LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023

Tema
Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian
Berbasis Kawasan

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 68/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 83/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh PD dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat serta ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.
(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN
    b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023; dan
c. dasar kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta layanan publik, baik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun alternatif sumber pendanaan lainnya.

Pasal 5

Dalam upaya memastikan keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan DPRD; dan
b. PD wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran PD dengan DPRD.

Pasal 7

(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Dalam hal RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 61/E

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenanNya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2022 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubagan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rancangan RPJMD dan memperhatikan keselarasan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional, yang didalamnya memuat tentang kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, berisi pula tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2023, program/kegiatan Perangkat Daerah, dan rencana kerja dalam kerangka regulasi serta kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif di Tahun 2023.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini kami berharap apa yang menjadi agenda prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2023 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kami berharap melalui dokumen ini nantinya semua Perangkat Daerah dapat bekerja sesuai dengan perencanaan yang ada berdasarkan urusan

berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada pada setiap Perangkat Daerah. Melalui dokumen ini juga kami berharap masing-masing Perangkat Daerah untuk dapat saling bersinergi melalui pelaksanaan program demi tercapainya apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah.

Terselesaikannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang berperan aktif dalam proses penyusunan RKPD ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, swasta dan masyarakat atas sumbangsihnya, dengan harapan di masa datang partisipasinya dapat lebih ditingkatkan untuk melangkah bersama memastikan roda pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan pada rel yang dicita-citakan. MAJU BERSAMA SEJAHTERA BERSAMA.

Akhirnya kami harapkan agar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang terkait, serta tercapainya target pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT. Aamiin.

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4	Maksud dan Tujuan	I-14
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-15
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II-1**
2.1	Kondisi Umum Daerah	II-1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
	2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-34
	2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-169
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-180
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-185
	2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-185
	2.3.2 Aspek Pelayanan Umum	II-186
	2.3.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-202
2.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-204
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi	III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021 III-5
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 III-25
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-32
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-34
3.2.1. Analisis Kinerja Kuangan Periode Tahun 2019-2021 III-37
3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-47

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1. Telaahan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 IV-1
4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 IV-6
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023 IV-9
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023 IV-18
4.2.1. Telaahan Prioritas Nasional Tahun 2023 IV-18
4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 IV-23
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan IV-27
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023 IV-41
4.2.5. Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 IV-45

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecamatan dan Luas Area	II-3
Tabel 2.2	Rata-rata Suhu, Kecepatan Angin, Jumlah Curah Hujan dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Blitar Tahun 2021	II-6
Tabel 2.3	Wilayah Kabupaten Blitar Menurut Jenis Penggunaan dan Persentase Luas Lahan Tahun 2020	II-7
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-13
Tabel 2.5	Persebaran Penduduk pe Kecamatan	II-14
Tabel 2.6	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)	II-16
Tabel 2.7	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)	II-17
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-20
Tabel 2.9	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.10	Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.11	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-27
Tabel 2.12	Status IDM Kecamatan di Kabupaten Blitar Tahun 2021	II-32
Tabel 2.13	Data Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-36
Tabel 2.14	Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.15	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-39
Tabel 2.16	Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2021	II-40
Tabel 2.17	Indikator Terkait Kesehatan Bayi dan Balita Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-41
Tabel 2.18	Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-41

Tabel 2.19	Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-53
Tabel 2.20	Kinerja Kabupaten Blitar pada Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2016 - 2021	II-60
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-71
Tabel 2.22	Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-75
Tabel 2.23	Kinerja Pemerintah Daerah pada Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021	II-76
Tabel 2.24	Kinerja Pemerintah Daerah dalam Aspek Pangan	II-82
Tabel 2.25	Kinerja Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan	II-85
Tabel 2.26	Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016-2021	II-87
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021	II-94
Tabel 2.28	Kinerja Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-102
Tabel 2.29	Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perhubungan tahun 2016-2021	II-111
Tabel 2.30	Capaian Indikator Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-113
Tabel 2.31	Kinerja Pemerintah daerah Dalam Aspek Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-121
Tabel 2.32	Kinerja Pemerintah Daerah pada Aspek Penanaman Modal Kabupaten Blitar tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.33	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II-128
Tabel 2.34	Kinerja Pemerintah daerah Pada Aspek Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar 2016-2020	II-130
Tabel 2.35	Capaian Indikator Irisan Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.37	Kinerja Pemerintah Daerah pada Aspek Perpustakaan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-140

Tabel 2.38	Kinerja Pemerintah Daerah Pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2020	II-150
Tabel 2.39	Capaian Kinerja pada Urusan Pariwisata tahun 2017-2021	II-153
Tabel 2.40	Kinerja Pemerintah daerah pada Urusan Perindustrian tahun 2017-2021	II-156
Tabel 2.41	Pendapatan Listrik Negara Kabupaten Blitar 2016-2020	II-161
Tabel 2.42	Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan (KUBIK) tahun 2016-2021	II-161
Tabel 2.43	Indikator Capaian Urusan Perencanaan Kabupaten Blitar 2017-2021	II-163
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Blitar 2016-2020	II-163
Tabel 2.45	Realisasi Indikator SDG's Urusan Keuangan tahun 2015-2019	II-164
Tabel 2.46	Capaian Skor SAKIP Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-165
Tabel 2.47	Capaian Urusan Pengawasan Kabupaten Blitar terkait Tindak Lajut Hasil Rekomendasi BPK tahun 2019-2021	II-166
Tabel 2.48	Capaian Urusan Pengawasan Kabupaten Blitar terkait Tindak Lajut Hasil Rekomendasi APIP tahun 2019-2021	II-166
Tabel 2.49	Capaian Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-167
Tabel 2.50	Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan kelas Jalan, 2016-2021 (KM)	II-173
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2017-2021	II-180
Tabel 2.52	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan tahun 2021	II-202
Tabel 2.53	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan tahun 2021	II-207
Tabel 2.54	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum tahun 2021	II-219
Tabel 2.55	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat tahun 2021	II-223
Tabel 2.56	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021	II-225

Tabel 2.57 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial tahun 2021 II-229

Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023 III-2

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%) III-8

Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%) III-10

Tabel 3.4 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%) III-12

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Blitar Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%) III-13

Tabel 3.6 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 III-18

Tabel 3.7 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 III-22

Tabel 3.8 Indikator Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 III-24

Tabel 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 III-40

Tabel 3.10 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 III-41

Tabel 3.11 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 III-42

Tabel 3.12 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 III-43

Tabel 3.13 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 III-44

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024 III-55

Tabel 3.15 Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024 III-64

Tabel 3.16 Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024 III-69

Tabel 3.17	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024	III-70
Tabel 3.18	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024	III-72
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-5
Tabel 4.2	Realisasi dan Targat Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur	IV-8
Tabel 4.3	Pemetaan Visi-Misi RPJMN Periode 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026	IV-11
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023	IV-16
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026	IV-33
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023	IV-44
Tabel 4.7	Peta Proses Bisnis Misi, Sasaran, Strategi, Indikator Kinerja Sasaran, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023	IV-51
Tabel 5.1	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Program Berdasarakan Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Rancangan Program, Target Kinerja dan Pagu Program RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023	V-7
Tabel 5.3	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	V-41
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar Tahun 2023	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	I-4
Gambar 1.2	Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Blitar	II-2
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi	II-9
Gambar 2.3	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	II-11
Gambar 2.4	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-13
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar 2021	II-15
Gambar 2.6	Gini Ratio Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	II-19
Gambar 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021	II-21
Gambar 2.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar 2017-2021	II-24
Gambar 2.9	IPM Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	II-25
Gambar 2.10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar berbanding Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	II-26
Gambar 2.11	Status IDM di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021	II-31
Gambar 2.12	Perkembangan IPG Kabupaten Blitar	II-33
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-34
Gambar 2.14	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-35
Gambar 2.15	Persentase Sekolah Dengan Bangunan Baik Kabupaten Blitar	II-38

Gambar 2.16	Pergerakan Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) di Kabupaten Blitar	II-42
Gambar 2.17	Pergerakan Persentase Ketaatan Tata Ruang di Kabupaten Blitar	II-44
Gambar 2.18	Pergerakan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Blitar	II-45
Gambar 2.19	Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional di Kabupaten Blitar	II-46
Gambar 2.20	Pergerakan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air di Kabupaten Blitar	II-49
Gambar 2.21	Pergerakan Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Km) di Kabupaten Blitar	II-42
Gambar 2.22	Pergerakan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Blitar	II-50
Gambar 2.23	Pergerakan Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Blitar	II-51
Gambar 2.24	Pergerakan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Blitar	II-52
Gambar 2.25	Pergerakan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Blitar	II-54
Gambar 2.26	Pergerakan Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Blitar	II-55
Gambar 2.27	Pergerakan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Blitar	II-56
Gambar 2.28	Pergerakan Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Blitar	II-57
Gambar 2.29	Pergerakan Persentase Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar	II-58
Gambar 2.30	Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Blitar	II-59
Gambar 2.31	Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-61
Gambar 2.32	Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-62
Gambar 2.33	Pertumbuhan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-63

Gambar 2.34	Pertumbuhan Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-64
Gambar 2.35	Pertumbuhan Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (X/Hari) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-66
Gambar 2.36	Pertumbuhan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-67
Gambar 2.37	Pertumbuhan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-69
Gambar 2.38	Pertumbuhan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Panti) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-71
Gambar 2.39	Pertumbuhan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-73
Gambar 2.40	Pertumbuhan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-74
Gambar 2.41	Pertumbuhan Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-77
Gambar 2.42	Pertumbuhan Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-78
Gambar 2.43	Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-80
Gambar 2.44	Pertumbuhan Penyeleseian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	II-83
Gambar 2.45	Pertumbuhan Regulasi Ketahanan Pangan	II-83
Gambar 2.46	Pertumbuhan Ketersediaan Pangan Utama	II-84
Gambar 2.47	Pergerakan Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Blitar	II-85
Gambar 2.48	Pergerakan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Blitar	II-86
Gambar 2.49	Pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar	II-87
Gambar 2.50	Pergerakan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) di Kabupaten Blitar	II-88
Gambar 2.51	Pergerakan Jumlah Penanganan Sampah di Kabupaten Blitar	II-90

Gambar 2.52	Pergerakan Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Blita	II-90
Gambar 2.53	Pergerakan Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten Blitar	II-91
Gambar 2.54	Parameter Pencapaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-93
Gambar 2.55	Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-95
Gambar 2.56	Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok PKK	II-96
Gambar 2.57	Pertumbuhan Jumlah LSM	II-97
Gambar 2.58	Pertumbuhan LPM Berprestasi	II-98
Gambar 2.59	Pertumbuhan Posyandu Aktif	II-99
Gambar 2.60	Pertumbuhan Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	II-100
Gambar 2.61	Pertumbuhan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	II-101
Gambar 2.62	Jumlah Bumdes Kabupaten Blitar Tahun 2016-202	II-102
Gambar 2.63	Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-103
Gambar 2.64	Pertumbuhan Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-104
Gambar 2.65	Pertumbuhan Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-105
Gambar 2.66	Pertumbuhan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-106
Gambar 2.67	Capaian Indikator TFR (Total Faterity Rate) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-107
Gambar 2.68	Capaian Indikator mCPR (Modern Contraceptive Prevelence Rate) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-109
Gambar 2.69	Capaian Indikator Unmet Need KB Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-110
Gambar 2.70	Pergerakan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-112

Gambar 2.71	Pergerakan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 20116-2021	II-114
Gambar 2.72	Pergerakan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-115
Gambar 2.73	Pergerakan Persentae Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-116
Gambar 2.74	Pergerakan Lama Pengujian KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-117
Gambar 2.75	Pergerakan Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-118
Gambar 2.76	Parameter Indikator Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-120
Gambar 2.77	Pertumbuhan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-122
Gambar 2.78	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-123
Gambar 2.79	Pertumbuhan Jumlah UM Non BPR/LKM UM Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-124
Gambar 2.80	Capaian Indikator Jumlah Koperasi Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-125
Gambar 2.81	Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-126
Gambar 2.82	Pertumbuhan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-127
Gambar 2.83	Pertumbuhan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-128
Gambar 2.84	Pertumbuhan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-129
Gambar 2.85	Pertumbuhan Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-131
Gambar 2.86	Pertumbuhan Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-132

Gambar 2.87	Pertumbuhan Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-132
Gambar 2.88	Pertumbuhan Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-133
Gambar 2.89	Pertumbuhan Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-134
Gambar 2.90	Pertumbuhan Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-136
Gambar 2.91	Pertumbuhan Jumlah Gedung Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-137
Gambar 2.92	Pertumbuhan Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-138
Gambar 2.93	Pertumbuhan Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-139
Gambar 2.94	Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Blitar 2016-2020	II-141
Gambar 2.95	Pertumbuhan Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-142
Gambar 2.96	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Perternakan dan Perkebunan di Kabupaten Blitar 2016-2021	II-144
Gambar 2.97	Pergerakan Produktivitas Tanaman Pangan (kuintal per Hektar)	II-145
Gambar 2.98	Pergerakan Komposit Pembentuk Produktivitas Tanaman Pangan (kuintal/hektar) di Kabupaten Blitar	II-145
Gambar 2.99	Pergerakan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Blitar	II-146
Gambar 2.100	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Blitar	II-147
Gambar 2.101	Pergerakan Peningkatan Produktivitas Perkebunan (dari potensi produksi di lapangan) dan Peningkatan jumlah SDM Perkebunan Berkualitas di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020	II-149
Gambar 2.102	Pergerakan Produksi Perikanan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-150

Gambar 2.103	Pergerakan Cakupan Bina dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020	II-151
Gambar 2.104	Pergerakan Kerusakan Kawasan hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020	II-152
Gambar 2.105	Jumlah Pajak Daerah dari sektor Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Blitar 2016-2020	II-154
Gambar 2.106	Pergerakan Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021	II-155
Gambar 2.107	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	II-156
Gambar 2.108	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah)	II-157
Gambar 2.109	Perkembangan Ekspor Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-159
Gambar 2.110	Pergerakan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-169
Gambar 2.111	Pergerakan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-170
Gambar 2.112	Pergerakan Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-171
Gambar 2.113	Angka Kriminalitas Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-174
Gambar 2.114	Pertumbuhan Jumlah Demo Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-175
Gambar 2.115	Pertumbuhan Lama Proses Perijinan Usaha/SIUP TDP (hari) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-176

Gambar 2.116	Pertumbuhan Jumlah Perda/Perbup yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	II-177
Gambar 2.117	Rasio Ketergantungan (%) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	II-178
Gambar 2.118	Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2021	II-213
Gambar 2.119	Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-214
Gambar 2.120	Capaian SPM ODGJB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-214
Gambar 2.121	Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-216
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (Rp Triliun)	III-6
Gambar 3.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	III-7
Gambar 3.3	Perkembangan Struktur Perekonomian Kabupaten Blitar Menurut Karakteristik Produksi Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)	III-11
Gambar 3.4	Perkembangan ICOR Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	III-15
Gambar 3.5	Perkembangan Tingkat Inflasi Year to Year Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)	III-16
Gambar 3.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	III-17
Gambar 3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	III-19
Gambar 3.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur dan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	III-20
Gambar 3.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021	III-21

Gambar 3.10	Urutan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021 (%)	III-23
Gambar 3.11	Perkembangan Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Global dan Indonesia (Per 6 Desember 2021)	III-26
Gambar 3.12	Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Perkembangan Nilai Tukar ytd Bulanan Negara G-20 dan ASEAN	III-28
Gambar 3.13	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 (%)	III-29
Gambar 4.1	Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	IV-23
Gambar 4.2	Pemetaan Strategi Pembangunan 2021-2026	IV-38
Gambar 4.3	Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026	IV-40
Gambar 4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP, Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Tahun 2023	IV-45
Gambar 4.5	Peta Proses Utama Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023	IV-46
Gambar 4.6	Peta Proses Utama dan Proses Pendukung Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023	IV-47
Gambar 4.7	Pemetaan Sasaran dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-202	IV-48
Gambar 4.8	Keselarasan Proses Utama I dan Prioritas Pembangunan RKPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2023	IV-49
Gambar 4.9	Keselarasan Proses Utama II dan Prioritas Pembangunan RKPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2023	IV-50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan posisi perencanaan pembangunan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia, serta dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang ada. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan dapat dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dikelola secara efektif dan efisien, sehingga akan bermuara pada hasil pembangunan yang optimal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan yang disusun secara sistematis merupakan salah satu unsur dalam proses perencanaan dimana produk perencanaan dihasilkan melalui tahapan-tahapan. Sedangkan perencanaan yang disusun secara terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian perencanaan pembangunan secara antarwaktu maupun antartingkatan pemerintahan.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mengacu pada kedua amanat undang-undang di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap keempat atau periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 yang juga diharmonisasikan dengan visi-misi kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Blitar.

Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif diharapkan dapat turut mendukung kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan disusun agar saling terintegrasi dan saling mendukung untuk pencapaian pembangunan satu dengan yang lain. Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Persiapan Penyusunan RKPD

   Persiapan penyusunan RKPD Tahun 2023 dimulai pada Desember Tahun 2021 dengan beberapa aktivitas yaitu pembentukan tim penyusun RKPD; orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilaksanakan pada Desember Tahun 2021, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Selain itu, Rancangan Awal RKPD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik.

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan masukan seluruh Rancangan Renja PD yang telah diverifikasi dan dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan RKPD.

d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD yang telah dibahas dalam Musrenbang kabupaten berdasarkan berita acara Musrenbang. Sebelum Rancangan Akhir diserahkan ke gubernur untuk difasilitasi, maka APIP melakukan reviu untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir RKPD telah disusun sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan RPJMD, dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

f. Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli Tahun 2022.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD

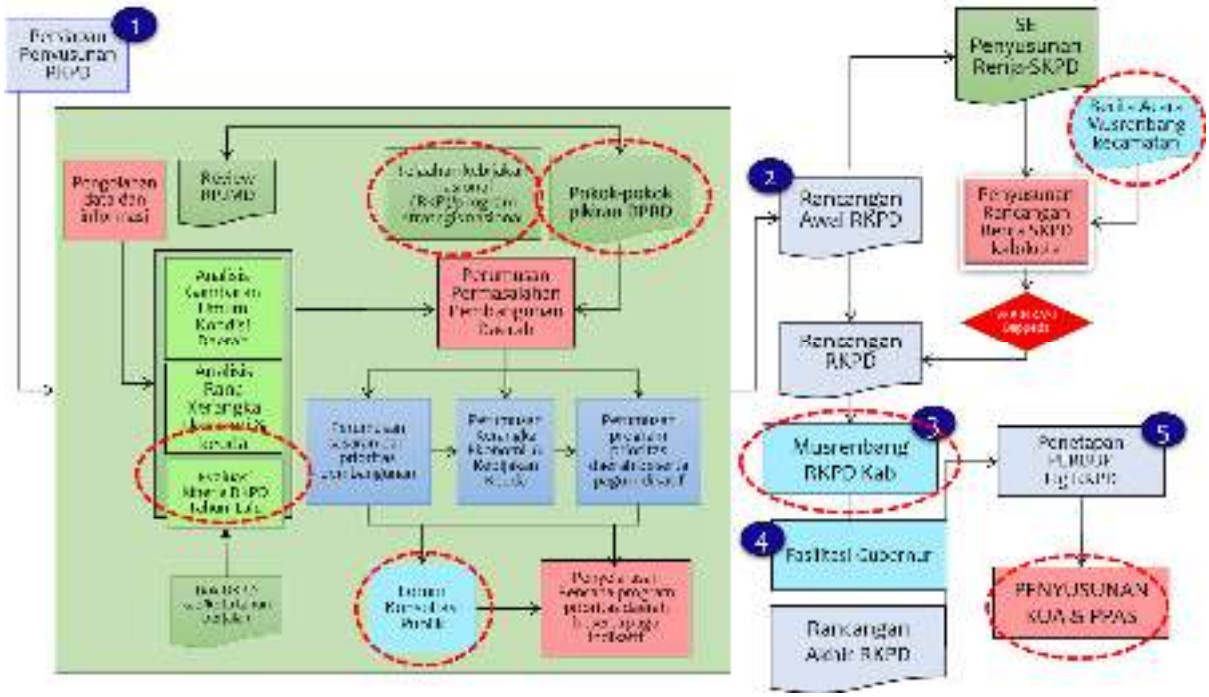

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021–2026 dalam mencapai target pembangunan 2023 guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, program strategis nasional, serta hasil evaluasi kinerja RKPD dan RPJMD Kabupaten Blitar tahun sebelumnya. RKPD Tahun 2023 disusun juga dengan memperhatikan saran, masukan, dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar sebagai hasil reses penjaringan aspirasi masyarakat.

Dokumen RKPD menyajikan gambaran kondisi daerah, hasil evaluasi kinerja RKPD dan RPJMD tahun sebelumnya, permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan di tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta tujuan dan sasaran

pembangunan tahun 2023, maka ditetapkan Tema pembangunan Kabupaten Blitar adalah "Pembangunan SDM Dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan" dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2023. Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 menjadi salah satu acuan utama untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu 1) pendekatan teknokratik, 2) pendekatan partisipatif, dan 3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, dengan mempedomani RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan faktor internal dan eksternal lainnya. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD, hal ini antara lain melalui konsultasi publik dan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan melibatkan semua *stakeholders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar juga berorientasi substantif Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan Tematik-Holistik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, koordinasi dari Perangkat Daerah terkait sangat penting untuk dilakukan untuk mensinkronisasikan

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Kemudian, pendekatan Integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan Spasial, mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang akurat, sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2023 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik –Bangkalan– Mojokerto – Surabaya–Sidoarjo–Lamongan-Kawasan Bromo – Tengger– Semeru - Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Nomor Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur; (2) RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur; serta (3) RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

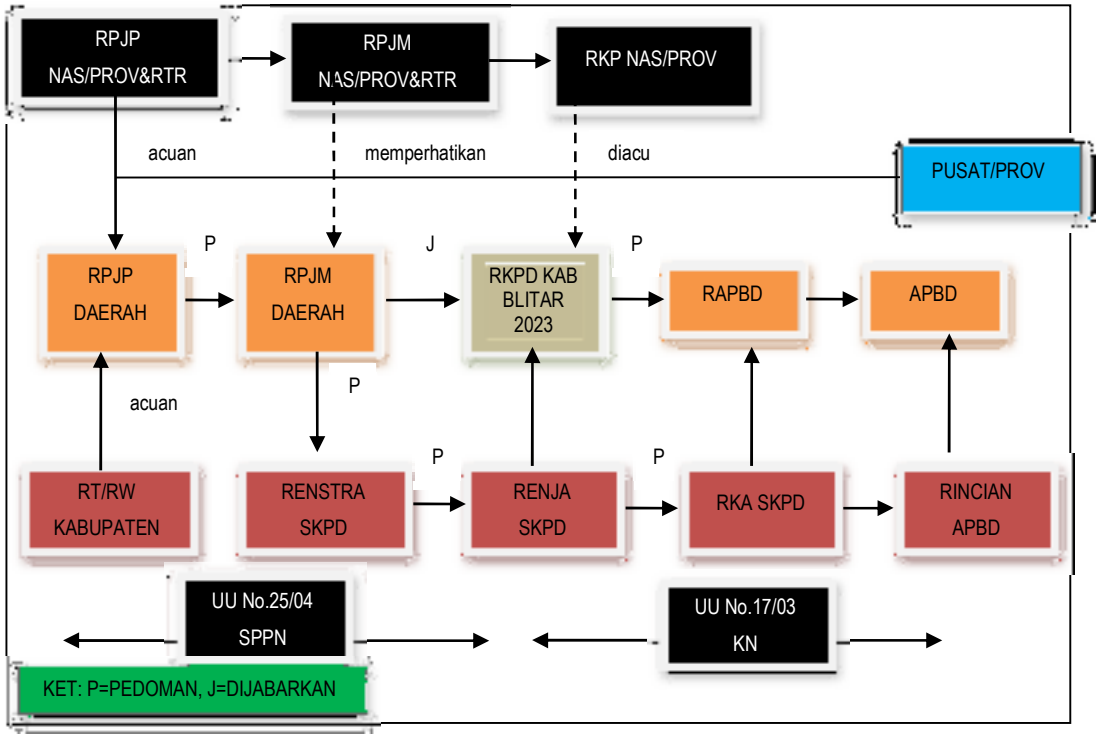

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Penyusunan RKPD bersamaan dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan KUA-PPAS, dan menjadi dasar penyusunan APBD. Berbagai kebijakan dan dokumen lain yang terkait juga menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Dokumen dan/atau kebijakan dimaksud antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar dan kebijakan pemerintah pusat lainnya yang diterbitkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar dan berbagai pihak lain termasuk masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar guna mewujudkan target RPJMD tahun 2023.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 meliputi:

a. Mengidentifikasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya sebagai masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2023.
b. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan tahun 2023.
c. Menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2023.
d. Mendukung prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
e. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan, sekaligus untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Blitar.
f. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.
g. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Blitar, dasar hukum penyusunan, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada Bab II juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 dan realisasi dari RPJMD, serta permasalahan pembangunan. Pada bab ini dimuat juga penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun lalu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan dan tahun rencana, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan beserta target tahun 2023, dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah mempedomani RPJMD untuk pembangunan tahun 2023, dan memperhatikan prioritas nasional, prioritas provinsi, dan isu

strategis pembangunan Kabupaten Blitar. Selain itu dimuat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target sasaran pembangunan.

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun lalu, rencana tahun 2023 pada RPJMD dan Renstra PD, serta arahan pembangunan daerah sesuai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023.

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan target 2023.

BAB VII: PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan RKPD Tahun 2023 ini pada hakekatnya didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, dinamika kondisi eksisting, dan disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026. Evaluasi tersebut merupakan hasil telaah atas pelaksanaan kinerja dari program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, yang secara berjenjang mendukung pencapaian target kinerja sasaran dan kegiatan. Sebelum membahas evaluasi pelaksanaan RKPD taehun sebelumnya dan pencapaian RPJMD, di bawah ini disampaikan terlebih dahulu kondisi umum daerah yang akan memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi geografis, demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Selanjutnya, akan dirumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir.

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Pada bagian ini menyajikan data dan informasi yang menggambarkan kondisi daerah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis.

2.1.1.1. Aspek Geografis

Aspek geografis Kabupaten Blitar terletak pada $111^0\ 40^1$ - $112^0\ 10^1$ Bujur Timur dan 7^058^1 - $8^09^151^{11}$Lintang Selatan. Luas Kabupaten Blitar 1,588,79 km^2 atau 158,88 Ha. Luas kabupaten Blitar sekitar 1.588,79 km^2 yang meliputi wilayah Blitar Selatan dan Blitar bagian utara yang dipisahkan oleh sungai Brantas. Secara administratif Kabupaten Blitar berbatasan dengan beberapa wililayah antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;
- Bagian Tengah wilayah Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kota Blitar.

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Blitar

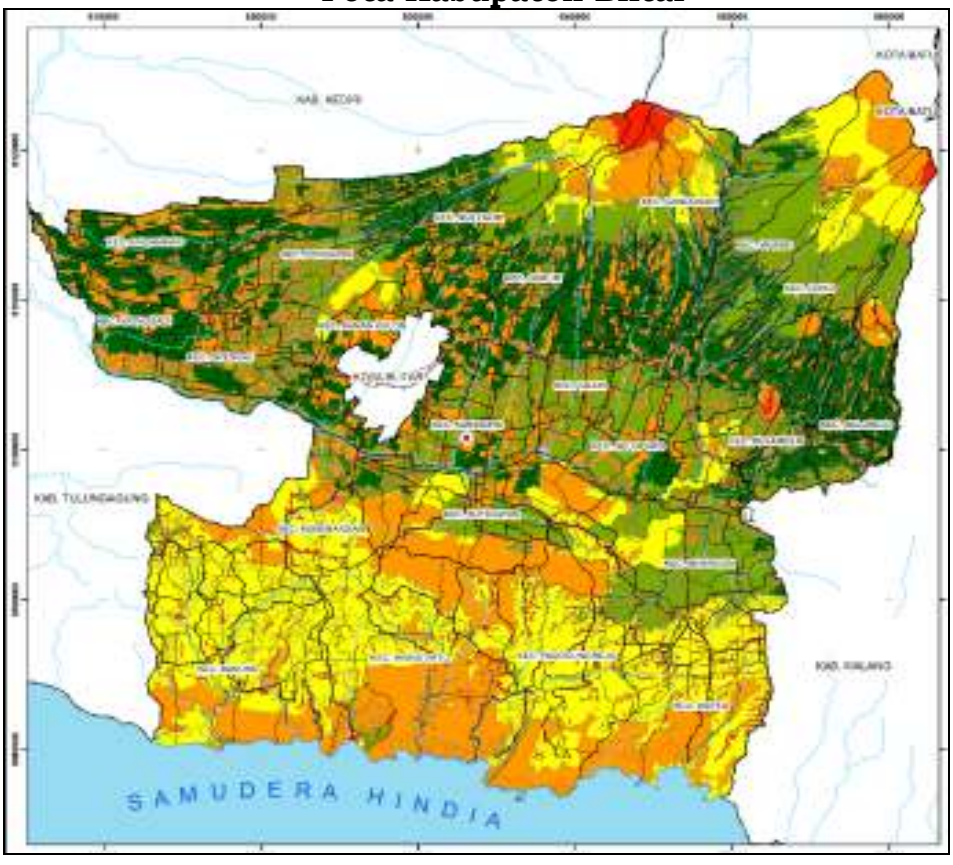

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020

Topografi wilayah Kabupaten Blitar memiliki ketinggian rata-rata +100 meter di atas permukaan laut dengan klasifikasi wilayah menurut

ketinggian sebagai berikut: 36,4% kecamatan berada pada ketinggian antara 100 - <200 meter di atas permukaan air laut, 36,4% wilayah kecamatan di antara ketinggian antara 200 - <300 meter di atas permukaan air laut, 27,2% wilayah kecamatan berada pada ketinggian > 300 meter di atas permukaan air laut.

Terdapat enam kecamatan yang wilayahnya berada di ketinggian > 300 meter di atas permukaan laut, yaitu antara lain Kecamatan Wates, Wonotirto, Doko, Gandusari, Nglegok dan Panggungrejo. Secara administrasi Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 kelurahan. Berikut nama-nama Kecamatan di Kabupaten Blitar beserta luasan wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1
Kecamatan dan Luas Area

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area
1	Bakung	Bakung	111,24
2	Wonotirto	Wonotirto	164,54
3	Panggungrejo	Panggungrejo	119,04
4	Wates	Wates	68,76
5	Binangun	Binangun	76,79
6	Sutojayan	Sutojayan	44,20
7	Kademangan	Kademangan	105,28
8	Kanigoro	Kanigoro	55,55
9	Talun	Talun	49,78
10	Selopuro	Selopuro	39,29
11	Kesamben	Kesamben	56,96
12	Selorejo	Selorejo	52,23
13	Doko	Doko	70,95
14	Wlingi	Wlingi	66,36
15	Gandusari	Gandusari	88,23
16	Garum	Garum	54,56
17	Nglegok	Nglegok	92,56
18	Sanankulon	Sanankulon	33,33
19	Ponggok	Ponggok	103,83
20	Srengat	Srengat	53,98
21	Wonodadi	Wonodadi	40,35
22	Udanawu	Udanawu	40,98
Luasan Keseluruhan Kecamatan, Kab Blitar			**1,588,79**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020.

22 Kecamatan di Kabupaten Blitar tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan adanya Sungai Brantas yang mengalir di Kabupaten Blitar.

Kedua bagian tersebut terbagi menjadi Kabupaten Blitar Bagian Selatan meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutotojayan, dan Kademangan. Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Blitar Selatan tersebut berada di daerah pesisir dan penggunungan berbatu, dengan luasan +689,49 Km^2 dengan ketinggian antara 105-349 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk wilayah bagian Blitar Utara meliputi Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian Utara Kabupaten Blitar ini memiliki luas +898,94 Km^2 dengan ketinggian 150-420 meter dari permukaan air laut. Pada bagian Utara ini perpaduan antaran dataran tinggi dan rendah serta memiliki struktur tanah yang subur dan dialiri aliran sungai yang keberadaannya di sekitar Gunung Kelud.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar Utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian Selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi Kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi

Kecamatan Wonodadi, sebagaian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

Struktur geologi Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah Selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian Utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara wilayah Utara dengan Selatan. Wilayah Utara Sungai Brantas membentuk pola aliran (*drainase system*) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah Selatan, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5

liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

Secara klimatologis, iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan November – April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Dengan suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ° C dan 28,3 ℃. Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Berikut ini disajikan rata-rata suhu, kecepatan angin, jumlah curah hujan, dan kelembaban di Kabupaten Blitar di sepanjang Tahun 2021 menurut pengamatan Stasiun Geofisika Malang.

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu, Kecepatan Angin, Jumlah Curah Hujan dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Blitar Tahun 2021

Bulan	Suhu (°C)	Kecepatan Angin (m/det)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Kelembaban (%)
Januari	26.8	1.9	379.3	82.5
Februari	27.4	2.6	206.6	78.8
Maret	27.6	2.2	301	78
April	28.1	2.4	151.5	73
Mei	28.4	2.3	51	72.7
Juni	27.9	2.0	199.5	74.9
Juli	26.9	2.8	37.3	70.8
Agustus	27	3.8	9.3	72.3
September	27.4	3.8	133.6	72.2
Oktober	27.8	3.1	42.7	72.8
November	26.9	1.7	590	82.6
Desember	27.8	2.1	241.3	79.4

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Dilihat dari penggunan lahan luas wilayah Kabupaten Blitar sekitar 1,588,79 Km^2 terbagi dalam beberapa kegunaan lahannya antara lain:

Tabel 2.3
Wilayah Kabupaten Blitar Menurut Jenis Penggunaan dan Persentase Luas Lahan Tahun 2021

Penggunaan Lahan	%
Sawah	20.13
Tegal/kebun	30.01
Ladang/Huma	0.02
Perkebunan	8.26
Hutan rakyat	3.44
Padang penggembalaan/padang rumput	0.01
Hutan negara	5.32
Sementara tidak diusahakan *)	0.08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dan lain-lain)	6.21
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26.51

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar, 2021

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi geografis Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Komoditas Hasil Peternakan terdiri dari telur, daging dan susu. Ketiga komoditas ini sangat menonjol dari sisi produktifitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Blitar.

Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi komoditas perkebunan yaitu: rambutan, nanas, teh, cengkeh, kopi. Komoditas pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan meliputi: padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, gula merah yang dikemas dengan berbagai bentuk olahan, dan sebagainya. Komoditas perikanan yang terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan koi, ikan air tawar dengan produk utama antara lain gurami, nila, lele, mujair dan ikan laut tangkapan. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, di wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang golongan C seperti, feldspar, kaolin, zeolit, pasir besi dan batu kapur.

Dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio-kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar, seperti di wilayah barat kebudayaan masyarakatnya condong ke Mataraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan di bagian timur cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik dan luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar di sepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata.

Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir disetiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih-lebih jika dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Topografis Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai. Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam yang cukup beragam, antara lain:

1) Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung.
2) Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat.
3) Daerah rawan banjir meliputi wilayah di sepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
4) Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu.

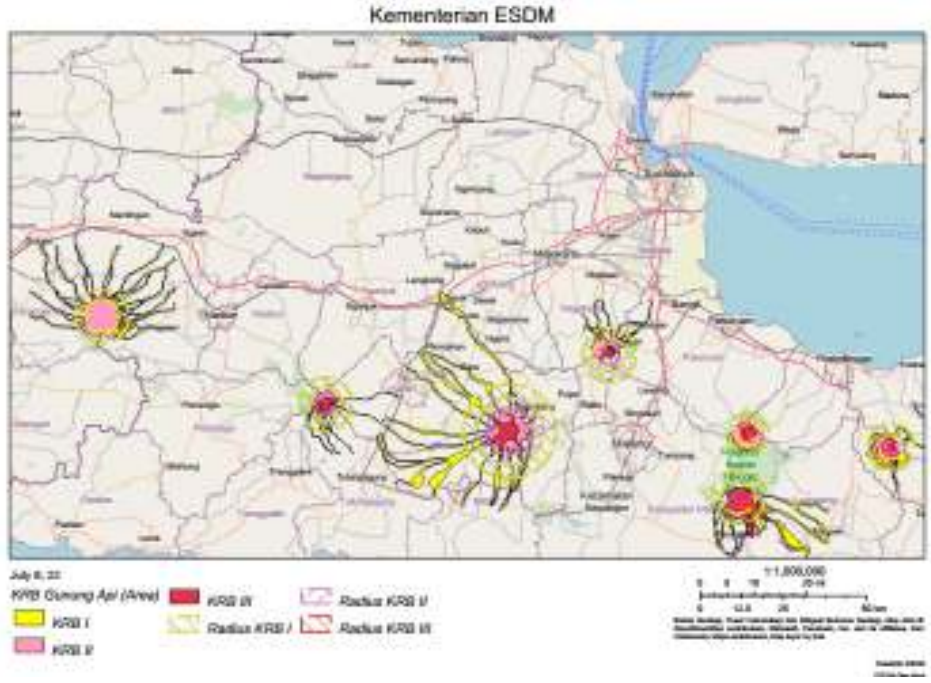

Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api

Sumber: Kementerian ESDM RI, 2022

Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi tersebut, kawasan rawan bencana Gunung Berapi Gunung Kelud adalah:

a) mencakup wilayah Blitar Utara khususnya wilayah yang berada di sekitar Gunung Kelud dan di sekitar jaringan aliran lahar (di Desa Pasirharjo dan sekitar Desa Soso) serta di sekitar jaringan aliran lahar yaitu sekitar Sungai Lekso, Sungai Putih, Sungai Lahar, Sungai Darapdurgo, Sungai Kuning, Sungai Putih, Sungai Semut (Kali Badak, Kali Termas I dan Kali Termas II) dengan jalur evakuasi Kecamatan Gandusari - Kecamatan Wlingi - Kecamatan Talun - Kecamatan Ponggok - Kecamatan Udanawu;
b) Dam-dam penahan lahar Gunung Kelud lokasinya meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Udanawu;
c) Daerah rawan letusan dalam Ring 1 (satu) meliputi: Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kanigoro; dan
d) Daerah rawan letusan dalam Ring 2 (dua) meliputi Kecamatan Garum dan Kecamatan Gandusari

Sedangkan potensi ancaman gempa bumi di Kabupaten Blitar sesuai data Kementerian ESDM disajikan dalam gambar berikut:

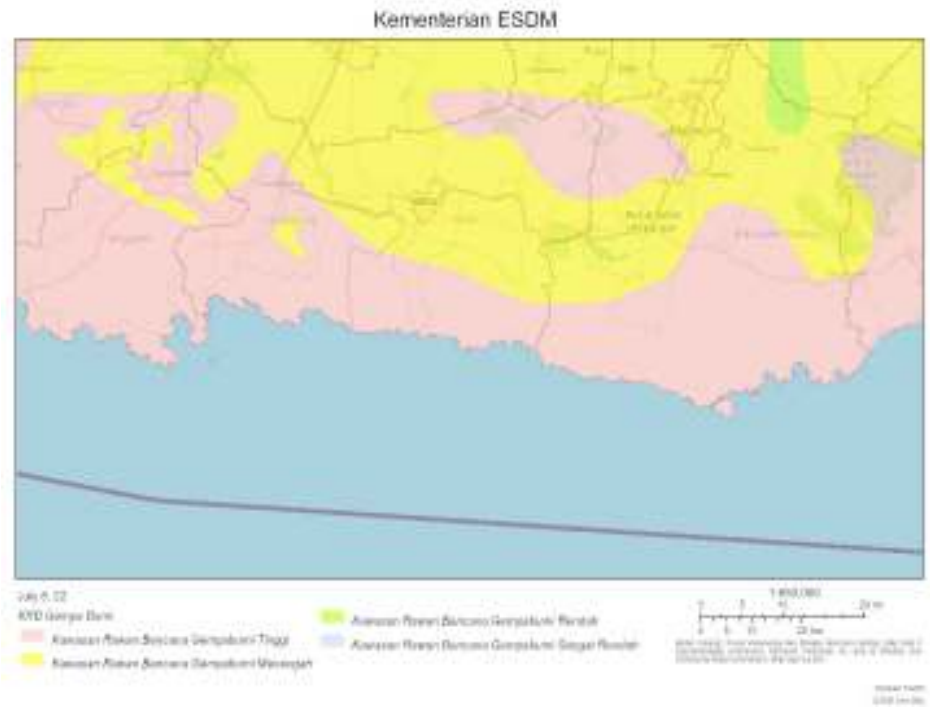

Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Sumber: Kementerian ESDM RI, 2022

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa wilayah Blitar Selatan merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi level Tinggi, sedangkan sisi Utara masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi level Menengah. Adapun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar, kawasan rawan bencana tsunami terdapat di kawasan pantai selatan antara lain pantai Pasur Kecamatan Bakung, pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, pantai Serang Kecamatan Panggungrejo, dan pantai Jolosutro Kecamatan Wates.

2.1.1.4. Demografi

Secara umum, aspek demografis Kabupaten Blitar yang akan disajikan pada bagian ini meliputi pertumbuhan penduduk dan persebarannya, serta struktur dan karakteristik penduduknya. Data BPS Kabupaten Bitar mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.231.013 jiwa bertambah 66.364 jiwa dari tahun 2020 yang sebanyak 1.164.649 jiwa. Ini menunjukkan terjadi

pertumbuhan penduduk sebesar 0,79% pada tahun 2021, yakni lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain itu, data BPS pada tahun 2021 menunjukkan sex ratio sebesar 101,3%, yang artinya pada 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Sex Ratio*
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.149.710	1.153.803	1.157.500	1.160.677	1.164.649	1.231.013
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,66	0,35	0,32	0,27	0,30	0,79
Sex Ratio (%)	100.38	100,38	100,4	100,4	100.37	101,3

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022 (Hasil Proyeksi Penduduk)

Pada grafik di bawah dapat diketahui selama kurun waktu tahun 2016-2020 populasi penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan dengan populasi penduduk perempuan.

Gambar 2.2.
Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

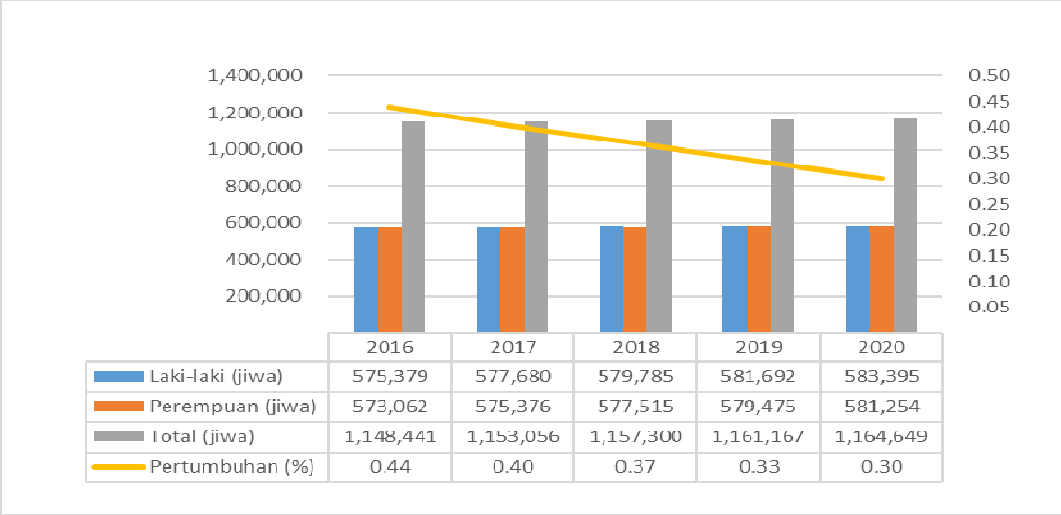

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2020

Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 583.295 jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 581.692 jiwa. Jadi sekitar 1.602 jiwa penambahan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk perempuan juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 walaupun jumlahnya masih dibawah jumlah penduduk laki-

laki. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 berjumlah 579.475 jiwa, pada tahun 2020 berjumlah 581.254 jiwa. Jadi peningkatan penduduk perempuan sekitar 1.770 jiwa. Meskipun demikian, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Blitar relatif seimbang.

Adapun persebaran penduduk per kecamatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Sex Ratio*
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah	Tingkat Kepadatan Penduduk
BAKUNG	13,707	13,628	27,335	111.24	245.73
WONOTIRTO	19,334	18,586	37,920	164.54	230.46
PANGGUNGREJO	21,640	20,657	42,297	119.04	355.32
WATES	15,103	15,048	30,151	68.76	438.50
BINANGUN	23,113	22,749	45,862	76.79	597.24
SUTOJAYAN	25,498	25,578	51,076	44.2	1,155.57
KADEMANGAN	35,091	34,621	69,712	105.28	662.16
KANIGORO	41,075	40,694	81,769	55.55	1,471.99
TALUN	32,813	32,606	65,419	49.78	1,314.16
SELOPURO	22,120	21,780	43,900	39.29	1,117.33
KESAMBEN	26,471	26,562	53,033	56.96	931.06
SELOREJO	19,307	19,310	38,617	52.23	739.36
DOKO	20,532	20,169	40,701	70.95	573.66
WLINGI	27,118	26,601	53,719	66.36	809.51
GANDUSARI	37,046	36,194	73,240	88.23	830.10
GARUM	34,424	33,889	68,313	54.56	1,252.07
NGLEGOK	37,829	36,978	74,807	92.56	808.20
SANANKULON	29,041	28,487	57,528	33.33	1,726.01
PONGGOK	54,684	53,485	108,169	103.83	1,041.79
SRENGAT	33,813	33,902	67,715	53.98	1,254.45
WONODADI	24,899	24,198	49,097	40.35	1,216.78
UDANAWU	21,853	21,512	43,365	40.98	1,058.20
KABUPATEN BLITAR	**616,511**	**607,234**	**1,223,745**	**1,588.79**	**770.24**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (Hasil SP 2020)

Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Ponggok sedangkan

jumlah penduduk dengan populasi terkecil adalah Bakung. Adapun kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sanankulon dan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Wonotirto.

Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta menunjukkan tingkat perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Struktur penduduk Kabupaten Blitar tahun 2021 ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar 2021

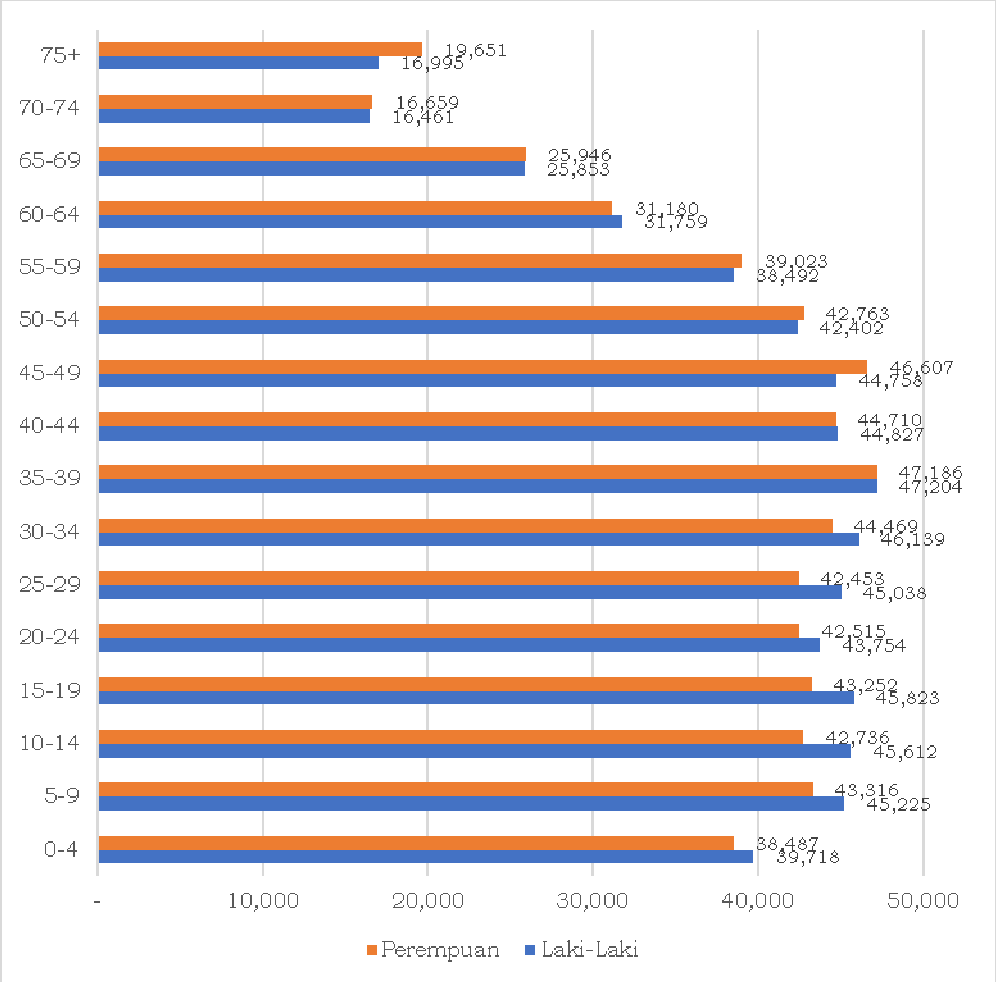

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa porsi penduduk produktif tahun 2021 masih cukup dominan dibandingkan dengan usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-64) sejumlah 854.354 jiwa dengan persentase sejumlah 69,40%. Sedangkan untuk jumlah penduduk di usia non produktif 0-14 tahun sejumlah 255.094 jiwa dengan persentase 20,72% maupun usia lebih dari 65 tahun dengan jumlah 121.565 jiwa dengan persentase 9,88%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB dibagi atas PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.6
Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (Dalam Juta)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.171,01	7.253,24	7.371,06	7.375,20	7.376,26
B	Pertambangan dan Penggalian	986,09	1.021,98	1.050,01	999,53	1.015,22
C	Industri Pengolahan	3.133,55	3.351,76	3.612,44	3.422,52	3.609,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,08	17,95	18,95	18,67	19,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,44	8,86	9,35	9,82	10,39
F	Konstruksi	2.154,86	2.317,65	2.474,40	2.350,62	2.370,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.268,49	4.574,06	4.861,81	4.509,51	4.772,54

Kategori	Uraian	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (Dalam Juta)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
H	Transportasi dan Pergudangan	295,61	320,06	346,16	326,07	359,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	223,88	244,89	262,85	251,98	264,01
J	Informasi dan Komunikasi	1.519,57	1.651,32	1.801,76	1.969,02	2.104,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	516,41	544,11	559,58	556,91	566,55
L	Real Estate	454,76	490,41	518,98	530,46	553,83
M,N	Jasa Perusahaan	81,66	87,89	93,54	86,34	89,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	774,81	806,97	837,64	833,27	835,12
P	Jasa Pendidikan	958,95	1.013,32	1.090,44	1.122,60	1.142,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194,72	209,59	224,86	241,60	255,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	347,59	372,17	396,26	341,34	357,47
PDRB		**23.107,48**	**24.286,24**	**25.530,11**	**24.945,46**	**25.700,02**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Jika dilihat dari data PDRB ADHK pada tabel di atas, pada tahun 2021 dapat diidentifikasi 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Blitar meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 7.376,26 Miliar. Terbesar kedua adalah sektor pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp. 4.772,54 miliar, sektor industri sebesar Rp. 3.609,16 miliar dan sektor konstruksi sebesar Rp. 2.370,41 miliar.

Tabel 2.7
Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (dalam miliar)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.854,58	11.334,83	11,764,94	11.916,90	12.116,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1.324,25	1.462,90	1.537,12	1.499,15	1.577,79
C	Industri Pengolahan	4.164,41	4.592,72	5.059,74	4.871,80	5.310,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,45	20,21	21,67	20,89	21,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,99	10,58	11,03	11,62	12,55
F	Konstruksi	2.999,71	3.253,75	3.387,27	3.227,15	3.294,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.573,15	6.208,69	6.772,51	6.349,84	6.954,47

Kategori	Uraian	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (dalam miliar)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
H	Transportasi dan Pergudangan	400,65	442,03	487,62	460,56	511,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299,14	330,29	360,67	352,33	381,74
J	Informasi dan Komunikasi	1.599,46	1.738,44	1.919,60	2.102,65	2.266,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	733,12	786,18	814,14	813,59	837,72
L	Real Estate	562,42	632,78	687,83	714,86	762,71
M,N	Jasa Perusahaan	106,25	119,07	129,80	122,98	127,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.011,56	1.117,49	1.236,77	1.281,37	1.282,51
P	Jasa Pendidikan	1.258,46	1.344,69	1.473,73	1.535,25	1.563,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238,47	257,09	281,09	304,40	323,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	420,31	465,65	501,60	438,63	474,13
PDRB		**31.574,36**	**34.117,38**	**36.447,14**	**36.023,96**	**37.819,73**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021 diidentifikasi 4 sektor terbesar PDRB ADHB yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 12.116,80 Miliar, sektor pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 6.954,47 Miliar, sektor industri sebesar Rp. 5.310,44 Miliar, dan sektor konstruksi sebesar Rp. 3.294,97 Miliar.

B. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati

satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

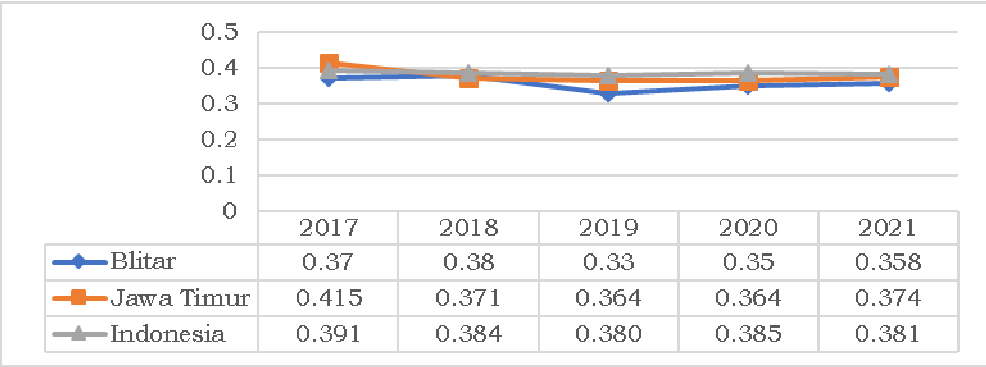

	2017	2018	2019	2020	2021
Blitar	0.37	0.38	0.33	0.35	0.358
Jawa Timur	0.415	0.371	0.364	0.364	0.374
Indonesia	0.391	0.384	0.380	0.385	0.381

Gambar 2.4.
Gini Ratio Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Blitar mencapai 0,37 dan mengalami kenaikan serta penurunan hingga menjadi 0,358 ditahun 2021. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka nilai indeks gini Kabupaten Blitar pada tahun 2021 berada dibawah nilai indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 0,374, Nasional sebesar 0,381, sedangkan Kabupaten Blitar hanya 0,358.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2019 naik dari 5,1 di tahun 2018 menjadi 5,12. Namun tahun 2020 karena adanya pandemik, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi -2,29. Selanjutnya, ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 mengalami

pertumbuhan sebesar 3,0. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 upaya pengendalian pandemi Covid-19 Kabupaten Blitar berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,10 persen diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,88 dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,83 persen.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	1,15	1,62	0,06	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	5,62	3,64	2,74	-4,81	1,57
C	Industri Pengolahan	6,50	6,96	7,78	-5,26	5,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,55	5,08	5,59	-1,51	2,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,07	4,94	5,57	5,01	5,83
F	Konstruksi	7,90	7,55	6,76	-5,00	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	7,16	6,29	-7,25	5,83
H	Transportasi dan Pergudangan	8,01	8,27	8,16	-5,80	10,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,60	9,39	7,33	-4,13	4,77
J	Informasi dan Komunikasi	8,54	8,67	9,11	9,28	6,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	5,36	2,84	-0,48	1,73
L	Real Estate	4,57	7,84	5,82	2,21	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	5,29	7,62	6,43	-7,70	3,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,21	4,15	3,80	-0,52	0,22
P	Jasa Pendidikan	4,08	5,67	7,61	2,95	1,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	7,64	7,28	7,44	5,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,20	7,07	6,47	-13,86	4,73
PDRB ADHK		**5,07**	**5,10**	**5,12**	**-2,29**	**3,02**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun yang sama, maka pertumbuhan ekomoni Kabupaten Blitar masih berada dibawahnya. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 3,57, Nasional 3,69, sedangkan Kabupaten Blitar hanya 3,02. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

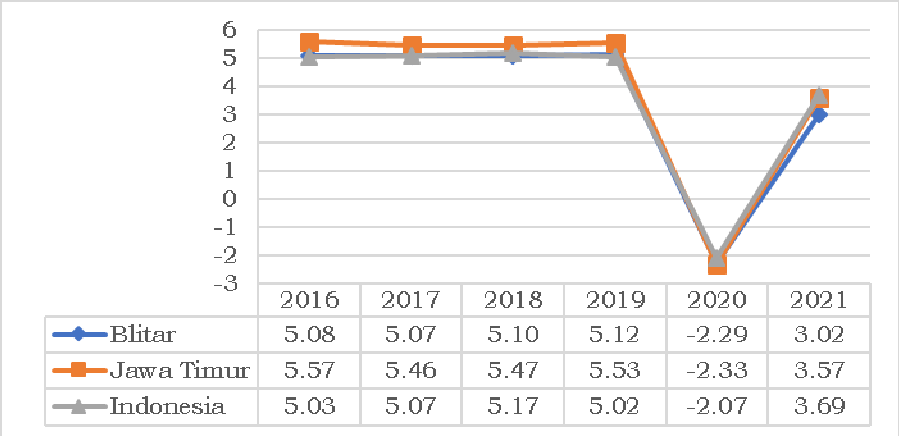

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Blitar	5.08	5.07	5.10	5.12	-2.29	3.02
Jawa Timur	5.57	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.57
Indonesia	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69

Gambar 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur

D. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 32,04 persen, selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 18,39 persen disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,04 persen, berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,99 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,13 persen.

Di antara kelima lapangan usaha yang dominan tersebut, selama tahun 2021 hanya Kategori Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Informasi dan Komunikasi saja yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estat, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya justru meningkat meskipun peranannya masing-masing kurang dari 5 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,38	33,22	32,28	33,08	32,04
B	Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,29	4,22	4,16	4,17
C	Industri Pengolahan	13,19	13,46	13,88	13,52	14,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,50	9,54	9,29	8,96	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,65	18,20	18,58	17,63	18,39
H	Transportasi dan Pergudangan	1,27	1,30	1,34	1,28	1,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,97	0,99	0,98	1,01
J	Informasi dan Komunikasi	5,07	5,10	5,27	5,84	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,30	2,23	2,26	2,22
L	Real Estate	1,78	1,85	1,89	1,98	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	3,28	3,39	3,56	3,39
P	Jasa Pendidikan	3,99	3,94	4,04	4,26	4,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,75	0,77	0,84	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,33	1,36	1,38	1,22	1,25

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

E. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Blitar dengan mengacu pada hasil inflasi Kota Kediri. Selama periode 2017-2021, tingkat inflasi Kabupaten Blitar cukup stabil cenderung turun kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2021 relatif terkendali pada kisaran angka yang rendah, yakni sebesar 1,64%.

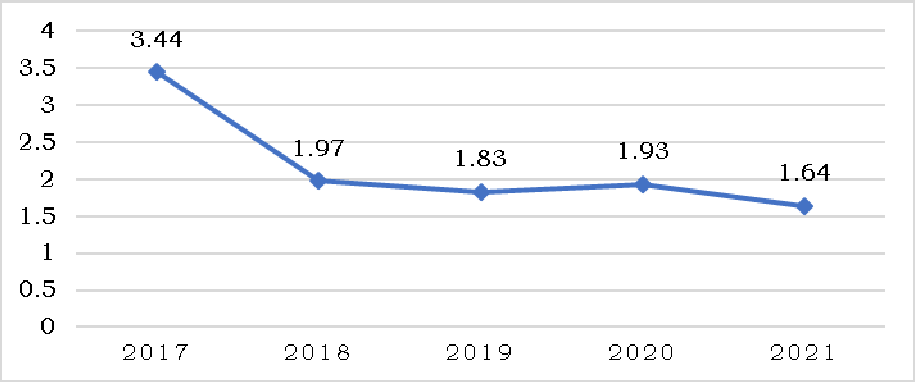

Gambar 2.6.
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau (IPM) merupakan instrumen yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia pada suatu wilayah yang dilihat berdasarkan tiga aspek penilaian penting, yakni aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi. IPM Kabupaten Blitar dalam periode 2017 hingga 2021 nilainya semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 70,57 atau meningkat sebesar 0,54 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 69,9. Lalu pada tahun 2021 IPM Kabupaten Blitar meningkat menjadi 71,05. Berdasarkan capaian tersebut IPM Kabupaten Blitar mengalami kenaikan kategori menjadi wilayah tinggi dengan rentang IPM diantara 70 – 80. Kenaikan IPM tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses

akumulasi perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang selama ini telah dilakukan. IPM sendiri merupakan indeks komposit dari tiga indeks, yakni; Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas pengetahuan dan tingkat pendidikan dari masyarakat; Indeks Kesehatan yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat; dan terakhir Indeks Pengeluaran (*Puschasing Power Parity*/PPP) yang berfungsi untuk menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	72,99	73,16	73,39	73,52	73,61
Indeks Kesehatan	0,8152	0,8178	0,8214	0,8234	0,82
Harapan Lama Sekolah	12,43	12,44	12,45	12,46	12,63
Rata-Rata Lama Sekolah	7,26	7,27	7,29	7,39	7,50
Indeks Pendidikan	0,5873	0,5879	0,5888	0,5924	0,60
Pengeluaran	9.828	10.327	10.861	10.654	10.757
Indeks Daya Beli	0,6961	0,7112	0,7210	0,72	0,72
IPM Kabupaten Blitar	**69,33**	**69,93**	**70,57**	**70,58**	**71,05**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Meskipun IPM Kabupaten Blitar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun nilai IPM Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu berada dibawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

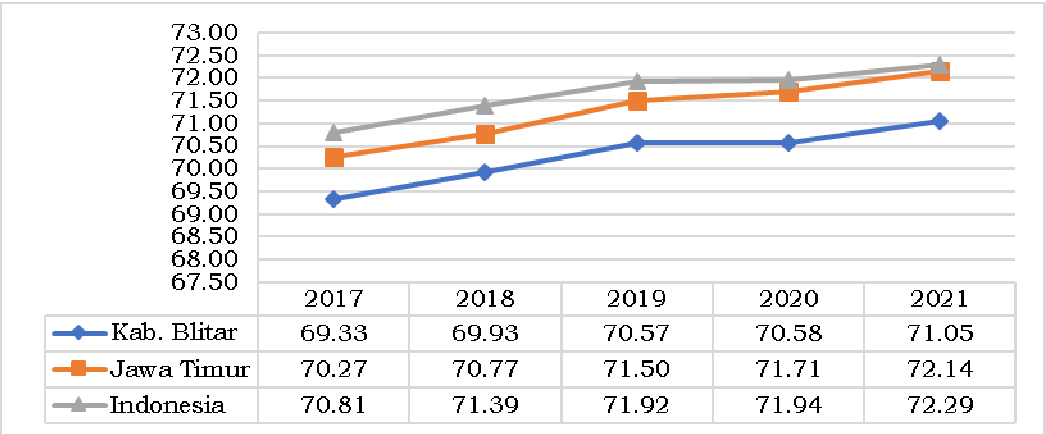

	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Blitar	69.33	69.93	70.57	70.58	71.05
Jawa Timur	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14
Indonesia	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Gambar 2.7.

IPM Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

B. Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 persentasenya mencapai 9,88 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 8,94 persen. Di tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen dibanding tahun 2020 yakni dari 9,33 persen menjadi 9,65 persen. Meningkatnya persentase penduduk miskin sejak tahun 2020 utamanya disebabkan oleh dampak pandemi Coviid-19. Kondisi ekonomi dan sosial serta sektor lainnnya yang terdampak pandemi belum pulih sepenuhnya sampai dengan tahun 2021 sebab Covid-19 masih menyebar di seluruh dunia dan menjadi perhatian utama semua bangsa.

Meski terbilang tinggi, namun tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional, selalu berada dibawah. Sebagai contoh pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur mencapai 10,59 persen, Nasional mencapai 9,71 persen, sedangkan Kabupaten Blitar hanya 9,65 persen.

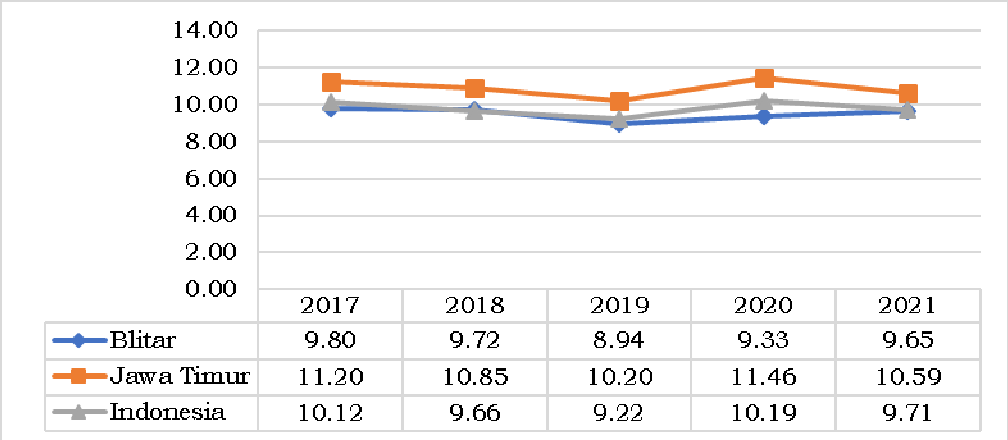

	2017	2018	2019	2020	2021
Blitar	9.80	9.72	8.94	9.33	9.65
Jawa Timur	11.20	10.85	10.20	11.46	10.59
Indonesia	10.12	9.66	9.22	10.19	9.71

Gambar 2.1.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar berbanding Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: BPS RI, 2022

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Blitar dapat disajikan dengan beberapa indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami sempat mengalami penurunan periode 2017 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 meningkat dan mencapai 112,62 ribu jiwa pada tahun 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2021 menunjukkan angka 0,85 yang berarti lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar 1,35. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Blitar cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2021 juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, berarti semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.11
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rupiah)	285.474	305.440	318.534	325.675	335.573
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	112,93	112,40	103,75	108,55	112,62
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,8	9,72	8,94	9,33	9,65
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,16	1,33	1,13	1,35	0,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,28	0,23	0,30	0,14

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Dalam jumlah penduduk miskin tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada yang merupakan kemiskinan miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem (kemiskinan absolut) didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan

ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Pemerintah telah menetapkan target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Suistanable Development Goals* (SDG's) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (a) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (b) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (c) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu: Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako; Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos regular; Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan; Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan; dan Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Penurunan Kemiskinan Ekstrem juga dilakukan dengan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
b) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Sebagaimana Surat Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor B.38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 perihal Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022, Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Meskipun secara persentase rendah, namun Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak. Tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Timur pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa dan pada tahun 2021 sejumlah 5 kabupaten masuk dalam pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Adapun tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 1,39% atau 16.220 jiwa.

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden menugaskan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah nyata percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menindaklanjuti Inpres dimaksud, pada tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan pendataan dan *profiling* kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar sehingga dapat menjadi pedoman intervensi program. Adapun percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 akan dilakukan konvergensi program, dimana penduduk ekstrem akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui penyediaan akses perumahan (melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni), Penyediaan akses sanitasi dan air bersih, ditingkatkan pendapatannya melalui berbagai program pelatihan (mulai dari proses produksi hingga ke pemasaran), serta disiapkan Bantuan Langsung Tunai bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. Adapun upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pengendalian harga dan stok bahan pokok, kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan diharapkan mampu menjaga daya beli dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

C. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: ≤ 0,491

2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan ≤ 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan ≤ 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan ≤ 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Capaian indikator IDM Kabupaten Blitar selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan dengan status kategori Maju, dari yang semula 0,7102 pada tahun 2018 naik menjadi 0,7439 di tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

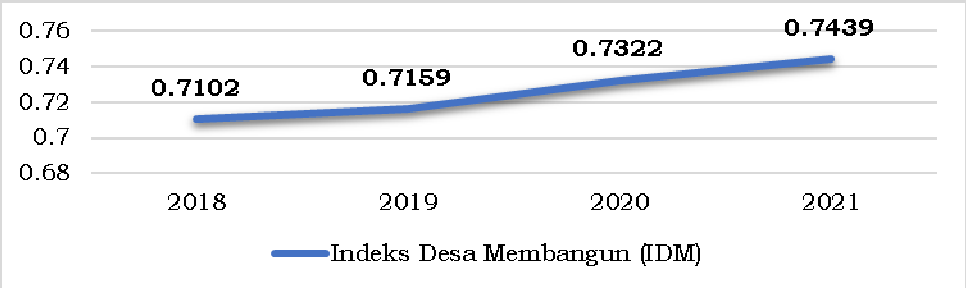

Gambar 2.2.
Status IDM di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022

Berdasarkan data IDM yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diperoleh informasi status IDM masing-masing kecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2021. Dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, terdapat 3 kecamatan dengan Status IDM nya berkembang, 18 kecamatan dengan Status IDM nya maju dan 1 kecamatan dengan Status IDM nya mandiri yaitu Kecamatan Kesamben.

Tabel 2.12
Status IDM Kecamatan di Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Kecamatan	IDM	Jumlah Desa	Status
1	Bakung	0.6899	11	Berkembang
2	Binangun	0.7538	12	Maju
3	Doko	0.7800	10	Maju
4	Gandusari	0.7165	14	Maju
5	Garum	0.8057	5	Maju
6	Kademangan	0.7106	14	Maju
7	Kanigoro	0.7620	10	Maju
8	Kesamben	0.8286	10	Mandiri
9	Nglegok	0.7425	10	Maju
10	Panggungrejo	0.7108	10	Maju
11	Ponggok	0.7461	15	Maju
12	Sanankulon	0.7487	12	Maju
13	Selopuro	0.7863	8	Maju
14	Selorejo	0.7481	10	Maju
15	Srengat	0.7607	12	Maju
16	Sutojayan	0.6668	4	Berkembang
17	Talun	0.7757	10	Maju
18	Udanawu	0.7567	12	Maju
19	Wates	0.7013	8	Berkembang
20	Wlingi	0.7114	4	Maju
21	Wonodadi	0.7126	11	Maju
22	Wonotirto	0.7389	8	Maju
23	**BLITAR**	**0.7439**	**220**	**MAJU**

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022

D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG diatas 90 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Blitar sudah mendekati seimbang antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2017-2021 berfluktuasi dari 92,50 pada tahun 2017 menjadi 92,33 pada tahun 2018 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 92,73 pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 92,70 dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 92,76. Fluktuasi IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya fluktuasi beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jenis kelamin laki-laki Kabupaten Blitar tahun 2021 mencapai 74,67 meningkat 0,46 poin atau tumbuh sebesar 0,46 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jenis kelamin Perempuan Kabupaten Blitar mencapai 69,69 meningkat 0,47 poin atau tumbuh sebesar 0,47 persen dibanding tahun 2020.

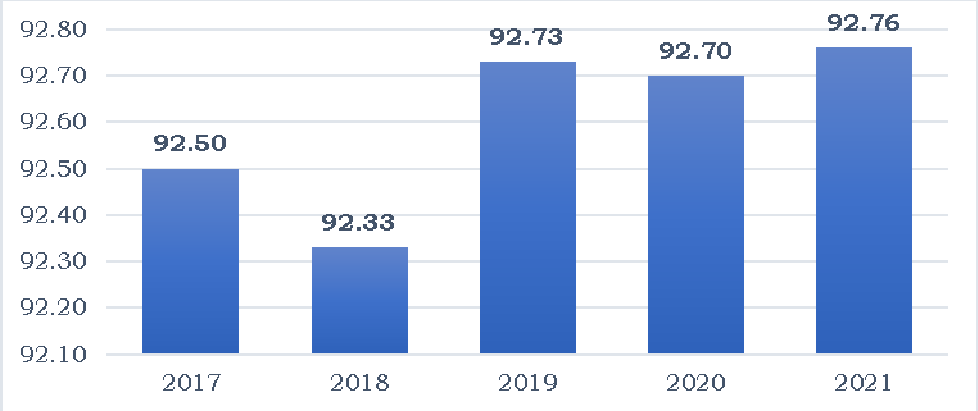

Gambar 2.3.
Perkembangan IPG Kabupaten Blitar
Sumber: BPS RI, 2022, diolah

E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,

dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor non pertanian. IDG Kabupaten Blitar pada 2017-2020 selalu mengalami peningkatan, yang artinya kesetaraan dan keadilan akses perempuan atas kehidupan ekonomi, politik dan manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi maupun politik. Dengan memperhatikan nilai IPG dan IDG ini diharapkan ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dapat terus dilanjutkan sehingga posisi perempuan akan semakin setara dengan laki-laki dan peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat semakin nyata. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai IDG di Kabupaten Blitar sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 79,68.

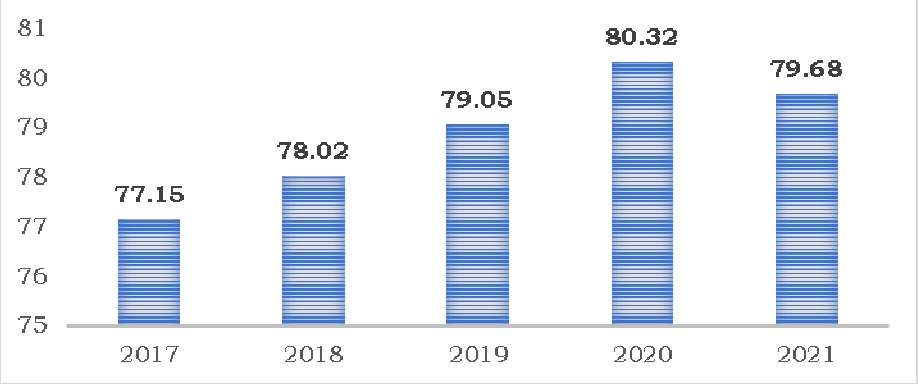

Gambar 2.4.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021
Sumber: BPS RI, 2022, diolah

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur berdasarkan pemerataan dan perluasan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas manajemen pendidikan.

1. Angka Melek Huruf (SPM)

Definisi Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Angka melek huruf di Kabupaten Blitar sudah cukup baik pada angka 94,62% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Namun, pada tahun 2020 angka melek huruf di Kabupaten Blitar mengalami sedikit penurunan sebesar 0,42% sehingga berada pada angka 94,20%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 93,78%.

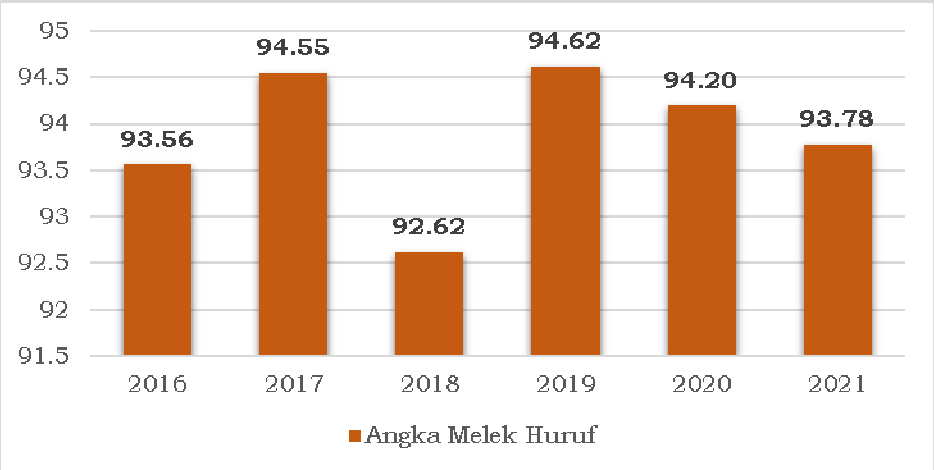

Gambar 2.5.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar Tahun 2021 dan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

2. Angka Partisipasi

Data Pendidikan pada tabel di bawah menunjukkan masih adanya penduduk yang belum mendapatkan akses pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Kabupaten Blitar Tahun 2021 pada jenjang SD/MI sebesar 103,19% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 100%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 103,85% pada tahun 2021. berdasarkan data tersebut maka APK Kabupaten Blitar sudah baik. Angka partisipasi murni SD/MTS sebesar 97,08%, yang artinya diantara 100 anak jenjang SD terdapat 2 orang yang tidak mendapat akses sekolah. Sedangkan APM SMP/MTS adalah 88,32%, dimana diantara 100 anak jenjang SMP terdapat 11 anak yang tidak mendapat akses pendidikan. Terdapat beberapa penyebab mengapa masih terdapat penduduk yang tidak bersekolah antara lain akses pendidikan yang masih terbatas, kesadaran penduduk akan pendidikan masih rendah dan kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal.

Tabel 2.13
Data Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS (%)						
	- SD/MI dan Paket A	96	97	100	100	100	97,08
	- SMP/MTs dan Paket B	77	81	100	100	100	88,32
2	APM (%)						
	- SD/MI dan Paket A	97	97	98	98	96,99	97,08
	- SMP/MTs dan Paket B	85	86	86	89	87,78	88,32
3	APK (%)						
	- SD/MI dan Paket A	99	100	100	101,24	100	103,19

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- SMP/MTs dan Paket B	99	100	100	104,8	99	103,85
4	Angka Putus Sekolah (%)						
	- SD	0	0	0	0	0	0
	- SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
5	Angka Kelulusan						
	- SD	100	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs	100	100	100	100	100	100

Sumber: 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

3. Ketersediaan Sekolah dan Guru

Kualitas layanan pendidikan sangat ditentukan dengan ketersediaan sekolah yang representatif. Hal utama yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan, setelah itu kualitas sekolah. Keberadaan guru yang memadai baik secara jumlah dan kualitas mejadi hal penting kedua dalam meningkatkan pendidikan di daerah. Berikut data ketersediaan guru di Kabupaten Blitar periode 2016-2020 berdasarkan pada data yang telah dihimpun:

Tabel 2.14
Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%)						
	- SD/MI	83	95	95	95	95	95
	- SMP/MTs	79	95	95	95	95	95
2	Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%) (SDG's)						
	- SD/MI	74	90	90	90	90	90
	- SMP/MTs	82	94	94	94	95	95

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Guru yang berkulifikasi serta bersertifikasi selalu meningkat setiap tahunnya, kondisi ini memunculkan angin segar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar.

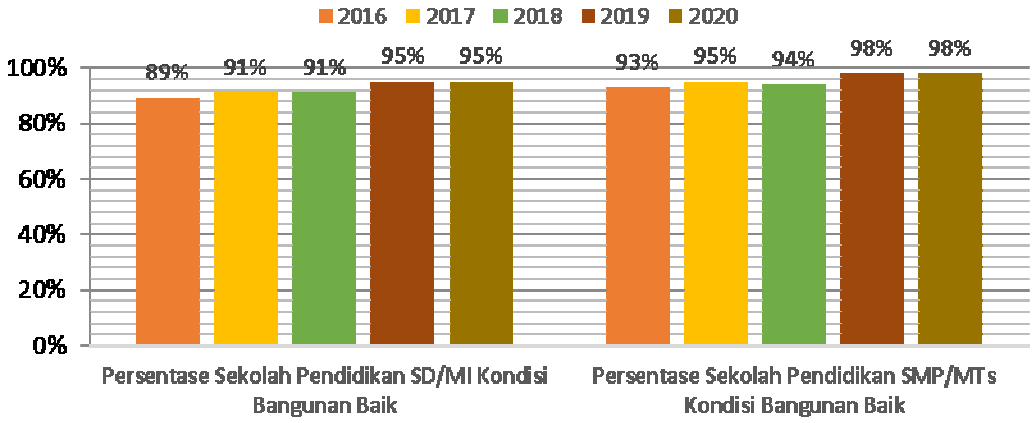

Gambar 2.6.
Persentase Sekolah Dengan Bangunan Baik Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar selain telah didukung oleh rasio ketersediaan sekolah yang cukup memadai, fasilitas pendidikan berupa gedung bangunan juga cukup baik. Data menunjukkan dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan kualitas gedung sekolah yang kemudian masih bertahan pada tahun 2020 dengan presentase kondisi bangunan baik pada jenjang SD/MI 95% dan 98% pada jenjang SMP/MTs. Sehingga dengan adanya kondisi bangunan yang baik maka dapat memberikan dampak dan manfaat terhadap baiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar.

4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar mulai tahun 2016-2021 secara umum meningkat namun bila dilihat secara series secara 6 tahun angka pertumbuhannya hanya berselisih 0,25. Hal ini diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Blitar memiliki pendidikan tinggi hingga 7 tahun atau setara Kelas VIII SMP. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah menerjemahkan seberapa tinggi ekspetasi pendidikan yang dapat mereka dapatkan apabila tinggal di Blitar. Angka tahun 2021 menunjukkan Harapan Lama Sekolah ialah 12,63 yang berarti setidaknya

masyarakat Kabupaten Blitar memiliki harapan untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi.

Tabel 2.15
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-Rata Lama Sekolah	7.25	7.26	7.27	7.29	7.39	7.50
2	Harapan Lama Sekolah	12.42	12.43	12.44	12.45	12.46	12.63

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2021

B. Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Selain itu ketersediaan tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Telah disadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian utama.

1. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup menjadi Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Terkait hal itu, masyarakat Kabupaten Blitar memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) yang berangsur-angsur meningkat dalam rentang enam tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar diketahui berjumlah 73,16. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 73,39. Data terakhir angka harapan hidup ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 73,52 dan pada tahun 2021 kembali meningkat hingga menjadi 73,61. Peningkatan AHH penduduk Kabupaten

Blitar secara kontinyu tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Blitar memiliki usia hidup dengan usia 73 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) ini sangatlah bergantung oleh tingkat kesehatan seseorang serta didukung dari kualitas hidup lainya, dengan asumsi bila semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut.

Tabel 2.16
Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2021

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	72,89	72,99	73,16	73,39	73,52	73,61

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022

2. Indikator Bayi dan Balita

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Blitar cukup rendah dan semakin menurun pada tahun 2020 yaitu 6,84, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7,82. Sedangkan prevalensi balita gizi buruk pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu mencapai 0,17%. Selain itu prevalensi stunting di Kabupaten Blitar dari tahun 2017 ke 2021 terus mengalami penurunan dari 23,2% menjadi 9,58% di tahun 2021. Kasus gizi buruk dapat menjadi prioritas dari pemerintah mengingat jumlahnya yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, hal ini ditangani dengan cukup baik terlihat dari indikator cakupan balita gizi buruk yang tertangani di Kabupaten Blitar yaitu mencapai 100%. Peningkatan prevalensi diimbangi juga dengan cakupan posyandu per satuan balita yang cukup baik, yaitu 1:46 yang artinya setiap posyandu melayani 46 balita. Meskipun cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sedikit menurun yaitu berada pada 99,09%, namun secara keseluruhan kinerja pemerintah dalam memperhatikan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Blitar sudah baik.

Tabel 2.17
Indikator Terkait Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi/ 1000 KH (SDG's)	10,45	9,13	9,03	7,82	6,84	7,82
2	Prevalensi Stunting	19,7%	23,2%	17,2%	11,60%	9,89%	9,58%
3	Peningkatan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,18	0,148	0,124	0,033	0,17	0,22
4	Angka Kematian Ibu	70.75	51,76	64,98	117,33	148,43	490,58
5	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022
2. LKPJ Bupati Tahun 2021

Adapun terkait kinerja pelayanan RSUD, dimana Kabupaten Blitar memiliki dua RSUD yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat sedikitnya 9 (sembilan) indikator yang menjadi ukuran keberhasilan Kabupaten Blitar pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.18
Kinerja Pemerintah Daerah
Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	Persen (%)	N/A	78,83	79,94	80,01	83,76
2	Persentase Ketaatan Ruang	Persen (%)	N/A	79	80	80	70
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	977,92	1.025,36	1.051,77	1109,47	1.281,98
	-Panjang Jalan Kabupaten	Km	1.383,27	1.383,27	1.383,27	1.558,30	1.558,30
	-Panjang Jalan Provinsi	Km	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
	-Panjang Jalan Nasional	Km	46,28	46,28	46,28	46,28	46,28

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	Km	12,45	12,45	13,83	19,05	0
5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	Km	120	120	120	120	120
6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	Km	82,13	199,57	329,57	348,38	148,67
7	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	Buah	28	28	30	31	6
8	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	Ha	27.902,00	26.852,63	24.399,32	24.420,13	24.730
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	Persen (%)	1,08	1,1	1,5	1,5	1,3

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021
2. LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

1. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)

Cakupan layanan infarastruktur merupakan proporsi yang membandingkan antara jangkauan layanan pemerintah terhadap variabel Jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi secara akumulatif terhadap total seluruh masyarakat. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator ini:

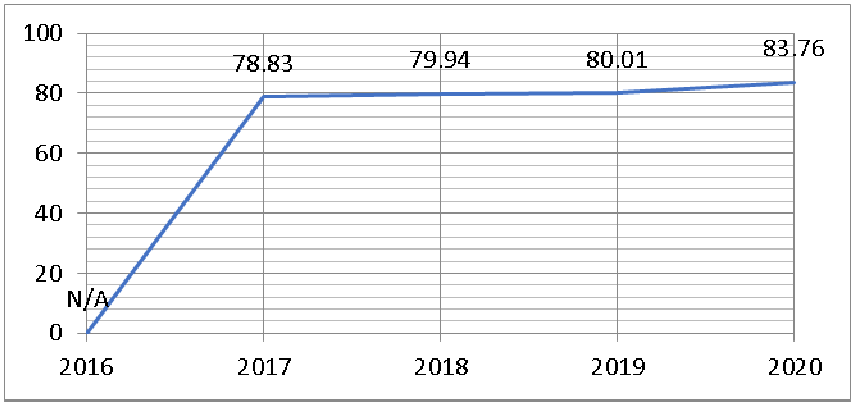

Gambar 2.7.
Pergerakan Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Memperhatkan grafik di atas, secara umum pergerakan persentase pada indikator ini secara konsisten meningkat. Terbaca pada tahun 2017 persentase berada pada angka 78,83%, kemudian meningkat menjadi 79,94% setahun berikutnya dan di angka 80,01% pada tahun 2019 selanjutnya kokoh di angka 83,76% pada tahun 2020.

Namun, dengan rata-rata pertumbuhan yang hanya 0.75% pertahun tentu akan sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan termasuk vital untuk mendukung arus barang dan jasa, begitupun irigasi yang memiliki peran dalam mendukung produksi. Jika perkembangan pembangunan pada infrastruktur-infrastruktur tersebut tidak optimal, maka pertumbuhan ekonomi secara umum tentu tidak akan signifikan dan tentunya atmosfir perekonomian secara "riil" di Kabupaten Blitar akan tetap pada level yang sama selama periode kedepan.

Adapun air minum dan sanitasi memang tidak secara langsung memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dukungan kualitas lingkungan yang sehat dapat memberikan dampak terhadap kondusifitas lingkungan yang baik dan ini secara tidak langsung dapat menjadi daya tarik investasi tersendiri untuk Kabupaten Blitar di masa yang akan datang.

2. Persentase Ketaatan Tata Ruang

Indikator ini merupakan persentase adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, maka disajikan data beberapa tahun terakhir. Merujuk pada data tersebut, diketahui bahwa ketaatan ruang di Kabupaten Blitar cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase ketaatan tata ruang adalah sebesar 79%, lalu meningkat menjadi 80% pada tahun 2018 dan 2019. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 70%.

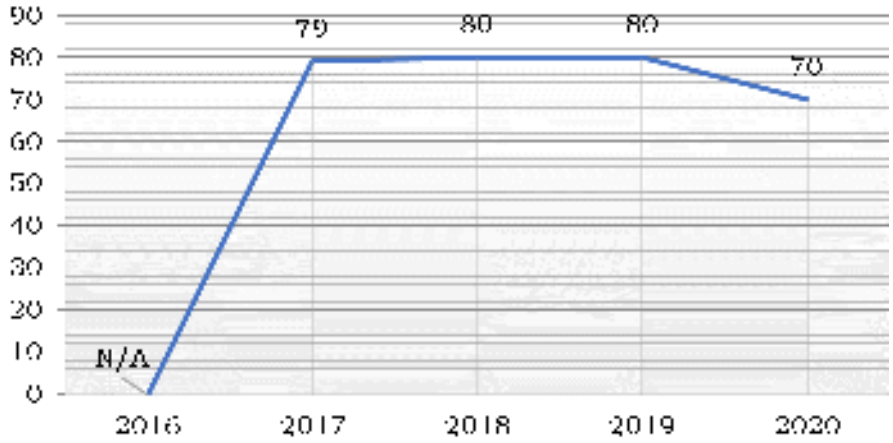

Gambar 2.8.
Pergerakan Persentase Ketaatan Tata Ruang di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Dengan adanya penurunan di tahun 2020 pada periode selanjutnya relatif berat. Artinya perlu ada *treatment* khusus atau *effort* lebih untuk memenuhi 100%. Pada dasarnya, pemenuhan ketaatan terhadap tata ruang terhadap pembangunan tidak secara langsung memberi dampak pembangunan di Kabupaten Blitar karena pemenuhannya terbilang administratif.

Dampak pembangunan sangat tergantung pada kualitas RTRW Kabupaten Blitar, jika muatan substansial pada RTRW Kabupaten Blitar baik dengan analisis yang dalam dan kebijakan zonasi serta pembangunan fisik yang tepat sasaran maka pemenuhan ketaatan terhadap tata ruang ini akan sangat baik, jika sebaliknya maka dampaknya tentu berbanding terbalik. Dengan asumsi bahwa RTRW Kabupaten Blitar telah tersusun dengan ideal baik administratif maupun substantif, maka dengan memperhatikan pergerakan persentase tersebut dapat dikatakan pembangunan fisik di Kabupaten Blitar sedang bergerak pada real yang positif.

3. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Indikator ini mengukur panjang (km) kualitas jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam. Berikut grafik pergerakan panjang jalan yang dalam kondisi baik tahun 2016 sampai dengan 2020:

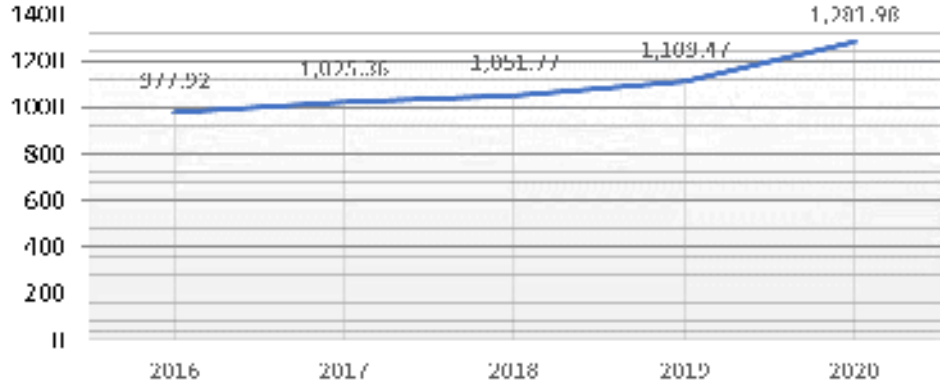

Gambar 2.9.
Pergerakan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Kondisi jalan baik di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dengan rata-rata kenaikan 4,30% per tahun, kondisi jalan baik di Kabupaten Blitar melesat dari 977,92 Km di tahun 2016 menjadi 1109,47 km di tahun 2019, Serta mengalami kenaikan menjadi 1281,98 di tahun 2020. Kondisi ini tentu sangat positif baik dilihat dari sisi ekonomi maupun keamanan. Kondisi jalan yang baik menjamin arus barang dan jasa yang lancar serta mengurangi resiko kecelakaan. Meskipun demikian, dengan melihat ekonomi Kabupaten Blitar yang belum menunjukkan peningkatan gairah yang signifikan, nampaknya kedepan perlu ada peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik yang jika perlu di atas kenaikan rata-rata pertahun.

4. Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional

Indikator ini mengukur panjang (km) jalan yang dapat dilalui kendaraan yang terbagi kedalam jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional. Berikut grafik pergerakan panjang jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional tahun 2016 sampai dengan 2020:

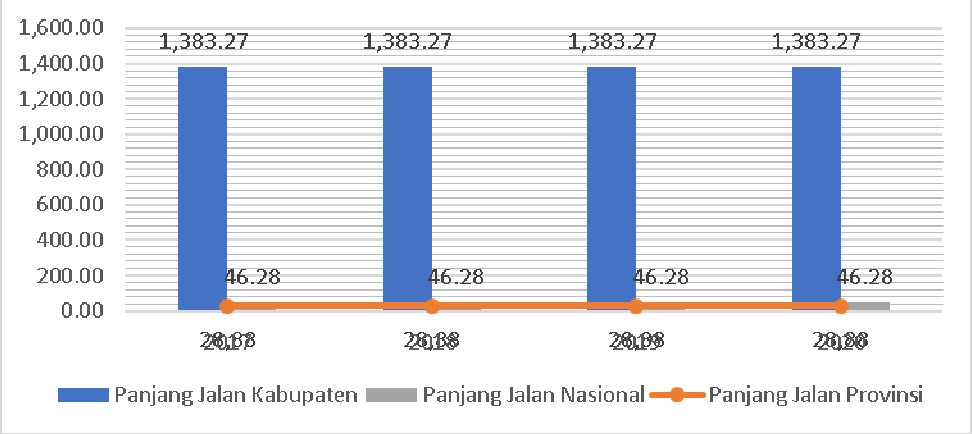

Gambar 2.10.
Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Panjang jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional di Kabupaten Blitar menunjukkan stagnasi. Untuk panjang jalan kabupaten dari tahun 2016-2020 relatif tetap dengan panjang sebesar 1.383,27. Panjang jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/351/409.012/KPTS/2011 tahun 2011 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya. Lalu untuk Panjang Jalan Nasional dari tahun 2016-2020 relatif tetap dengan panjang sebesar 46,28 km dan untuk panjang jalan provinsi dari tahun 2016-2020 adalah 28,88 km. Meskipun demikian, dengan melihat infrastruktur panjang jalan kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Blitar penting untuk mendukung perekonomian daerah, nampaknya kedepan perlu ada peningkatan panjang jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

5. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air pada indikator ini tercatat yang memiliki kelebaran/kedalaman 1,5 m. Berikut grafik perkembangan capaian indikator ini sepanjang tahun 2016-2020:



Gambar 2.11.
Pergerakan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Grafik di atas menunjukkan pergerakan kinerja yang fluktuatif namun cenderung meningkat khususnya pada 2017-2019 pada indikator ini. Terbangun sepanjang 12,45 Km pada tahun 2016, baru mengalami perpanjangan di tahun 2018 menjadi 13,83 Km dan secara signifikan meningkat menjadi 19,05 Km di tahun 2019. Tahun 2020 tidak ada pembangunan.

Trotoar dan drainase merupakan komponen penting jalan, peran drainase dalam manajemen genangan air di Kabupaten Blitar cukup signifikan. Hal ini mengurangi potensi genangan air di musim hujan pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Blitar. Adapun trotoar, sekalipun kecenderungan untuk berjalan kaki di Kabupaten Blitar belum sedemikian marak, namun komponen jalan ini tetap memiliki fungsi optimal sebagai area pedestrian. Karena tahun 2020 adalah tahun pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan atau *Refocusing* (Realokasi), sehingga kegiatan pembangunan trotoar tidak dilaksanakan. Selain itu sebab yang lain adalah permasalahan pembebasan lahan pada wilayah yang akan dibangun trotoar.

6. Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Indikator ini menghitung panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kabupaten Blitar dengan satuan kilometer. Dengan memperhatikan tabel 2.19 dapat diamati bahwa sepanjang periode pembangunan sebelumnya belum ada perkembangan dalam penanganan bangunan liar di sempadan sungai Kabupaten Blitar. Terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 panjang sempadan sungai yang ada bangunan liarnya *stuck* di angka 120 km.

Dengan adanya bangunan liar tersebut, jika tidak tertangani pada periode selanjutnya sangat berpotensi menjadi sumber pencemaran sungai. Umumnya, sempadan sungai yang memiliki bangunan liar cenderung menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir, dan jika ini terjadi terus menerus di Kabupaten Blitar akan terjadi endapan sampah yang barang tentu memberikan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan komunitas yang memanfaatkan sungai sebagai sumber air mereka baik untuk konsumsi maupun kebutuhan harian.

7. Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Indikator ini secara sederhana membaca panjang drainase dengan status berfungsi secara baik/tidak tersumbat dengan satuan panjang kilometer. Berikut perkembangan drainase Kabupaten Blitar yang berfungsi secara optimal tahun 2016-2020:

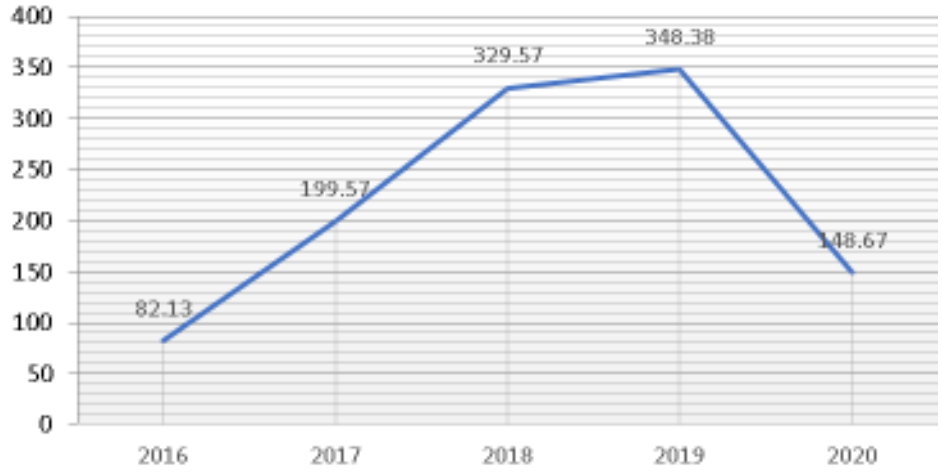

Gambar 2.12.
Pergerakan Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Km) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Dengan membaca grafik di atas, terlihat bahwa kondisi drainase di Kabupaten Blitar terbilang fluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2016 tercatat sepanjang 82.13 Km drainase berfungsi optimal, kemudian meningkat menjadi 199.57 Km setahun berikutnya, lalu melompat menjadi 32.53 Km di 2018 hingga akhirnya kokoh di 348.38 pada tahun 2019. Pergerakan paling signifikan tentu pada tahun 2017 yang mencapai peningkatan sebesar 142,99 Km, namun di tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 148,67Km. Tentu dengan melihat penurunan drastis ini, harusnya perlu perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja.

8. Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten

Indikator ini mengukur Jumlah turap yang terbangun pada wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dengan satuan buah. Demikian perkembangan pembangunan turap di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:

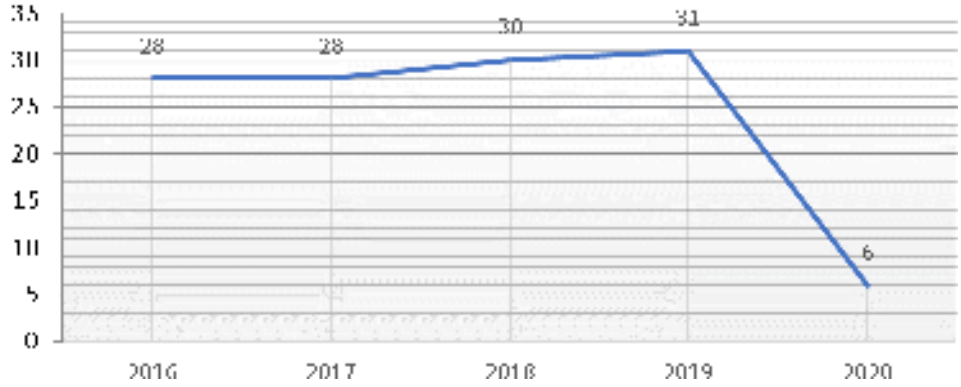

Gambar 2.13.
Pergerakan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Perkembangan pembangunan turap Kabupaten Blitar sepanjang 2016 sampai dengan 2019 bergerak secara progresif meskipun tidak signifikan. Di 2016 dan 2017 turap yang terbangun adalah 28 buah, kemudian meningkat menjadi 30 buah di tahun 2018 dan menjadi 31 buah di tahun 2019 lau di tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya menjadi 6 buah.

Pembangunan turap di lingkup kewenangan Kabupaten pada wilayah penghubung dan sungai rawan longsor merupakan tindak pencegahan untuk meminimalisir potensi bencana longsor. Kabupaten Blitar memang memiliki wilayah kerawanan longsor yang relatif banyak. Tercatat pada awal tahun 2019 terjadi sekitar 33 kali tanah longsor, 10 kali lebih banyak dibanding 2018 yaitu sebanyak 22 kali (BPBD dalam *blitartimes.com* dipublikasi pada 15 Maret 2019).

9. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas Irigasi Kabupaten Blitar dalam kondisi baik diukur dengan satuan hektar secara sederhana untuk melihat besar wilayah irigasi di Kabupaten Blitar yang berfungsi secara optimal. Berikut perkembangan luas irigasi Kabupaten Blitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021:

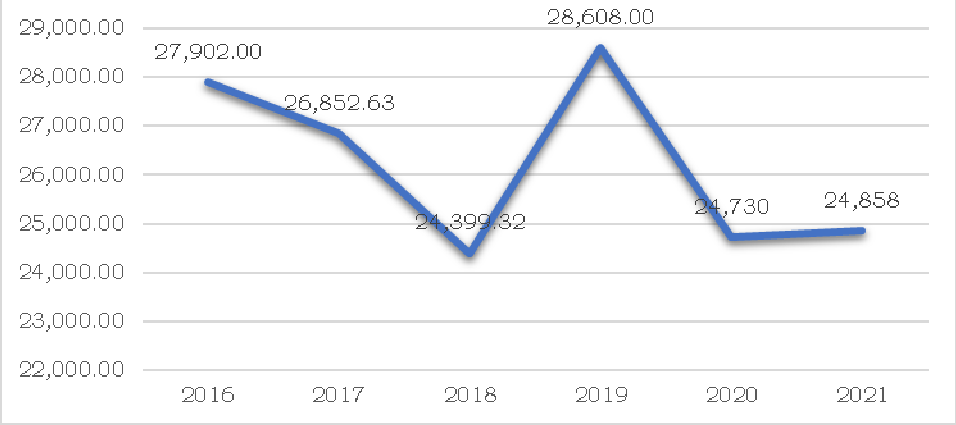

Gambar 2.14.
Pergerakan Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021 dan LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi. Pergerakan dari 2016 sampai dengan 2018 luas irigasi dalam kondisi baik merangkak menurun secara konsisten. Pada tahun 2016 luas irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 27.902 Ha, lalu menurun menjadi 26.852,63 Ha setahun setelahnya, kemudian menurun lagi di 2018 menjadi 24.399,32 Ha hingga melompat naik menjadi 28.608 Ha di tahun 2019. Dan kembali mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar 24.730 dan kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 24.858 Ha. Beberapa indikator dalam perubahan iklim seperti meningkatnya permukaan banjir, kekeringan, beberapa permasalahan sumber daya dan permasalahan dalam pengembangan sumber daya air. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap temperatur , kelembaban relatif, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, curah hujan dan debit sungai. Tingginya intensitas curah hujan setelah terjadinya perubahan iklim berdampak terhadap fluktuasi debit sungai pada musim hujan dan kemarau bisa berpengaruh terhadap penurunan luas irigasi sehingga hal ini juga perlu diperhatikan untuk tindakan pencegahan dan penanganan.

Mengingat irigasi memiliki kontribusi terhadap produksi pertanian, maka konsistensi peningkatan irigasi dalam kondisi optimal harus menjadi upaya utama. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka periode pembangunan selanjutnya perlu mempertimbangkan peningkatan luasan irigasi yang memiliki kondisi prima.

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Indikator ini membandingkan luasan ruang terbuka hijau (RTH) per satuan wilayah ber HPL atau HGB terhadap total wilayah Kabupaten Blitar. Berikut pergerakan rasio RTH Kabupaten Blitar tahun 2016-2020:

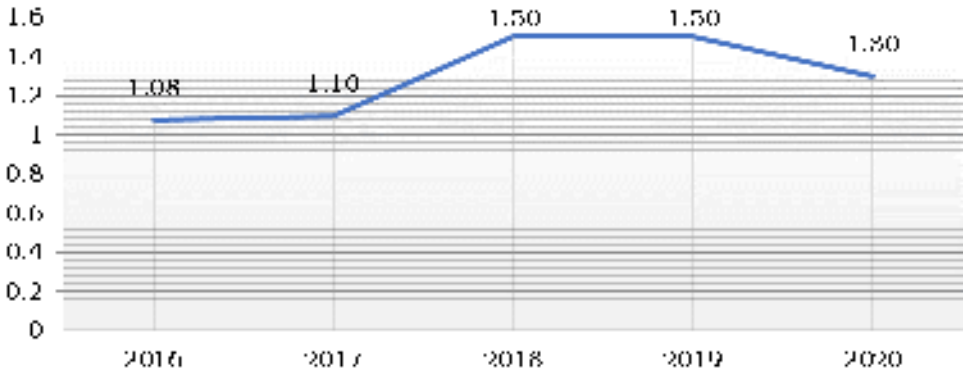

Gambar 2.15.
Pergerakan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan gambar di atas, kecenderungan rasio RTH di Kabupaten Blitar konsisten meningkat. Pada tahun 2016, besaran rasio RTH adalah sebesar 1,08%, lalu meningkat menjadi 1,1% setahun setelahnya. Kemudian stagnan di angka 1,5% pada tahun 2018 dan 2019 hingga akhirnya mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1,3%.

Jika merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka angka 1,3% di tahun 2020 tersebut masih terbilang minim dimana standar minimal pada aturan tersebut adalah 30% luas wilayah

daerah dengan proporsi 20% untuk publik dan 10% untuk privat. Dengan demikian, untuk memenuhi urgensi aturan, maka perlu ada peningkatan kinerja pada periode pembangunan kedepan agar dapat mencapai standar luasan RTH minimal tersebut. Berdasarkan pada *series data* yang ada dengan asumsi menggunakan besaran anggaran dan kinerja pada periode sebelumnya, maka tahun 2024 diproyeksikan rasio RTH baru menyentuh 2,38%. Artinya, butuh *effort* yang relatif besar untuk paling tidak memperkecil *gap* rasio RTH Kabupaten Blitar terhadap standar yang dimandatkan undang-undang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut tahun 2016-2020:

Tabel 2.19
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga pengguna air bersih	KK	327.337	331.155	335.744	339.168	342.834
2	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen (%)	74	75,56	79,1	81,42	82,3
3	Rumah tangga pengguna listrik (%)	Persen (%)	68	70	72	100	77
4	Rumah tangga ber-Sanitasi	KK	242.438	243.150	243.496	246.417	300.137
5	Kawasan kumuh (%)	Persen (%)	1,85	1,75	1,7	0,8	0,49
6	Rumah layak huni	Jml	301.929	302.566	303.243	305.019	305.697

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator ini mengukur Jumlah rumah tangga yang terakses air bersih dalam satuan KK di Kabupaten Blitar. Berikut pergerakan rumah tangga yang terakses air bersih di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:

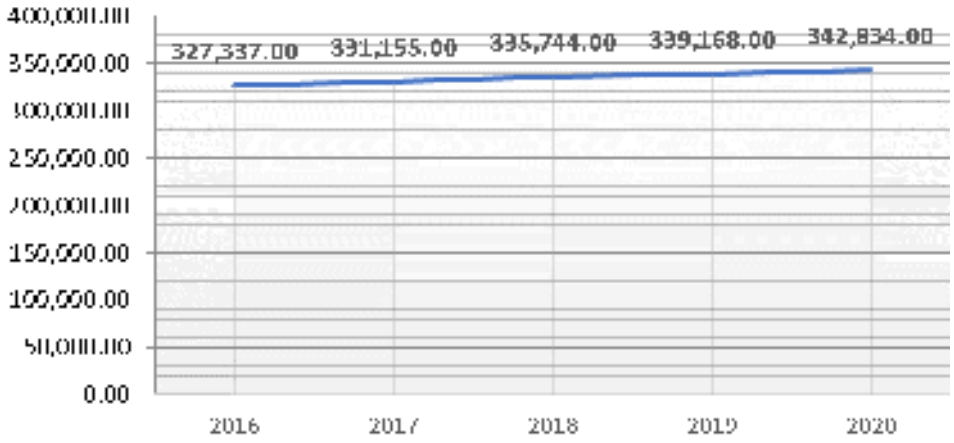

Gambar 2.16.
Pergerakan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan rumah tangga pengguna air bersih konsisten meningkat meskipun tidak signifikan. Berada di angka 327.337 KK pada tahun 2016, rumah tangga terakses air bersih mengalami lompatan menjadi 331.155 pada tahun 2017. Setahun berikutnya naik lagi menjadi 335.277 dan kemudian menjadi 339.168 di tahun 2019 hingga akhirnya di tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 342.834. kenaikan terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu 1,39%.

Air bersih merupakan salah satu faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat. Dengan menjamin distribusi air bersih dapat tersalurkan seluas mungkin, maka disaat yang sama kualitas kesehatan masyarakat memiliki kemungkinan peningkatan yang luas pula. Topografi wilayah Kabupaten Blitar yang cenderung kering tentu menjadikan penyediaan air bersih ini menjadi *urgent*, ditambah lagi persebaran penduduk yang sangat luas menyebar di wilayah-wilayah yang relatif berjauhan di Kabupaten Blitar tentu menjadikan upaya ini menjadi lebih menantang.

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi ini diukur dengan membandingkan total penduduk yang memiliki akses air minum terhadap total Jumlah penduduk. Berikut progres penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Kabupaten Blitar tahun 2016-2020:

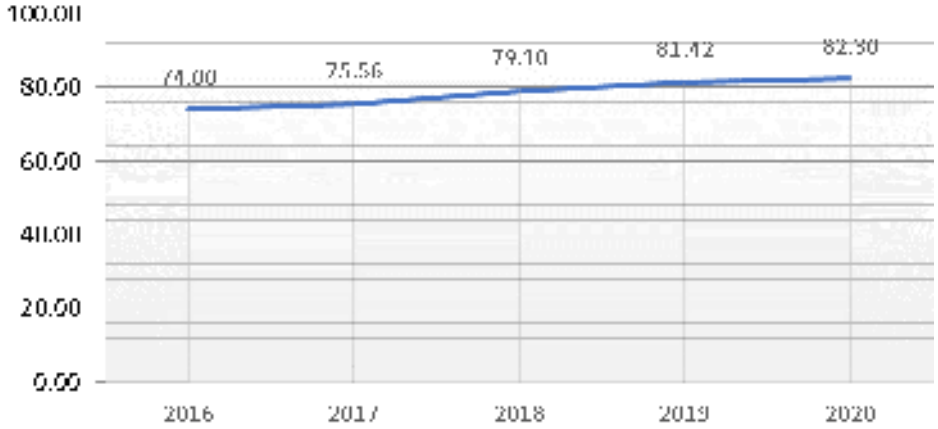

Gambar 2.17.
Pergerakan Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Persentase masyarakat berakses air minum di Kabupaten Blitar sepanjang 2016 sampai dengan 2019 konsisten meningkat. Berada di angka 74% di tahun 2019, indikator ini kemudian sedikit mengalami peningkatan setahun berikutnya menjadi 75,56%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan relatif besar yaitu menjadi 79,1% dan pada akhir 2019 berada di angka 81,42% dan di tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 82,30%.

Posisi indikator ini memiliki urgensi yang sama dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih dalam hal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Blitar. kondisi terakhir di 2020 sebesar 82,30%, dapat berada dalam koridor yang baik. Jika dikalkulasi dengan pendekatan *forecast* sederhana serta menggunakan asumsi *effort* dan kekuatan anggaran yang sama dengan periode sebelumnya, ditemukan pada akhir periode pembangunan kedepan (2024) adalah sebesar 94%. Artinya, dengan cukup

mempertahankan atau menguatkan kinerja pada indikator ini pemerintah Kabupaten Blitar sedang berasa pada *track* yang sangat positif.

3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini mengukur perbandingan rumah tangga pengguna listrik terhadap Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar. Berikut perkembangan kinerja pemerintah dalam pemenuhan rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020:

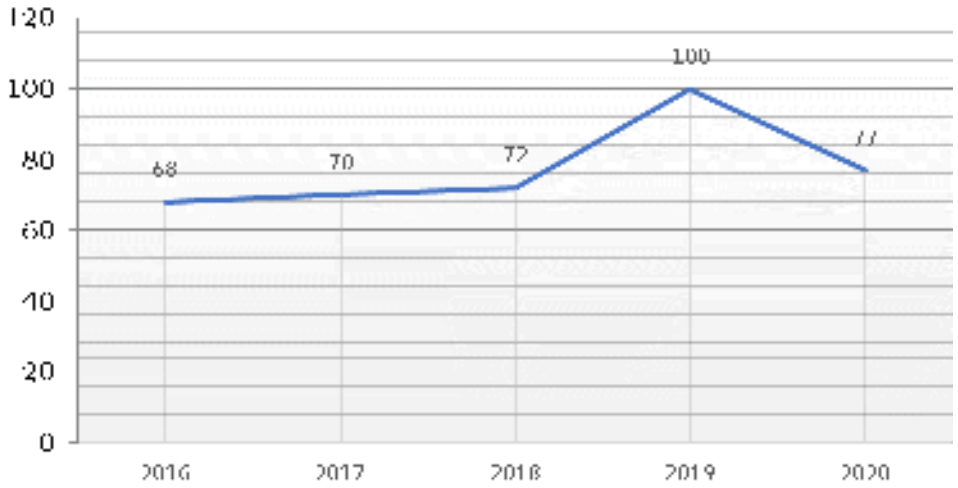

Gambar 2.18.
Pergerakan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berangkat dari angka 68% di tahun 2016, kinerja pada indikator ini merangkak naik menjadi 70% setahun berikutnya lalu 72% di tahun 2018. Pada tahun 2019 kinerja pada indikator ini sudah sempurna yaitu 100%, artinya seluruh rumah tangga di Kabupaten Blitar telah teraliri listrik. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 77 %.

Melihat perkembangan kinerja tersebut, secara statistik *effort* pemerintah perlu ditingkatkan lagi dan pemerintah memiliki tanggung jawab pemeliharaan pada periode pembangunan ke depan agar rumah tangga yang telah memiliki listrik untuk ditingkatkan lagi.

4. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Blitar diukur dengan satuan KK. Berikut perkembangan kinerja pada indikator ini:

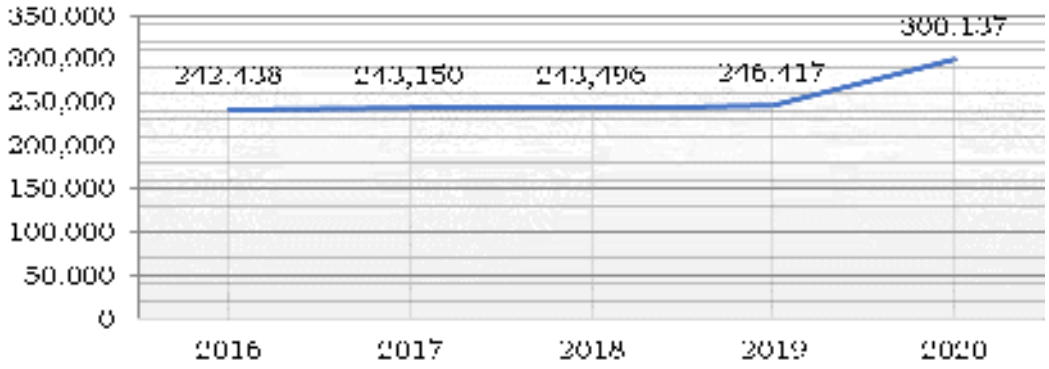

Gambar 2.19.
Pergerakan Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Kinerja pemerintah pada indikator ini konsisten meningkat sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Blitar tercatat 242.438 rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 243.150 rumah tangga dan sedikit merangkak naik lagi di tahun 2018 menjadi 243.496 rumah tangga. Pada 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 246.417 dan 300.137.

Dengan kenaikan yang signifikan di tahun 2020 tentunya menjadi hal yang positif. Rumah tangga bersanitasi menjadi salah satu faktor lingkungan dan masyarakat yang sehat, oleh karena itu dengan melakukan *boosting* pada indikator ini atau paling tidak pada area ini menjadi penting. Artinya, pada periode pembangunan kedepan perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja pada inidikator ini.

5. Persentase Kawasan Kumuh

Persentase kawasan kumuh merupakan proporsi perbandingan kawasan kumuh di Kabupaten Blitar terhadap total wilayah di Kabupaten Blitar. Berikut perkembangan kinerja kawasan kumuh di Kabupaten Blitar:

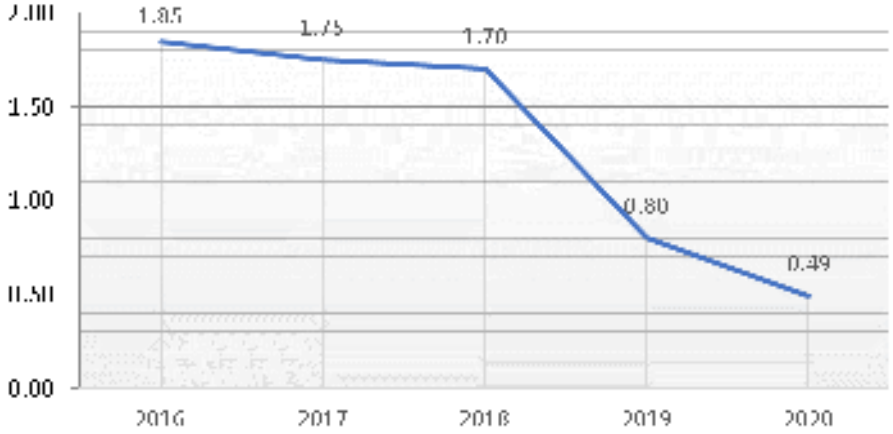

Gambar 2.20.
Pergerakan Persentase Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Secara total penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar kurang lebih 1%. Secara rinci, di tahun 2016 adalah 1,85%, kemudian berhasil berkurang menjadi 1,75% setahun berikutnya dan kembali menurun mejadi 1,7% di tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 menurun secara signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,8% dan 0,49%. dimana pergerakan penurunan di 2019 adalah 52,9% dari tahun 2018.

Dengan berdasarkan pada *track* kinerja pada periode pembangunan sebelumnya, maka upaya pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Blitar menjadi 0% sangat mungkin terjadi di periode pembangunan kedepan. Artinya, hanya dengan mempertahankan kinerja saat ini, upaya peniadaan kawasan kumuh tersebut sangat mungkin tercapai.

6. Rumah Layak Huni

Indikator ini menggunakan ukuran sederhana yaitu Jumlah rumah layak huni. Berikut perkembangan Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Blitar:

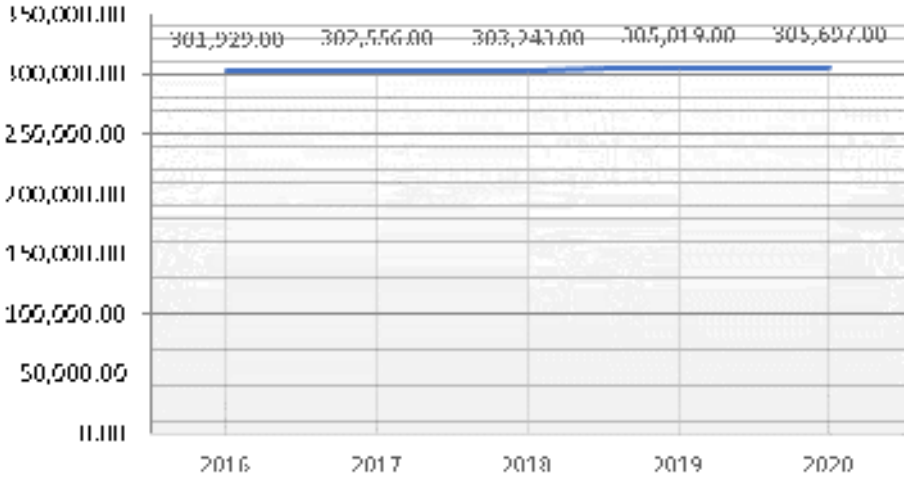

Gambar 2.21.
Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021

Jumlah rumah layak huni tahun demi tahun konsisten merangkak naik di Kabupaten Blitar. Bergerak dari angka 301.929 rumah yang tercatat layak huni di tahun 2016, jumlah rumah layak huni ini bergerak naik menjadi 302.566 rumah di tahun berikutnya. Kemudian kembali meningkat menjadi 303.243 di tahun 2018 serta meningkat lagi menjadi 305.019 di tahun 2019 hingga di tahun 2020 menjadi 305.697.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan sebuah harapan yang diinginkan dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tenteram, kondusif sesuai dengan pengertian dari tantribum itu sendiri. Di Kabupaten Blitar, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) organisasi perangkat daerah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terdapat 12 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.20
Kinerja Kabupaten Blitar Pada Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	7	15	15	4
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	8	6	6	3
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2	2	2	1	1
4.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	71	71	71	70	70
5.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1Pos/ RT	1Pos/ RT	1Pos/ RT	1Pos/ RT	9Pos/ Desa
6.	Penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	95
7.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (X/Hari)	3x	3x	3x	2x	2x
8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten (%)	95	95	95	95	95
9.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT)	0,71	0,71	1,4	1	1
10.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100
11.	Tingkat waktu tanggap (*respone time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	40	40	55	30	30

Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Blitar 2016-2020

1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan peran LSM, Ormas, dan OKP dalam rangka turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP di Kabupaten Blitar:

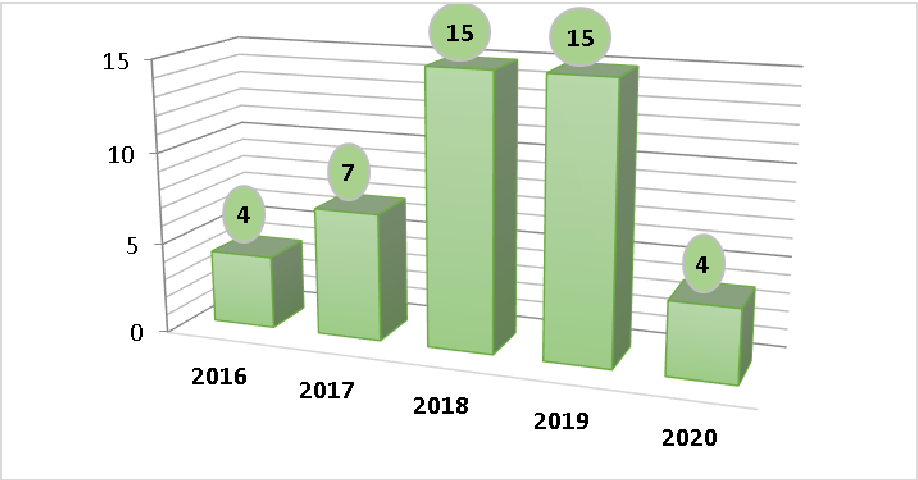

Gambar 2.22.
Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP secara garis besar memiliki kecenderungan meningkat pada periode 2016-2019 dan menurun di tahun 2020. Pada tahun 2016 terdapat 4 kegiatan pembinaan, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan pembinaan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu kegiatan pembinaan dilakukan sebanyak 15 dan konsisten sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah kegiatan pembinaan yang sama. Akan tetapi, di tahun 2020 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mengalami penurunan yang hanya terlaksana 4 kegiatan. Maka rata-rata pertumbuhan per tahun untuk kegiatan pembinaan ini adalah sebesar 28,98%. Hal ini perlu menjadi perhatian penting dan mendapatkan evaluasi penyebab dari rendahnya persentase pertumbuhan tersebut, karena peran serta LSM, Ormas dan OKP dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah dan juga masyarakat.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah bertujuan agar masyarakat mampu memahami situasi sosial politik yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh terkait pertumbuhan indikator dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Blitar:

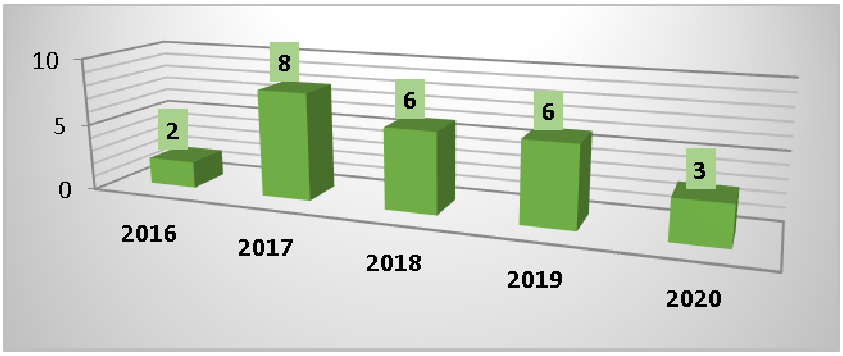

Gambar 2.23.
Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Blitar secara garis besar memiliki kecenderungan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kegiatan pembinaan politik daerah hanya dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2017 yaitu kegiatan pembinaan politik daerah dilakukan sebanyak 8 kali. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan, sebab kegiatan pembinaan politik daerah hanya dilakukan sebanyak 6 kali hingga di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 kegiatan pembinaan politik daerah hanya dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini mengartikan jika adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 56,25%, sehingga hal ini mengartikan perlu adanya kegiatan evaluasi untuk menilai dan mengetahui penurunan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 utamanya.

3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja per 10.000 jumlah penduduk. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar:

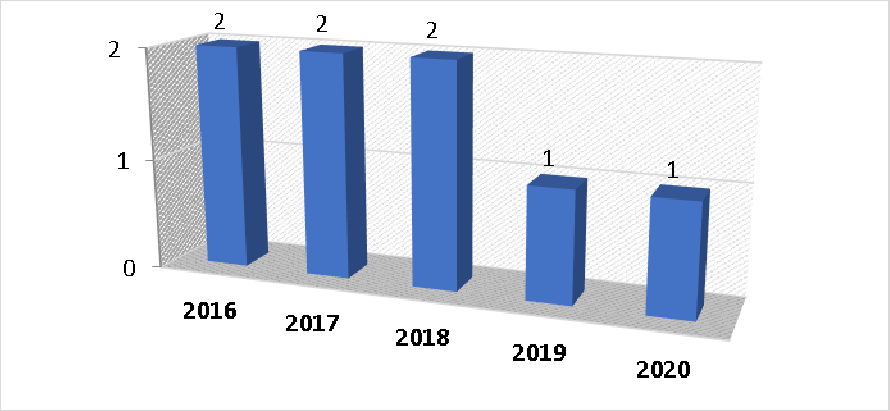

Gambar 2.24.
Pertumbuhan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk secara garis besar memiliki kecenderungan menurun. Hal tersebut terjadi karena jumlah dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun pertumbuhannya mengalami penetapan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk berada di angka 2 dan mengalami penurunan di tahun 2019 hingga 2020 yaitu dengan berada di angka 1. Rata-rata pertumbuhan rasio jumlah polisi pamong praja per tahunnya sebesar -12,5%, hal ini mengartikan jika terdapat penurunan rasio jumlah per tahunnya.

4. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas di setiap 10.000 penduduk. Untuk memahami lebih jauh capaian pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar:

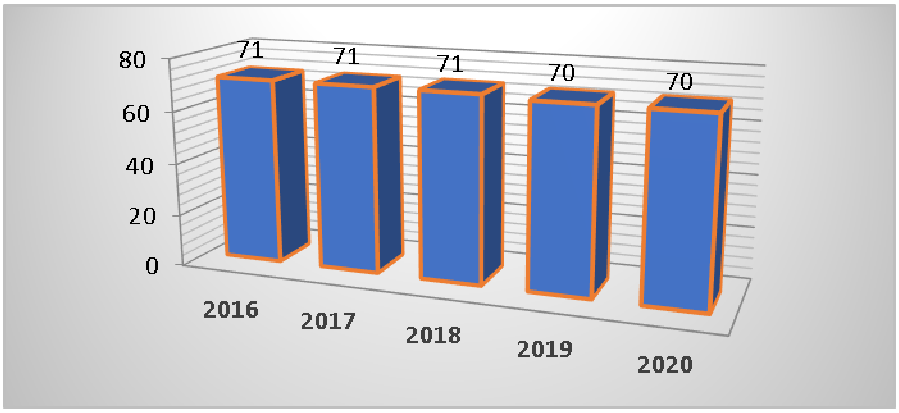

Gambar 2.25.
Pertumbuhan Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk memiliki kecenderungan menurun. Hal tersebut terjadi karena jumlah dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun pertumbuhannya mengalami penetapan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun di tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk berjumlah 71 Linmas, namun pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 70 linmas per jumlah 10.000 penduduk. Rata-rata pertumbuhan jumlah linmas per 10.000 penduduk adalah sebesar -0,35%. Hal ini menunjukkan jika telah terjadi penurunan pertumbuhan per tahunnya.

5. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan merupakan perbandingan antara jumlah Pos Siskamling dengan jumlah Desa/Kelurahan. Pertumbuhan rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blitar secara garis besarnya konsisten tetap dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah Pos Siskamling per RT tidak mengalami penambahan dan penurunan yaitu hanya berjumlah 1 Pos Siskamling. Kemudian di tahun 2020 hitungan rasio pos Siskamling berdasarkan Desa terdapat 9 Pos Siskamling. Rata-rata pertumbuhan rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan pertahunnya sebesar 0%, sebab tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan dalam setiap tahunnya.

6. Penegakan Perda

Penegakan Perda merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat guna pematuhan Peraturan Daerah oleh masyarakat setempat, begitu halnya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Pertumbuhan penegakan Perda secara garis besarnya konsisten tetap dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 usaha untuk menegakan Peraturan Daerah telah mencapai persentase sebesar 95%. Rata-rata pertumbuhan penegakan Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam setiap tahunnya sebesar 0%, sebab tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan capaian.

7. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (X/hari)

Cakupan patroli petugas Satpol PP merupakan jumlah seberapa banyak petugas Satpol PP menjalankan patroli dalam satu hari di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan cakupan patroli petugas Satpol PP perharinya di Kabupaten Blitar:

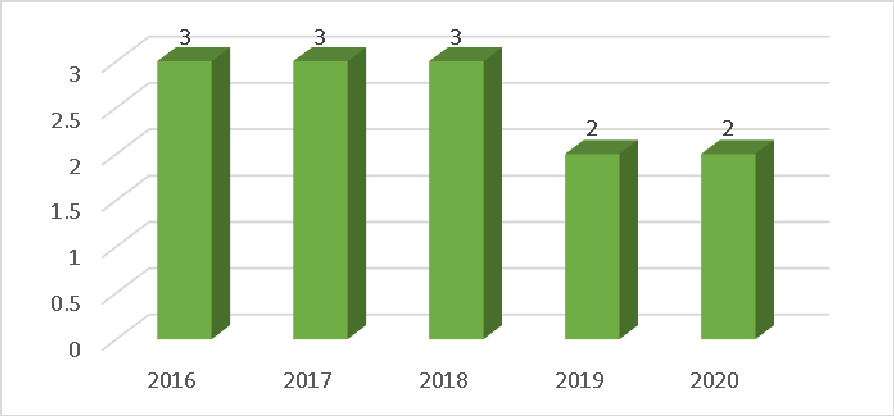

Gambar 2.26.
Pertumbuhan Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (X/Hari) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan cakupan jumlah patroli petugas Satpol PP dalam sehari secara garis besarnya memiliki kecenderungan menurun. Hal tersebut terjadi karena, jumlah antara tahun basis yaitu pada tahun 2016 dengan tahun akhir yaitu tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun sempat stabil pada tahun 2016 sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat diketahui bahwa cakupan jumlah patroli petugas Satpol PP dalam sehari sebanyak 3 kali, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu hanya sebanyak 2 kali dalam sehari. Rata-rata pertumbuhan cakupan patroli petugas Satpol PP sebesar -8,35% per tahun. Persentase ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan cakupan patroli petugas Satpol PP per tahunnya.

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan) merupakan persentase keberhasilan penyelesaian pelanggaran dalam hal ketertiban, keamanan, dan keindahan.

Pertumbuhan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, dan keindahan) di Kabupaten Blitar secara garis besarnya konsisten tetap. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 95%. Rata-rata pertumbuhan persentase penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, keamanan, dan keindahan) pertahunnya sebesar 0%, karena tidak adanya capaian peningkatan maupun penurunan dalam setiap tahunnya.

9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Indikator petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan indikator yang menerangkan jumlah Linmas yang berada pada tiap-tiap RT yang tersebar di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas).

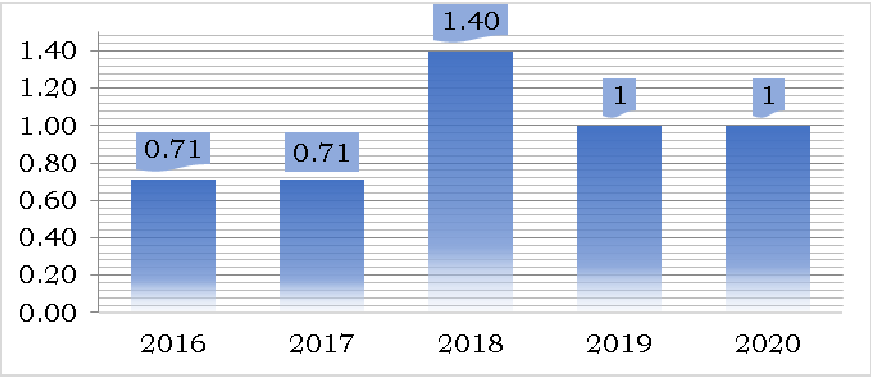

Gambar 2.27.
Pertumbuhan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun kenaikan dalam setiap tahunnya tidak stabil, namun masih terhitung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) berada pada angka 0,71 dan tidak

mengalami perubahan di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu dengan berada di angka 1,4, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dengan berada di angka 1. Rata-rata dari pertumbuhan petugas perlindungan masyarakat (linmas) adalah 17,2% per tahunnya. Hal ini mengartikan jika, perlu upaya yang lebih besar di tahun berikutnya agar dapat terjadi peningkatan kembali dan semakin membaik.

10. Persentase Penanganan Konflik

Persentase penanganan konflik merupakan indikator yang mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik yang terjadi di daerah. Pertumbuhan persentase penanganan konflik setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap, sebab tidak mengalami perubahan dari tahun basis yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun akhir yaitu tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase penanganan konflik konsisten berada pada angka 100%, hal ini berarti penanganan konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Blitar telah mencapai usaha yang maksimal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan persentase penanganan konflik setiap tahunnya sebesar 0% sebab tidak mengalami penurunan dan kenaikan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat terus mempertahankan usahanya dalam menangani konflik di daerah. Namun berdasarkan data pada tahun 2021 Persentase penanganan konflik sedikit mengalami penurunan menjadi 90%.

11. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan indikator mengenai usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap bencana kebakaran. Pertumbuhan persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Blitar secara garis besarnya mengalami konsisten tetap, sebab tidak terjadi perubahan

dari tahun basis sampai dengan tahun akhir. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase pelayanan bencana kebakaran tetap berada di angka 100%. Hal tersebut dapat dikatakan cukup baik, sebab sudah mencapai target maksimal dan masih dapat mempertahankannya dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar sebesar 0%, hal ini karena tidak adanya capaian yang meningkat maupun menurun dalam setiap tahunnya.

12. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran merupakan indikator mengenai jumlah waktu pemerintah daerah dalam menanggapi daerah layanan wilayah manajemen kebakaran. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran:

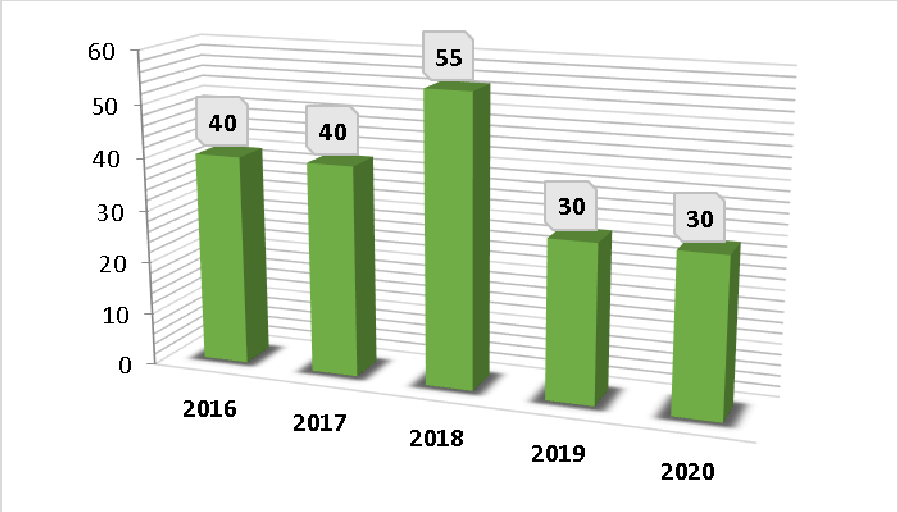

Gambar 2.28.
Pertumbuhan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran yang terjadi di Kabupaten Blitar secara garis besar mengalami kecenderungan menurun. Meskipun jumlah peningkatan dan penurunan tidak stabil, namun jika dibandingkan waktu tanggap pelayanan antara tahun basis dengan tahun akhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dibutuhkan waktu 40 menit untuk menanggapi daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dan tidak mengalami perubahan di tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu membutuhkan waktu lebih lama yaitu selama 55 menit, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan waktu tanggap pelayanan yaitu selama 30 menit. Rata-rata pertumbuhan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran yaitu -10,41%. Dengan demikian dapat terlihat bahwa pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun hal tersebut memiliki dampak yang positif, karena semakin sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar.

Indikator pertumbuhan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dan menurun di tahun 2020. Indikator pertumbuhan kegiataan pembinaan partai politik cenderung fluktuasi. Kemudian indikator pertumbuhan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk; indikator jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk; cakupan patroli petugas Satpol PP; indikator petugas perlindungan masyarakat (Linmas); serta indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran mengalami penurunan. Selanjutnya untuk indikator rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan; indikator penegakan Perda; tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, keindahan); serta indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar dari tahun 2016-2020 dalam kondisi yang konsisten.

F. Sosial

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek sosial. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut selama enam tahun terakhir.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	24	24	27	27	27	
2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	14,02	37,74	10,19	9,3	29,14	
3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12,58	15,05	2,54	4,83	5,90	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi merupakan indikator yang mengukur ketersediaan sarana sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi:

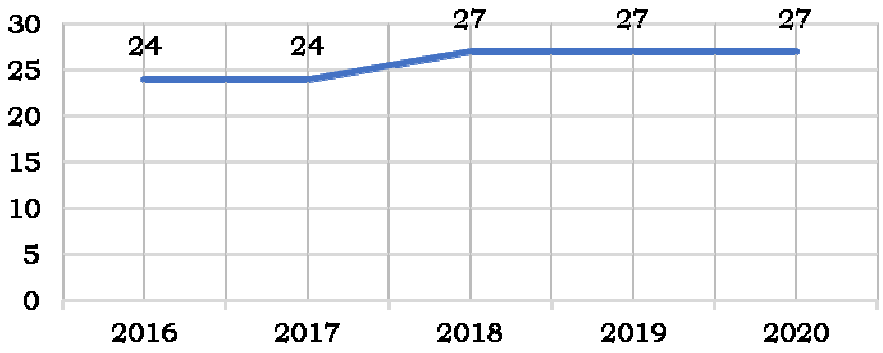

Gambar 2.29.

Pertumbuhan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Panti) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah sarana sosial di Kabupaten Blitar setiap tahun secara garis besarnya cenderung meningkat, meskipun tidak mengalami peningkatan yang konsisten, namun jika dibandingkan antara tahun basis dengan tahun tahun akhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah sarana sosial di Kabupaten Blitar sebanyak 24, yang mana tidak mengalami perubahan di tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 27 sarana sosial dan kembali tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. Perkembangan jumlah sarana sosisal seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi berkembang mengikuti kebutuhan sarana yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

2. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan indikator yang mengukur jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial:

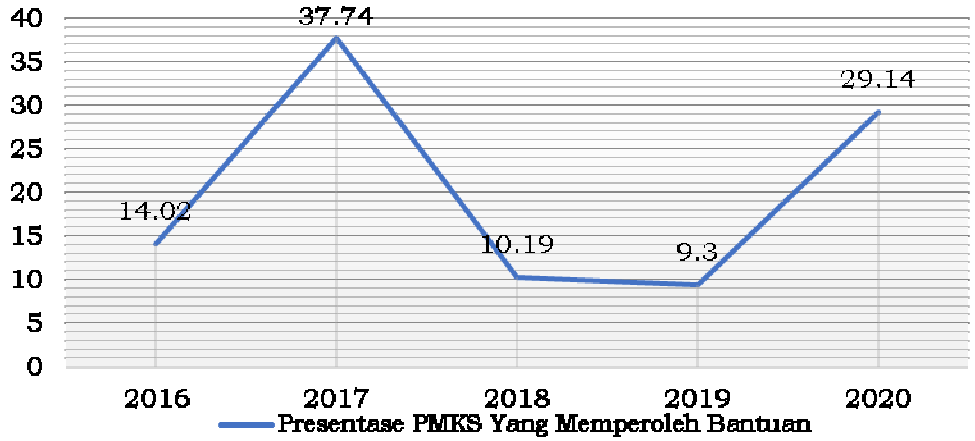

Gambar 2.30.
Pertumbuhan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial setiap tahun secara garis besarnya mengalami fluktuatif (berubah-ubah), meskipun sempat terjadi kenaikan pada tahun 2017, namun jika dibandingkan antara tahun basis dengan tahun akhir maka dapat diambil kesimpulan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 14,02%, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 yaitu menjadi 37,74%. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 sehingga persentase penerima bantuan sosial menjadi 10,19% hal ini dikarenakan sedikitnya populasi PMKS di Kabupaten Blitar dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 9,3%. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan social mengalami kenaikan drastis menjadi 29,14%. Kenaikan drastis ini dikarenakan banyaknya masyarakat terdampak covid-19 yang mendapatkan bantuan sosial.

3. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah

dalam menangani masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

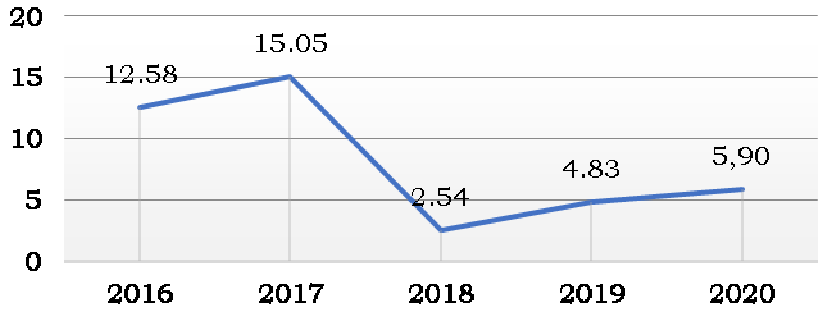

Gambar 2.31.
Pertumbuhan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase penanganan penyandang masalah sosial di Kabupaten Blitar setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan menurun, meskipun sempat terjadi kenaikan, namun jika dibandingkan antara tahun basis dengan tahun akhir diperoleh kesimpulan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 12,58%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu menjadi 15,05%. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 2,54%, kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 yaitu menjadi 4,83% dan pada tahun 2020 mengalami kenaik menjadi 5,90%. Rata-rata pertumbuhan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial setiap tahunnya sebesar 8,80%. Rata-rata pertumbuhan tersebut terbilang cukup rendah, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih pada tahun berikutnya agar pertumbuhan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat lebih stabil.

G. Tenaga Kerja

Pembahasan berikutnya adalah pada aspek ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Blitar. Angka TPT ditargetkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Data menunjukkan bahwa angka TPT belum menyentuh level yang diharapkan dan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tiga tahun pertama, data menunjukkan kecenderungan yang justru meningkat yakni pada 2016 hingga pada periode 2018. Peningkatan jumlah TPT pada periode awal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada 2019 jumlah TPT Kabupaten Blitar berhasil ditekan sebesar 0,33% hingga pada angka 3,05%. adapun penurunan TPT yang terjadi terakhir dapat dimaknai bahwa terjadi penurunan jumlah pengangguran dalam jumlah yang signifikan atau sekitar 1.343 orang. Namun pada tahun 2020, TPT yang diperoleh Kabupaten Blitar jumlahnya kembali meningkat menjadi 3,82% atau naik sebesar 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor pandemi Covid-19 secara luas berimbas pada perekonomian termasuk di dalamnya kesempatan kerja masyarakat. kenaikan ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Blitar saja, tapi secara umum juga terjadi di seluruh Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya meskipun pada tahun 2021 TPT di Kabupaten Blitar mengalami penurunan sebesar 0,16% dibandingkan tahun 2020 menjadi 3,66%, namun angka TPT dimaksud masih terbilang tinggi. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	Orang	894,202	898,121	917,177	922,939	928,291	933,473
Angkatan Kerja	Orang	606,121	638,135	647,606	673,074	657,595	657,544

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,78	71,05	70,61	72,93	70,83	70,44
Tingkat Pengangguran terbuka	%	2,73	2,99	3,38	3,05	3,82	3,66
Pencari Kerja Terdaftar	Orang	5,019	6,515	6,255	7,051	1,702	
Penempatan	Orang	3,792	4,784	5,203	5,922	1,537	
Jumlah Penganggur	Orang	16,537	19,085	21,886	20,543	25,134	24.072
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Rp	1.405.000	1.520.920	1.653.384	1.801.046	1.954.705	2.004.705

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022

Sementara pada sisi upah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam lima periode terkahir. pada 2016 jumlah upah minimum Kabupaten Blitar telah mencapai Rp.1.405.000,00 Kemudian meningkat terus hingga tahun 2021 UMK yang dimiliki Kabupaten Blitar adalah sebesar Rp.2.004.705,00.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 5 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut tahun 2016-2021.

Tabel 2.23
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,49	3,53	3,72	2,4	2,13	2,67
2	Persentase partsipasi perempuan di lembaga swasta	29,17	37,23	14,35	19,87	18,31	22,90
3	Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	
4	kekerasan terhadap perempuan dan	84	85	102	122	64	80

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	anak						
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	77	92,94	85,29	88,52	90,62	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

1. Persentase Pertisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan indikator yang mengukur mengenai jumlah persentase perempuan yang turut aktif terlibat dalam urusan pemerintah daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2016-2021.

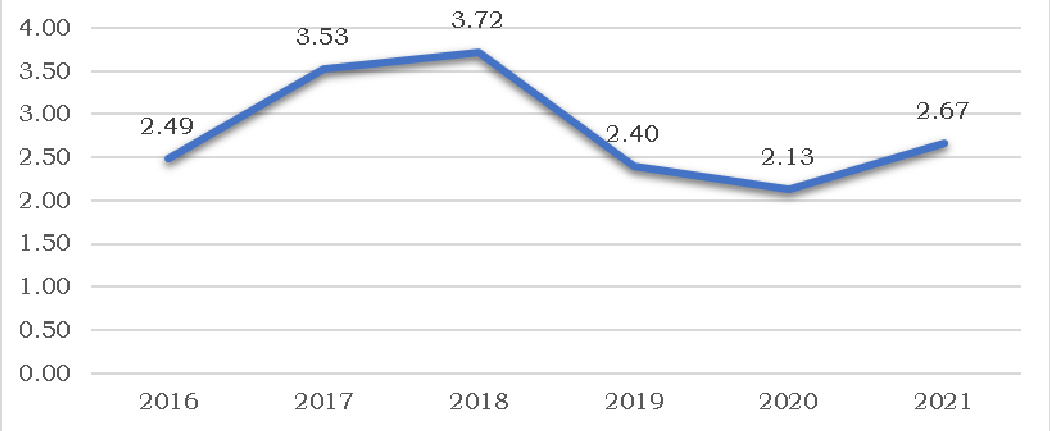

Gambar 2.32.
Pertumbuhan Persentase Partisipasi Perempuan
Di Lembaga Pemerintah

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan persentase partisipasi perempuan setiap tahun secara garis besarnya memiliki kecenderungan menurun. Meskipun pada grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang menurun. Pada tahun 2016 jumlah

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 2,49%, kemudian mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar masing-masing 3,53% dan 3,72%. Namun pada 2019 dan 2020 persentasenya menunjukkan angka penurunan sebesar 2,4% dan 2,13%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali hingga menjadi 2,67%. Angka tersebut dapat terbilang relatif kecil, maka dari itu pada tahun berikutnya perlu lebih melibatkan perempuan pada urusan di lembaga pemerintahan agar dapat terjadi peningkatan pada indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan adanya perhatian untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebagai Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender.

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan indikator yang mengukur mengenai jumlah persentase perempuan yang turut aktif terlibat dalam urusan di lembaga swasta. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2016-2021:

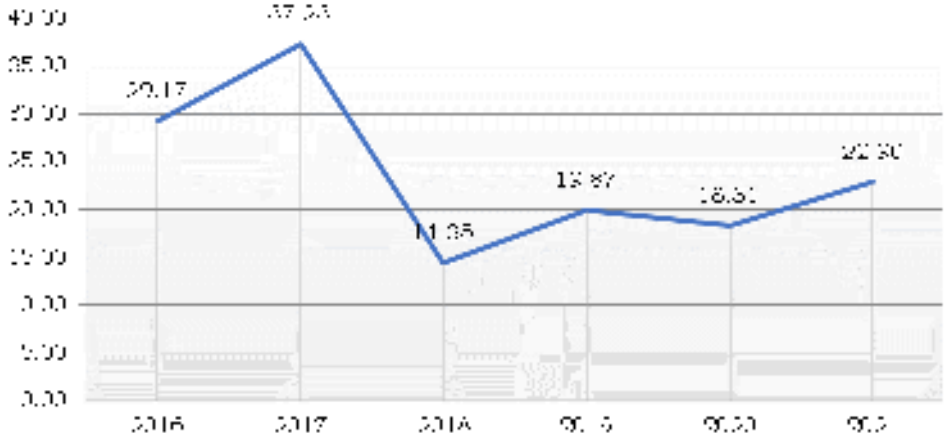

Gambar 2.33.

Pertumbuhan Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta setiap tahunnya secara garis besar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 29,17%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu menjadi 37,23%. Namun terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 yaitu menjadi 14,35%, meskipun demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali sebesar 19,87%. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 18,31%, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali hingga menjadi 22,90%. Angka tersebut dapat dibilang relatif rendah jika diukur melalui keberhasilan pemerintah daerah dalam memberdayakan perempuan di daerahnya. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dan dorongan yang lebih besar untuk melibatkan kaum perempuan dalam urusan di lembaga swasta agar terjadi peningkatan pada indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta serta terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dan mendapatkan kesempatan berkarir yang sama dengan laki-laki.

3. Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan indikator yang mengukur mengenai jumlah persentase pendampingan oleh pemerintah daerah dalam menyeleseikan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Pertumbuhan persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap. Hal ini berarti jumlah persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi

pada setiap tahunnya, yang mana pihak terkait telah berhasil mencapai maksimal dalam membantu korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Blitar dapat mempertahankan kinerjanya sehingga tetap berada pada angka 100%, sehingga rata-rata pertumbuhan persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya sebesar 0% sebab tidak terdapat perubahan dalam jangka waktu 5 tahun.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak adalah jumlah terjadinya kekerasanya terhadap perempuan dan anak pada periode tertentu. Data beberapa tahun menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun secara garis besarnya mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 84 kasus, kemudian mengalami kenaikan berturut turut pada tahun 2017 sampai 2019 yaitu menjadi 85, 102 dan 122 kasus. Lalu akhirnya pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sigifikan menjadi sebanyak 64 kasus. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi 80 kasus, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkelanjutan untuk kedepannya sehingga angka kasus kekerasan dapat terus dikurangi dan bahkan tidak terjadi lagi.



Gambar 2.34.
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan indikator yang mengukur mengenai persentase jumlah penyeleseian kasus yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan laporan mengenai perlindungan perempuan dan anak dari kasus tindak kekerasan. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

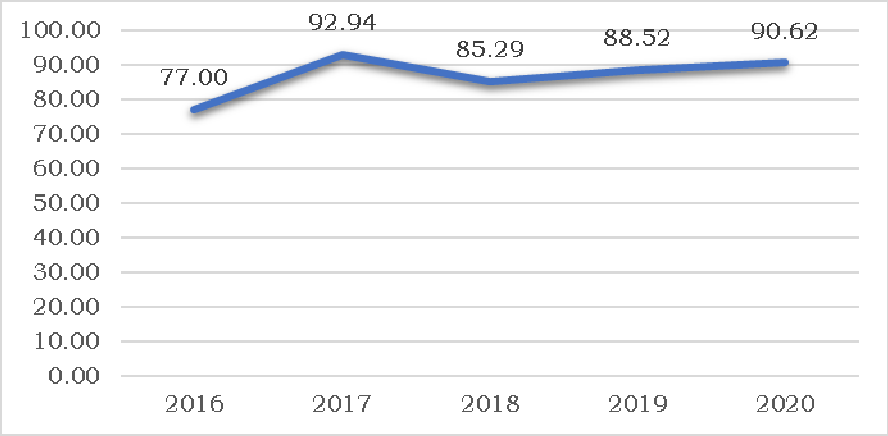

Gambar 2.35.
Pertumbuhan Penyeleseian Pengaduan Perlingan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase jumlah penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan setiap tahun secara garis besanya mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang meningkat. Pada tahun 2016 persentase jumlah penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 77%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 92,94%, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 85,29%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 88,52% dan 90,62%. Angka tersebut perlu ditingkatkan kembali setap tahunnya agar penyelesaian tindak kasus kekerasan dapat terseleseikan secara maksimal.

I. Pangan

Terdapat 2 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek pangan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.24
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pangan

No	NDIKATOR KINERJA	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Regulasi ketahanan pangan (regulasi)	0	0	0	1	0
2	Ketersediaan pangan utama (%)	80	114	110.14	94.76	101.96

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan pangan merupakan indikator mengenai ketersediaan regulasi atau peraturan pemerintah daerah dalam mengatur ketahanan pangan di dalam daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator regulasi ketahanan pangan:

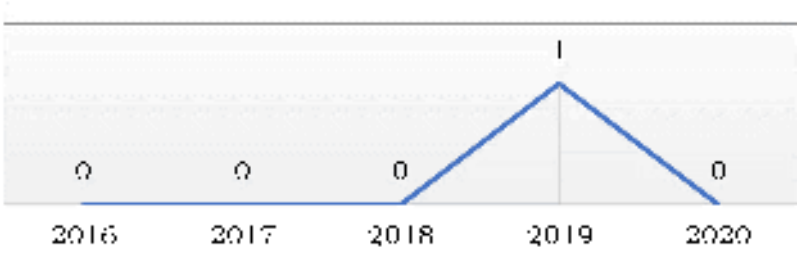

Gambar 2.36.
Pertumbuhan Regulasi Ketahanan Pangan
Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan regulasi ketahanan pangan setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat jika membandingkan antara tahun basis dengan tahun akhir yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak terdapat regulasi yang mengatur mengenai ketahanan pangan, sampai pada akhirnya pada tahun 2019 Pemerintah Daerah berhasil membuat regulasi mengenai ketahanan pangan dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 0. Peningkatan ketersediaan regulasi ketahanan pangan hanya terjadi pada tahun 2019

saja, sehingga rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak dapat diketahui.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama merupakan indikator yang mengukur mengenai persentase jumlah makanan pokok yang tersedia di dalam daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator ketersediaan pangan utama:

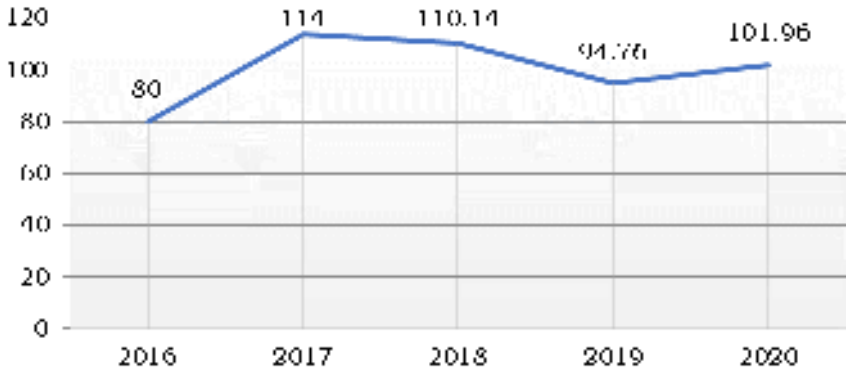

Gambar 2.37.
Pertumbuhan Ketersediaan Pangan Utama
Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021, Data Diolah

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase jumlah ketersediaan pangan utama setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang meningkat. Pada tahun 2016 persentase jumlah ketersediaan pangan sebesar 80%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu menjadi 114%. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan secara berturut-turut menjadi 110,14% dan 94,76% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 101,96%. Angka ini perlu ditingkatkan kembali setiap tahunnya agar terjadi kestabilan dalam ketersediaan pangan utama.

J. Pertanahan

Pada urusan Pertanahan terdapat 3 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.25
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pertanahan

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	40,6	41	42	43	50
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	-	Meningkat		Tetap	Meningkat	Meningkat
3	Penyelesaian Izin Lokasi	%	53	55	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Berikut pergerakan persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:

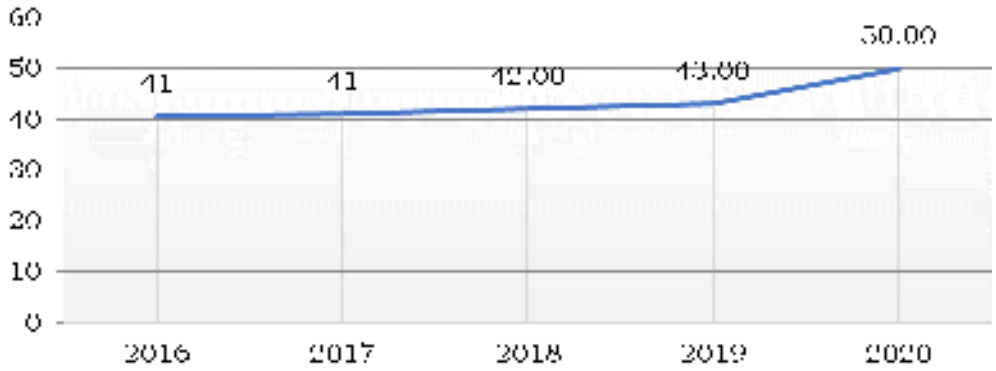

Gambar 2.38.
Pergerakan Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan grafik di atas, luas lahan bersertifikat di Kabupaten Blitar memang bergerak meningkat secara konsisten. Namun pergerakan peningkatannya masih cenderung lambat. Pada tahun 2016 persentase

lahan bersertifikat di Kabupaten Blitar adalah sebesar 40.6%. Kemudian merangkak naik menjadi 41%, 42%, 43% da 50% pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 secara berurutan. Meskipun kenaikan cukup tajam di tahun 2020 namun peningkatan kinerja di periode pembangunan ke depan pada indikator ini relatif *urgent.*

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Blitar pada periode 2016 sampai dengan 2019 tercatat tidak secara angka melainkan status. Berdasarkan LKPJ Kabupaten Blitar 2016-2019 tercatat bahwa penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 dan 2017 adalah meningkat, pada 2018 tetap dan pada 2019 kembali meningkat.

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Berikut pergerakan persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:

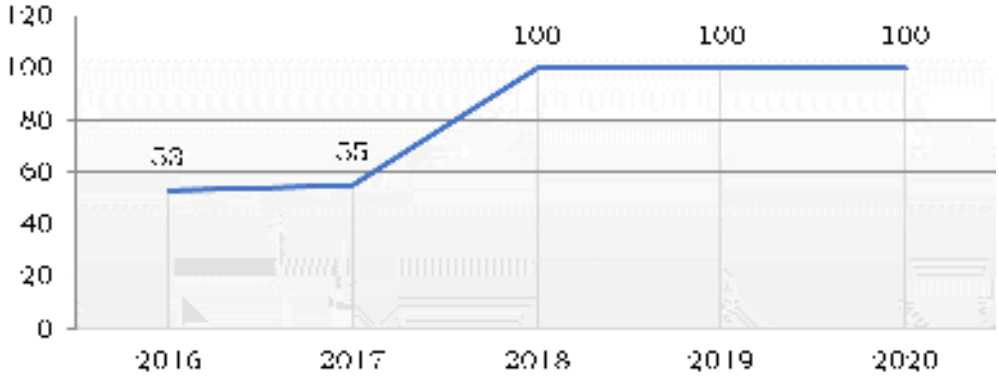

Gambar 2.39.
Pergerakan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Blitar meningkat secara signifikan selama 2016 sampai 2019. Diawali dengan besaran 53% di tahun 2016, kinerja indikator ini merangkak naik menjadi 55% di

tahun berikutnya dan secara signifikan menunju angka sempurna sebesar 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

K. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.26
Kinerja Pemerintah Daerah
Pada Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,87	67,79	69,5	69,9	66,70	59,95
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,1	70	66	66	56,67	55
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,1	97,78	98,73	99,44	98,22	87,46
4	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	42,5	43,5	50,21	50,66	50,69	43,04
5	Jumlah penanganan sampah (ton)	Ton	29.080,0	36.568,0	37.520,0	40.360,0	55.732	
6	Jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	TPS	30	45	52	56	61	
7	Pencemaran Status Mutu Air	%	4	3	3	3	3	
8	Persentase Penegakan hukum lingkungan	Persen (%)	100	100	100	100	100	

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. LKJIP 2021 Dinas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini merupakan hasil kalkulasi dari 3 komposit indeks lain yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Berikut pergerakan IKLH Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:

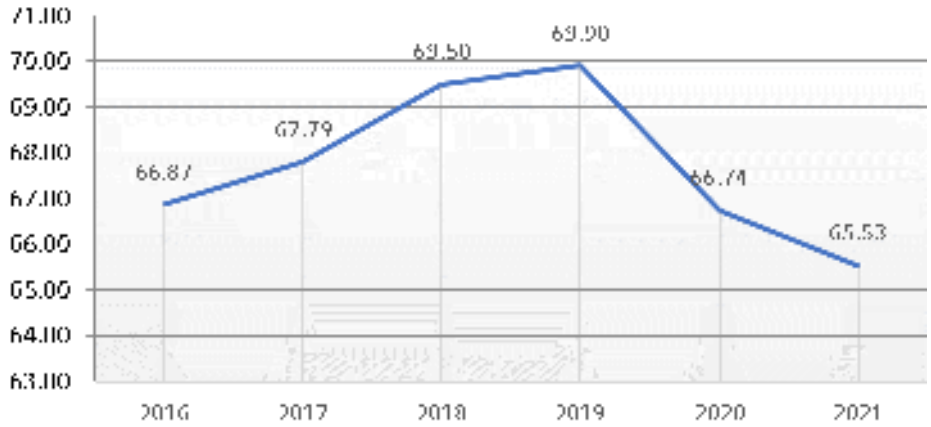

Gambar 2.40.
Pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan progres konsisten IKLH Kabupaten Blitar sepanjang periode pembangunan sebelumnya. Pada tahun 2017, IKLH Kabupaten Blitar adalah sebesar 67,79, kemudian meningkat menjadi 69,5 di tahun 2018 dan menjadi 69,90 di tahun 2019. Namun di tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi sebesar 65,53.

Memperhatikan capaian kinerj IKLH Kabupaten Blitar, sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 meskipun meningkat lalu mengalami sedikit penurunan pada dasarnya tetap berada pada *range* kategori yang sama, yaitu cukup. Dengan asumsi *effort* kinerja dan anggaran yang sama, maka berdasar hitungan *forecast* sederhana excel Kabupaten Blitar baru secara bulat beranjak dari kategori 'cukup' ke 'baik' pada tahun 2024 yaitu sekitar 75,5. Jika target pembangunan kedepan ada pada kategori 'baik', maka belum dibutuhkan *effort* kinerja lebih, cukup hanya mempertahankan kualitas kinerja seperti saat ini. Namun perlu komitmen dan *extra effort* jika yang ditargetkan adalah 'sangat baik' yang angka indeksnya adalah minimum 82.

Sebagaimana disebutkan pada paragraf awal sub bab ini bahwa IKLH terdiri dari 3 komposit, untuk memahami lebih detail pergerakan

kinerja indikator pembentuk IKLH Kabupaten Blitar, maka dapat diamati pada grafik berikut ini:

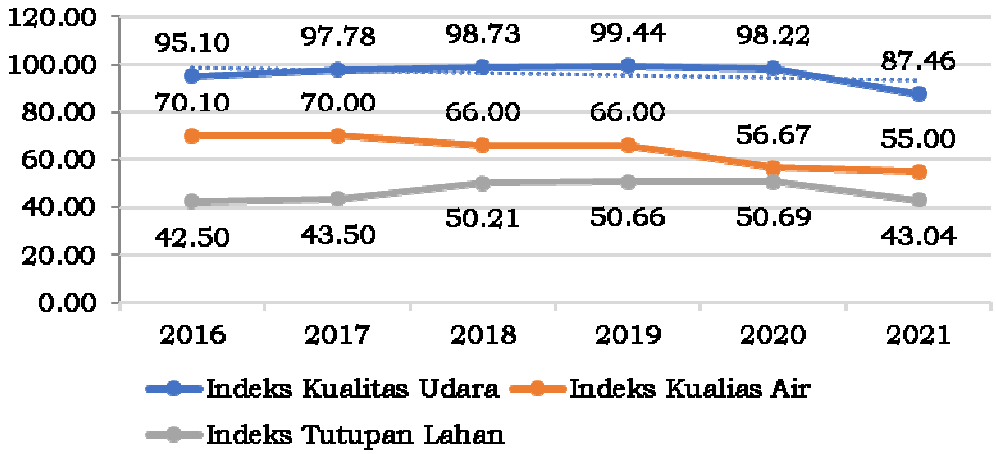

Gambar 2.41.
Pergerakan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 Indeks Kualitas Udara memulai periode dengan angka 95,10, yang artinya masuk kategori 'sangat baik'. Indeks ini kemudian konsisten meningkat hingga akhirnya menyentuh 99,44 di tahun 2019 dan kemudian turun menjadi 98,22 di tahun 2020 dan 87,46 ditahun 2021. Untuk Indeks tutupan lahan memulai dari kategori 'kurang' di tahun 2016 dan 2017 (42,5 dan 43,5, berurutan) kemudian merangkak naik kategori menjadi 'cukup' di tahun 2018 yaitu 50,21 dan 2019 yaitu 50,66 dan meningkat menjadi 50,69 di tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 43,04. Sama sekali berbeda dengan dua indikator sebelumnya, Indeks Kualitas Air (IKA) malah bergerak dari kategori 'sangat baik' di 2016 dan 2017 menjadi 'baik' di sisa tahun periode pembangunan sebelumnya. Lebih detail, pada awalnya di tahun 2016 IKA kabupaten Blitar berada di angka 70,1 dan pada 2017 berada di angka 70, kemudian tergelincir turun menjadi 66 di tahun 2018 dan 2019 lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 56,67

dan 55. Penyebab penurunan indeks kualitas air khususnya di tahun 2019 ke 2021 adalah salah satunya karena limbah rumah tangga belum terolah dengan sempurna dan adanya penambahan limbah menyebabkan banyaknya limbah tidak terolah dan terjadinya peningkatan pencemaran air sehingga hal ini perlu diselesaikan dengan langkah seperti pembangunan IPAL untuk Limbah Air dan sebagainya.

2. Jumlah Penanganan Sampah (Ton)

Indikator ini mengukur jumlah ton sampah yang tertangani dalam satu tahun. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini:

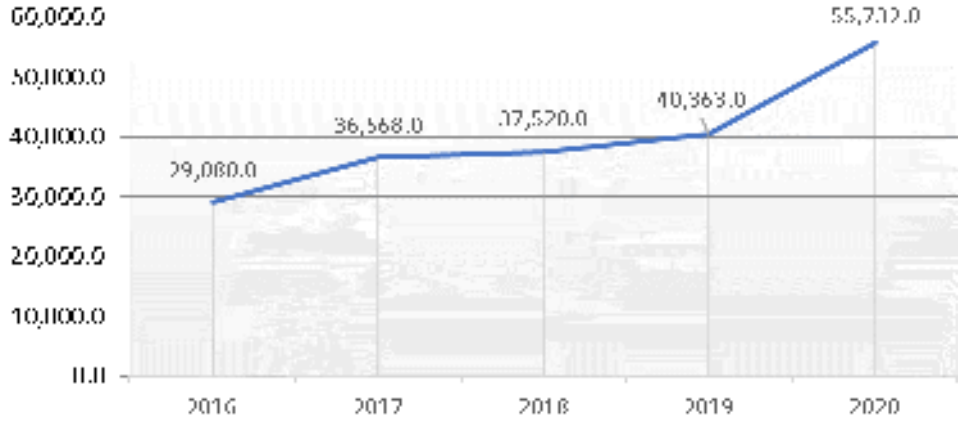

Gambar 2.42.
Pergerakan Jumlah Penanganan Sampah di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada gambar di atas, kembali terlihat konsistensi peningkatan kinerja penanganan sampah di Kabupaten Blitar. Bermula di angka 29.080 ton di 2016, penanganan sampah di kabupaten Blitar meningkat secara signifikan setahun berikutnya menjadi 36.568 ton. Kemudian di tahun 2018 terjadi sedikit peningkatan menjadi 37.520 ton dan kembali melompat di 2019 dan 2020 menjadi 40.363 ton dan 55.732 ton.

3. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Berikut tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kabupaten Blitar terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:

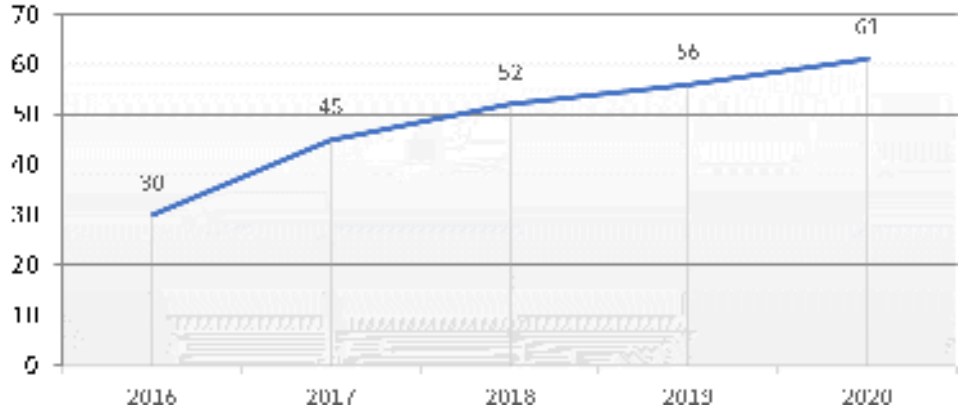

Gambar 2.43.
Pergerakan Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Jumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kabupaten Blitar tumbuh secara pogresif sepanjang tahun 2016-2020. Tercatat ada sejumlah 30 titik di tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 45 titik setahun berikutnya, lalu meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 52 titik di tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi 56 titik hingga akhirnya kokoh di angka 61 titik di tahun 2020.

4. Pencemaran Status Mutu Air

Indikator ini diukur dengan satuan persentase. Berikut pencemaran status mutu air Kabupaten Blitar tahun 2016 sampai dengan 2020:

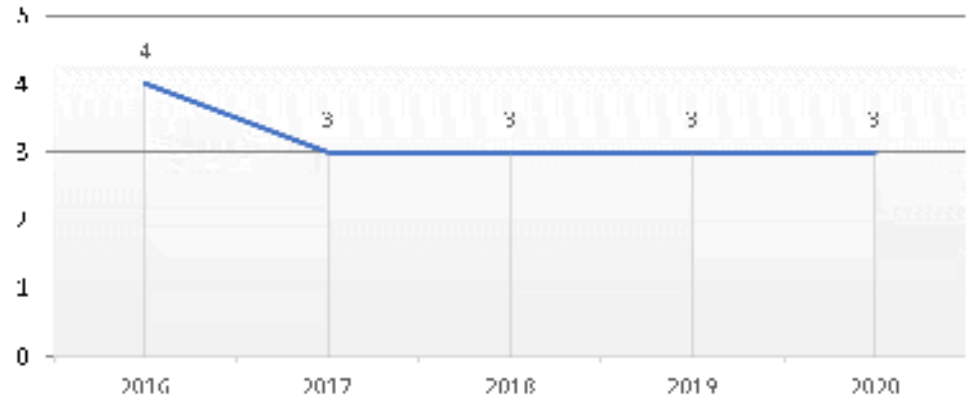

Gambar 2.44.
Pergerakan Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Persentase pencemaran menunjukan kecenderungan menurun. Lebih detil, sebenarnya penurunan hanya terjadi pada 2017 dimana berangkat dari angka 4% di 2016 kemudian menurun menjadi 3% di 2017. Sampai dengan 2019 dan 2020 angka 3% tersebut bertahan sepanjang periode terkait.

5. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan

Indikator ini mengukur proporsi perbandingan penegakan hukum lingkungan terhadap jumlah pelanggaran hukum lingkungan yang ada. Merujuk pada LKPJ Kabupaten Blitar periode 2016-2020, kinerja pada indikator ini konsisten pada angka 100% sepanjang periode tersebut. Artinya, untuk periode kedepan hal ini sudah tidak menjadi isu, dan hanya perlu dipertahankan.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan untuk melakukan pengadministrasian kependudukan dan pencatatan demografi penduduk. Urgensi dari urusan ini yakni melihat seberapa tinggi demografi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar yang nantinya dapat menjadi database penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib rutin yang berhubungan erat dengan Kemendagri. Hal ini dimaksudkan bahwa urusan kependudukan merupakan urusan mendasar yang menjadi tolok ukur kebijakan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional guna mencapai Indonesia yang sejahtera.

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blitar yang bersifat rutin dan kontinyu memiliki andil dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan menjamin

masyarakat memiliki identitas dan keterangan secara individu. Pengukuran terhadap penjaminan data identitas dan administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar adalah dengan indikator Persentase Kepemilikan KTP dan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran. 2 (dua) indikator ini menjadi parameter bagaimana Kabupaten Blitar tertib untuk mengadministrasi data berkaitan dengan pelaksanakaan pencatatan kependudukan. Berdasarkan data yang telah *collecting* maka dua indikator tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut:

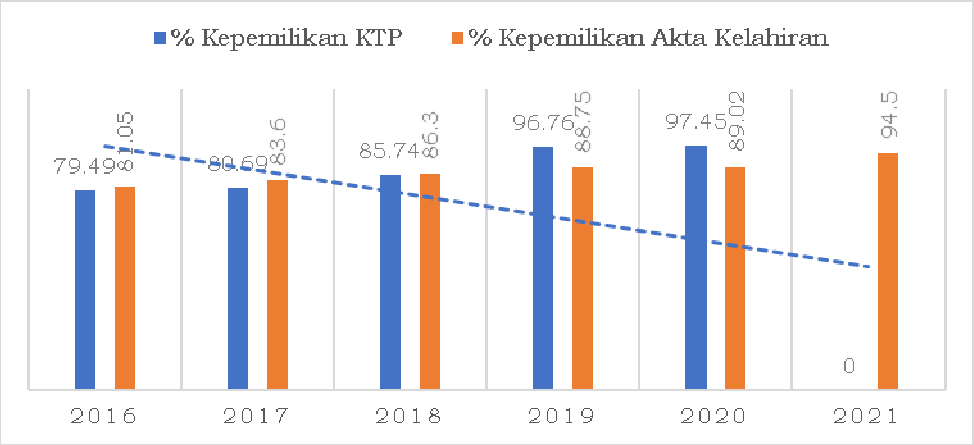

Gambar 2.45.
Parameter Pencapaian
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan Data diatas dapat dilihat bahwa rata rata untuk parameter Persentase Kepemilikan KTP hingga akhir tahun 2020 telah mencapai angka 97,45% dengan artian bahwa hampir seluruh masyarakat Kabupaten Blitar telah memiliki identitas KTP dan hanya tersisa 2,55% yang belum memiliki identitas KTP. Terlepas identitas tersebut adalah E-KTP namun secara administratif setidaknya telah ada data *record* sebesar 97,45% data penduduk.

Sementara itu untuk parameter Persentase kepemilikian Akta kelahiran di Kabupaten Blitar 94,50% Penduduk Kabupaten Blitar telah memiliki identitas akta kelahiran dan secara tren mulai tahun 2016-2020

terus mengalami kenaikan. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang cukup penting dikarenakan aktivitas bekerja, pendidikan dan lain-lain memerlukan dokumen tersebut. Sementara ditahun selanjutnya Kabupaten Blitar masih harus memenuhi sisa 10,98% agar seluruh penduduk memiliki akta kelahiran. Konflik umum yang terjadi adalah capaian kepemilikan KTP dan akta kelahiran seharusnya adalah setimbang karena salah satu data dalam KTP adalah KK yang mendasari pada Akta Kelahiran. Maka beberapa penduduk secara subjektif memberikan penanggalan tersendiri.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terdapat 9 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7	8	8	8	9	9
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9	20	20	20	20	20
3	Jumlah LSM	22	172	217	217	217	
4	LPM Berprestasi (unit)	2	6	8	10	14	
5	PKK aktif (unit)	271	271	271	271	271	
6	Posyandu aktif (unit)	1.468	1.469	1.469	1.470	1.470	
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta)	3.035,0	5.577,9	3.300,0	3.990,6	3.991	
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Juta	343	517,21	520,16	1.229,50	472,9	
9	Jumlah Bumdes	220	220	220	220	220	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan indikator yang mengukur mengenai rata-rata jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pembinaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar kelompok masyarakat tersebut dapat lebih mandiri. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).



Gambar 2.46.
Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sejumlah 7 kelompok, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 sebanyak 8 kelompok. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlahnya tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sejumlah 8 kelompok lalu di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dan menjadi 9 kelompok. Rata-rata pertumbuhan rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPLM) dalam jangka 4 tahun adalah sebesar 4,80%. Pada tahun berikutnya diperlukan usaha yang lebih agar terjadi peningkatan jumlah rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat yang diberdayakan dapat semakin banyak.

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan indikator yang menghitung mengenai rata-rata jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan oleh PKK. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

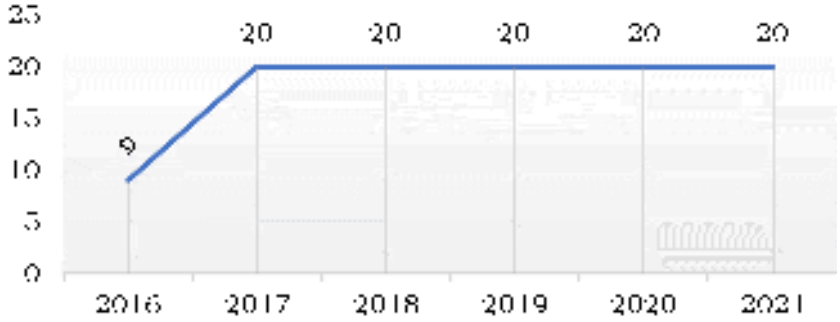

Gambar 2.47.
Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok PKK
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 9 kelompok. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tetap sebanyak 20 kelompok. Rata-rata pertumbuhan jumlah rata-rata kelompok binaan PKK dalam 4 tahun adalah sebesar 40,70%.

3. Jumlah LSM

Jumlah LSM adalah indikator yang mengukur mengenai perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam suatu daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah LSM.

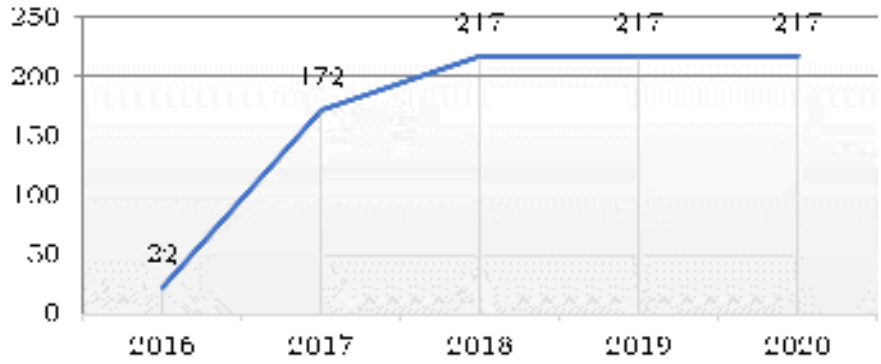

Gambar 2.48.
Pertumbuhan Jumlah LSM

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dketahui bahwa pertumbuhan jumlah LSM setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah LMS di Kabupaten Blitar sebanyak 22, kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu penambahan jumlah LSM menjadi 172 LSM. Pada tahun 2018 jumlah LSM kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi sebanyak 217 LSM dan jumlahnya tetap bertahan hingga tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan jumlah LSM dalam jangka waktu 4 tahun adalah sebesar 235,9%. Angka tersebut cukup tinggi sebab kenaikan jumlah LSM di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan yang signifikan.

4. LPM Berprestasi

LPM berprestasi merupakan indikator yang menjelaskan mengenai banyaknya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang

berprestasi dalam keberhasilannya memberdayakan masyarakat. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator LPM berprestasi.



Gambar 2.49.
Pertumbuhan LPM Berprestasi
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan LPM berprestasi setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2016 jumlah LPM yang berprestasi sebanyak 2 unit. Kemudian pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami peningkatan secara berturut-turut yaitu masing-masing sebanyak 6, 8, 10 dan 14. Rata-rata pertumbuhan LPM berprestasi dalam jangka waktu 4 tahun adalah sebesar 86,10%.

5. PKK Aktif

PKK aktif merupakan indikator yang menjelaskan mengenai jumlah kelompok Pemberdayaan Kelompok Keluarga (PKK) yang masih aktif dalam kegiatannya pada suatu daerah. Pertumbuhan jumlah PKK aktif setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami perubahan jumlah PKK yang masih aktif, tercatat sebanyak 271 unit PKK masih aktif di Kabupaten Blitar.

Rata-rata pertumbuhan jumlah PKK aktif dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 0%, sebab tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

6. Posyandu Aktif

Posyandu aktif merupakan indikator yang mengukur jumlah posyandu yang masih aktif membantu melayani kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator Posyandu aktif.



Gambar 2.50.
Pertumbuhan Posyandu Aktif
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui pertumbuhan jumlah posyandu yang masih aktif setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah posyandu aktif sebanyak 1.468 unit, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 1.469 unit dan tidak mengalami perubahan di tahun 2018. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 1.470 unit dan di tahun 2020 angka masih sama. Rata-rata pertumbuhan jumlah posyandu dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 0,04%.

7. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat merupakan besarnya jumlah dana yang direncanakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat:

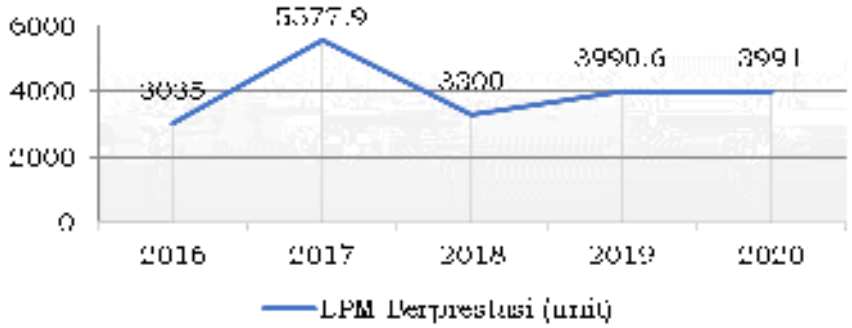

Gambar 2.51.
Pertumbuhan Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat setiap tahun secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang meningkat. Pada tahun 2016 jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 3.035 juta rupiah swadaya masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 5.577,9 juta rupiah, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.300 juta rupiah. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 3.990,6 dan 3.991 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan swadaya masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 21,30%.

8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat merupakan indikator mengenai sejumlah dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

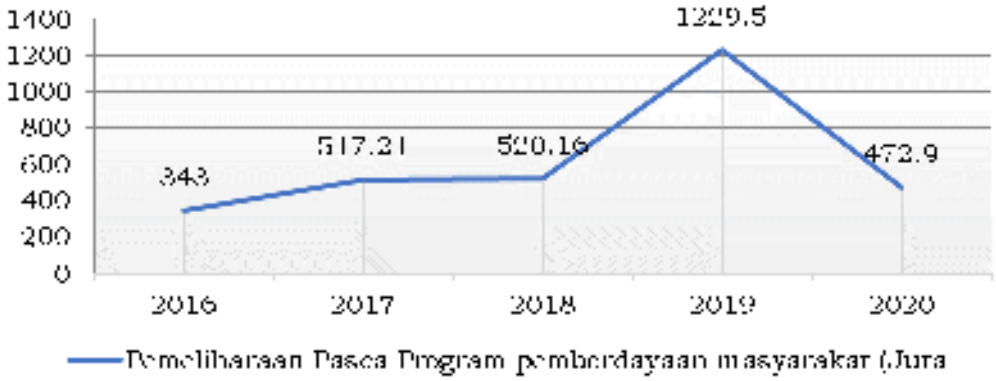

Gambar 2.52.
Pertumbuhan Pemeliharaan
Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat. Hal ini disebabkan karena selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 anggaran dana untuk pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sebesar 343 juta rupiah. Kemudian terjadi peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 sebesar masing-masing 517,21 juta rupiah, 520,16 juta rupiah, 1.229,5 juta rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 472,9. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 62,60%.

9. Jumlah Bumdes

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada periode tahun 2016 smapai 2020 Jumlah Bumdes Kabupaten Blitar sama yakni 220.

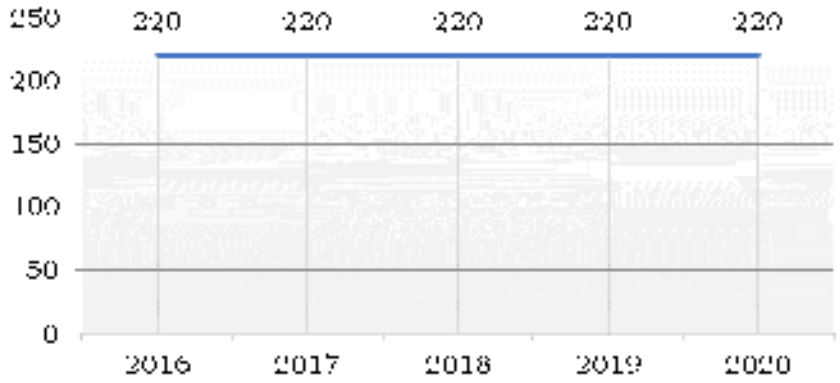

Gambar 2.53.
Jumlah Bumdes Kabupaten Blitar Tahun 2016-202
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat 8 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.28
Kinerja Aspek Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	0,75	0,71	0,75	1,00	0,63
2	Rasio akseptor KB	13,45	16,57	13,88	12,51	13,2	12,78
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	70	75.85	76.03	77.18	78.46	

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Pasangan Usia Subur	234.604	236.634	242.062	245.702	252.927	
5	TFR /total fertility rate atau angka kelahiran	2,34	2,26	2,19	2,12	2,03	
6	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern) mCPR	75,42	75,84	76,01	77,18	78,47	78,97
7	Unmet Need KB	22.400	21.570	24.448	23.834	21.514	
8	Data ASFR	NA	NA	NA	NA	9,82	8,42

Sumber: 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020;
2. LKPJ Bupati Tahun 2021;
3. dan LKJIP 2021 DPPKBP3A.

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator yang menghitung jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh satu keluarga. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rata-rata jumlah anak per keluarga:

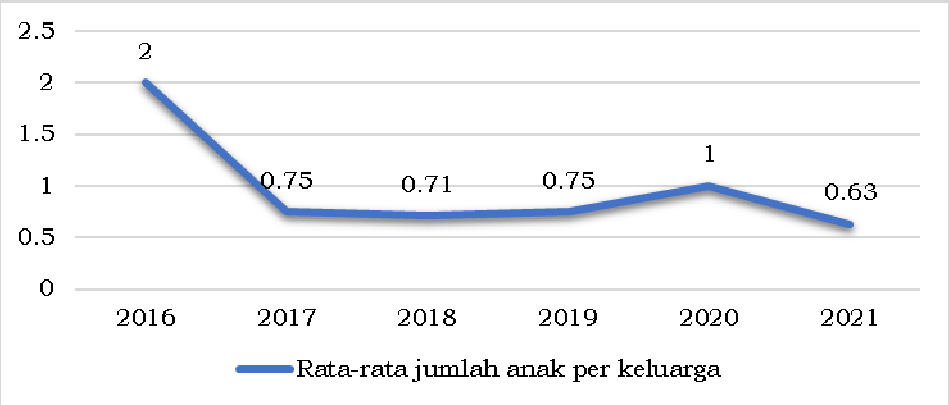

Gambar 2.54.
Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata jumlah anak per keluarga setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan fluktuatif (berubah-ubah). Pada tahun 2016 rata-rata

jumlah anak per keluarga sebanyak 2 orang anak, kemudian jumlah tersebut menurun secara berturut-turut di tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 0,75 dan 0,71. Pada tahun 2019 rata-rata jumlah anak per keluarga kembali mengalami peningkatan menjadi 0,75. Kemudian pada tahun 2020 rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami kenaikan kembali menjadi 1. Hal ini dikarenakan jumlah pasangan subur yang mengikuti program KB setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun demikian rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2021 kembali turun menjadi 0,63.

2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rasio akseptor KB:

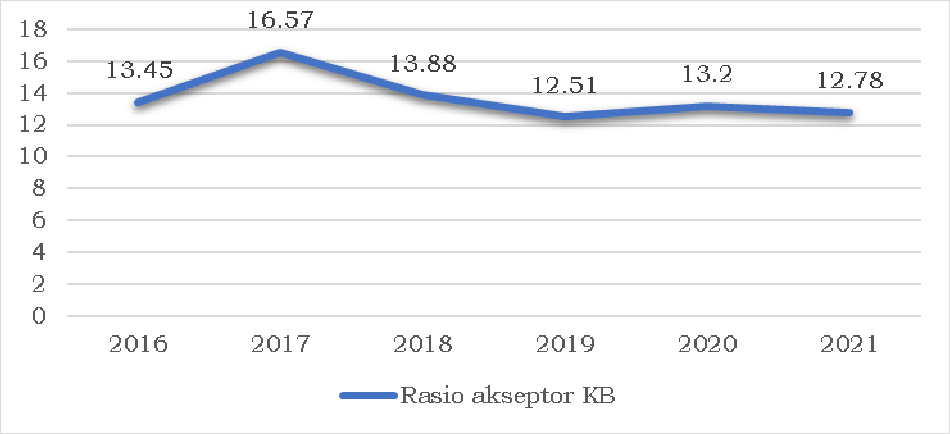

Gambar 2.55.
Pertumbuhan Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio akseptor KB setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan fluktuatif. Meskipun pada grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang menurun. Pada tahun 2016 rasio akseptor KB tercatat sebesar 13,45, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,57. Namun pada pada tahun setelahnya terjadi penurunan secara berturut-turut pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 13,88 dan 12,51. Pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yaitu 13,1%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 12,78%.

3. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator cakupan peserta KB aktif.

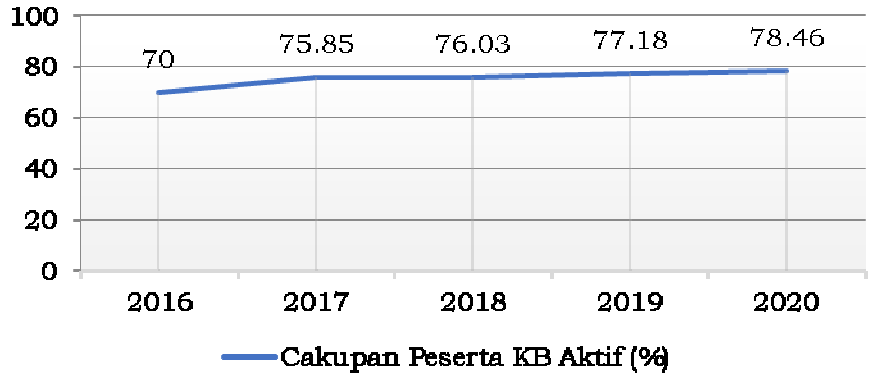

Gambar 2.56.

Pertumbuhan Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan cakupan peserta KB aktif setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan secara berkala. Pada tahun 2016 persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 70%, kemudian di tahun berikutnya mengalami kenaikan secara terus-menerus hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 jumlah cakupan peserta KB aktif sebesar 75,85%, di tahun 2018 sebesar 76,03%, dan pada tahun 2019 sebesar 77,18%. Pada tahun 2020 jumlah cakupan peserta KB aktif teteap konsistesn mengalami kenaikan yaitu 78,46%. Pada tahun terakhir semakin mengalami kenaikan karena adanya sosialisasi pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

4. Jumlah Pasangan Usia Subur

Jumlah pasangan usia subur merupakan indikator mengenai jumlah pasangan suami istri yang masih memiliki peluang untuk memiliki anak. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah pasangan usia subur.

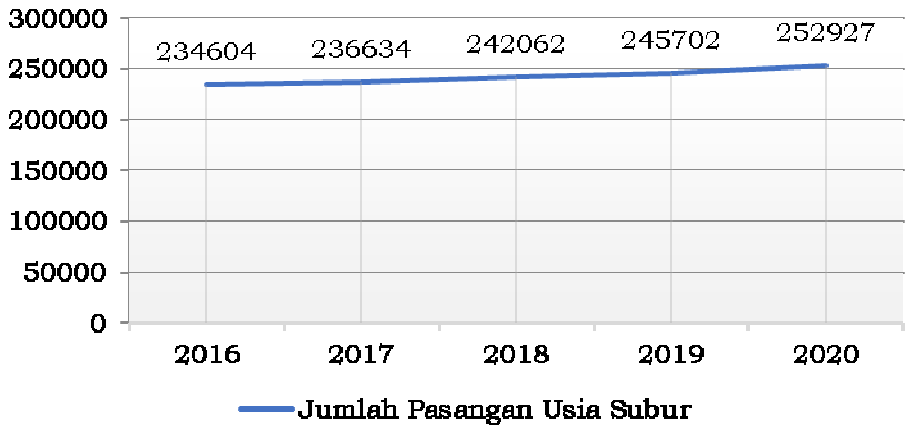

Gambar 2.57.

Pertumbuhan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dalam jangka waktu lima tahun, jumlah pasangan usia subur mengalami pertumbuhan yang konsisten meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pasangan usia subur mencapai 234.604 ribu dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 236.634 ribu, kemudian pada tahun 2018 mencapai 242.062 ribu. Lalu pada tahun 2019 tetap mengalami peningkatan mencapai 245.702 ribu dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan tinggi mencapai 252.927 ribu. Pada tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi dikarenakan naiknya pernikahan di Kabupaten Blitar. Meskipun jumlah pasangan usia subur meningkat, namun pertumbuhan penduduk masih dapat ditekan jika para pasangan usia subur menerapkan program keluarga berencana.

5. Presentase *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran

TFR (*Total Fertility Rate*) atau angka kelahiran total adalah indikator angka yang menunjukan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya di Kabupaten Blitar. Untuk melihat capain kinerja indikator TFR dapat dilihat melalui grafik berikut:

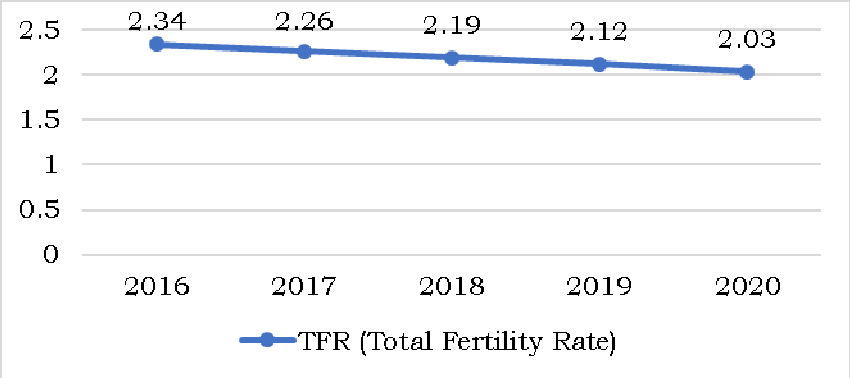

Gambar 2.58.

Capaian Indikator TFR (Total Faterity Rate) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dalam lima tahun terakhir antara 2016-2020 capaian kinerja pemerintah Kabupaten Blitar pada indikator *Total Faterity Rate* cukup bagus, dimana angka kelahiran menurun setiap tahunnya hal ini membuktikan bahwa perkembangan penduduk dapat dikendalikan terbukti dari tahun 2016 ada sebanyak 2,34% angka kelahiran kemudian pada tahun 2017 menjadi 2,26% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,19% dan tren menurun tetap terjadi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,12% dan 2,03% angka kelahiran atau TFR. Hal ini membuktikan bahwa kinerja perangkat daerah Kabupaaten Blitar sudah cukup bagus dalam pengendalian penduduk.

6. Presentase mCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* atau Prevalensi Kontrasepsi Modern)

mCPR (*Modern Contraceptive Prevalance Rate* atau prevelensi kontrasepsi modern). Adalah proses jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern, seperti IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik, Pil dan Kondom. Untuk melihat capain kinerja indikator mCPR dapat dilihat melalui grafik berikut.

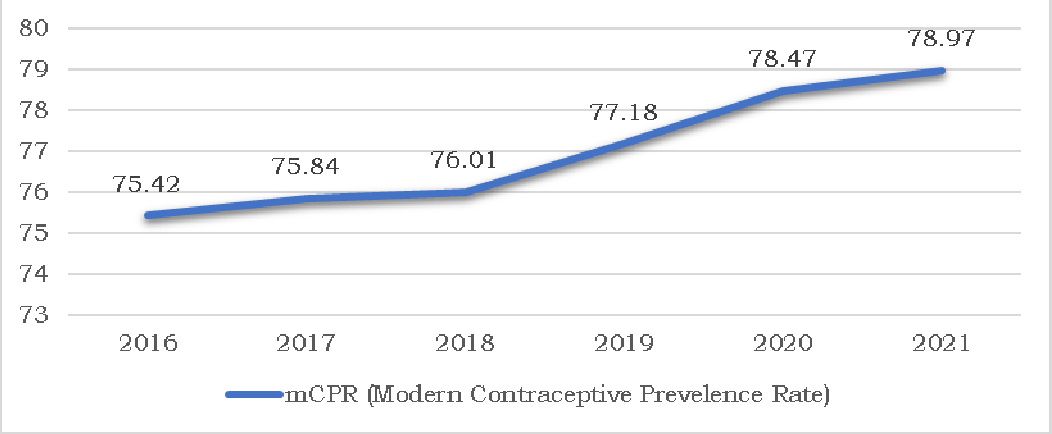

Gambar 2.59.
Capaian Indikator mCPR (Modern Contraceptive Prevelence Rate)
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Dalam enam tahun terakhir antara 2016-2021 capaian kinerja pemerintah Kabupaten Blitar pada indikator ini cukup bagus terbukti setiap tahunnya pengguna atau pemakai mCPR tiap tahuhunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ada sebanyak 75,42% pengguna mCPR kemudian naik lagi menjadi 75,84% pada tahun 2017, tren naik tetap terjadi pada tahun 2018 menjadi 76,01% pengguna kemudian naik lagi menjadi 77,18% pada tahun 2019 dan terus naik pada tahun terakhir menjadi 78,97% pasangan usia subur yang memakai mCPR.

7. Jumlah Unmet need KB

Unmet merupakan indikatari dimana Pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi tetapi bleum terlayani atau tidak ikut di Kabupaten Blitar. Untuk melihat capain kinerja indikator Unmeet Need KB dapat dilihat melalui grafik berikut.

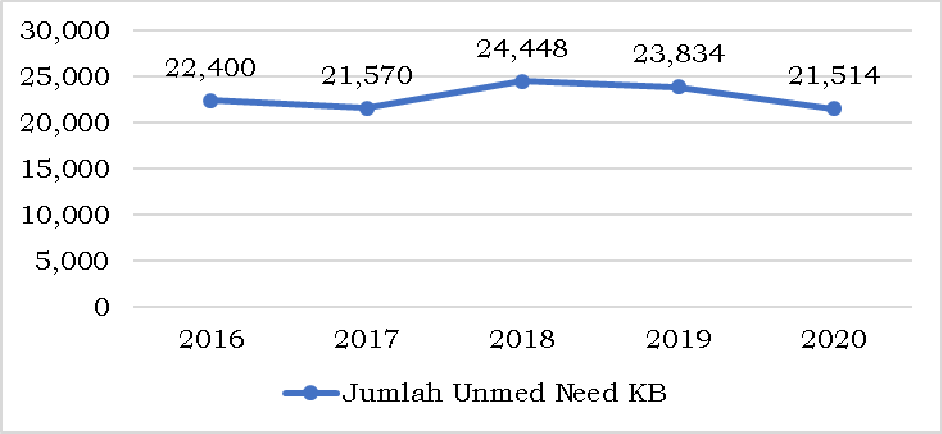

Gambar 2.60.
Capaian Indikator Unmet Need KB Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dalam kurun waktu dari 2016-2020 jumlah pasangan usia subur yang menggunakan metode unmet need KB mengalami tidak stabil (fluktuatif). Pada tahun awal 2016 ada sebanyak 22.400 orang pasangan usia subur yang menggunakan unmet Need KB. Kemudian mengalami penunutun menjadi 21.570 orang pada tahun 2017 penurunan ini dikarenakan PUS memakai cara lain seperti mCPR. Kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi 24.448 orang pasangan usia subur yang menggunakan unmet need KB lalu pada dua tahun terakhir mengalami penurunan menajadi 23.834 orang dan 21.512 orang pasangan usia Subur (PUS) yang menggunakan unmet need KB. Hal ini dikarenakan banyak PUS yang beralih menggunakan mCPR.

8. Presentase ASFR

ASFR merupakan indikator pengukur angka yang menunjukan jumlah kelahiran pada Wanita usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran. Indikator ini digunakan untuk mengukur usia subur atau pasangan usia subur yang melahirkan pada usian 15-19 tahun di Kabupaten Blitar. Pada indikator ini di tahun 2016-2019 tidak ada data, pada tahun 2020

baru ada data ASFR di Kabupaten Blitar sebanyak 9,82% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi hanya 8,42%.

O. Perhubungan

Pada urusan Perhubungan terdapat sedikitnya 9 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.29
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perhubungan
Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Jumlah	127.250	123.018	102.500	55.276	27.415	12.818
2	Rasio Ijin Trayek	Rasio	38,1	33,3	33,33	9,52	9,52	9,52
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah	12.262	13.017	14.348	14.840	16.597	10.432
4	Jumlah Angkutan Laut/Udara/Terminal	Jumlah	4	3	3	3	3	3
5	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	14.872	15.709	16.917	17.487	19.355	12.130
6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen (%)	17,5	17,1	15,1	15,1	14,25	14,00
7	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	Menit	60	50	50	40	40	
8	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	Rupiah	45.000 utk > 3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk > 3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk > 35.00 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	Rp. 45.000 utk JBB > 3.500 kg; Rp. 35.000 utk JBB < 3.500 kg dan Rp. 40.000 utk Kereta gandeng / tempel	45.000 utk > 3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	
9	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	Persen (%)	32,22	33,96	35,29	36,95	38,53	39,99

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini mengukur jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun dengan satuan 'orang'. Berikut pergerakan pertahun penumpang angkutan umum di Kabupaten Blitar:

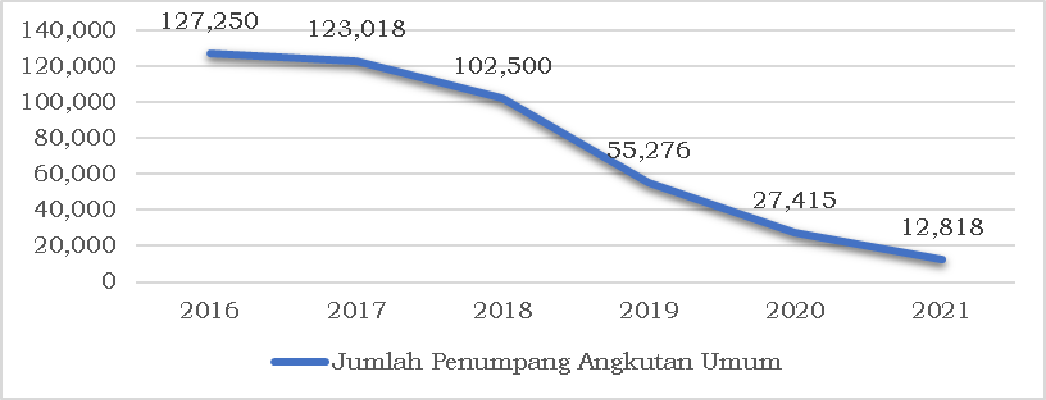

Gambar 2.61.
Pergerakan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum yang bergerak menurun. Pada tahun 2016 jumlah penumpang angkutan umum tercatat sebanyak 127.250 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 123.018 orang setahun berikutnya. Lalu pada tahun 2018 jumlah penumpang kembali menurun relatif besar menjadi 102.500 orang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan sangat drastis menjadi 55.276 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan sangat drastis karena dampak dari adanya pandemi covid-19 menjadi 27.416 dan kemudian pada tahun 2021 turun kembali menjadi hanya 12.818.

Jika diamati, fenomena ini dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, dari sisi ekonomi fenomena ini dapat dikatakan positif karena besar kemungkinan semakin tahun masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi yang artinya ada peningkatan daya beli setiap tahunnya. Kedua, jika dilihat dari sisi perhubungan konotasinya cenderung negatif sebab layanan angkutan umum yang ada belum mampu menurunkan minat masyarakat untuk bermobilisasi dengan kendaraan publik. Efek jangka panjang dari kecenderungan menggunakan kendaraan prbadi tentu tidak baik, potensi permasalahan

umum perkotaan seperti macet dan polusi bisa saja menjadi isu di masa depan jika pelayanan angkutan umum di Kabupaten Blitar tidak ditingkatkan.

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio Ijin Trayek merupakan perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan terhadap jumlah Kendaraan yang beroperasi. Berikut tabel rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Rasio Ijin Trayek Di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Ijin Trayek	Rasio	38.1	33.3	33.33	9.52	9.52	9,52

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berikut pergerakan kinerja uji KIR angkutan umum di Kabupaten Blitar.

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Blitar konsisten meningkat. Berada di angka 12.262 pengujian pada tahun 2016, jumlah uji KIR mengalami peningkatan menjadi 13.017 setahun berikutnya, kemudian kembali meningkat menjadi 14.348 di tahun 2018 lalu merangkak naik lagi di tahun 2019 menjadi 14.840. Lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 16.597, namun kemudian turun ditahun 2021 menjadi 10.432. Terjadinya penurunan jumlah KBWU yang lulus uji tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah KBWU sedangkan apabila dilihat dari persentase KBWU yang lulus uji laik jalan, maka terdapat peningkatan sebesar 0,25% dari tahun 2021.

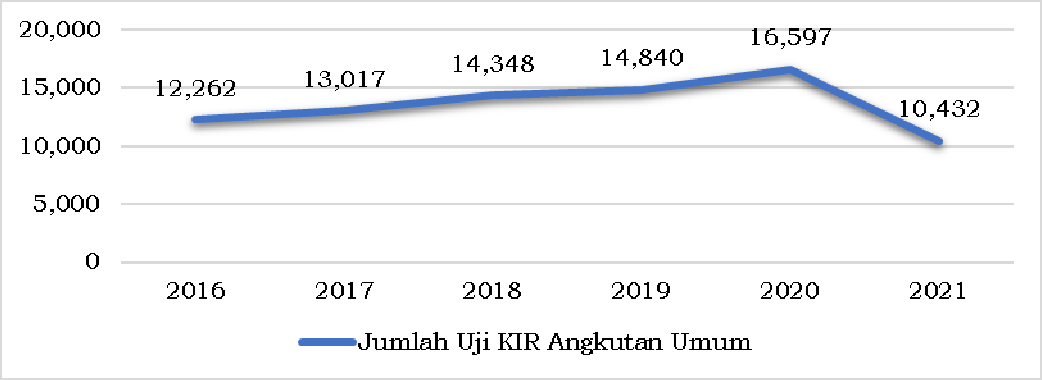

Gambar 2.62.
Pergerakan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

4. Jumlah Angkutan Laut/Udara/Terminal

Indikator ini secara sederhana membaca jumlah angkutan laut, udara secara akumulatif dalam setahun. Berdasarkan pada LKPJ tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagaiamana tersaji pada tabel 2.5, tercatat bahwa terjadi kecenderungan penurunan pada indikator ini. Di tahun 2016 jumlah angkutan laut/udara/terminal adalah sebesar 4, kemudian pada tahun 2017, 2018,2019, 2020 dan 2021 stagnan di angka 3.

5. Jumlah Angkutan Darat

Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator ini secara sederhana menghitung jumlah angkutan darat. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, jumlah angkutan darat di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 tecatat jumlah angkutan darat sebanyak 14.872 unit, kemudian meningkat setahun berikutnya menjadi 15.709 unit. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 16.917 unit, kokoh di angka 17.487 unit di tahun 2019. Dan tetap mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 19.355 unit, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12.130 unit. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir sampai dengan tahun 2021 yang berdampak pada usaha angkutan belum bergerak kearah yang makin membaik

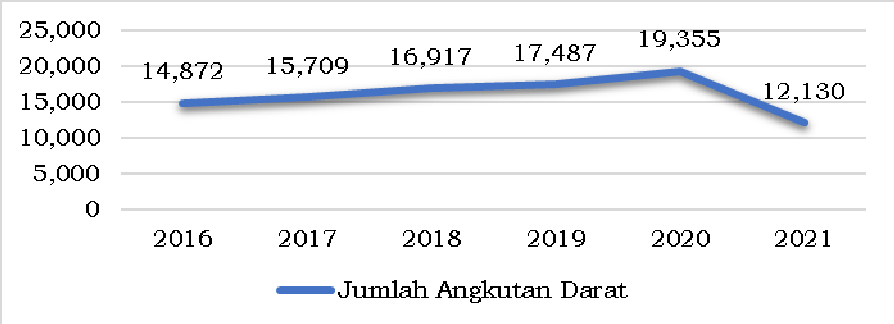

Gambar 2.63.
Pergerakan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

6. Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Lama Pengujian KIR

Kepemilikan KIR dihitung dengan satuan persentase yang membandingkan angkutan umum yang memiliki KIR terhadap total angkutan umum yang ada. Berikut pergerakan persentase tahunan kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Blitar:

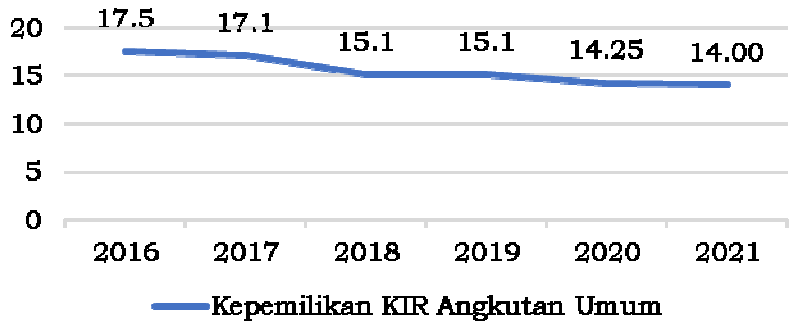

Gambar 2.64.
Pergerakan Persentae Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2016-2021 bergerak menurun. Pada tahun 2016 persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Blitar adalah sebesar 17,5%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 17,1% di tahun berikutnya turun kembali menjadi 15,1% dimana persentase ini bertahan sampa pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 14,25% dan 14,00%. Penurunan ini disebabkan dinas perhubungan tidak melakukan operasi secara keseluruhan ditambah pada tahun 2020 adanya pandemi covid-19.

Melihat kecenderungan kepemilikian KIR yang menurun dan disaat yang sama memiliki persentase yang relatif rendah tentu perlu menjadi catatan sendiri. Alasannya adalah, uji KIR merupakan rangkaian tes kelayakan kendaraan khususnya kendaraan umum untuk dapat beroperasi di jalan raya, jika lebih banyak angkutan yang tidak memiliki

KIR maka tidak ada jaminan mayoritas angkutan umum yang beroperasi saat ini berada dalam kondisi layak dan tentu meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Lama pengujian KIR di Kabupaten Blitar kian tahun semakin singkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

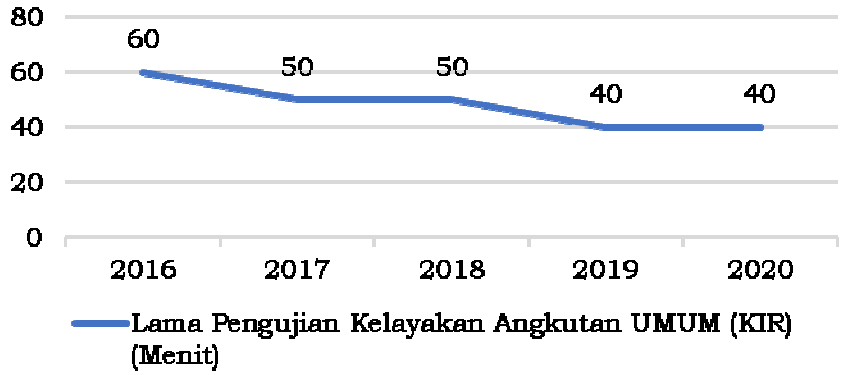

Gambar 2.65.
Pergerakan Lama Pengujian KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Melalui grafik di atas, dapat ditelaah bahwa proses pengujian KIR di Kabupaten Blitar diupayakan untuk semakin efisien dan semakin ringkas dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 selama 60 menit pengujiannya kemudian pada tahun 2017 dan 2018 selama 50 menit lama pengujian KIR dan pada tahun 2019 dan 2020 dipercepat lagi menjadi 40 menit, percepatan ini dilakukan untuk efisensi waktu pengecekan. Namun persentase kepemilikan KIR masih saja rendah. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, nampaknya persentase kepemilikan KIR masih relevan menjadi isu pada periode pembangunan ke depan.

7. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Secara umum biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kabupaten Blitar tidak berubah, hanya ada penambahan jenis pengujian saja di tahun 2019. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 tercatat sebesar Rp 45.000 untuk angkutan di atas 3.500 Kg dan Rp 35.000 untuk di bawah 3.500 Kg. Di tahun 2019 ada penambahan pengujan untuk Kereta Gandeng/Tempel

yaitu sebesar Rp 40.000, dimana untuk pengujian lainnya baik jenis maupun biaya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan jenis pengujuan, tercatat sebesar Rp 45.000 untuk angkutan di atas 3.500 Kg dan Rp 35.000 untuk di bawah 3.500 Kg.

8. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak rambu yang telah terpasang dalam satuan persentase. Berikut pergerakan persentase pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Blitar:

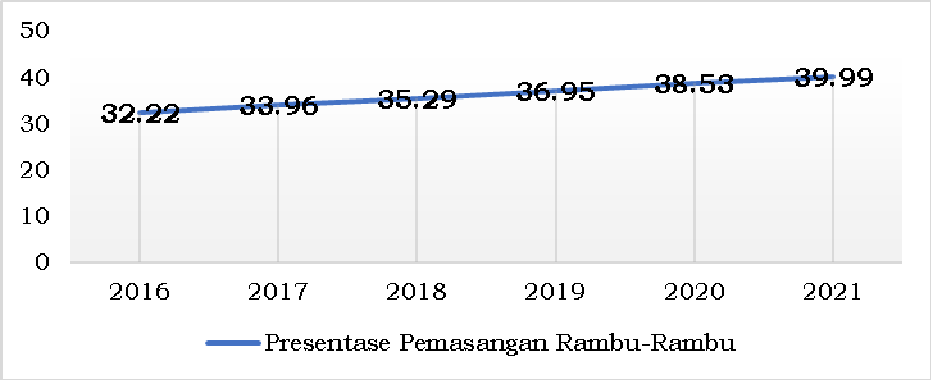

Gambar 2.66.
Pergerakan Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021
dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Pemasangan rambu di Kabupaten Blitar secara konsisten meningkat. Berawal di angka 32,22% pada tahun 2016, persentase pemasangan rambu di Kabupaten Blitar meningkat menjadi 33,96% di tahun 2017, lalu kembali meningkat di 2018 menjadi 35,39%, kemudian menjadi 36,95% di 2019 dan tetap mengalamai kenaikan menjadi 38,53% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 39,99%. Peningkatan ini terjadi karena upaya dinas Perhubungan Kabupaten Blitar setiap tahun berupaya untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara di ruas jalan umum Kabupaten Blitar.

P. Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program dapat membantu masyarakat dalam menampung informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi *e-government* sampai tingkat daerah. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing.

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Blitar memiliki 5 parameter yang telah dilakukan pada masa periode tahun lalu. 5 (lima) parameter ini yakni Rasio wartel/warnet Terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (buah), Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (statiun), Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/expo. Lebih detail pencapaian 5 parameter tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

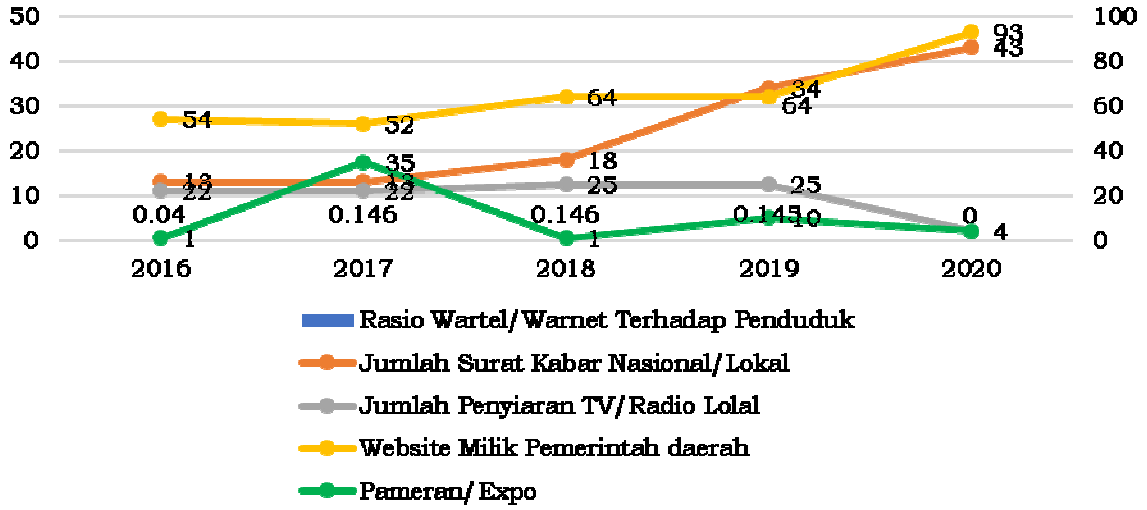

Gambar 2.67.
Parameter Indikator Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan amanat pembangunan Nasional Nawa Cita dapat diterjemahkan bahwa salah satu percepatan pembangunan salah satunya adalah akses terhadap informasi yang cepat. Parameter terkait rasio warnet terhadap penduduk sepertinya menjadi hal yang kurang relevan bila disandingkan dengan eksistensi percepatan industri 4.0 dimana jaringan internet menjadi kebutuhan umum segala lini. Terlebih lagi kebijakan nasional terkait *Social Distancing* mengakibatkan kebutuhan akan konsumsi internet menjadi meningkat pesat.

Bila diterjemahkan parameter indikator rasio warnet terhadap jumlah penduduk maka dapat diartikan jumlah penduduk yang mampu difasilitasi oleh 1 warnet. Saat ini kebutuhan akan internet dan informasi bisa didapatkan secara luas meskipun berbayar. Dan untuk beberapa kasus di daerah yang belum terjangku sinyal ponsel atau internet. Maka kedepanya pemerintah Kabupaten Blitar dapat memberikan akses internet gratis kepada daerah-daerah yang belum terjangkau pada titik-titik tertentuk seperti Balai Latihan Kerja, Kantor Kelurahan, Pos-Pos masyarakat untuk menjangkau akses internet.

Indikator lain yakni jumlah statiun tv/radio lokal yang melakukan penyiaran mengalami tren yang naik dari tahun 2016 sebesar 22 menjadi 25 hingga akhir tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 4. Berdasarkan skala siaran dan institusinya pada dasarnya persaingan informasi menjadi kompetitif namun memiliki sumber daya modal yang besar sehingga pertambahan bergerak positif namun belum secara fluktiatif. Namun berdasarkan eksistensi adanya stasiun tv/radio lokal menunjukkan bahwa sarana komunikasi bagi swasta menjadi hal yang mendapat apresiasi dengan maksud mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Blitar

Indikator website Pemerintah daerah juga masih menjadi hal yang relevan terkait akuntabilitas dan transparansi publik. Demikian juga untuk mendukung kelancaran PPID untuk pengelolaan data diharapkan semua *stakeholder* memiliki sinkronisasi data yang baik.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek koperasi, usaha kecil, dan menengah. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.31
Kinerja Pemerintah Derah Dalam Aspek Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi aktif	76.50	75	85	45,7	53,83
2	Jumlah Usaha Mikro (unit)	13.175	15.132	15.312	20.242	31.056
3	Jumlah UM non BPR/LKM UM (unit)	254.287	254.287	255.206	20.242	
4	Jumlah Koperasi:	951	971	974	996	1016
	– Aktif	424	429	437	460	547
	– Tidak Aktif	527	542	537	536	469

Sumber: 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. LKJIP 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar

1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan indikator mengenai jumlah koperasi yang masih aktif beroperasi. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase koperasi aktif:

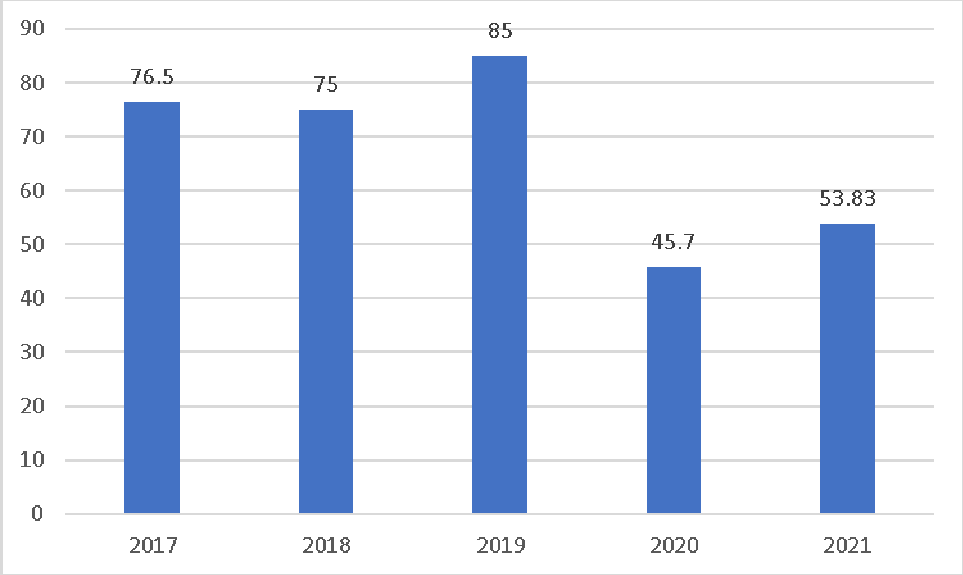

Gambar 2.68.
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase koperasi aktif setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase jumlah koperasi yang aktif sebesar 50%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 76,5% namun terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi 75%. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 85%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 45,7%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastic diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga koperasi ikut terdampak. Rata-rata pertumbuhan persentase jumlah

koperasi yang aktif dalam jangka waktu empat tahun yaitu sebesar 21,50%.

2. Jumlah Usaha Mikro

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah usaha mikro setiap tahun. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah usaha mikro.

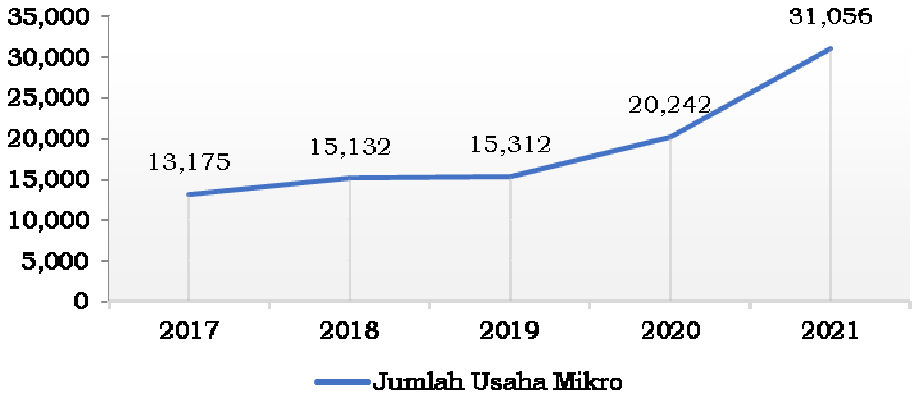

Gambar 2.69.
Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2021
Sumber: LKJIP 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar

Pada grafik di atas dapat diketahui jika pertumbuhan jumlah usaha mikro pada setiap tahunnya secara garis besar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Jumlah Usaha Mikro sebanyak 13.175 unit dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 31.056 unit. Dengan banyaknya usaha mikro yang tumbuh, maka perekonomian daerah akan turut meningkat.

3. Jumlah UM non BPR/LKM UM (unit)

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah UM non BPR/LKM UM pada setiap tahunnya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah UM non BPR/LKM UM.

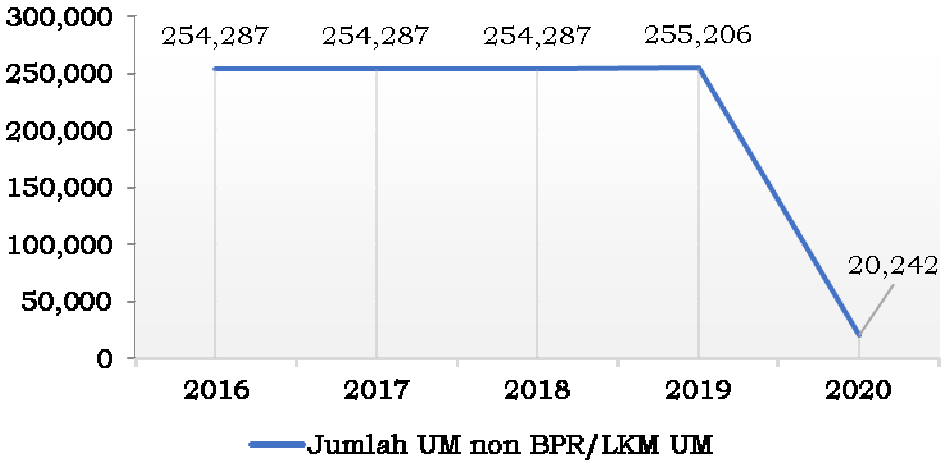

Gambar 2.70.
Pertumbuhan Jumlah UM Non BPR/LKM UM Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui jika pertumbuhan jumlah UM non BPR/LKM UM pada setiap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlahnya relatif tetap yaitu sebesar 254.287 unit UM non BPR/LKM UM, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 255.206 unit UM non BPR/LKM. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha mikro dalam jangka waktu empat tahun mencapai 0,12%. Angka tersebut sangat rendah, maka dari itu diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta lebih banyak usaha mikro non BPR/LKM UM kedepannya. Dengan banyaknya usaha mikro yang tumbuh, maka akan membantu meningkatkan perekonomian daerah.

4. Jumlah Koperasi

Jumlah koperasi merupakan indikator pengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengadaan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif dalam setiap tahunnya. Untuk melihat jumlah koperasi di Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam grafik berikut:

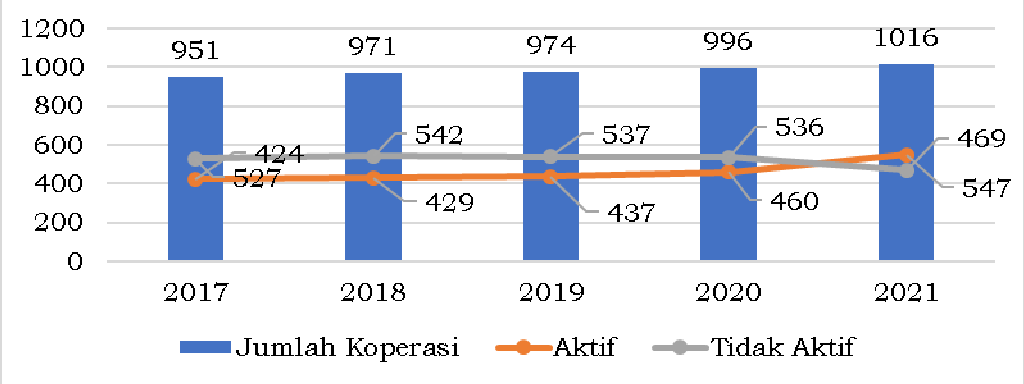

Gambar 2.71.
Capaian Indikator Jumlah Koperasi Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tahun 2021

Jumlah Koperasi di Kabupaten Blitar pada kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yang semula pada tahun 2017 ada 951 unit koperasi dengan rincian 424 koperasi aktif dan 527 koperasi tidak aktif dan kondisi tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2021, dimana jumlah koperasi mencapai 1016 unit yang terdiri dari 547 unit koperasi aktif dan 469 unit koperasi tidak aktif.

R. Penanaman Modal

Terdapat 5 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek penanaman modal. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.32
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	4	12	8
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar)	7,7	8,10	1.847,00	346,29	1.302
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:680	1:805	1:27	1:07	1:3
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	1	1	865	1,981.00	404,7
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (miliar rupiah)	1	7.754,60	237	1.232,51	9.997,80

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, 2021

1. Jumlah Investor Berskala Nasional

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah investor berskala nasional:

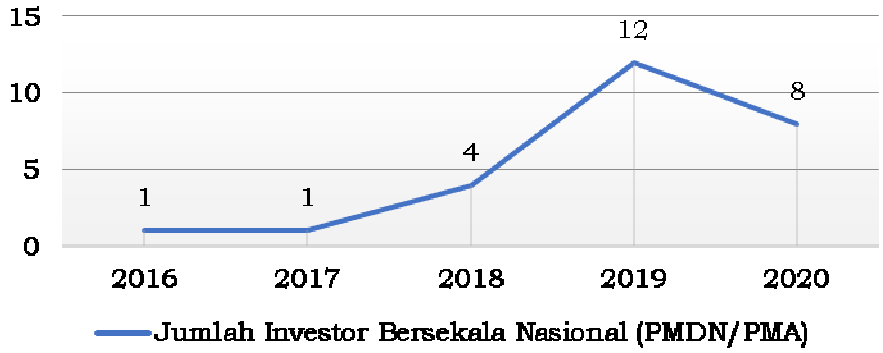

Gambar 2.72.
Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah investor berskala nasional pada setiap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah investor di Kabupaten Blitar hanya berjumlah 1 investor saja, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah investor menjadi 4 investor pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 jumlah investor bertambah menjadi 12 investor. Pada tahun 2020 mengalami penurunan investor menjadi 8 investor penurunan investor masuk ini dampak dari adanya pandemic covid-19. angka terseburt relatif tinggi sebab terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Bidang Usaha yang melakukan investasi di Kabupaten Blitar ada 3 bidang Usaha yaitu, Usaha Hasil Industri, Pertanian dan Kehutanan, Industri Aneka dan Industri Logam, Mesin dan Kimian. Semakin banyak investor yang masuk

maka akan semakin baik dalam membantu meningkatkan perekonomian di Blitar.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah nilai investasi berskala nasional pada setiap tahunnya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah nilai investasi berskala nasional:



Gambar 2.73.
Pertumbuhan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021

Grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah nilai investasi berskala nasional pada setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 nilai investasi berskala nasional bernilai sebesar 7,7 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 8,1 miliar rupiah. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.847 miliar rupiah, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga hanya mencapai 346,29 miliar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penangkitan yang signifikan menjadi 1.302 miliar.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pada indikator ini untuk melihat pertumbuhan rasio daya serap tenaga kerja pada setiap tahunnya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut tabel pertumbuhan indikator rasio daya serap tenaga kerja:

Tabel 2.33
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio daya serap tenaga kerja	1:680	1:805	1:27	1:07	1:3

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, 2021

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator ini untuk melihat angka kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN:

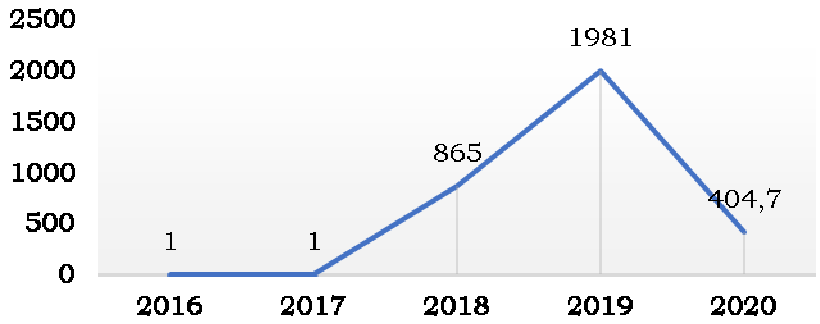

Gambar 2.74.
Pertumbuhan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021

Grafik diatas dapat diketahui pertumbuhan kenaikan/penurunan nlai realsasi PMDN pada setiap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 nilai realisasi PMDN sejumlah 1 miliar rupiah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 865 miliar rupiah, dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 1.981 miliar rupiah. Namun mengalamai penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 404,7 miliar.

5. Kenaikan/Penurunan Nilai Realsasi PMA

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA:

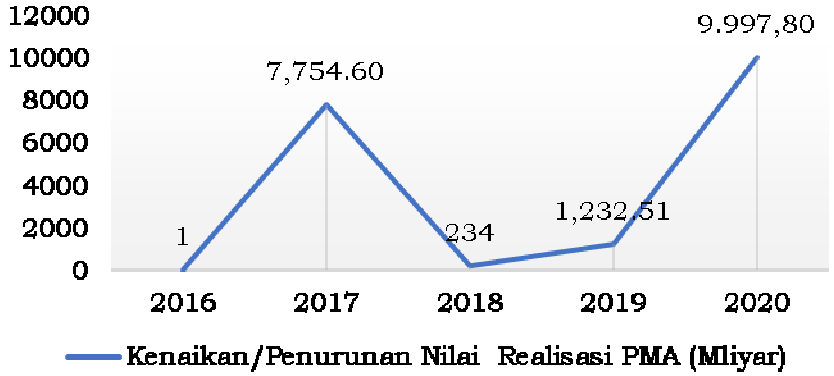

Gambar 2.75.
Pertumbuhan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA pada setap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 nilai realisasi PMA sebesar 1 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 7.754,60 miliar rupiah. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 237 miliar rupiah. Pada tahun 2019 nlai realisasi PMA mengalami kenaikan kembali sebesar 1.232,51 miliar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 9.997,80 miliar rupiah.

S. Kepemudaan dan Olahraga

Terdapat 7 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek kepemudaan dan olahraga. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.34
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

No.	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga	199	226	241	279	261
2	Jumlah sarana/gedung olahraga	444	444	444	444	444
3	Jumlah organisasi pemuda (unit)	27	27	28	28	28
4	Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	28	30	31	31	32
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)	4	4	4	5	8
6	Jumlah kegiatan olahraga (buah)	5	6	8	8	3
7	Lapangan olahraga (unit)	444	444	444	444	444

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2021

1. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan indikator mengenai jumlah total klub olahraga yang aktif bergerak di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah klub olahraga:

Pada grafik di bawah dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah klub olahraga setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat. Pada tahun 2016 jumlah klub olahraga sebanyak 199 klub, kemudian mengalami peningkatan secara terus-menerus pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 jumlah klub olahraga bertambah menjadi 226, pada tahun 2018 jumlah klub olahraga bertambah menjadi 241, kemudian pada tahun 2019 jumlah klub olahraga bertambah menjadi 278. Pada tahun 2020 jumlah klub olahraga berkurang menjadi 261 karena adanya klub olahraga yang vakum akibat dari pandemi covid-19. Rata-rata

pertumbuhan jumlah klub olah raga dalam jangka waktu lima tahun sebesar 31,15%.

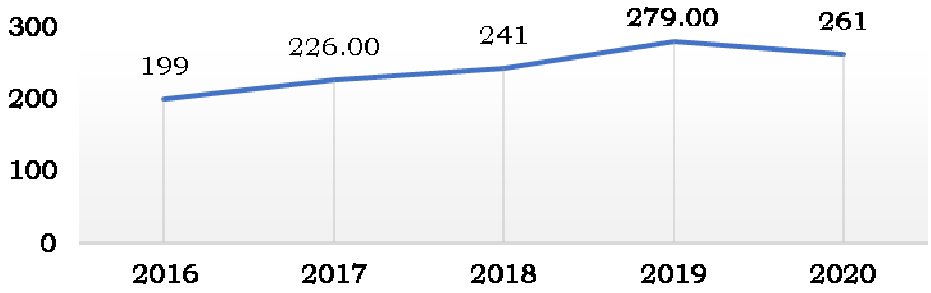

Gambar 2.76.
Pertumbuhan Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2021

2. Jumlah Sarana atau Gedung Olahraga

Jumlah sarana atau gedung olahraga merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah sarana atau gedung atau fasilitas olahraga di Kabupaten Blitar. Berdasarkan dari tabel 2.25, pertumbuhan jumlah sarana/gedung olahraga setiap tahunnya konsisten tetap, sebab tidak terjadi perubahan setiap tahunnya, jumlahnya tetap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 444 unit. Oleh karena itu rata-rata pertumbuhan dalam jangka empat tahun sebesar 0% sebab tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

3. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah organisasi pemuda yang masih aktif. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah organisasi pemuda setiap tahunnya mengalami kecederungan meningkat. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Blitar sebanyak 27 unit, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018

menjadi sebanyak 28 unit dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan jumlah organisasi pemuda dalam jangka waktu lima tahun adalah sebesar 1,20%.

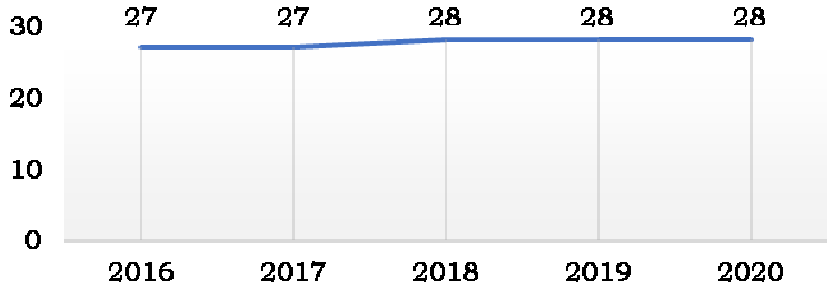

Gambar 2.77.
Pertumbuhan Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

4. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah organisasi olahraga.

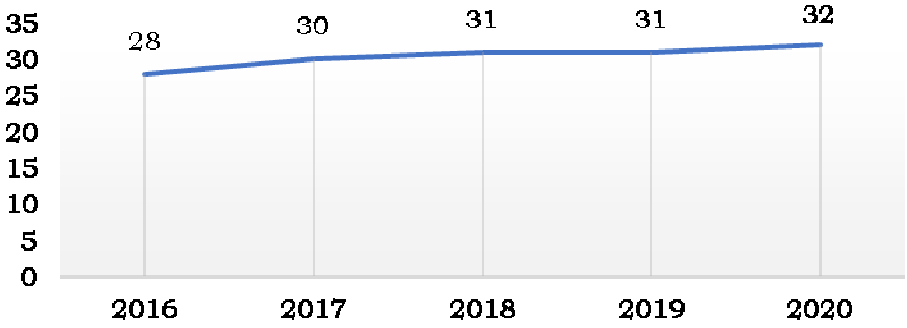

Gambar 2.78.
Pertumbuhan Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah organisasi olahraga setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016, jumlah organisasi olahraga sebanyak 28 unit. Kemudian mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017 bertambah sebanyak 30 unit dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 31 unit. Namun pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada jumlah 31 unit. Pada tahun 2020 jumlah organisasi olahraga bertambah menjadi 32 Rata-rata pertumbuhan jumlah organisasi olahraga dalam jangka waktu lima tahun yaitu sebesar 14,28%.

5. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah kegiatan kepemudaan.

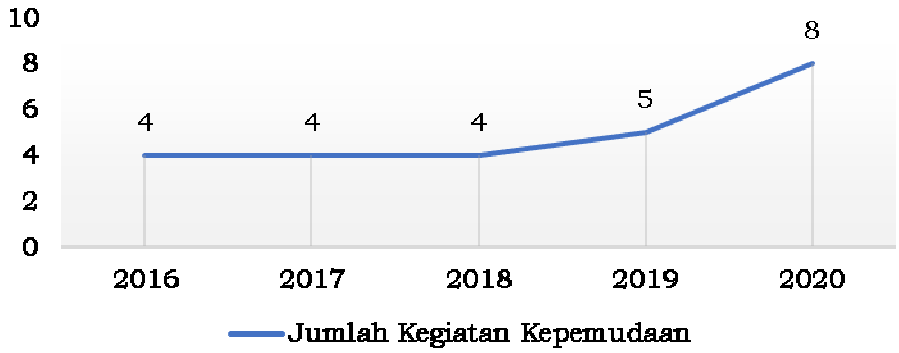

Gambar 2.79.
Pertumbuhan Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kegiatan kepemudaan setiap tahunnya secara garis besar mengalami

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah kegiatan kepemudaan tidak mengalami perubahan sehingga tetap berjumlah sebanyak 4 buah. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5 buah jumlah kegiatan kepemudaan. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebanyak 8 buah. Rata-rata pertumbuhan jumlah kegiatan kepemudaan setiap tahunnya dalam jangka waktu lima tahun yaitu sebesar 8,30%.

6. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah kegiatan olahraga. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah kegiatan olahraga:

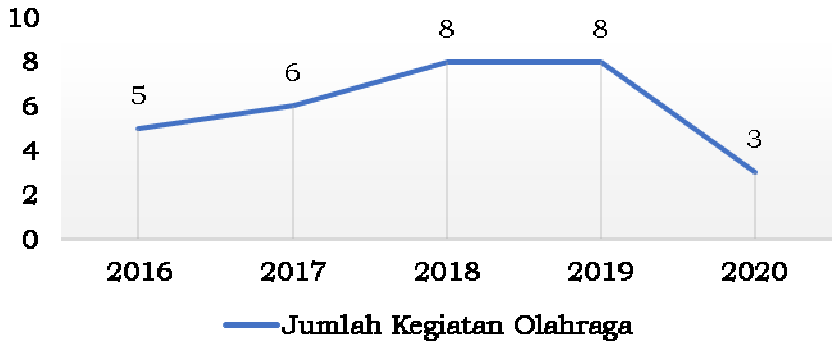

Gambar 2.80.
Pertumbuhan Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kegiatan olahraga setiap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah kegiatan olahraga diadakan sebanyak 5 kali, kemudian terjadi peningkatan jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 6 kali serta pada tahun 2018 sebanyak 8 kali. Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan jumlah kegiatan olahraga sehingga kegiatan olahraga dilakukan sebanyak 8 kali sama seperti tahun 2018. Padu tahun 2020 terjadi penurunan jumlah

kegiatan olahraga menjadi 3 penurunan ini akibat dari adanya pandemi covid-19 yang dimana dilarangnya ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Rata-rata pertumbuhan jumlah kegiatan olahraga dalam jangka lima tahun yaitu sebesar 17,80%.

7. Lapangan Olahraga

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah lapangan olahraga setiap tahunnya. Seperti yang dapat ditelaah dari Tabel 2.47, pertumbuhan jumlah lapangan olahraga setiap tahunnya secara garis besar konsisten tetap sebab tidak terjadi perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah lapangan olahraga berjumlah sebanyak 444 unit, sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0% sebab tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan.

T. Statistik

Urusan Pelaksanaan statisik merupakan urusan yang bersifat umum di setiap daerah maka parameter indikator yang digunakkan rata-rata adalah sama yakni untuk Kabupaten Blitar memiliki indikator Buku PDRB Kabupaten dan Kabupaten Blitar dalam angka. Hal ini menjadi bersifat krusial dan penting sebagai dasar untuk sajian data statistik dan sektoral yang digunakkan untuk melaksanakan kajian Penelitian dan Pengembangan. Capaian Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PD RB kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2021

U. Kebudayaan

Terdapat 5 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada aspek kebudayaan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	245	258	272	282	328
2	Jumlah gedung	1	1	2	2	2
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)	59	65	68	69	17
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	16	16	18	18	18
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	36	36	36	36	36

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Jumlah Grup Kesenian

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah grup kesenian setiap tahunnya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah grup kesenian:

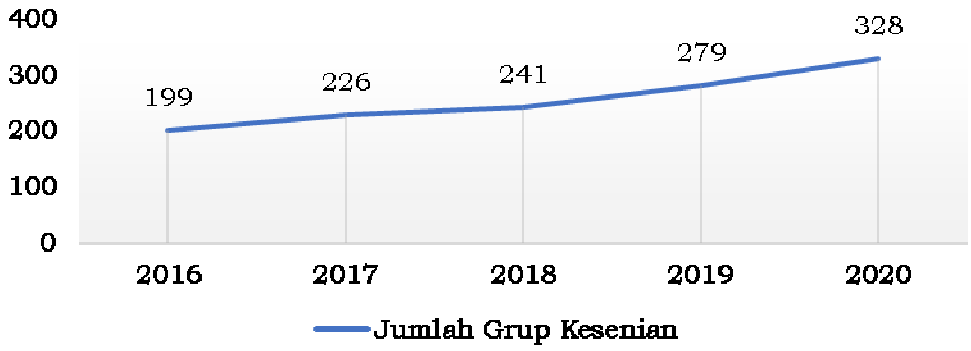

Gambar 2.81.
Pertumbuhan Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah grup kesenian setiap tahunnya secara garis besarnya konsisten meningkat, sebab terjadi kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah grup kesenian sebanyak 245 grup, kemudian terjadi peningkatan secara berturut-turut sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2017 diketahui jumlah grup kesenian berjumlah 258 grup, kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi sebanyak 272 grup, pada tahun 2019 juga terjadi kenaikan kembali sehingga menjadi berjumlah 282 grup. Pada tahun 2020 jumlah grup kesenian konsisten mengalami kenaikan menjadi 328 Rata-rata pertumbuhan jumlah grup kesenian dalam jangka waktu lima tahunnya adalah sebesar 64,82%.

2. Jumlah Gedung

Indikator ini untuk melihat pertumbuhan jumlah gedung kesenian yang berada di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah gedung:

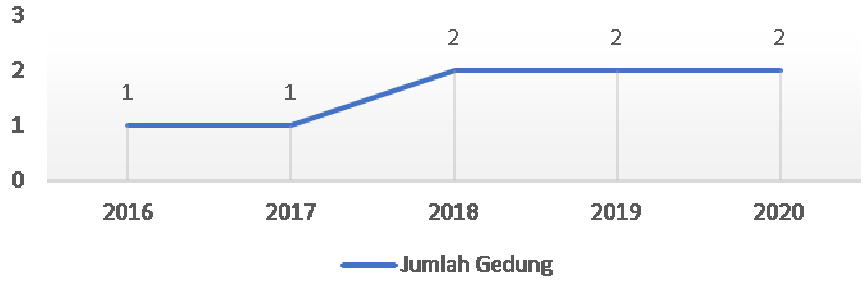

Gambar 2.82.
Pertumbuhan Jumlah Gedung Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah gedung kesenian pada setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah gedung kesenian di Kabupaten Blitar berjumlah 1 gedung kesenian,

kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 2 gedung kesenian, dan jumlahnya tetap hingga tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan jumlah gedung kesenian dalam jangka lima tahun sebesar 33,30%.

3. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan indikator untuk melihat jumlah kegiatan penyelenggaraan festiival seni dan budaya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya:

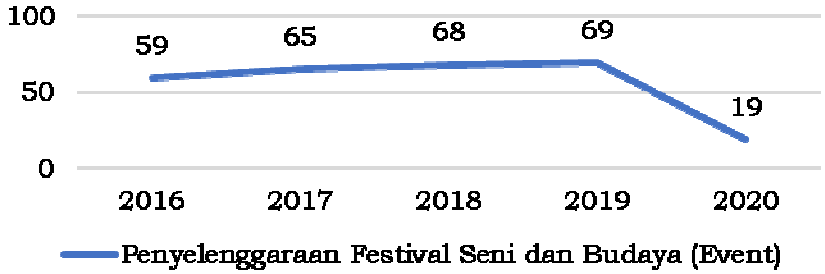

Gambar 2.83.
Pertumbuhan Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada setiap tahunnya secara garis besarnya konsisten meningkat, hal tersebut terjadi karena terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penyelenggaran festival seni budaya sebanyak 59 kegiatan. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 sebanyak 65 kegiatan, tahun 2018 sebanyak 68 kegiatan, serta pada tahun 2019 sebanyak 69 kegiatan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 17 kegiatan, penurunan ini karena adanya pandemi virus covid-19 yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat. Rata-rata

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dalam jangka waktu lima tahun adalah sebesar 5,40%.

4. Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan indikator untuk melihat jumlah keseluruhan sarana yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

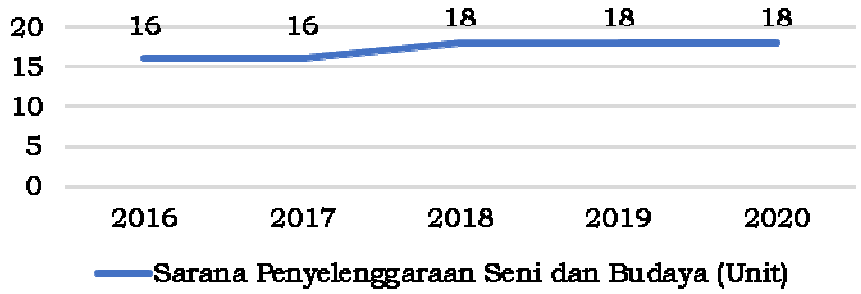

Gambar 2.84.
Pertumbuhan Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada setiap tahunnya secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah sarana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya berjumlah 16 unit. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan menjadi 18 unit sarana. Rata-rata pertumbuhan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dalam jangka waktu lima tahun adalah sebesar 12,5%.

5. Benda, Kawasan, Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Pada indikator benda, kawasan, situs cagar budaya yang dilestarikan dapat diperhatikan pertumbuhan jumlah benda, kawasan, situs cagar budaya yang dilestarikan. Berdasarkan pada tabel 2.50, pertumbuhan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada setiap tahunnya konsisten meningkat, hal tersebut terjadi sebab tidak terjadi perubahan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan berjumlah sebanyak 36 unit, sehingga rata-rata pertumbuhannya dalam jangka empat tahun sebesar 0% sebab tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan.

V. Perpustakaan

Terdapat 3 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Blitar pada urusan perpustakaan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.37
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Perpustakaan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA	Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perpustakaan (unit)	1422	1422	1422	1422	1.448	
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	415.354,0	418.899,0	421.645,0	423.037,0	218.948,0	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)	10.367	12.638	15.344	15.806	17.849	17.849

Sumber:1. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. LKPJ Bupati Tahun 2021

1. Jumlah Perpustakaan

Indikator jumlah perpustakaan untuk meilhat pertumbuhan jumlah perpustakaan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah perpustakaan pada setiap tahunnya konsisten tetap, hal tersebut dikarenakan tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu empat tahun.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah perpustakaan di Kabupaten Blitar sebanyak 1.422 unit. Pada tahun 2020 jumlah perpustakaan mengalami kenaikan menjadi 1.448 unit. Maka dari itu, rata-rata pertumbuhan jumlah perpustakaan dalam jangka empat tahun sebesar 0% sebab tidak terjadi peningkatan dan penurunan.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun merupakan indikator untuk melihat perkembangan jumlah pergunjung perpustakan dalam setiap tahunnya. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

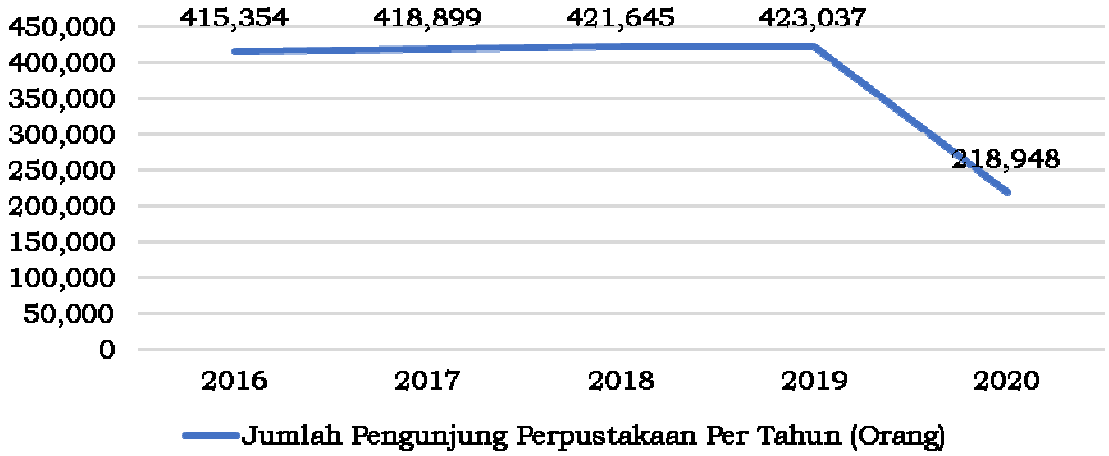

Gambar 2.85.
Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan pada setiap tahunnya konsisten meningkat, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah pengunjung dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan berjumlah 415.354 orang. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2017 jumlah

pengunjung mencapai 418.899 orang, pada tahun 2018 jumlah pengunjung mencapai 421.645 orang, serta pada tahun 2019 jumlah pengunjung mencapai 423.037 orang pengunjung. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunnan yang sangat signifikan mencapai 218.948 orang turunnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah karena adanya pembatasan kunjungan dan adanya pembatasan waktu kunjungan karena adanya pandemi covid-19. Rata-rata pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun mencapai 0,63%, angka tersebut terbilang relatif kecil sebab peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan harus terus ditingkatkan agar membangun minat membaca pada masyarakat, namun hal tersebut masih terbilang positif sebab minat membaca masyarakat Kabupaten Bllitar semakin meningkat setiap tahunnya.

3. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indikator ini untuk melihat perkembangan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakan daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.



Gambar 2.86.
Pertumbuhan Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada setiap tahunnya konsisten meningkat, hal tersebut terjadi sebab adanya peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah koleksi buku di perpustakaan berjumlah 10.367 buah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan secara berturut-turut hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 terdapat kenaikan menjadi 12.638 buah, pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan menjadi 15.344 buah, pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 15.806 buah, dan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan menjadi 17.849 buah. Rata-rata pertumbuhan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun mencapai 72,17%. Penambahan koleksi buku perpustakan, memiliki arti bahwa kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat setempat mengenai literasi meningkat, sehingga diharapkan dapat memperlancar transfer ilmu pada masyarakat Kabupaten Blitar.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Pada urusan Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan terdapat beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan.

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Indikator ini mengukur pertumbuhan kontribusi tahunan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan Kabupaten Blitar terhadap PDRB. Pada prinsipnya sektor pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap PDRB adalah menurun secara konsisten sepanjang periode. Di 2016 sektor pertanian terhadap PDRB tumbuh sebesar 2,19% lalu melambat 1,15% setahun berikutnya dan sedikit menguat sebesar 1,62% di tahun 2019. Di tahun 2020 angka ini mengalami penurunan yang cukup

signifikan menjadi 0,06% dan kemudian turun lagi ditahun 2021 hingga menjadi 0,01%. Angka ini merupakan angka terendah sepanjang 6 tahun terakhir.

Sebagai wilayah yang melibatkan sektor unggulannya pada sektor agraris, Kabupaten Blitar perlu melakukan akselerasi pertumbuhan pada indikator ini. Artinya, perlambatan ini perlu untuk menjadi isu pembangunan kedepan untuk menjamin keberpihakan kinerja dan anggaran pada sektor ini dapat teralokasikan dengan baik.

Berikut pertumbuhan tersebut tersaji dalam grafik di bawah ini:

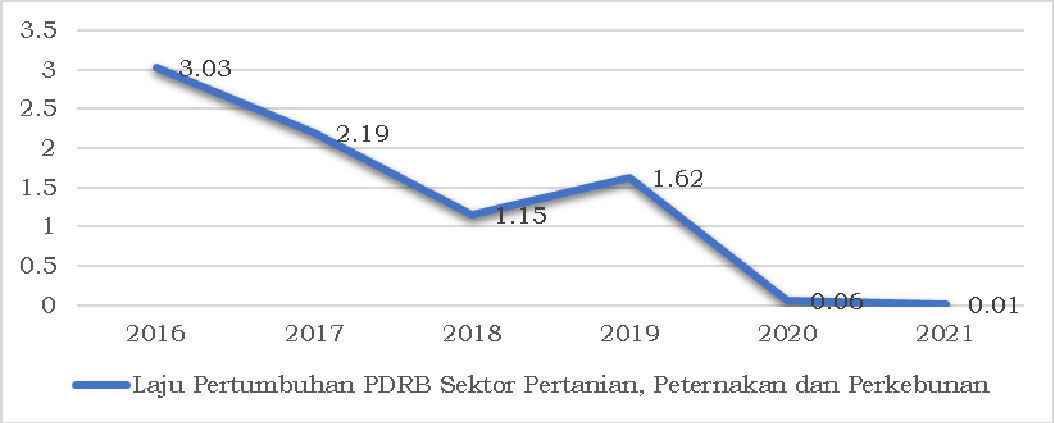

Gambar 2.87.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar 2021

2. Produktivitas (Kuintal per Hektar) dan Produksi (Ton) Tanaman Pangan

Produktivitas melihat seberapa produktif sebuah produk di produksi, sementara produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang, dalam konteks ini adalah tanaman pangan. Pertama, berikut disajikan produktivitas tanaman pangan Kabupaten Blitar dengan satuan kuintal/hektar:

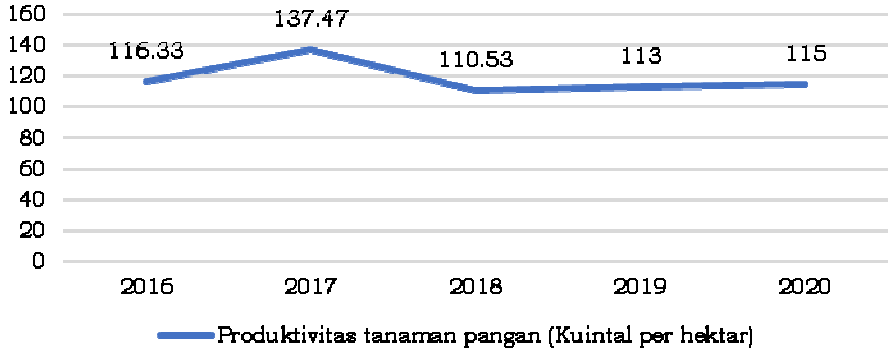

Gambar 2.88.
Pergerakan Produktivitas Tanaman Pangan (Kuintal Per Hektar)
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar 2021

Pergerakan produktivitas tanaman pangan Kabupaten Blitar bergerak fluktuatif. Pada 2016 produktivitas tanaman pangan Kabupaten Blitar adalah sebesar 116,33 kuintal/hektar, kemudian meningkat relatif besar menjadi 137,47 kuintal/hektar di 2017. Setahun berikutnya terjadi penurunan produktivitas menjadi 110,53 kuintal/hektar dan kemudian merangkak naik menjadi 113 kuintal/hektar di 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 115 kuintal/hektar. Untuk memahami lebih detil pergerakan produktivitas ini, dapat diamati pada dua komposit pembentuknya yaitu padi sawah dan padi ladang sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

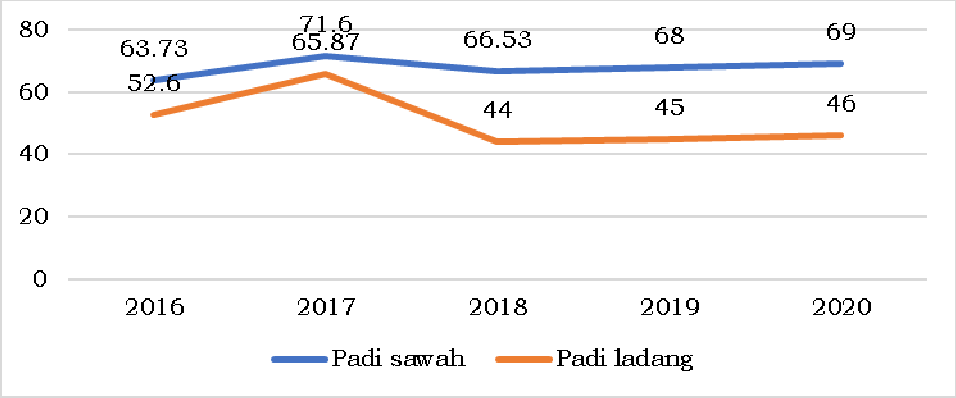

Gambar 2.89.
Pergerakan Komposit Pembentuk Produktivitas Tanaman Pangan (Kuintal/Hektar) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar 2021

Melalui grafik di atas, terbaca bahwa produktivitas padi ladang merupakan komposit yang memberikan kontribusi penurunan terhadap produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Blitar, dan komposit padi ladang pula lah yang berkontribusi dalam lonjakan di tahun 2017. Namun kedua produktivitas tanaman tersebut mengalami penurunan setelah tahun 2017, dan meningkat sedikit demi sedikit hingga tahun 2020. Melihat kecenderungan komposit padi sawah yang fluktuatif namun meningkat, maka jelas komposit padi ladang yang perlu mendapat perhatian peningkatan pada periode pembangunan kedepan.

Selanjutnya, sama halnya dengan produktivitas tanaman pangan, produksi tanaman panganpun juga sudah barang tentu juga tercatat menurun. Jika dikalkulasi, rata-rata penurunan pertahunnya mencapai 3.16%, kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 340.216 ton. Angka ini relatif besar untuk daerah yang memiliki karakter agraris dengan agrikultur sebagai sektor unggulannya. Berikut grafik produksi tanaman pangan Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2016-2020.

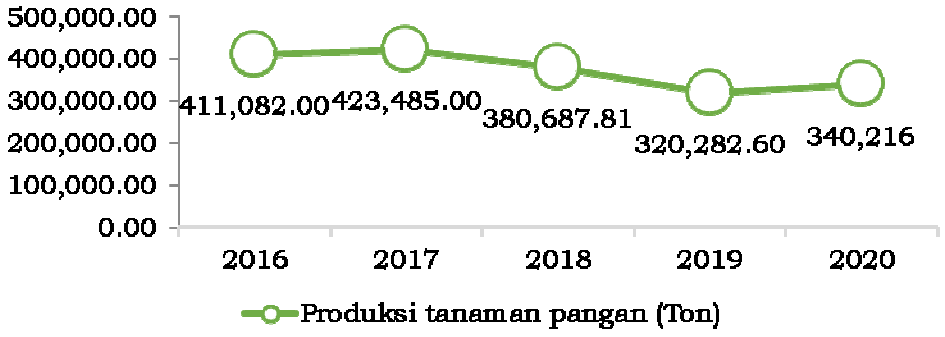

Gambar 2.90.
Pergerakan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar 2021

3. Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Terhadap PDRB

Indikator ini menghitung besaran proporsi kontribusi subsektor-subsektor tersebut terhadap konstruksi PDRB Kabupaten Blitar. Berikut

pergerakan kontribusi subsektor-subsektor tersebut disajikan pada grafik di bawah ini:

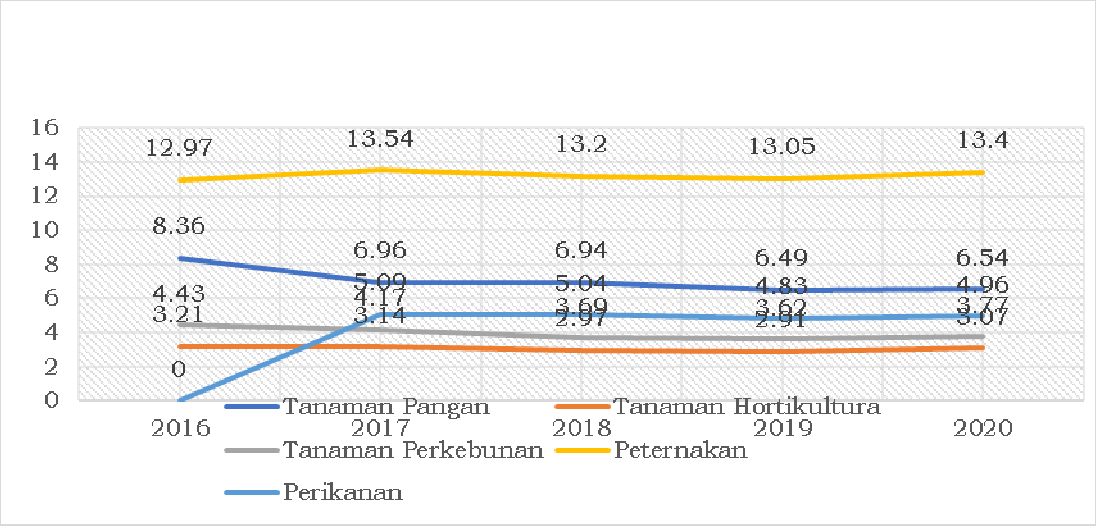

Gambar 2.91.
Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Terhadap PDRB di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Data Diolah 2021

Melalui grafik di atas, dapat diringkaskan kesimpulan pada poin-poin berikut ini:

a. Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB konsisten sebagai kontributor terbesar sepanjang periode di urusan pertanian, peternakan dan perkebunan, meskipun sempat mengaami penurunan di tahun 2017-2019, namun kembali meningkat di tahun 2020.
b. Kontribusi subsektor tanaman pangan berada di posisi kedua kontributor terbesar terhadap PDRB di urusan pertanian, peternakan dan perkebunan dengan pergerakan yang terus menurun sepanjang periode;
c. Kontribusi subsektor perikanan menduduki posisi ketiga kontributor terbesar terhadap PDRB di urusan pertanian, peternakan dan perkebunan dengan pergerakan fluktuatif yang cenderung stagnan berdasarkan data yang tercatat sejak 2017 sampai 2020;
d. Kontribusi subsektor tanaman perkebunan menjadi kontributor terbesar keempat terhadap PDRB di urusan pertanian, peternakan

dan perkebunan dengan pergerakan yang terus menurun sepanjang periode pembangunan sebelumnya;

e. Tanaman holtikultura menduduki peringkat buncit dengan kontribusi terendah terhadap PDRB di urusan pertanian, peternakan dan perkebunan yang juga menunjukkan pergerakan menurun sepanjang periode. Meskipun di akhir periode mengalami kenaikan namun belum dapat kembali ke angka semula di tahun 2016 yaitu 3,21%.

4. Cakupan Bina Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani merupakan proporsi perbandingan jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah di tahun tertentu terhadap total jumlah kelompok tani dengan satuan persentase. Jika mengamati LKPJ Kabupaten Blitar 2016-2020, tercatat bahwa seluruh kelompok tani di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 telah mendapat pembinaan (menunjukkan angka persentase 100%) oleh pemerintah Kabupaten Blitar.

5. Peningkatan Produktivitas Perkebunan dari Potensi Produk di Lapangan dan Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkuailtas

Indikator ini ingin melihat pergerakan pertahun produktivitas perkebunan dari potensi produk di lapangan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, terdapat lompatan *extreme* pada indikator ini. Berawal di angka 0,12% di tahun 2016, terjadi peningkatan produktivitas perkebunan sebesar 1,1% di tahun 2017. Lalu menurun sebesar 0,19 di 2018 sebelum kemudian melompat naik sebesar 3,3% pada tahun 2019 dan 2020. Dalam hal jumlah SDM perkebunan, pada tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 2,3%, kemudian meningkat lagi 3,8% di 2017 dan menurun sebesar 2,67% setahun berikutnya. Baru pada tahun 2019 dan 2020 terjadi lonjakan peningkatan sebesar 8%. Jika diamati, pola peningkatannya bergerak seiring dengan penambahan jumlah SDM perkebunan berkualitas. Hanya saja, peningkatan produktivitas selalu

lebih dari dua kali lipat lebih rendah dari peningkatan jumlah SDM. Artinya, eksistensi SDM perkebunan berkualitas di Kabupaten Blitar belum berperan secara optimal, dan masih memiliki ruang penguatan pada periode pembangunan kedepan.

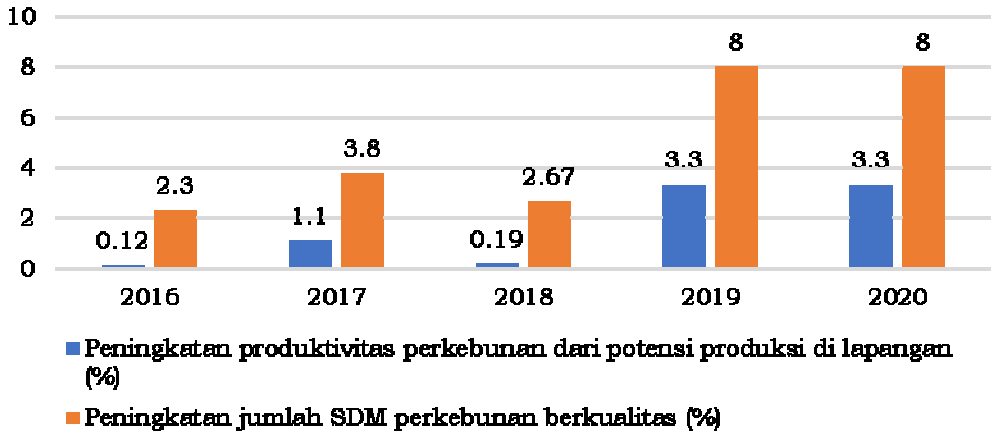

Gambar 2.92.
Pergerakan Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Dari Potensi Produksi di Lapangan) dan Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkualitas di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 2021

6. Peningkatan Pertumbuhan Subsektor Perkebunan

Indikator ini mengukur pergerakan tahunan subsektor perkebunan mulai tahun 2016 sampai dengan 2019. Berdasar pada LKPJ 2016-2019, tercatat bahwa pada 2016 terjadi penurunan sebesar 1,17% yang kemudian meningkat sebesar 1,04% setahun berikutnya. Sayangnya, kembali terjadi penurunan yang relatif besar di 2018 sebesar 2,10%. Pada 2019, terjadi akselerasi peningkatan sebesar 4,61%. Kemudian angka tersebut meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 5,13%.

B. Kelautan dan Perikanan

Pada urusan Kelautan dan Perikanan terdapat sedikitnya 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut indikator yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar:

Tabel 2.38
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan	%	100	107,41	107,68	99,05	93,84
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0	18,97	32,76	43,9	24,8
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	11,77	10,56	16,98	25,48	11,39
4	Peningkatan	-	19,14	55,94	39,73	40,2	38,03

Sumber: Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Produksi Perikanan

Indikator ini mengukur presentase produksi perikanan dalam satuan ton terhadap target daerah yang juga dalam ton. Berikut pergerakan persentase produksi perikanan Kabupaten Blitar.

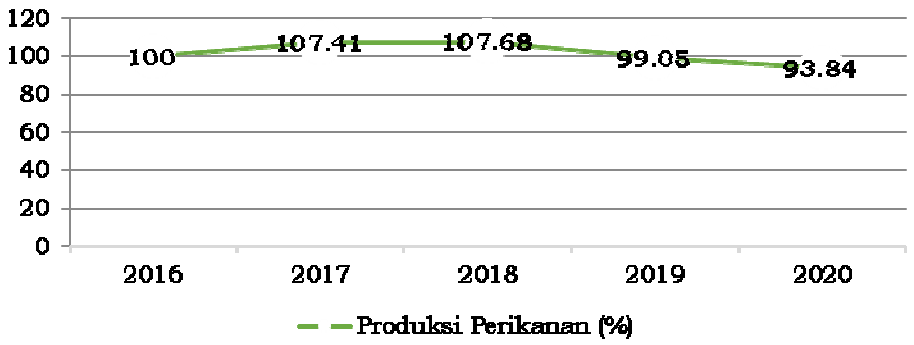

Gambar 2.93.
Pergerakan Produksi Perikanan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar 2021

Jika mengamati pergerakan grafik tersebut, dapat disimpulkan indikator ini fluktuatif dengan kecenderungan sedikit menurun. Tahun 2016, persentase produksi pemerintah Kabupaten Blitar adalah 100%. Angka ini kemudian meningkat 107,41% setahun berikutnya. Lalu bergerak meningkat lagi menjadi 107,68%, baru pada tahun 2019 sedikit

menurun menjadi 99,05%, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2020 menjadi 93,84%. Gejala penurunan yang terus menerus ini perlu menjadi peringatan sebab sangat penting untuk menjaga agar angka tonase riil produksi ikan terus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan merupakan proporsi jumlah kelompok nelayan yang terbina berbanding total jumlah kelompok nelayan yang ada, sementara produksi perikanan kelompok nelayan merupakan persentase produksi perikanan oleh kelompok tersebut. Berikut grafik pergerakan pertahun indikator-indikator tersebut.

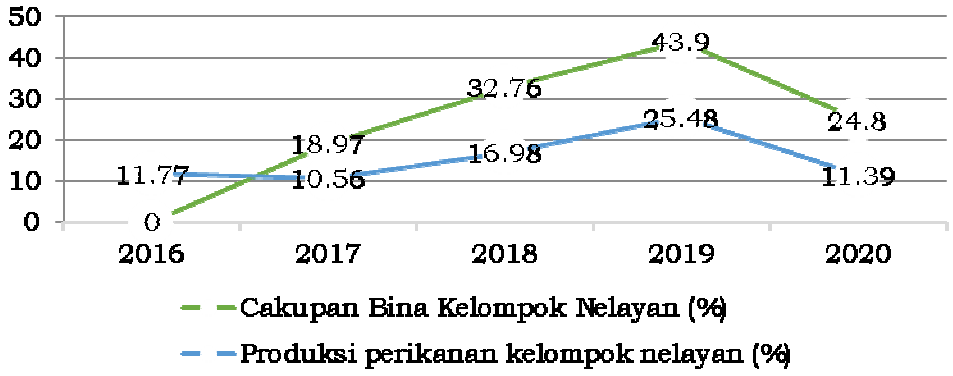

Gambar 2.94.
Pergerakan Cakupan Bina dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Blitar 2021

Melalui grafik di atas, terhitung sejak 2017 ketika cakupan bina kelompok nelayan tercatat, produksi perikanan oleh kelompok nelayan bergerak meningkat sejalan dengan peningkatan cakupan pembinaan kelompok tani tersebut. Namun, perlu menjadi catatan bahwa kelompok nelayan yang terbina di tahun 2019 sebesar 43,9%, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 24,8%, Hal ini dibarengi pula oleh produksi perikanan kelompok nelayan juga mengalami penurunan sebesar 11,39%. Persentase ini perlu ditingkatkan khususnya pada

kelompok nelayan yang dibina karena intervensi pada perluasan cakupan pembinaan memberikan dampak progresif terhadap produksi perikanan oleh kelompok tersebut.

C. Kehutanan

Pada urusan kehutanan, Kabupaten Blitar menetapkan 2 indikator sebagai ukuran keberhasilan pada periode pembangunan sebelumnya. Dua indikator tersebut yaitu 'Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis' serta 'Kerusakan Kawasan Hutan' dengan satuan hektar. Untuk lebih mudah memahami pergerakan data kinerja pada urusan ini, berikut disajikan grafik pergerakan kinerja pertahun pada urusan kehutanan.

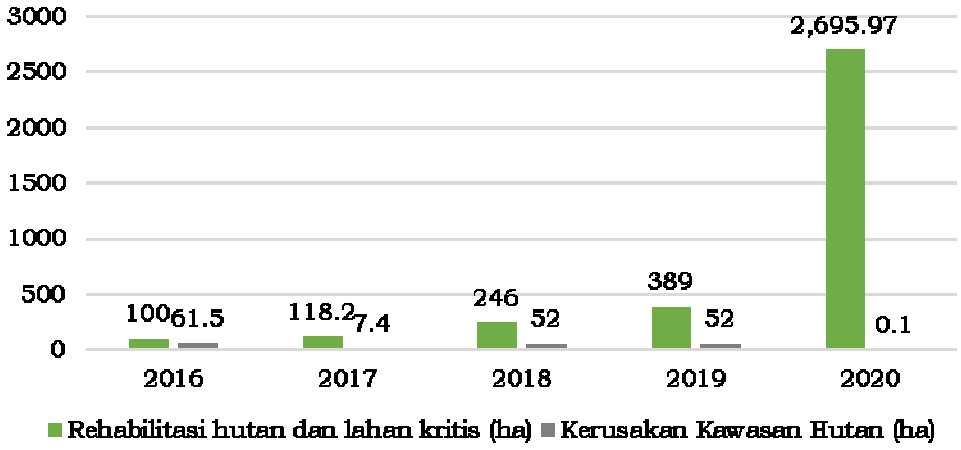

Gambar 2.95.
Pergerakan Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 2021

Memperhatikan grafik di atas, terlihat ambisi pemerintah Kabupaten Blitar terhadap rehabilitasi hutan dan lahan kritis sangat besar, namun besaran kawasan hutan yang mengalami kerusakan tidak berkurang signifikan. Di 2016, tercatat 61,5 Ha kawasan hutan rusak dengan luasan yang direhabilitasi tercatat 100 Ha. Setahun berikutnya, kawasan hutan rusak berkurang signifikan menjadi hanya 7,4 Ha sedangkan luasan wilayah hutan yang direhabilitasi meningkat dari

tahun sebelumnya menjadi 118,2 Ha. Pada 2018, kerusakan kawasan hutan meningkat menjadi 52 Ha dan tercatat rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebesar 246 Ha, 2 kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2019, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Blitar tetap di angka 52 Ha. Lalu di tahun 2020 luas kerusakan hutan menurun drastis menjadi 0,1 Ha dengan luasan rehabilitasi yang juga meningkat secara signifikan tercatat 2695,97 Ha. Berdasar deskripsi di atas, terekam anomali kinerja pada urusan kehutanan. Dengan penambahan luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang lebih dari 100% dari tahun 2019 ke 2020, kawasan kerusakan hutan menurun signifikan menjadi dari 52 Ha ke 0,1 Ha. Begitupun halnya pada luas rehabilitasi dari 389 Ha menjadi 2695,97 Ha.

D. Pariwisata

Pada urusan Pariwisata terdapat sedikitnya 2 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut indikator yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebu.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Pada Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pajak Daerah Dari Sektor Usaha Kepariwisataan	Rupiah (Rp)	3.199.703	4.223.855	5.742.647	4.274.781	
2	Kunjungan Wisata	(Orang)	1.727.953	2.240.689	2.754.998	1.532.742	1.250.000

Sumber: 1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 2021
2. LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

1. Jumlah Pajak Daerah Dari Sektor Usaha Kepariwisataan

Indikator ini secara sederhana mengukur pertumbuhan pajak daerah yang diterima dari sektor usaha pariwisata. Berikut pertumbuhan tersebut tersaji dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2.96.
Jumlah Pajak Daerah Dari Sektor Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 2021

Jumlah pajak yang tercatat di Kabupaten Blitar 2017-2020 adalah sebesar Rp 3.199.703 pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 4.223.855 di 2018. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.742.647. Hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan besaran pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan ini adalah menjadi Rp 4.274.781. Penurunan di akhir tahun ini disebabkan karena adanya dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan tutupnya sektor pariwisata selama beberapa waktu.

Jika melihat besaran tersebut, untuk menjadikan Kabupaten Blitar sebagai *icon* baru kepariwisataan Jawa Timur, perlu *effort,* keseriusan dan komitmen yang relatif besar untuk mewujudkannya di periode pembangunan kedepan. Artinya, keberpihakan anggaran dan kinerja terhadap urusan kepariwisataan menjadi sebuah keabsahan pada periode pembangunan kedepan.

2. Kunjungan Wisata

Pergerakan kunjungan wisata Kabupaten Blitar dapat diamati pada grafik berikut ini:

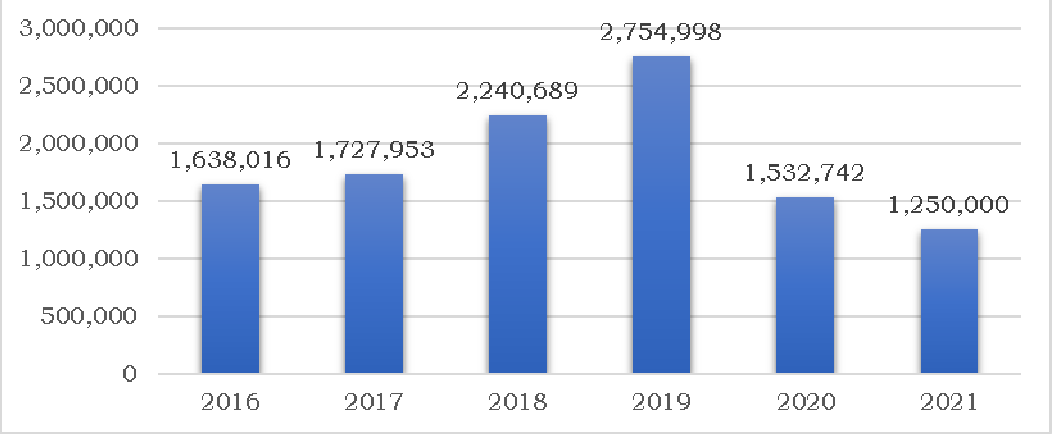

Gambar 2.97.
Pergerakan Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 2021
dan LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

Melihat grafik di atas, terlihat Kabupaten Blitar pada prinsipnya memiliki daya tarik tersendiri terhadap wisatawan. Beranjak dari angka 1.638.019 orang di tahun 2016, kunjungan wisata melesat menjadi 2.754.998 orang di 2019. Jika dihitung, rata-rata kenaikan wisatawan pertahunnya adalah sebesar 19,37% dengan kenaikan terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu 29,67%. Namun pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 1.532.742 orang. Hal ini berkaitan dengan dampak dari pandemic covid-19 yang ada di Indonesia sejak tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 1.250.000 orang.

E. Perindustrian

Pada urusan perindustrian terdapat sedikitnya 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.40
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perindustrian
Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,50	6,96	7,78	-5,26	5,45
2	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	3.133,55	3.351,76	3.612,44	3.422,52	3.609,16
		-	2,05%	2,07%	1,41%	0,74%	
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	565 (1.765)	447 (2.212)	458 (2.670)	388 (3.058)	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 2021

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator ini ingin melihat seberapa besar pertumbuhan proporsi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Berikut pergerakan pertumbuhan tersebut tersaji pada grafik di bawah ini:

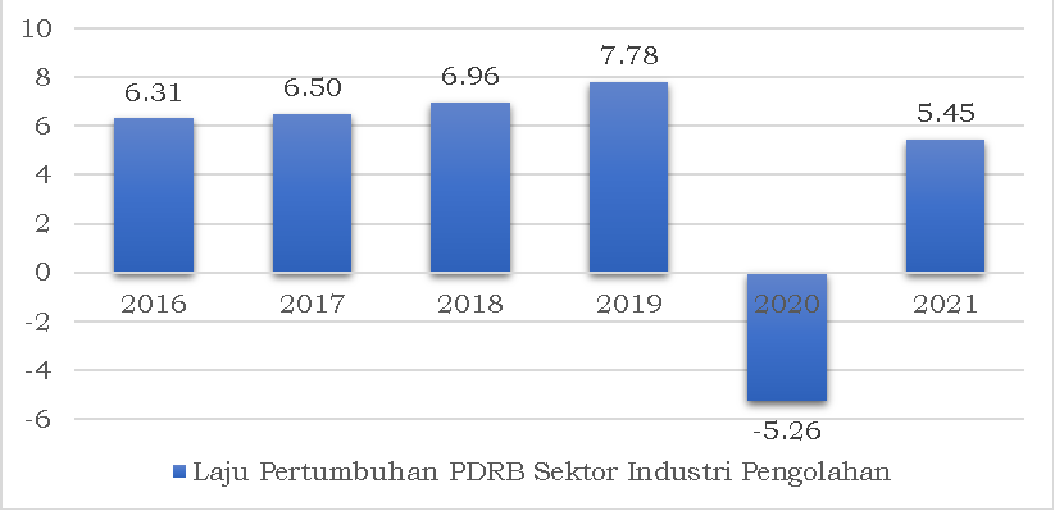

Gambar 2.98.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 2021 dan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Tercatat sejak 2017, pertumbuhan industri pengolahan terhadap PDRB adalah sebesar 6,50%. Peningkatan ini terjadi lagi di tahun 2018 yaitu sebesar 6,96%. *Trend* peningkatan ini bertahan sampai 2019 yang naik sebesar 7,78%. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar -5,26%. Penurunan ini disebabkan karena pertumbuhan sektor industri yang juga menurun. Hal ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 5,45%.

2. Pertumbuhan industri

Indikator ini menghitung seberapa pertumbuhan industri pengolahan Kabupaten Blitar.

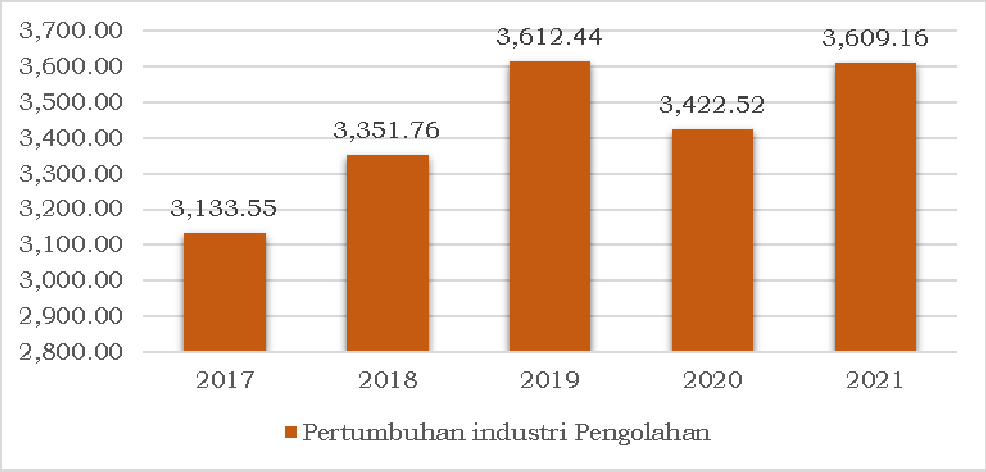

Gambar 2.99.
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Pertumbuhan industri di Kabupaten Blitar bergerak secara konsisten meningkat selama 3 tahun pertama, namun menurun di tahun 2020. Di 2017, besaran kontribusi sektor ini adalah sebesar 3.133,55 miliar rupiah. Pada 2018 sektor ini kembali meningkat menjadi 3.351,76 miliar rupiah dan kembali naik menjadi 3.612,44 miliar rupiah di 2019.

Di tahun 2020 menurun menjadi 3.433,52 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan hingga menjadi 3.609,16 miliar rupiah.

F. Perdagangan

Pesatnya kemajuan teknologi industri 4.0 mendorong pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) serta komoditas lain semakin mudah melakukan pemasaran ke luar negeri baik secara langsung maupun melalui eksportir dari kota lain. Salah satu kemajuan Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 telah berhasil memfasilitasi industri kerajinan Kendang Jimbe untuk melakukan ekspor secara mandiri ke Cina, dimana pada tahun-tahun sebelumnya komoditas ini diekspor melalui eksportir dari Kota Blitar. Selain furniture yang menjangkau pasar Amerika, Australia dan Belanda serta Kendang Jimbe melayani pasar China, produk IKM makanan juga tercatat masih eksis melakukan penjualan keluar negeri khususnya Hongkong di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hal ini mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk lebih fokus dalam pembinaan bagi pelaku ekspor sehingga semakin banyak yang mampu melakukan ekspor secara mandiri, guna meningkatkan nilai jual produk. Apabila dilihat dari perkembanganya, nilai ekspor Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 2.817.185.000,- atau mengalami penurunan 42% dibandingkan ekspor pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4.880.392.462,50,-. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan lalu lintas barang sebagai dampak adanya pandemi COVID-19.

Kondisi membaik pada tahun 2021, ditunjukkan dengan nilai ekspor yang meningkat sangat tajam dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp27995740118,30. Nilai tersebut merupakan total ekspor dari 9 (sembilan) perusahaan dengan komoditi ekspor meliputi furniture dan handycraft, kendang djimbe, bros/aksesoris, kain batik, aneka kripik,

jenang dan wajik, ikan mas koki dan ikan koi. Tujuan negara ekspor ke Belanda, Cina, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat dan Filipina.

Gambar 2.100.
Perkembangan Ekspor Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

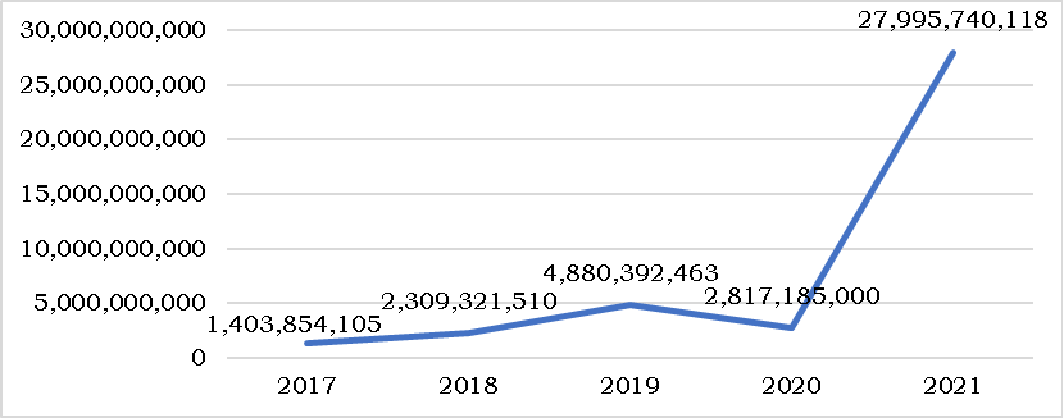

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2022

Indikator selanjutnya yang menjadi perhatian daerah adalah terlampauinya target Cakupan Bina Kelompok Pedagang atau Usaha Informal dengan telah dilaksanakannya pembinaan terhadap 100 pedagang informal dari target sebanyak 97 pedagang informal melalui kegiatan Audisi Abang PKL dan Asongan. Dengan audisi tersebut para peserta khususnya para pedagang kali lima dan asongan dibekali dengan berbagai *soft skill* dan pendampingan guna mengawal agar ilmu dan wawasan yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Disamping itu para peserta juga mendapatkan fasilitas jaringan pemasaran sehingga saat dievaluasi mereka diharapkan telah naik kelas menjadi pedagang informal yang tentunya berdampak pada tingkat pendapatan/kesejahteraannya. Dalam rangka mendukung upaya penanganan dampak Pandemi Covid-19, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar fokus pada upaya penanggulangan dampak ekonomi yang dilaksanakan sebagai langkah pemulihan ekonomi daerah dengan memberikan dukungan terhadap tenaga operasional di lapangan (pasar rakyat) dan pedagang serta masyarakat konsumen

diantaranya dengan pengadaan *face shield*, masker kain, *handscoon*, *thermo gun*, sabun cuci tangan, desinfektan, *sprayer* serta tandon air bagi pemenuhan kebutuhan pencegahan penularan COVID-19 di 13 pasar rakyat se- Kabupaten Blitar.

G. Transmigrasi

Indikator pada urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar adalah transmigran yang diberangkatkan dengan satuan kepala keluarga (KK). Berdasarkan pada LKPJ Kabupaten Blitar 2016-2020, pada tahun 2016 ada 8 KK yang diberangkatkan sementara di tahun 2017 hanya 2 KK dan menjadi hanya 1 KK di tahun 2018. Adapun di 2019 melonjak menjadi 10 KK transmigran yang diberangkatkan. Namun menurun drastis, pada tahun 2020, tidak ada yang diberangkatkan. Hal ini bekaitan dengan dampak covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 transmigran yang diberangkatkan kembali ada menjadi 3 KK.

H. Energi dan Sumber Daya Mineral

Variabel energi merupakan variabel dimana Kabupaten Blitar dapat memproduksi listrik yang disuplai baik untuk kegiatan rumah tangga, rumah tangga produksi, maupun industri. Selain penggunaan energi listrik, Kabupaten Blitar juga melakukan pencatatan penggunaan atau penyaluran air bersih melalui PDAM kepada rumah-rumah penduduk. Penggunaaan air dan listrik oleh masyarakat menjadi elemen penting fokus Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Potensi energi listrik terletak pada adanya pembangkit listrik yang berada di Karangkates yang merupakan salah satu pembangkit listrik yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 3 (tiga) daerah pembangkit yaitu UPJ Wlingi, UPJ Srengat, dan UPJ Sutojayan. Berikut merupakan statistik energi listrik di Kabupaten Blitar. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Blitar sangat dimungkinkan

memanfaatkan potensi sumber daya air yang melimpah, hal itu disebabkan Kabupaten Blitar dikelilingi beberapa gunung yang memiliki sumber-sumber air serta dialiri sungai brantas. Kedua sumber daya yang dimiliki telah memungkinkan pendapatan Kabupaten Blitar memiliki nilai yang cukup potensial. Berikut merupakan gambaran statistik energi listrik dan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.41
Pendapatan Listrik Negara Kabupaten Blitar 2016-2020

Tahun	Pelanggan PLN	Kapasitas Terpasang (MW)	Rasio Elektrifikasi (%)
2020	363.298	362.709	103,42
2019	353.689	340.293.349	97,35
2018	341.921	323.708.872	96,93
2017	85.938	82.495.846	95,11
2016	82.728	77.168.046	93,32

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2021

Tabel 2.42
Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan (Kubik) Tahun 2016-2021

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tempat Tinggal	12.815	13.425	13.742	14.130	14.106	
Hotel/Obyek Wisata	-	-	-	-		
Badan Sosial/Rumah Sakit	284	306	316	320	322	
Tempat peribadataan	-	-	-	-		
Sarana Umum	8	8	8	8	8	
Toko, Industri, Perusahaan	101	100	98	96	100	
Industri/Kantor Pemeritahan	30	29	30	31	32	
Lainya	-	-	-	-		
Kabupaten Blitar	13.238	13.868	14.194	14.585	14.568	14.961
Jumlah Pendapatan (Rp Ribu)	10.209.831	11.428.340	n/a	n/a	n/a	

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2021

Berdasarkan dua tabel di atas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya jumlah energi listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi

berikut jumlah pendapatan yang diterima sebagaimana ditunjukkan pada periode 2016-2017 selalu mengalami kenaikan. Selain itu tren kenaikan juga tercermin melalui jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang yang selalu mengalami kenaikan dari periode tahun 2016 hingga terakhir tahun 2020. Bersama dengan produksi yang selalu mengalami kenaikan, rasio elektrifitasnya pun dirasa sudah optimal untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Blitar (100%). Sementara itu terdapat penyusutan atau jumlah listrik yang dinyatakan hilang atau tidak terstatistik dengan variabel yang beragam setiap tahunnya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa variabel energi listrik di Kabupaten Blitar masih sangatlah potensial. Secara umum, pola yang sama pada sumber daya listrik ini juga terjadi pada sumber daya air yang dikelola PDAM, dimana terlihat bila pengguna dan jumlah pendapatan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2.1.3.3. Urusan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Parameter pencapaian pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya memiliki 3 (tiga) indikator yakni adanya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Capaian 3 indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.43
Indikator Capaian Urusan Perencanaan Kabupaten Blitar 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2022

Berdasarkan capaian indikator urusan perencanaan diatas dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD telah ada setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar telah tertib dalam menjalankan tahapan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

B. Keuangan

Dalam tatanan urusan keuangan internal pemerintahan Kabupaten Blitar dalam menjaga pembangunan yang konsisten menerapkan indikator/parameter Opini BPK dan hingga saat ini dengan catatan terakhir tahun 2019 capaian Opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Detail capaian tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Blitar 2016-2020

Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2020

Berdasarkan capaian tabel diatas kinerja keuangan Kabupaten Blitar masih relatif baik dan wajar tanpa adanya opini dan penilaian buruk dari BPK. Prestasi ini wajib untuk dipertahankan untuk menjaga

struktur keuangan serta menciptakan pemerintah Kabupaten Blitar akuntabel.

Tabel 2.45
Realisasi Indikator SDG's Urusan Keuangan Tahun 2015-2019

Indikator	Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	51,76%	49,40%	47,49%	50,88%	50,79%
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	87,65%	92,12%	94,82%	89,93%	92,66%
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	n/a	100%	100%	100%	100%
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	0,81%	0,76%	1,02%	0,74%	0,78%
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,21%	0,21%	0,23%	0,26%	0,26%
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	65,14%	71,89%	70,41%	n/a	n/a
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	n/a	n/a	0,008%	0.,006%	0,005%

Sumber: BAPPEDA: KLHS Kabupaten Blitar Tahun 2020

Berdasarkan indikator urusan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Blitar diantaranya adalah: Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui dan Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya merupakan indikator yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Blitar dan sudah mencapai target nasional. Sementara itu, untuk indikator Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah; Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; Jumlah proyek yang ditawarkan untuk

dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB merupakan indikator yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Blitar namun belum mencapai target nasional. Sedangkan untuk indikator Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik merupakan indikator yang belum memiliki ketersediaan data di Kabupaten Blitar.

C. Pengawasan

Urusan Pengawasan berkaitan dengan menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan, serta menjaga stabilitas pemerintah yang disiplin dan taat terhadap undang-undang. Wujud dari urusan pengawasan dimanifestasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah.

Dalam penilaian predikat SAKIP terdapat beberapa kriteria yang harus dipastikan terlaksana di pemerintah daerah dengan baik. Kriteria yang dimaksud adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. 5 kriteria tersebut dibentuk oleh KEMENPAN-RB sebagai wujud menciptakan pemerintah yang terarah dan terstruktur. Capaian urusan pengawasan dpat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Skor SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Inspektorat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B

Sumber: 1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021
2. LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

Dari sisi monitoring dan evaluasi hasil pengawasan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK tiga tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Urusan Pengawasan Kabupaten Blitar terkait Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK Tahun 2019-2021

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK Tahun 2019	798	90,98%
Rekomendasi BPK Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	726	
Yang belum ditindaklanjuti	69	
Rekomendasi BPK Tahun 2020 (Semester I)	825	99,52%
Rekomendasi BPK Tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti	821	
Yang belum ditindaklanjuti	4	
Rekomendasi BPK Tahun 2021 (Semester I)	891	99,6%
Rekomendasi BPK Tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti	888	
Yang belum ditindaklanjuti	3	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2022.

Sedangkan tindak lanjut hasil pengawasan internal disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.47
Capaian Urusan Pengawasan Kabupaten Blitar terkait Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi APIP Tahun 2019-2021

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi APIP Tahun 2019	1950	53, 5
Rekomendasi APIP Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	1044	
Yang belum ditindaklanjuti	906	
Rekomendasi APIP Tahun 2020	1603	44,1
Rekomendasi APIP Tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti	707	
Yang belum ditindaklanjuti	896	
Rekomendasi APIP Tahun 2021	1296	56,5%
Rekomendasi APIP Tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti	812	

Yang belum ditindaklanjuti	484	

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2022.

Dari sisi kompetensi, Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Blitar sudah mencapai Level 3 (integrated) sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor SP- 412/D3/04/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Blitar.

D. Pemerintahan

Sekretariat daerah adalah lembaga yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi yang dilakukan oleh sekretariat daerah adalah a). Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah; b). Pengkoordinasian Pengelolaan Keuangan Daerah; c). Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain; d). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah; e). Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; dan f). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Urusan Pelaksanaan Sekretariat Daerah menentukan 2 indikator sebagai parameter keberhasilan yakni nilai LPPD dan predikat nilai Kepuasan masyarakat. Capaian nilai indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

Sekretariat Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai LPPD	3,2038	3,1238	3,0624	N.A	N.A	N.A

Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Blitar, dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran perkapita dapat mengungkap mengenai pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik kondisi tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Berikut pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Blitar dari tahun 2016 sampai tahun 2020:

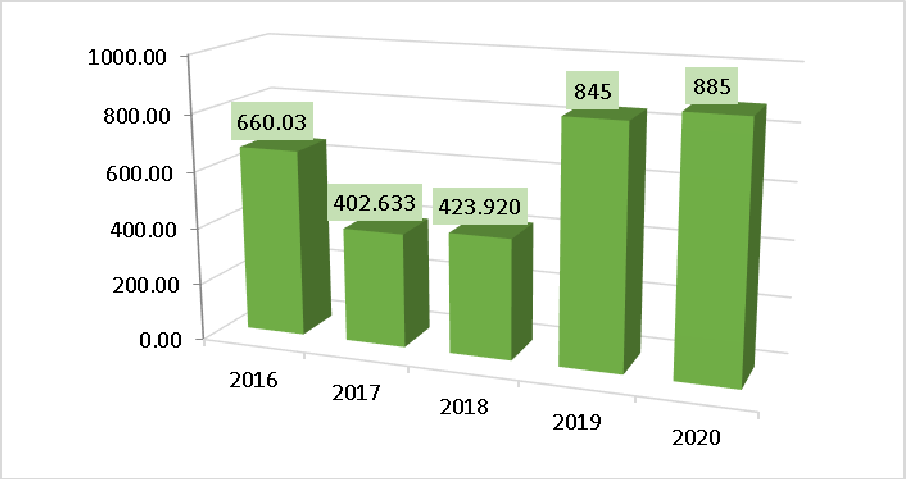

Gambar 2.101.
Pergerakan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Secara garis besarnya, pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan yang meningkat dalam tahun terakhir. Diketahui pada tahun 2016, besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah 660.03 rupiah. Kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 402.633 rupiah, dan meningkat menjadi 423.920 rupiah pada tahun 2018. Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 845 rupiah dan di tahun 2020 sebesar 885 rupiah. Capaian di tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 berturut-turut berada di atas angka 800 dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Indikator ini untuk mengukur persentase total pengeluaran rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, jika semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non pangan terhadap total pengeluaran, berarti semakin membaik tingkat perekonomian penduduk. Berikut pergerakan indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Blitar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

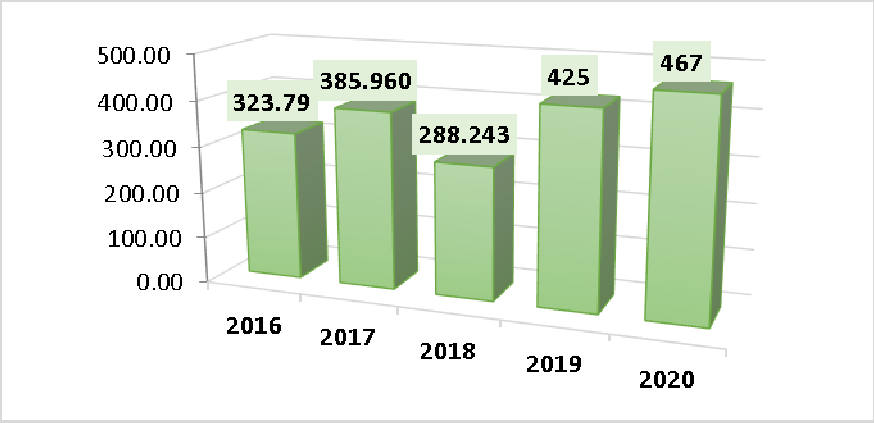

Gambar 2.102.
Pergerakan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pergerakan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Blitar mengalami kondisi yang meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita mencapai 323.79 rupiah, kemudian di tahun 2017 meningkat hingga mencapai 385.960 rupiah. Akan tetapi di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 288.243 rupiah, yang mana capaian ini lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Namun di tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai angka 425 rupiah dan menjadi 467 rupiah di tahun 2020.

3. Nilai Tukar Petani

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perbandingan antara indeks yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar oleh petani. Berikut pergerakan indikator nilai tukar petani Kabupaten Blitar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

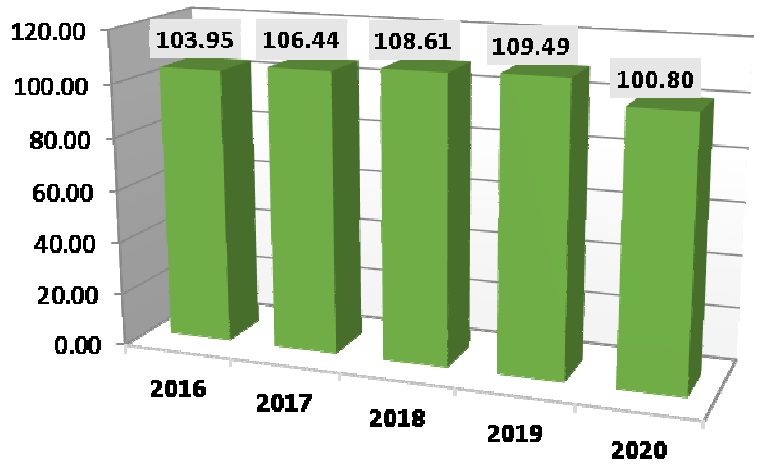

Gambar 2.103.
Pergerakan Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jika nilai tukar petani di Kabupaten Blitar cenderung naik dari tahun 2016 hingga tahun 2019,

akan tetapi menurun di tahun 2020. Pada tahun 2016 nilai tukar petani yang ada sebesar 103.95, kemudian naik mencapai 106.44 di tahun 2017, bertambah hingga mencapai 108.61 pada tahun 2018, dan bertambah kembali menjadi 109.49 pada tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan, menjadi 100.80 dan termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengartikan bahwa persentase perbandingan antara indeks yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar oleh petani pada tahun 2020 mengalami penurunan dan sangat rendah selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

A. Infrastruktur Jalan

Jalan dan jembatan sebagai bagian dari sarana dan prasarana perhubungan merupakan bidang yang penting dalam mendukung aktivitas perekonomian suatu daerah. Aspek sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lainya namun juga berperan sangat besar sebagai jalur distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini menandakan bahwa sarana dan prasarana yang layak dan memadai mutlak diperlukan untuk memastikan jalur distribusi perekonomian masyarakat serta arus barang dan jasa dapat berlangsung dengan mudah dan lancar. Selain itu dari sisi geografis kehadiran sarana dan prasarana perhubungan juga dapat memberikan peran sangat signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Mengingat hal tersebut, sangat perlu kiranya memberikan perhatian dan pembangunan bidang perhubungan agar masyarakat luas dapat melakukan mobilitas fisik dan mampu mengakses kondisi antar wilayah serta memudahkan distribusi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Optimalisasi pembangunan bidang perhubungan juga

dirasa sangat bermanfaat dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka mendukung langkah strategis dalam pembangunan bidang perhubungan tersebut, selanjutnya telah ditetapkan berbagai program yang dinilai mampu memecahkan permasalahan perhubungan di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.3
Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan, Kondisi & Kelas Jalan, 2016-2021 (Km)

KONDISI JALAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis Permukaan Jalan:						
Aspal	1.352,20	1.338,70	1.373,28	1.374,26	1.549,19	1.380,78
Kerikil	17,71	8,98	2,88	2,78	2,89	44,83
Tanah	557,00	162,85	7,11	6,23	6,22	23,65
Jumlah	1.926,91	1.510,53	1.383,27	1.383,27	1.558,30	1.558,30
Kondisi Jalan:						
Baik	439,88	537,54	567,92	853,07	463,47	777,65
Sedang	1680,00	440,60	484,05	198,94	629,44	440,04
Rusak Ringan	288,58	207,01	191,71	191,36	165,31	97,10
Rusak Berat	139,59	150,74	139,59	139,90	300,08	243,51
Jumlah	2548,05	1335,90	1.383,27	1.383,27	1.558,30	1.558,30

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 dan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tentang panjang jalan maupun kondisi jalan di Kabupaten Blitar menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 2016-2020 jumlah panjang jalan aspal di Kabupaten Blitar meningkat yang sebelumnya berjumlah 1.352,2 km pada tahun 2016 menjadi 1.549,19 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga menjadi 1.380,78.

Untuk jalan kerikil sebelumnya tercatat 17,71 km pada 2016 menjadi hanya 2,89 km pada tahun 2020. Selanjutnya jalan kerikil pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga menjadi 44,83 km. Hal tersebut juga terjadi pada jalan tanah yang berjumlah 557 km pada 2016 menjadi

hanya 6,22 km pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan hingga menjadi 23,65 km.

Selanjutnya, kondisi jalan rusak baik pada kategori rusak ringan maupun rusak berat dalam kurun waktu enam tahun terakhir terlihat jumlah keduanya semakin menurun. Pada jalan rusak ringan jumlahnya pada tahun 2016 adalah sebesar 288,58 km menjadi hanya 97,10 km pada tahun 2021. Namun pada jumlah rusak berat, terjadi peningkatan volume dalam waktu lima tahun terkahir dimana pada 2016 jumlahnya sebesar 139,59 menjadi 300,08 pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 243,51.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

A. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah. Tinggi rendahnya capaian angka kriminalitas yang terjadi di suatu daerah, dapat membuat para investor untuk mempertimbangkan investasi yang akan dilakukannya. Angka kriminalitas di Kabupaten Blitar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Berikut disajikan gambaran mengenai angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Blitar dari tahun 2016 hingga tahun 2020:

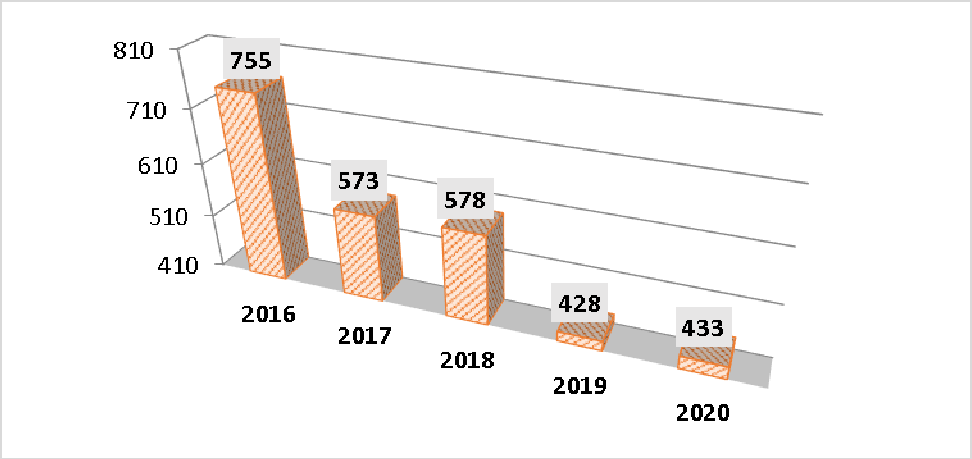

Gambar 2.104.
Angka Kriminalitas Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Blitar Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan kondisi angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Blitar mengalami fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika di tahun 2016 terdapat sebanyak 755 kasus kriminal, di tahun 2017 menurun menjadi 573 kasus, lalu sebanyak 578 kasus pada tahun 2018, menjadi 428 kasus di tahun 2019 dan di tahun 2020 terjadi sebanyak 433 kasus. Angka kriminal yang terjadi di tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2019, akan tetapi angka di tahun 2020 termasuk kecil jika dibandingkan pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini membuktikan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah berupaya untuk semakin menekan terjadinya kriminalitas di daerahnya untuk menjaga kondisi keamanan daerah.

B. Jumlah Demo

Jumlah demo menjadi salah satu cerminan kondusifitas iklim investasi di suatu daerah. Karena semakin banyak jumlah demo yang terjadi di suatu daerah, maka para investor akan merasa takut dan tidak nyaman untuk melakukan kegiatan investasi di daerah terkait. Di Kabupaten Blitar, jumlah demo yang terjadi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung dalam kondisi yang stagnan atau tetap. Berikut disajikan dalam bentuk grafik untuk jumlah demo yang terjadi di Kabupaten Blitar selama tahun 2016 hingga 2020:

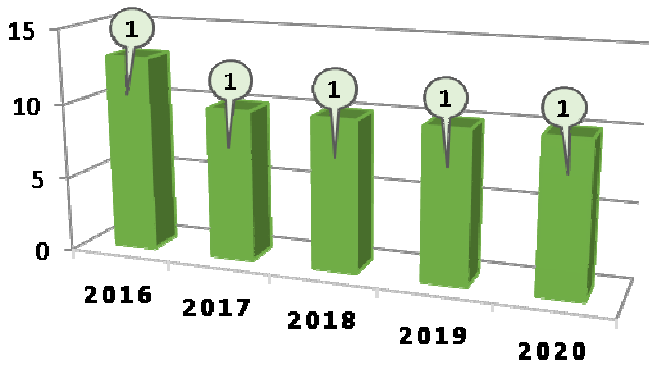

Gambar 2.105.

Pertumbuhan Jumlah Demo Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 13 kali kejadian demo, namun jumlah tersebut menurun pada tahun-tahun berikutnya. Selama tahun 2017 terjadi 10 kali kejadian demo di Kabupaten Blitar dan jumlah kejadian demo tersebut bertahan dengan nilai tetap hingga tahun 2020.

C. Lama proses perijinan usaha/SIUP TDP (hari)

Kecepatan dalam proses administrasi perizinan penanaman modal menjadi faktor pendukung iklim berinvestasi di suatu daerah. Di Kabupaten Blitar, lama proses perijinan usaha/SIUP TDP (hari) mengalami penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020.

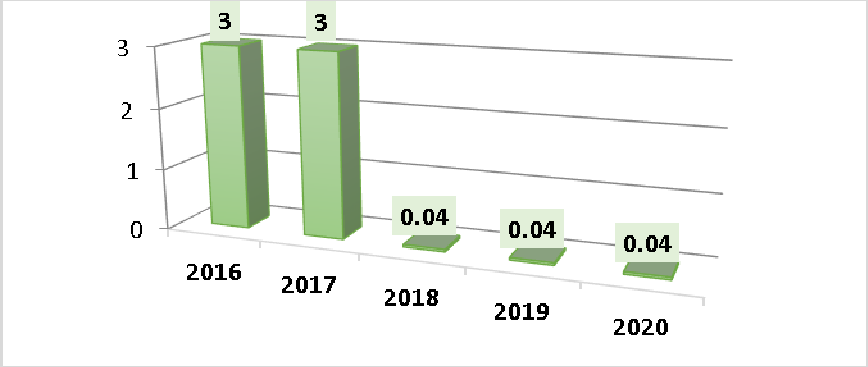

Gambar 2.106.
Pertumbuhan Lama Proses Perijinan Usaha/SIUP TDP (hari)
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021

Diketahui bahwa di tahun 2016 hingga tahun 2017 lama proses perijinan usaha di Kabupaten Blitar adalah 3 hari kerja, namun di tahun 2018 menurun menjadi 0,04 atau kurang dari 1 hari kerja dan capaian ini bertahan hingga tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa semakin cepat proses perijinan usaha di Kabupaten Blitar. Semakin cepat proses perijinan usaha, maka semakin meningkatnya motivasi para investor untuk melakukan investasi. Begitupun sebaliknya, jika proses perijinan

usaha yang dilakukan daerah membutuhkan durasi yang lama, maka akan mempersulit iklim nvestasi di daerah itu sendiri.

D. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor determinan dalam masuknya investor di suatu daerah. Kabupaten Blitar memiliki jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2019 dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak 40. Angka tersebut terus bertahan dari tahun 2016 hingga pada akhir tahun 2019. Sehingga dapat diketahui jika dari tahun ke tahun yaitu 2016 hingga 2019, pemerintah daerah Kabupaten Blitar tidak menambah ataupun mengurangi jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di wilayahnya.

E. Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda/Perbup di Kabupaten Blitar yang mendukung kaitannya dengan iklim usaha selama periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Berikut disajikan gambaran grafik terkait pertumbuhan jumlah Perda/Perbup di Kabupaten Blitar yang mendukung iklim usaha:

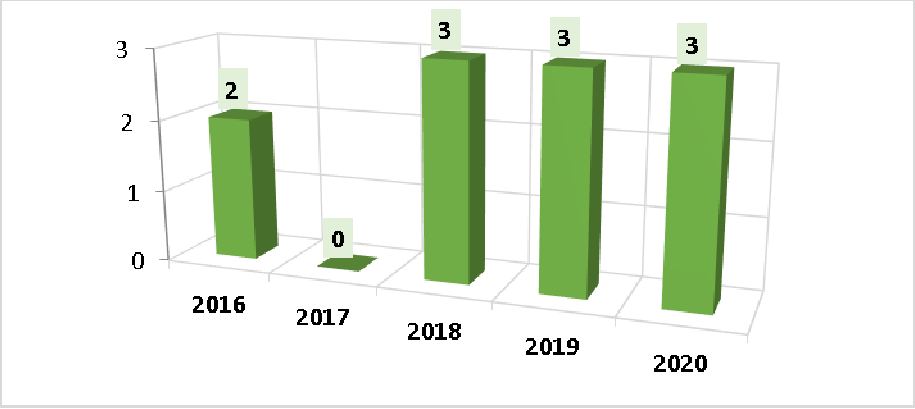

Gambar 2.107.
Pertumbuhan Jumlah Perda/Perbup yang Mendukung Ilkim Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada tahun 2016 terdapat 2 peraturan yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Blitar, namun di tahun 2017 tidak ada peraturan yang mengatur sama sekali. Akan tetapi di tahun 2018 meningkat menjadi 3 peraturan yang ada di Kabupaten Blitar untuk mendukung iklim usaha, dan dapat bertahan hingga pada tahun 2020 dengan jumlah yang tetap.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio ketergantungan (%)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pension). Berikut pertumbuhan indikator rasio ketergantungan Kabupaten Blitar dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

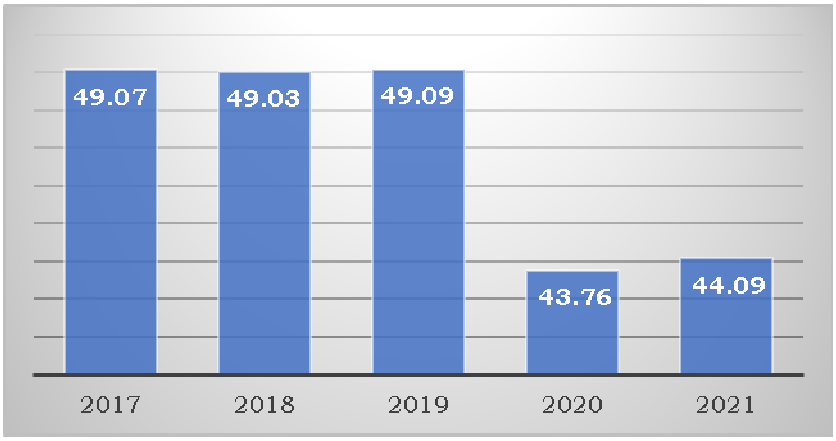

Gambar 2.108.
Rasio Ketergantungan (%) Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa, pertumbuhan rasio ketergantungan pada periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari 49,09% menjadi 43,76%. Namun pada tahun berikutnya mengakami peningkatan menjadi 44,09%. Nilai ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia kerja (dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 44 orang yang belum atau dianggap sudah tidak produktif lagi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Subbab ini menyajikan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD sejak tahun pertama periode RPJMD sampai dengan tahun berjalan (2022) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Mengingat periode RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang dimulai tahun 2022 sebagai tahun pertama sampai dengan tahun 2026 (5 tahun), maka pada subbab ini tidak menyajikan capaian indikator kinerja beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan beberapa tahun terakhir sampai dengan athun lalu (2021) merupakan pelaksanaan dari RPJMD periode lalu yaitu RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Namun untuk memberikan gambaran kinerja pembangunan periode yang lalu sebagai masukan bagi pembangunan tahun depan, maka pada subbab ini disajikan capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulan I 2022 disajikan pada Lampiran. Tabel tersebut

memuat informasi target dan realisasi kinerja serta pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat						
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	**a. Pertumbuhan ekonomi (%)**	**5,07**	**5,10**	**5,12**	**-2.29**	**3,02**
	b. Indeks Gini	**0,37**	**0,38**	**0,33**	**0,348**	**0,328**
1.1. Menurunnya angka kemiskinan	a. Angka Kemiskinan (%)	9,80	9,72	8,94	9,33	9,65
	b. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	27,44	29,52	31,40	30,59	n.a
	c. Indeks Daya Beli	0,6961	0,7112	0,7266	0,7207	0,72
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,99	3.37	3,05	3,82	3,66
1.2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	78,83	79,94	80,01	83,77	n.a
Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum						
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	**Persentase penegakan PERDA (%)**	**95**	**95**	**95**	**95**	n.a
2.1. Terwujudnya stabilitas wilayah	a. Persentase penanganan konflik (%)	100	100	100	100	90
	b. Persentase penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	n.a
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)						
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,33	69,93	70,57	70,58	71,05
3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,5873	0,5879	0,5888	0,5924	0,60

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.2. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8152	0,8178	0,8214	0,8234	0,82
3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	77,15	78,02	79,05	80,32	79,68
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**n.a**	**n.a**	**58,00**	**60,66**	**61,81**
4.1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
	b. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	3,1238	3,0624	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis
	c. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a
4.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing						
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	**PDRB ADHB (juta rupiah)**	**31.654.359,64**	**34.203.382,48**	**36.447.136,40**	**36.023.963,40**	**37.819.725,50**
5.1. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan	a. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,95	7,16	6,29	-7.25	5,83

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
pariwisata						
	b. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,5	6,96	7,78	-5.26	5,45
	c. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	2,19	1,15	1,62	0,06	0,01
	d. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	3.199.703	4.223.855	5.742.647	4.274.781,21	n.a
5.2. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	Baik	Baik	n.a
5.3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,79	69,5	69,9	66,74	65,53
	b. Persentase Ketaatan Tata Ruang	79	80	80	70	n.a
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan						
6. Meningkatkan kemandirian desa	**Persentase Desa Berstatus Pratama (%)**	**15,9**	**0,91**	**0,45**	**0**	n.a
12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa berstatus pratama (%)	15,9	0,91	0,45	0	n.a

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kabupaten Blitar, 2022

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan atau kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Konsep tersebut memberikan batasan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang direncanakan. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, maka dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana diuraikan pada subbab ini.

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Indeks Gini Kabupaten Blitar mengalami kenaikan

   Indeks Gini Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Blitar mencapai 0,37 dan mengalami kenaikan serta penurunan hingga menjadi 0,358 ditahun 2021.
2. Masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2019 naik dari 5,1 ditahun 2018 menjadi 5,12 namun tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi -2,29. Selanjutnya pada tahun 2021 seiring dengan mulai melandainya pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar kembali naik hingga menjadi 3,02. Walau mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Blitar belum pulih sepenuhnya dan masih perlu upaya bersama untuk tahun-tahun mendatang.

3. Angka kemiskinan masih cukup tinggi

   Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 9,33 persen (2020) dan 9,65 persen (2021). Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin ini perlu diwaspadai agar dapat ditangani dengan tepat dan selaras dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

4. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar

   Pada tahun 2021 nilai IDG di Kabupaten Blitar sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 79,68.

2.3.2. Aspek Pelayanan Umum

Pada Aspek Pelayanan Umum terdapat beberapa permasalahan yang dijabarkan pada setiap urusan antara lain:

A. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Layanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan pada urusan pendidikan antara lain:

a. Menurunnya Angka Melek Huruf di Kabupaten Blitar.

b. Menurunnya APS untuk jenjang SD/MI dan Paket A dan SMP/MTs dan Paket B.

c. APM SMP/MTS masih tergolong rendah, kondisi ini dikarenakan kondisi sosial budaya di Kabupaten Blitar yang masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran pentingnya Pendidikan.

d. Ketersediaan fasilitas sekolah untuk jenjang SMP/MTS penting ditingkatkan, mengingat rasio Sekolah terhadap penduduk usia sekolah meningkat cukup signifikan.

2. Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan pada urusan kesehatan yaitu:

a. Meningkatnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Blitar yaitu 6,84 di tahun 2020 dan 7,82 pada tahun 2021.

b. Pelayanan kesehatan untuk anak masih perlu ditingkatkan mengingat masih tingginya angka stunting di Kabupaten Blitar.

c. Ketersediaan fasilitas Kesehatan rujukan di Kabupaten Blitar masih minim sehingga pelayanan kesehatan masih sangat minim.

d. Peningkatan prevalensi gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita yang datang dan ditimbang ke posyandu kurang dari target yaitu sejumlah 35.112 balita dari target sasaran yang seharusnya 83.547 balita. Hal ini disebabkan banyak balita yang tidak hadir karena kekhawatiran keluarga balita tertular COVID-19.

e. Rasio rumah sakit (TT) per satuan penduduk

Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Tahun 2020 Kabupaten Blitar memiliki 8 Rumah Sakit yang terdiri dari 1 RSUD tipe B Pendidikan, 1 RSUD tipe C, 1 RS Swasta tipe C, dan 5 RS Swasta tipe D dengan jumlah total tempat tidur (TT) sebanyak 771 TT dan jumlah penduduk sebanyak 1.163.789 jiwa. Rasio Rumah Sakit (TT) per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 1: 1.509 dari target sebesar 1: 1.500. Sedangkan sesuai standar idealnya rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 1: 1.000.

f. Rasio dokter per satuan penduduk

Data rasio Dokter per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Dokter terhadap penduduk. Rasio Dokter tahun 2020 adalah 1: 4.375 dapat dikatakan tercapai apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan sebesar 1: 5.310. Namun bila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Dokter idealnya melayani 2.500 penduduk berarti Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga dokter. Total jumlah tenaga Dokter di Kabupaten Blitar tahun 2020 adalah sebanyak 266 orang.

g. Rasio perawat per satuan penduduk

Data rasio Perawat per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Perawat terhadap penduduk. Rasio jumlah Perawat terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1: 1.641 dari target sebesar 1: 1.500. Sesuai standar nasional idealnya 1 Perawat melayani 585 penduduk yang artinya Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga perawat. Jumlah total perawat di Kabupaten Blitar adalah sebanyak 709 Perawat.

h. Rasio bidan per satuan penduduk

Data rasio Bidan per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Bidan terhadap penduduk. Rasio jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1: 1.847 dari target sebesar 1: 2.000. Bila dibandingkan dengan target masih belum tercapai dan apabila dibandingkan dengan standar bahwa 1 Bidan idealnya melayani 1.000 penduduk berarti Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga Bidan. Adapun jumlah Bidan di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 adalah sebanyak 630 Bidan.

i. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2020 sebesar 99,98% dari total jumlah ibu melahirkan sebanyak 15.526 persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan belum bisa 100% dikarenakan ada 2 persalinan yang tidak di fasilitas pelayanan Kesehatan.

j. Cakupan Desa UCI (%)

Capaian cakupan Desa UCI tahun 2020 adalah sebesar 91,84% dari target sebesar 93,5%. Penurunan capaian Desa UCI ini sangat

dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dalam masa pandemic COVID-19 kegiatan imunisasi mengalami beberapa kendala diantaranya:

1) Pada awal terjadinya pandemi belum ada pedoman pelaksanaan imunisasi pada masa pandemic, sehingga imunisasi yang seharusnya berjalan sesuai jadwal sempat tertunda dan hanya dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) saja.
2) Pada awal masa pandemi belum tersedia Alat Pelindung Diri yang cukup untuk petugas imunisasi dan kader posyandu.
3) Setelah adanya pedoman imunisasi dalam masa pandemi, tata cara imunisasi diganti dengan cara mengundang sasaran ke fasilitas pelayanan Kesehatan, tetapi ada beberapa sasaran yang tidak hadir karena alasan kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19.

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC tahun 2020 sebesar 23,3% dari target sebesar 32,25%. Dari target penemuan kasus sebesar 2.575 kasus ditemukan 601 kasus atau atau sebesar 23,3%. Capaian penemuan terduga TBC dan kasus yang diobati tersebut diperoleh dari 31 layanan yang ada di Kabupaten Blitar yang terdiri dari 24 Puskesmas, 2 RSUD dan 5 RSU Swasta. Penemuan kasus di tahun 2020 ini jika dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan karena pada Semester Pertama tahun 2020 kegiatan investigasi kontak sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Namun dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kegiatan investigasi kontak bisa berjalan Kembali dengan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat. Upaya mendorong penemuan kasus TBC di Kabupaten Blitar terus dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan yang bersifat aktif dan massif baik yang dilakukan oleh layanan Puskesmas maupun oleh lintas sector yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Blitar. Pelibatan kader

peduli TBC yang ada di level Puskesmas juga ditingkatkan untuk kegiatan Investigasi Kontak guna peningkatan capaian terduga TBC.

l. Cakupan Pustu

Cakupan Pustu di Kabupaten Blitar sebesar 27.42% tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2020 karena tidak ada penambahan jumlah Pustu di Kabupaten Blitar.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar antara lain:

a. Menurunnya Persentase Ketaatan Ruang dari yang semula 80% pada tahun 2019 menjadi hanya 70% di tahun 2020.
b. Menurunnya Drainase dalam kondisi baik menjadi hanya 148,67 Km pada tahun 2020 dari yang semula 348,38 Km di tahun 2019.
c. Menurunnya pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota.
d. Menurunnya Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.
e. Bangunan Liar di Sepanjang Sempadan Sungai Stagnan Tidak Berkurang.
f. Irigasi dalam kondisi baik belum konsisten meningkat.
g. Gap Rasio RTH Kabupaten Blitar terhadap mandat UU masih besar.
h. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan.
i. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur teknis dibidang jalan dan jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada.
j. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan.
k. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan.

l. Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA).
m. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan.
n. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir).
o. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
p. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
q. Belum ditetapkannya RDTR sebagai salah satu acuan pengembangan wilayah.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pada urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar antara lain:

a. Menurunnya rumah tangga pengguna listrik menjadi 77% di tahun 2020, dari yang semula 100% pada tahun 2019.
b. Masyarakat yang terakses air bersih untuk konsumsi dan keseharian belum keseluruhan. Kondisi topografi wilayah dan jarak antar rumah menjadi tantangan distribusi air bersih.
c. Pergerakan kenaikan rumah bersanitasi lamban.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

a. Menurunnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dan kegiatan pembinaan politik daerah.
b. Menurunnya angka rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.
c. Angka pertumbuhan cakupan patroli Satpol PP mengalami penurunan, sementara jumlah aparat Satpol PP dan PPNS Satpol PP yang ada saat ini belum mencukupi.
d. Kurangnya sarana prasarana terutama mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran.
e. Produk hukum/perda yang belum memuat sanksi yang jelas atau sanksi belum bisa membuat efek jera atau jangka waktu sanksi yang terlalu pendek.
f. Terkait penampungan anjal dan gepeng dari operasi penertiban merupakan ranah Dinas Sosial (Satpol PP hanya penertiban anjal dan gepeng).

6. Urusan Sosial

Beberapa Permasalahan pada Urusan Sosial yaitu:

a. Menurunnya Persentase penanganan konflik
b. Cenderung menurunnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari yang semula 37,74% di tahun 2017 menjadi hanya 29,14% di tahun 2020.
c. Cenderung menurunnya persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari yang semula 15,05% di tahun 2017 menjadi hanya 5,90% pada tahun 2020.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Layanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja yaitu:

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran terbuka yang dibarengi dengan menurunnya jumlah angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK
b. Menurunnya angka pencari kerja yang terdaftar.
c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).
d. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya.
e. Terbatasnya lowongan pekerjaan di wilayah Kabupaten Blitar karena perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar paling banyak adalah perusahaan kecil dan menengah, sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
f. Masih tingginya minat masyarakat Kabupaten Blitar untuk bekerja ke luar negeri, namun perlindungan terhadap CTKI/TKI belum maksimal.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak antara lain:

a. Masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
b. Masih rendahnya persentase partsipasi perempuan di lembaga swasta.
c. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Masih rendahnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

3. Urusan Pangan

Berdasarkan data tahun 2021, pada urusan pangan tidak ditemui permasalahan ketersediaan pangan utama sebab terjadi surplus. Kondisi ini bila dipertahankan, maka perlu dibuat strategi untuk dapat mengekspor pangan utama ke daerah lain tanpa mengurangi pemenuhan pangan dalam daerah.

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanahan yaitu masih rendahnya persentase luas lahan bersertifikat yaitu masih di angka 50% pada tahun 2020.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan Lingkungan Hidup antara lain:

a. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
b. Menurunnya Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
c. Menurunnya Indeks Tutupan Lahan

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

a. Jumlah SDM aparatur untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencukupi.
b. Masih diperlukan beberapa penyesuaian kecukupan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga tersedia sebuah gudang arsip yang memadai dan berfungsi optimal. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki risiko kerusakan, bencana alam, dan kebakaran. Oleh

karenanya, selain ketersediaan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu:

a. Cenderung menurunnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
b. Menurunnya pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

a. Rasio akseptor KB mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diwaspadai sebab jumlah PUS cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
b. Menurunnya Unmet Need KB.
c. Menurunnya Data ASFR.
d. Adanya Perda retribusi pelayanan yang dinilai cukup tinggi sehingga membuat masyarakat enggan menjadi akseptor KB.
e. Pandemi Covid-19 yang melanda nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat pada awal tahun 2020 memicu resiko terjadinya *Baby Boom* di masa pandemi dan akan sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Dalam hal ini, Dinas PPKBP3A menginisiasi terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188/ 84/409.06/KPTS/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

9. Urusan Perhubungan

Beberapa Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Perhubungan yaitu:

a. Jumlah pengguna/penumpang angkutan umum (transportasi publik) menurun drastis.
b. Menurunnya Jumlah Uji KIR Angkutan Umum.
c. Menurunnya Jumlah Angkutan Darat.
d. Persentase kepemilikan KIR rendah dan menurun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraan dan disisi lain terdapat kondisi kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor.
e. Status kepemilikan lahan terminal masih belum terselesaikan.
f. Jumlah jukir dan sarpras parkir tidak sesuai dengan lokasi potensi parkir.
g. Kurang tersosialisasinya ANDALALIN.
h. Jumlah SDM perawatan yang tidak sebanding dengan jumlah perlengkapan keselamatan jalan.
i. Sering terjadi keterlambatan informasi kerusakan.
j. Kurangnya sarpras pendukung perbaikan perlengkapan keselamatan jalan.
k. Kewenangan penyelenggaraan perkerataapian di wilayah masih belum jelas.
l. Penyebaran Covid-19 merupakan ancaman bagi semua sektor dan akan berdampak luas termasuk sektor perhubungan. Dengan adanya mobilitas orang dan/atau barang maka sektor transportasi merupakan salah satu sumber penyebaran Covid-19. Deteksi dini penyebaran Covid-19 belum optimal dilakukan di fasilitas–fasiltas transportasi.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah menurunnya jumlah statiun tv/radio lokal yang melakukan penyiaran pada tahun 2020.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

a. Jumlah Usaha Mikro masih sedikit.
b. Menurunnya jumlah UM non BPR/LKM UM.

12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal adalah menurunnya jumlah investor berskala nasional yang juga diikuti dengan menurunnya nilai investasi berskala nasional.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah menurunnya jumlah klub olahraga dan jumlah kegiatan olahraga.

14. Urusan Kebudayaan

Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Kebudayaan yaitu

a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan. Penurunan ini karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat. Pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas tidak berjalan maksimal terutama pelaksanaan pagelaran seni budaya dalam daerah maupun luar daerah.
b. Kurang diminatinya wisata museum oleh masyarakat.

c. Belum adanya team ahli cagar budaya.
d. Belum adanya tenaga administrasi di museum daerah.

15. Urusan Perpustakaan

Permasalahan umum terkait penyelenggaraan Urusan Perpustakaan yaitu menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan terutama sejak tahun 2020 yang disebabkan adanya pembatasan kunjungan dan adanya pembatasan waktu kunjungan karena adanya pandemi Covid-19.

C. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2020:

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Peternakan dan Perkebunan terus mengalami penurunan.
b. Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Terus Menurun.
c. Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB terus menurun.
d. Kontribusi Subsektor Tanaman Holtikultura terhadap PDRB terus menurun dan memiliki kontribusi terhadap PDRB yang relatif rendah.
e. Komposit pembentuk produktivitas tanaman pangan yaitu produktivitas padi ladang cenderung menurun.

2. Urusan Perikanan

Permasalahan pada urusan Perikanan antara lain:

a. Cakupan pembinaan kelompok nelayan di bawah 45%.
b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan mengalami penurunan. Penurunan produksi perikanan (khususnya perikanan laut) disebabkan La Nina (basah berhujan) tersebut dapat mempengaruhi

hasil tangkapan laut. La Nina menyebabkan arus laut cukup kencang dan perbedaan antara arus di permukaan laut dan arus di bawah laut Selain itu, pada masa pandemi Covid-19, permintaan akan konsumsi ikan menurun.

c. Kondisi cuaca yang ekstrim menutut untuk sigap dalam mengantisipasi kejadiam kasus penyakit.

d. Perlu adanya regulasi peraturan perundangan mengenai kerjasama pengelolaan TPI antaran pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

3. Urusan Pariwisata

Beberapa permasalahan pada urusan Pariwisata antara lain:

a. Industri pariwisata cenderung lesu dilihat dari jumlah pajak usaha sektor kepariwisatan yang rendah padahal memiliki jumlah kunjungan wisata dengan peningkatan yang relatif tinggi.

b. Jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan.

c. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pasar pariwisata di Kabupaten Blitar melemah. Anggaran daerah lebih diorientasikan untuk upaya penangan Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya, sehingga beeberapa kegiatan teknis pengembangan dan pemasaran tidak teranggarkan/dikurangi anggarannya.

d. Kegiatan Pembinaan SDM kepariwisataan dan kreatif tidak bisa dijalankan secara optimal karena adanya pembatasan atau protokol kesehatan.

4. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Perindustrian Kabupaten Blitar yakni:

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan masih terbilang rendah yaitu baru mencapai 5,45% di tahun 2021.

b. Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan.

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan dalam melaksanakan urusan perdagangan Kabupaten Blitar yakni:

a. Meskipun nilai ekspor tahun 2021 meningkat sangat tinggi dibandingkan tahun 2020, namun sebagian perusahaan yang melakukan ekspor pada tahun-tahun sebelumnya tidak melanjutkan aktivitas ekspornya sampai tahun 2021.
b. Pembinaan terhadap kelompok pedagang atau usaha informal diharapkan tidak hanya 100 kelompok, namun dapat bertambah jumlah dan kualitas atau jenis pembinaannya.

6. Urusan Transmigrasi

Permasalahan dalam melaksanakan urusan Transmigrasi Kabupaten Blitar yakni pada tahun 2020 tidak ada penduduk yang diberangkatkan untuk bertransmigrasi. Hal ini berkaitan dengan Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah pendaftar transmigrasi sejumlah 20 KK, namun karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, maka hanya dapat diberangkatkan transmigran sejumlah 3 (tiga) KK.

D. Urusan Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintah

1. Urusan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Keuangan Kabupaten Blitar yakni:

a. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya cenderung mengalami penurunan.
b. Menurunnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

2. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yakni menurunnya nilai LPPD di Kabupaten Blitar.

2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Nilai Tukar Petani mengalami penurunan.
2. Panjang lalan dalam kondisi aspal mengalami penurunan.
3. Masih tingginya anga kriminalitas.

2.3.4. Permasalahan Pembangunan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran

Permasalahan pembangunan selain bersumber dari pencapaian data-data pembangunan atau kinerja perangkat daerah juga bersumber dari masukan pokok-pokok pemikiran DPRD. Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun dengan

berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunananya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Berikut

merupakan isu atau permasalahan yang diangkat dalam pokir DPRD.

No.	Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1.	Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial	- Pemenuhan/Peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif	- Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Perikanan - Pelatihan Budidaya Ikan - Pengembangan Daya Tarik Wisata - Pengembangan Ekonomi Kreatif - Pembinaan SDM Pariwisata
3.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD, dan Peningkatan Pendapatan Daerah	- Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan BUMDesma. - Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial.
4.	Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan.	- Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan - Penyediaan Perlengkapan Jalan. - Normalisasi saluran air/sungai - Penataan Kawasan

		Permukiman yang sehat. - Pelestarian Sumber Mata Air - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pertanian
5.	Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan	- Peningkatan Kualitas Produk UMKM - Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi. - Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi. - Fasilitasi Produksi Olahan Makanan, Minuman, dan Kerajinan UKM yang telah memiliki rintisan usaha. - Pemasaran Pariwisata.

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan pembangunan daerah diprioritaskan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Jenis SPM terdiri atas

SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

Penerapan SPM pada tahun 2021 telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah pengampu sesuai kewenangan masing-masing. Adapun pelaksanaan SPM tahun 2021 di Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam urusan Pendidikan dalam implementasinya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2021 melalui 15 Program dan 72 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.765.941.599.541,99 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 753.820.745.070,05 (98,42%).

Tabel 2.5

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**				
		Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1 Jumlah yang harus Dilayani	33,788	31,827	1,961	94.20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	
	2 Buku Gambar	31,827	31,827	0	100 %
	3 Alat mewarnai	31,827	31,827	0	100 %
	4 Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	759	238	521	31.36%
	5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	21,506,400,000	19,127,100,000	2,379,300,000	88.94 %
	Kualitas				

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	6 tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	638	638	0	100.00 %
	7 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,136	1,136	0	100.00 %
	8 jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	759	759	0	100 %
2	**Pendidikan Dasar**				
		Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1 Jumlah yang harus Dilayani	162,556	144,460	18,096	88.87 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	
	2 Buku Teks Pelajaran	144,460	144,460	0	100%
	3 Perlengkapan Belajar	144,460	144,460	0	100%
	4 Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	763	569	194	74.57 %
	5 Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	763	632	131	82.83 %
	6 jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	779	679	100	87.16 %
	7 satuan pendidikan yang berakreditasi	779	679	100	87.16 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	minimal c				
	8 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1,452,106,000	1,437,280,000	14,826,000	98.98 %
	9 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6,650	6,650	0	100%
3	**Pendidikan Kesetaraan**				
		Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1 Jumlah yang harus Dilayani	24,869	707	24,162	2.84 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	
	2 Modul Belajar	707	707	0	100%
	3 Perlengkapan Belajar	707	707	0	100%
	4 Jumlah rombongan belajar di PKBM	6	6	0	100%
	5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	7,260,800,000	7,260,800,000	0	100%
	6 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7	7	0	100%
	7 Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	2	4	33.33 %
	8 Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	6	2	4	33.33 %
	9 PKBM Terakreditasi minimal C	6	2	4	33.33 %

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan SPM pendidikan, yaitu:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan pendidikan, khususnya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan khususnya guru tidak tetap, dan pemerataan penyebaran dan penataan tenaga guru masih belum optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
3. Belum maksimalnya pemenuhan pembiayaan operasional beberapa SD dan SMP, serta pemenuhan biaya tenaga guru dan biaya sarana prasarana.
4. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
5. Perpustakaan belum memiliki tenaga fungsional pustakawan yang memiliki keahlian dan kompetensi mengelola perpustakaan, sehingga Perpustakaan umum daerah yang belum bisa diusulkan terakreditasi.
6. Infrastruktur penyelenggaraan pelayanan perpustakaan secara online dan alih media buku elektronik masih sangat berbatas, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai bahan bacaan dan pelayanan lebih lama dan lambat.
7. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa masih rendah.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam menyelesaikan permasalahan, antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi dan pemberdayaan komite sekolah melalui fasilitasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar terus ditingkatkan.
2. Melaksanakan pemetaan guru per sekolah serta redistribusi guru sehingga kebutuhan guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),

serta memprioritaskan kebutuhan guru di daerah terpencil dengan memenuhi fasilitasi dan jaminan hidupnya.

3. Memanfaatkan BOS Affirmasi untuk menopang kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir dalam BOS reguler.
4. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
5. Mengusulkan formasi tenaga fungsional pustakawan dan perpustakaan daerah segera diusulkan akreditasi.
6. Peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dalam pengembangan layanan online dan akses sumber bacaan digital dilakuka secara bertahap.
7. Sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat desa dalam pengembangan perpustakaan desa (taman bacaan masyarakat) terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

2. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada 2021 Dinas Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 125.080.406.211 dan dapat direalisasikan 138,22% atau sebesar Rp. 172.883.174.171,08. Capaian tersebut dihitung setelah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 47.802.767.960,08 melalui 7 program dan 62 kegiatan. Sementara, RSUD melalui 3 program dan 4 kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategisnya "Meningkatnya pelayanan rujukan yang paripurna" merealisasikan 152,03% dari alokasi anggaran atau sebesar Rp. 130.746.575.730,48 dari Rp. 86.000.000.000. Pelampauan realisasi keuangan tersebut disebabkan

karena adanya tambahan anggaran sebesar Rp. 44.746.575.730,48 pada tahun 2021.

Tabel 2.6

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN BLITAR**				**85.29%**
1	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan**			**91.08%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
		17,133	14,078	**3,055**	**82.17%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1 Buku KIA	14,078.00	14,078.00	0	100.00%
	2 Tablet Tambah Darah	14,078.00	14,078.00	0	100.00%
	3 Vaksin Tetasus Difetri (Td)	14,078.00	14,078.00	0	100.00%
	4 Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	14,078.00	14,078.00	0	100.00%
	5 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14,078.00	14,078.00	0	100.00%
2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan**			**89.54%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	
		16,354	12,932	3,422	79.08%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	12,932.00	12,932.00	0	100.00%
	2 Buku KIA	12,932.00	12,932.00	0	100.00%
	3 Formulir Photograf	12,932.00	12,932.00	0	100.00%
3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan**			**94.42%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang**	**yang belum terlayani**	**88.85%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
			terlayani		
		15,575	13,838	1,737	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1 Vaksin Hepatitis BO	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
	2 Vitamin K1 Injeksi	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
	3 Salep/Tetes Mata Antibiotik	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
	4 Formulir Bayi Baru Lahir	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
	5 Formulir MTBM	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
	6 Buku KIA	13,838.00	13,838.00	0	100.00%
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan**			**99.23%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	98.47%
		64,104	63,122	982	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Formulir DDTK	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	2 Buku KIA	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	3 Vitamin A Biru	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	4 Vitamin A Merah	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	5 Vaksin Imunisasi Lanjutan: * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	6 Jarum Suntik dan BHP	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	7 Peralatan Anafilaktik	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	8 Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
	9 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	63,122.00	63,122.00	0	100.00%
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**	**Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan**			**67.21%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**34.41%**
		138,988	47,826	**91,162**	
		Jumlah yang harus	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		dilayani		**terlayani**	
	1 Buku Raport Kesehatanku	47,826.00	47,826.00	0	100.00%
	2 Buku Pemantauan Kesehatan	47,826.00	47,826.00	0	100.00%
	3 Kuesioner Skrining Kesehatan	47,826.00	47,826.00	0	100.00%
	4 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	47,826.00	47,826.00	0	100.00%
	5 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	47,826.00	47,826.00	0	100.00%
6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**	**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			**75.90%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	51.79%
		714,667	370,143	344,524	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	370,143.00	370,143.00	0	100.00%
	2 Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	370,143.00	370,143.00	0	100.00%
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**	**Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			89.90%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**79.81%**
		217,809	173,831	43,978	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Strip Uji	173,831.00	173,831.00	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Pemeriksaan * Gula 2Darah * Kolesterol				
	2 Buku Kesehatan Lansia	173,831.00	173,831.00	0	100.00%
	3 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	173,831.00	173,831.00	0	100.00%
8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**	**Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan**			64.70%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**29.41%**
		361,801	106,400	**255,401**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	106,400.00	106,400.00	0	100.00%
	2 Tensimeter	106,400.00	106,400.00	0	100.00%
	3 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	106,400.00	106,400.00	0	100.00%
9	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**	**Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan**			**98.12%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**96.25%**
		24,196	23,288	908	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	23,288.00	23,288.00	0	100.00%
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	23,288.00	23,288.00	0	100.00%
	3 Pedoman dan Media KIE	23,288.00	23,288.00	0	100.00%
10	**Pelayanan kesehatan Orang**	**Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani**			97.93%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	**Kesehatan**			
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**95.85%**
		2,219	2,127	**92**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2,127.00	2,127.00	0	100.00%
	2 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2,127.00	2,127.00	0	100.00%
	3 Media KIE	2,127.00	2,127.00	0	100.00%
	4 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2,127.00	2,127.00	0	100.00%
11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**	**Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan**			**71.51%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**43.02%**
		11,404	4,906	**6,498**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	2 Reagen Zn TB	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	3 Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	4 Catridge Tes Cepat Molekuler	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	5 Formulir Pencatatan dan Pelaporan	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	6 Pedoman/Standar Operasional Prosedur	4,906.00	4,906.00	0	100.00%
	7 Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	4,906.00	4,906.00	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering					
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**		**Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan**			**83.94%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:		**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**67.88%**
			20,720	14,064	6,656	
			Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	14,064.00	14,064.00	0	100.00%
	2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	14,064.00	14,064.00	0	100.00%
	3	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	14,064.00	14,064.00	0	100.00%

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Secara umum capaian Kegiatan SPM di bidang kesehatan pada tahun 2021 belum mencapai target 100 persen seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:

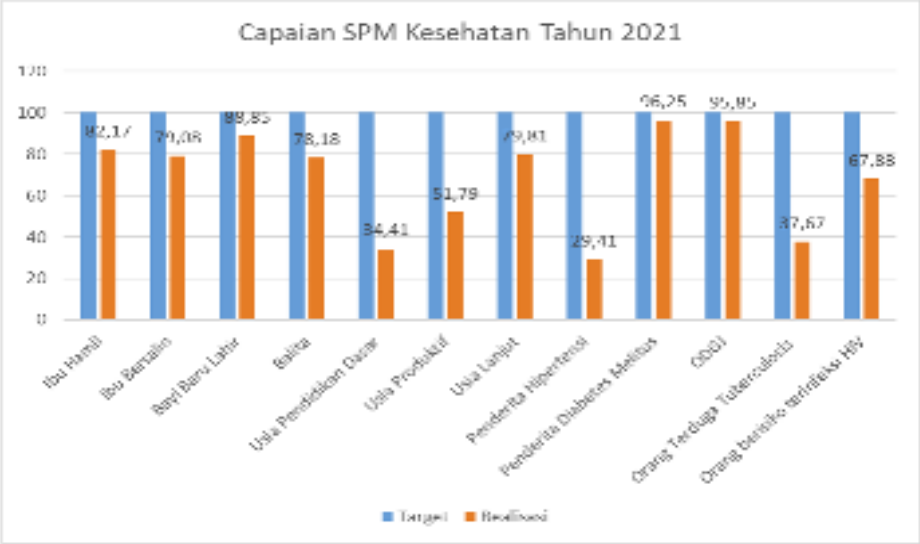

Gambar 2.109.
Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Sumber: LKPJ Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian SPM tertinggi yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 96,25% dan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sebesar 95,85%. Sedangkan capaian SPM yang terendah adalah Pelayanan Penderita Hipertensi sebesar 29,41%. Terkait dengan pelayanan penyakit menular, pelayanan TBC di Kabupaten Blitar yang sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Penemuan TBC dilakukan dengan penanganan sampai tuntas dengan slogan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah melakukan pelayanan TBC baik di rumah sakit pemerintah, swasta maupun puskesmas dan didukung dengan alat pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Puskesmas Sutojayan, Puskesmas Srengat dan Puskesmas Kesamben.



Gambar 2.110.
Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Sumber: LKPJ Kabupaten Blitar Tahun 2021

Penemuan Terduga TBC tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4.906 terduga (43,2%) jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 3.313 terduga (29%). Penemuan ini masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5.572 terduga (55,2%). SPM selanjutnya, pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang sesuai standar meliputi pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pengobatan rutin, pelayanan rujukan dan edukasi. Setiap ODGJB harus dilakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pelayanan Kesehatan ODGJB sesuai standar, tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 2.127 (95,8%) jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.075 terduga (93,8%).

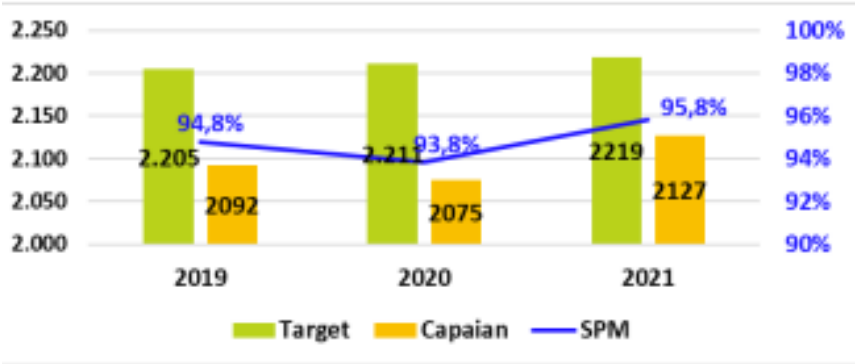

Gambar 2.111.
Capaian SPM ODGJB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Sumber: LKPJ Kabupaten Blitar Tahun 2021

Selanjutnya, dalam penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan melalui 24 Puskesmas, 7 Rumah Sakit dan 10 Klinik Swasta yang tersebar di Kabupaten Blitar telah menyediakan layanan tes HIV bagi warga masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam penanggulangan HIV/AIDS antara lain skrining pada ibu hamil, pasien TBC, pemeriksaan pada kelompok kelompok berisiko (Lelaki Seks Lelaki/LSL, Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP, Wanita Pekerja Sosial/WPS, Waria/Transgender, calon pengantin, dan pasien pre-operasi. Dengan dilakukannya pemeriksaan dini pada kelompok-kelompok tersebut diharapkan jika menemukan orang yang positif terinfeksi HIV dapat segera diobati sehingga bisa memutus rantai penularan. Saat ini, Kabupaten Blitar memiliki 11 layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) yaitu RSUD Ngudi Waluyo, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Binangun, Puskemas Kademangan, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Srengat, RSUD Srengat, Puskesmas Udanawu, Puskesmas Nglegok, Puskesmas Gandusari, dan Puskesmas Sutojayan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan WBP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Target SPM HIV Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 20.721 dengan populasi ibu hamil dan pasien TBC (Target 100%). Capaian SPM jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2021 sebesar 67,9% mengalami peningkatan 7% dari tahun sebelumnya.

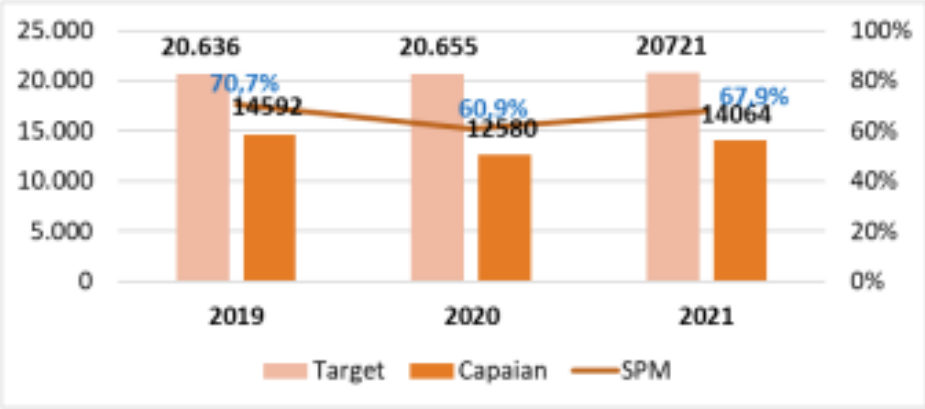

Gambar 2.112.
Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Sumber: LKPJ Kabupaten Blitar Tahun 2021

Penyebab belum tercapainya SPM secara umum antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 membuat kegiatan tidak dapat berjalan optimal. Larangan untuk mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa menyebabkan kegiatan seperti posyandu, posbindu, prolanis, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan pemeriksaan lainnya yang bersifat masif menjadi terkendala/tertunda sehingga mempengaruhi capaian SPM;
2. Dari 69 total kematian ibu hamil 56 orang diantaranya meninggal karena Covid 19. Sisanya 13 ibu hamil meninggal karena kasus kebidanan;
3. Untuk ibu bersalin, tidak semua ibu bersalin melakukan persalinan di faskes. Masih ada (1.124 ibu hamil) yang bersalin di Bidan Praktek Mandiri (BPM);
4. Lemahnya sistem rujukan apalagi di masa pandemi membuat rujukan ke faskes yang lebih tinggi sedikit rumit dan menghambat pelayanan kedaruratan pasien;
5. Keterlibatan layanan faskes swasta seperti RS swasta, klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) belum maksimal dan belum semua melaporkan melalui sistem aplikasi (SITB, Wi Fi TBC);

6. Jejaring internal dan eksternal layanan TBC belum berjalan secara optimal di puskesmas maupun rumah sakit;
7. Kegiatan tim penanggulangan TBC (DPPM) yang sudah direncanakan belum semua berjalan secara aktif;
8. Belum semua testing HIV yang terlaporkan di SIHA, notifikasi pasangan belum semua dilakukan pada tes indeks;
9. Stok RDT 1 HIV terbatas pada Bulan Mei dan Juni 2021, Stok RDT 2 dan 3 HIV terbatas pada bulan Agustus-Oktober 2021;
10. Belum semua pasien TBC dites HIV, hasil testing tidak dientry secara realtime;
11. Pada masa pandemi, pasien ODGJ tidak rutin kontrol dan minum obat dikarenakan keluarga takut mengambil obat ke Puskesmas;
12. Kurang peran serta keluarga ODGJ dalam memperhatikan minum obat;
13. Masih 3 kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem dan Puskesmas Srengat;
14. Belum optimalnya kunjungan ODGJ ke psikiater di tiga tempat yaitu Puskesmas Srengat, Puskesmas Kademangan dan Puskesmas Kesamben; dan
15. Pandemi covid membuat fokus kegiatan di Puskesmas pada kegiatan Testing, Tracing, Treatment (3T) dan vaksinasi sehingga kekurangan SDM untuk kegiatan yang lain.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

1. Penguatan pemahaman pelaksanaan SPM pada petugas kesehatan;
2. Pemenuhan SDM, sarpras, BMHP kegiatan SPM;
3. Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah, kader dan tokoh masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang optimal seperti posyandu, pelacakan dan pemantauan, bumil risti, posbindu, pengambilan obat ODGJ, pemeriksaan kontak TBC, skrining HIV;

4. Melakukan kegiatan terintegrasi dengan pelaksanaan vaksinasi Covid 19;
5. Investigasi kontak (tracing) pada pasien TBC oleh kader;
6. Penguatan jejaring internal di rumah sakit dan puskesmas serta pertemuan evaluasi pelaksanaan program TBC;
8. Entri data TBC secara real time pada aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) serta pemberian dukungan gizi pada penderita TB;
9. Penguatan testing HIV bagi layanan rumah sakit dan klinik swasta, serta pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV;
10. Pertemuan koordinasi lintas program TBC;
11. Pemenuhan logistik RDT 1-3;
12. Validasi data setiap awal tribulan;
13. Evaluasi implementasi notifikasi pasangan Orang Dengan HIV (ODHIV);
14. Pengaktifan PANDU (pelayanan terpadu) penyakit tidak menular di puskesmas, kolaborarasi dengan Prolanis terkait kegiatan dan pelaporan, optimisasi peran pustu, polindes terkait pelayanan hipertensi dan Diabetes Melitus (DM);
15. Memaksimalkan pelayanan psikiater dari RSJ Lawang yang bertitik di Puskesmas Srengat (Setiap Sabtu Minggu Ke 2), Puskesmas Kesamben (Setiap Sabtu Minggu Ke 3) dan Puskesmas Kademangan (Setiap Sabtu Minggu Ke 4);
16. Vaksinasi untuk ibu hamil dan disabilitas;
17. Penguatan sistem rujukan sehingga tidak ada lagi keterlambatan rujukan pasien ke faskes yang lebih tinggi;
16. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan di beberapa desa, masih ada warga yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan adanya kontra indikasi bahwa anak akan menderita penyakit auto imun, dll;

17. Perbaikan mutu pelayanan *life saving* di IGD dan melaksanakan pelatihan ACLS bagi seluruh tenaga medis agar memahami penanganan kegawatdaruratan pada jantung; dan
18. Digitalisasi pelayanan dinkes terdiri dari Lapak Dinkes, Iso konsul dan Satrio. Lapak Dinkes merupakan portal pelayanan dinkes berbasis web. Ada 9 pelayanan yang ada di lapak dinkes, antara lain: rekomendasi izin penelitian, rekomendasi perizinan apotik, rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional, rekomendasi griya sehat, penerbitan sertifikat penyuluh keamanan pangan, perizinan praktik tenaga Kesehatan, perizinan toko obat berizin, perizinan usaha mikro obat tradisional. Lapak dinkes dapat di akses melalui https://lapakdinkes.blitarkab.go.id/.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 108.201.366.639,00 akibat pandemi wabah virus Corona, kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 102.354.839.687 atau 94,60%.

Tabel 2.7

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN BLITAR**				**88.80%**
1	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari**			**91.38%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**82.76%**
		416,567	344,745	**71,822**	
		Jumlah warga negara yang berhak	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		mendapat layanan			
	1 Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	416,567.00	416,567.00	**0**	**100.00%**
	2 Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	71,822.00	71,822.00	**0**	**100.00%**
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			**86.22%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**72.43%**
		416,567	301,725	**114,842**	
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	83	83	**0**	**100.00%**
	2 Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima: masayarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	168	168	**0**	**100.00%**
	3 Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi	83	83	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan				

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Permasalahan:

1. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan.
2. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan.
3. Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA).
4. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan.
5. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir) di wilayah Kabupaten Blitar.
6. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
7. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Solusi permasalahan tersebut meliputi:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan.
3. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
4. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, pembentukan Komir, re-organisasi HIPPA/P3A dan penyusunan Manual O&P.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tujuh) Program dan 11 (delapan belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 46.660.552.620 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.138.325.457 (98,88%).

Tabel 2.8

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN BLITAR**				**91.67%**
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni**			**100.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		3	3	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	3	3	0	100.00%
	2 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	0	100.00%
	3 Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	0	100.00%
	4 Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	3	3	0	100.00%
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**			**83.34%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN BLITAR**				**91.67%**
	Daerah kabupaten/ kota				
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		3	3	0	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**66.67%**
	1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	3	2	1	66.67%
	2 Subsidi Uang Sewa	3	2	1	66.67%
	3 Penyediaan Rumah Layak Huni	3	2	1	66.67%

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Permasalahan:

1. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada perangkat daerah pengampu SPM memahami tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penereapan SPM.
2. Kabupaten Blitar memiliki zona rawan bencana dikarenakan kondisi topografi yang pegunungan dan wilayah pantai serta gunung berapi;
3. Banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
4. Anggaran yang ditetapkan kurang memenuhi sesuai kebutuhan.
5. Belum ada perencanaan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten yang dianggarkan.

Solusi permasalahan meliputi:

1. Menganggarkan alokasi dana untuk peningkatan kualitas ataupun pembangunan baru rumah khususnya akibat adanya bencana alam dan relokasi program pemerintah.

2. Selain menggunakan dana APBD usulan bantuan perbaikan rumah bisa diusulkan melalui APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2021 SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut melalui 7 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.187.175.804 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.446.438.765 atau (92,73 %).

Tabel 2.9

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN BLITAR**				**91.84%**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**	**Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**			**100.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**100.00%**
	1 warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100.00%
	2 warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	0	100.00%
2	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**	**Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**			**98.52%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**97.04%**
	1 Penegakan Perda sesuai SOP	129	129	0	100.00%
	2 Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	135	129	6	95.56%
	3 Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	135	129	6	95.56%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**100.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus*	**jumlah total yang*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,242,207.00	1,242,207.00	0	100.00%
4 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**				**100.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00%
	2 Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	31,199.00	31,199.00	0	100.00%
	3 Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	31,199.00	31,199.00	0	100.00%
	4 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi	4	4	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	(KIE) rawan bencana				
	5 Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	3	3	0	100.00%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**93.42%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,790	1,790	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**86.84%**
	1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1,790.00	1,790.00	0	100.00%
	2 Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1,790.00	1,790.00	0	100.00%
	3 Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100.00%
	4 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	0	100.00%
	5 Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1	1	0	100.00%
	6 Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	95	20	75	21.05%
6	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				59.09%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**72.73%**
		22	16	**6**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**45.46%**
	1 Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban	22	16	6	72.73%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	kebakaran atau terdampak				
	2 Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	22	4	18	18.18%

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Permasalahan:

1. Jumlah aparat Satpol PP dan PPNS Satpol PP yang ada saat ini kurang mencukupi.
2. Produk hukum/perda yang belum memuat sanksi yang jelas atau sanksi belum bisa membuat efek jera atau jangka waktu sanksi yang terlalu pendek.
3. Terkait penampungan anjal dan gepeng dari operasi penertiban merupakan ranah Dinas Sosial (Satpol PP hanya penertiban anjal dan gepeng).
4. Perlunya penambahan sarana dan prasarana, khususnya mobil pemadam kebakaran dan mobil patroli, yang didukung dengan kesiapan jumlah personil pemadam kebakaran yang memadai.
5. Intensifikasi penyuluhan/sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan peraturan.
6. Permasalahan lebih di sebabkan kurangnya dukungan infrastruktur untuk pelayanan sheltering berupa pertendaan, peralatan untuk sanitasi serta dukungan peralatan untuk kegiatan searching and rescue (SAR) pencarian dan penyelamatan.

Solusi:

7. Penambahan personil Satpol PP (perekrutan Tenaga Banpol sebanyak 30 orang).

8. Rencana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
9. Bekerjasama dengan relawan yg bergabung dalam organisasi (IEA (Indonesia Escourt Ambulance) TRC (Tim Reaksi Cepat), "RESOB" (Relawan Sosial Blitar), Jaladri Samudro (Komunitas Pendaki).
10. Pembinaan dilakukan secara virtual.

6. SPM Bidang Sosial

Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 7 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran penyelenggaraan urusan sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.579.168.248,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.270.884.130,75 atau 95,31%.

Tabel 2.10

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	**KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR**				**91.33%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**90.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		33	33	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80.00%**
	1 Penyediaan Permakanan	7	7	0	100.00%
	2 Penyediaan Sandang	7	7	0	100.00%
	3 Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0%
	4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	7	7	0	100.00%
	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	7	7	0	100.00%
	6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	7	7	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Disabilitas Terlantar				
	7 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	8 Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	7	7	0	100.00%
	9 Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	7	7	0	100.00%
	10 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0%
	11 Layanan Rujukan	7	7	0	100.00%
	12 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00%
	13 Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100.00%
	14 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00%
	15 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**96.67%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum*	**100.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		harus dilayani		*Terlayani*	
		1	1	0	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**93.33%**
	1 Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100.00%
	2 Penyediaan Permakanan	1	1	0	100.00%
	3 Penyediaan Sandang	1	1	0	100.00%
	4 Penyediaan Alat bantu	1	1	0	100.00%
	5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00%
	6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1	1	0	100.00%
	7 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	0	100.00%
	8 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00%
	9 Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	1	1	0	100.00%
	10 Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	1	1	0	100.00%
	11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0%
	12 Layanan Rujukan	1	1	0	100.00%
	13 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00%
	14 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
	15 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			86.67%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		5	5	0	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**73.33%**
	1 Layanan Data dan Pengaduan	5	5	0	100.00%
	2 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0%
	3 Penyediaan Permakanan	5	5	0	100.00%
	4 Penyediaan Sandang	5	5	0	100.00%
	5 Penyediaan Alat bantu	5	5	0	100.00%
	6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5	5	0	100.00%
	7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	5	5	0	100.00%
	8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	9 Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0%
	10 Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	5	5	0	100.00%
	11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0%
	12 Layanan Rujukan	0	0	0	0%
	13 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00%
	14 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00%
	15 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00%
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**			93.33%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		26	26	0	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**86.67%**
	1 Layanan Data dan Pengaduan	26	26	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	2 Penyediaan Permakanan	26	26	0	100.00%
	3 Penyediaan Sandang	26	26	0	100.00%
	4 Penyediaan Alat bantu	26	26	0	100.00%
	5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	26	26	0	100.00%
	6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	26	26	0	100.00%
	7 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	26	26	0	100.00%
	8 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	9 Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan dasar	0	0	0	0%
	10 Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	26	26	0	100.00%
	11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	26	26	0	100.00%
	12 Layanan Rujukan	26	26	0	100.00%
	13 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00%
	14 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00%
	15 Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**			**90.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		154	154	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80.00%**
	1 Penyediaan Permakanan	154	154	0	100.00%
	2 Penyediaan Sandang	154	154	0	100.00%
	3 Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	102	102	0	100.00%
	4 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	0	0%
	5 Pelayanan Dukungan Psikososial	102	102	0	100.00%

Sumber: LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2021

Permasalahan:

1. Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah daerah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kemampuan APBD dalam memberikan bantuan hanya mencapai 1% dari jumlah PMKS maka dengan adanya pandemi covid-19 menjadi meningkat. Hal ini didudukung dengan adanya refocusing anggaran, yaitu mengatur kembali fokus anggaran digunakan untuk memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19.

3. Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meningkat karena adanya beragam bantuan untuk masyarakat terdampak covid 19. Contohnya yaitu JPS (jaring pengaman sosial) yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini kemudian turut mengurangi JUMLAH TARGET PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah (keterangan ada pada kolom KETERANGAN). Karena PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meningkat, akhirnya target PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah berkurang.
4. Berkurangnya target PMKS yang harus diberi bantuan, kemudian di sisi lain MENINGKATNYA jumlah PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah daerah mengakibatkan realisasi dari program ini meningkat hingga 29.14% dari targetnya yaitu 1% saja.
5. Kesalahan dalam penyusunan indikator di tahun sebelumnya. Jika merujuk pada output indikator kegiatan maka seharusnya berbunyi JUMLAH, bukan PERSENTASE
6. Adanya kenaikan jumlah korban bencana yang diberi bantuan makan melalui dapur umum dikarenakan beberapa hal.
7. Adanya korban pandemi covid yang membutuhkan bantuan pangan selama diisolasi.
8. Adanya panitia pengemasan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19 yang diberi makanan melalui dapur umum. Proses pengemasan bantuan sosial yang memakan waktu hingga berbulan bulan tentunya mengakibatkan jumlah paket makanan yang dipenuhi melalui dapur umum juga meningkat. Dari yang semua targetnya ditentukan sebanyak 1.000 orang (1 paket 1 orang), meningkat hingga 17.300 orang (1 paket 1 orang).
9. Adanya pembatasan sosial, pengurangan aktifitas.
10. Turunnya jumlah KPM PKH disebabkan adanya KPM PKH Graduasi. Kemensos setiap 6 tahun sekali melakukan evaluasi terhadap KPM PKH, yang dapat berakibat pada pengurangan jumlah KPM PKH.

Apabila KPM tersebut non-eligible (tidak memenuhi syarat) maka akan dikeluarkan dari daftar KPM PKH.

11. Karena fakir miskin yang terdata dalam DTKS dibantu dan ditangani sesuai program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
12. Pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS.

Solusi:

1. Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2022.
2. Dilaksanakan sinergi intensif dengan potensi potensi penanggulangan bencana yang eksis di masyarakat serta OPD terkait.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Perekonomian menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan sebab memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi suatu negara/ wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Perwujudan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, serta dengan menyelenggarakan tata kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara akumulatif yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Mengingat pentingnya sektor perekonomian dalam pembangunan, maka dibutuhkan adanya perencanaan atau kerangka pembangunan ekonomi yang selaras dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam hal ini Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjadi bagian penting dalam menyusun RKPD, agar tercipta keselarasan antara kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Blitar sebelum adanya pandemi Covid-19 dapat dikatakan pada kondisi stabil dan progresif, kendati masih perlu perbaikan dalam beberapa indikatornya. Hal ini digambarkan berdasarkan capaian indikator makro ekonomi yang berada dalam

perkembangan positif. Indikator-indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, gini rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut disajikan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Blitar yang telah berjalan dan akan diproyeksikan sesuai lingkup kerja RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target	
			2020	2021	2022*)	2023*)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,29	3,02	4,56	7,58
2	Gini Rasio	Indeks	0,348	0,353	0,329	0,340
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,58	71,05	71,48	72,06
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,33	9,65	9,25	9,02
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,82	3,66	3,52	3,40

Sumber: BPS Jatim, 2022; dan BPS Kab. Blitar, 2022, diolah

Pada awal tahun 2020 terjadi tantangan yang cukup berat dan berlaku secara global seiring adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang membuat hampir seluruh aktivitas ekonomi dan pembangunan terganggu. Proses pembangunan ekonomi menjadi terhambat dan sulit berjalan normal dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas barang dan jasa, sebagai cara pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Aktivitas investasi, produksi, dan konsumsi banyak mengalami penurunan, sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa harus memangkas sejumlah tenaga kerjanya. Upaya pemulihan (*recovery*) ekonomi akan sangat bergantung pada langkah strategis pemerintah dan dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19.

Harapan pemulihan ekonomi sempat mencuat pada Semester I 2021 ketika tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-

tanda *rebound* yang kuat. Ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2021 mampu bangkit hingga mengalami pertumbuhan 7,07% (yoy) setelah empat kuartal sebelumnya terus mengalami kontraksi. Selain berkat adanya kebijakan struktural, faktor lain yang mendukung tingginya angka pertumbuhan pada waktu tersebut adalah *low base effect* atau *baseline* yang rendah, mengingat pada Triwulan II 2020 terjadi kontraksi ekonomi hingga -5,32%. Pada Semester I 2021, perekonomian Indonesia secara kumulatif masih mampu tumbuh hingga 3,10% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (yoy). Sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi secara keseluruhan mengalami pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung utama PDB dari sisi pengeluaran juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat.

Namun, tren positif tersebut gagal dipertahankan pada Triwulan III 2021. Merebaknya varian delta sebagai salah satu varian baru Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal Juli 2021. Pembatasan aktivitas masyarakat tersebut dilakukan pada 3 Juli – 25 Juli 2021 setelah terjadi gelombang kedua (*second wave*) lonjakan kasus Covid-19 besar-besaran, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Setelah berjalan tiga pekan, pemerintah mulai menerapkan PPKM level 3 dan 4 dengan memerhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di tiap-tiap daerah. Efek berlakunya kebijakan PPKM tersebut membuat perekonomian Indonesia kembali mengalami penurunan. Hasil pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2021 tercapai sebesar 3,51% (yoy) yang menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya. Kendati demikian, secara kumulatif tren pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup positif dengan kenaikan sebesar 3,24%.

Fenomena yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional pada akhirnya turut dirasakan Kabupaten Blitar. Perekonomian Kabupaten

Blitar pada tahun 2020 ikut mengalami kontraksi hingga -2,29% setelah lebih dari satu dasawarsa terus mengalami pertumbuhan. Terjadinya kontraksi ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar. Dalam waktu yang sama, tren TPT Kabupaten Blitar meningkat 0,77% dari sebelumnya 3,05% menjadi 3,82%. Peningkatan TPT tersebut berdampak buruk terhadap jumlah penduduk miskin yang meningkat 0,39% dari sebelumnya 8,94% menjadi 9,33%. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang direfleksikan melalui gini rasio juga mengalami kenaikan dari 0,333 menjadi 0,348.

Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai IPM Kabupaten Blitar tahun 2020 masih mengalami kenaikan kendati tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Blitar hanya meningkat 0,01 dari 70,57 menjadi 70,58. Tren perkembangan IPM Kabupaten Blitar mulai kembali progresif pada tahun 2021, dimana terjadi kenaikan 0,47 dari 70,58 menjadi 71,05. Tren perbaikan juga terjadi pada indikator TPT yakni pada tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka kembali dapat ditekan dari 3,82% menjadi 3,66% atau terjadi penurunan sebesar 0,16%. Namun, tren positif tersebut belum diikuti oleh indikator kemiskinan, dimana persentase jumlah penduduk miskin masih meningkat 0,32% pada tahun 2021 dari 9,33% menjadi 9,65%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar pada tahun 2020 tampak turun tipis dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari menurun 0,03 dari 92,73 menjadi 92,70.

Pemerintah Kabupaten Blitar berharap akan terjadi perbaikan indikator makro ekonomi pada tahun 2022-2023. Hal ini direfleksikan melalui target indikator makro ekonomi di dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang diproyeksikan akan terus menguat. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkat secara gradual sebesar 4,56% pada tahun 2022 dan kembali meningkat 7,58% pada tahun 2023. Dengan adanya perbaikan pada struktur perekonomian

tersebut, diharapkan akan berdampak pada perluasan penyerapan tenaga kerja dan bermuara pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. TPT Kabupaten Blitar ditargetkan akan terus ditekan hingga menjadi 3,52% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 3,40% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin juga ditargetkan menurun menjadi 9,25% (tahun 2022) dan 9,02% (tahun 2023) seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya mempersiapkan ketersediaan SDM yang lebih berkualitas dengan meningkatkan IPM dan IPG yang lebih progresif. IPM Kabupaten Blitar ditargetkan akan terus meningkat menjadi 71,48 pada tahun 2022 dan 72,06 pada tahun 2023. Adapun IPG sebagai indikator IPM berbasis gender juga diharapkan akan terus meningkat untuk mencapai pembangunan yang lebih berkeadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar ditargetkan akan meningkat secara gradual menjadi 92,83 pada tahun 2022 dan 92,90 pada tahun 2023.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021

Dalam kondisi normal, secara umum tren perekonomian Kabupaten Blitar 2017-2019 tercatat mengalami perkembangan positif yang diukur dengan adanya kenaikan baik secara nominal (PDRB ADHB) maupun secara riil (PDRB ADHK/pertumbuhan ekonomi). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memerhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki residen (penduduk lokal) atau non-residen (penduduk non-lokal). Kondisi ini bertolak belakang dengan capaian tahun 2020 yang justru mengalami kontraksi sebagai salah satu imbas adanya pandemi Covid-19.

PDRB Kabupaten Blitar atas dasar dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 37,82 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,8 triliun rupiah dibandingkan dengan

tahun 2020 yang sebesar 36,02 triliun rupiah. naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 24,95 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 25,70 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 upaya pengendalian pandemi Covid 19 Kabupaten Blitar berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di hamper seluruh lapangan usaha tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 3.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021
(Rp Triliun)

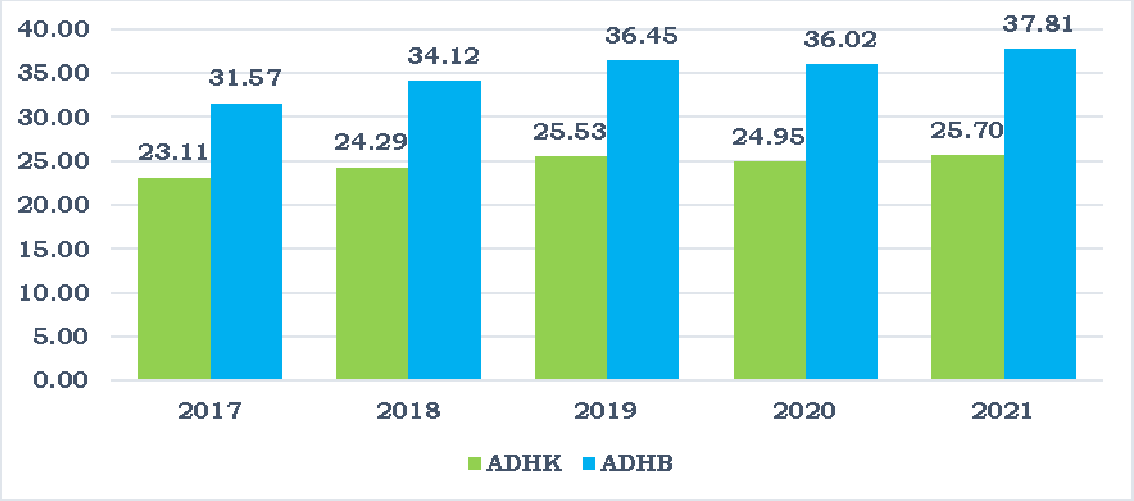

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Selain secara nominal, perubahan PDRB ADHK juga menggambarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai parameter riil kenaikan volume produksi atau konsumsi akhir. Pandemi Covid-19 secara simultan telah mengganggu struktur perekonomian daerah dan nasional hingga terjadi kontraksi. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mengalami kontraksi hingga -2,29%. Kontraksi pertumbuhan di Jawa Timur secara agregat bahkan lebih dalam lagi

hingga -2,33%. Adapun di level nasional, tingkat kontraksinya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Blitar dan Jawa Timur dengan berada pada angka -2,07%. Hasil-hasil tersebut menjadi anomali karena sejak krisis ekonomi 1998 berlalu Indonesia selalu berada pada periode positif, dimana perekonomian mampu selalu tumbuh kendati terjadi perlambatan dan fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, penanganan dampak pandemi Covid-19 menjadi faktor penting untuk segera memulihkan roda perekonomian baik di tingkat daerah maupun secara nasional.

Selanjutnya pada tahun 2021 seiring dengan mulai melandainya pandemi covid-19, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar kembali naik hingga menjadi 3,02%, namun demikian kondisi tersebut masih terbilang rendah karena masih dibawah LPE Provinsi Jawa Timur (3,57%) dan LPE Nasional yang mencapai 3,69%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

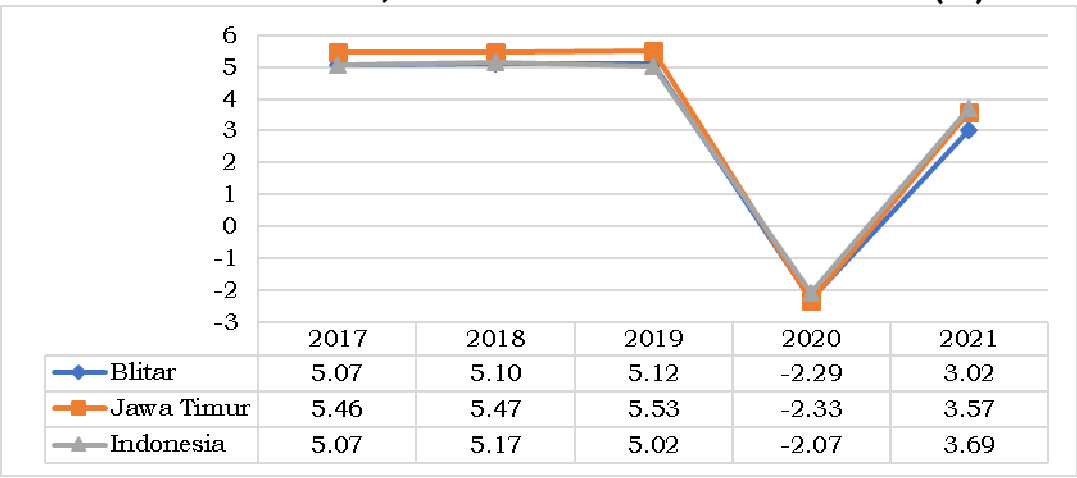

	2017	2018	2019	2020	2021
Blitar	5.07	5.10	5.12	-2.29	3.02
Jawa Timur	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.57
Indonesia	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga enam persen tersebut adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,88 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,83 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,83 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 5,68 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 5,45 persen.

Sedangkan sebelas kategori lainnya yang tumbuh positif namun kurang dari lima persen adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,77 persen, Jasa Lainnya sebesar 4,73 persen, dikuti oleh lapangan usaha Real estate sebesar 4,41 persen, Jasa Perusahaan yaitu sebesar 3,20 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,22 persen, jasa pendidikan sebesar 1,74 persen, lapangan usaha Keuangan dan Asuransi sebesar 1,73 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,57 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,84 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,22 persen dan terakhir lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB tumbuh sebesar 0, 01 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	1,15	1,62	0,06	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	5,62	3,64	2,74	-4,81	1,57
C	Industri Pengolahan	6,50	6,96	7,78	-5,26	5,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,55	5,08	5,59	-1,51	2,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,07	4,94	5,57	5,01	5,83
F	Konstruksi	7,90	7,55	6,76	-5,00	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	7,16	6,29	-7,25	5,83
H	Transportasi dan Pergudangan	8,01	8,27	8,16	-5,80	10,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,60	9,39	7,33	-4,13	4,77

Kategori	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor				
		2017	2018	2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	8,54	8,67	9,11	9,28	6,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	5,36	2,84	-0,48	1,73
L	Real Estate	4,57	7,84	5,82	2,21	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	5,29	7,62	6,43	-7,70	3,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,21	4,15	3,80	-0,52	0,22
P	Jasa Pendidikan	4,08	5,67	7,61	2,95	1,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	7,64	7,28	7,44	5,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,20	7,07	6,47	-13,86	4,73
PERTUMBUHAN PDRB		**5,07**	**5,10**	**5,12**	**-2,29**	**3,02**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Blitar didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blitar.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2021 dihasilkan oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 32,04 persen (angka ini menurun dari 34,38 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 18,39 persen (naik dari 17.65 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,04 persen (naik dari 13,19 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,71 persen (turun dari 9,50 persen

di tahun 2017) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,99 persen. Meskipun selama dua tahun terjadi pandemi covid-19 namun tidak mempengaruhi struktur ekonomi.

Di antara kelima lapangan usaha yang dominan tersebut, selama tahun 2021 hanya Kategori Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Informasi dan Komunikasi saja yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estat, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya justru meningkat meskipun peranannya masing-masing kurang dari 5 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,38	33,22	32,28	33,08	32,04
B	Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,29	4,22	4,16	4,17
C	Industri Pengolahan	13,19	13,46	13,88	13,52	14,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,50	9,54	9,29	8,96	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,65	18,20	18,58	17,63	18,39
H	Transportasi dan Pergudangan	1,27	1,30	1,34	1,28	1,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,97	0,99	0,98	1,01
J	Informasi dan Komunikasi	5,07	5,10	5,27	5,84	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,30	2,23	2,26	2,22

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
L	Real Estate	1,78	1,85	1,89	1,98	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	3,28	3,39	3,56	3,39
P	Jasa Pendidikan	3,99	3,94	4,04	4,26	4,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,75	0,77	0,84	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,33	1,36	1,38	1,22	1,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Selanjutnya, apabila struktur perekonomian dipilah berdasarkan karakteristik atau kategori produksinya menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier, sejak tahun 2018 hingga 2021, struktur perekonomian Kabupaten Blitar tampak sudah mengalami pergeseran di mana lapangan usaha pada kategori tersier mulai mendominasi peranan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan pada sektor-sektor tersebut secara agregat semakin meningkat kontribusinya.

Gambar 3.3.
Perkembangan Struktur Perekonomian Kabupaten Blitar Menurut Karakteristik Produksi Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

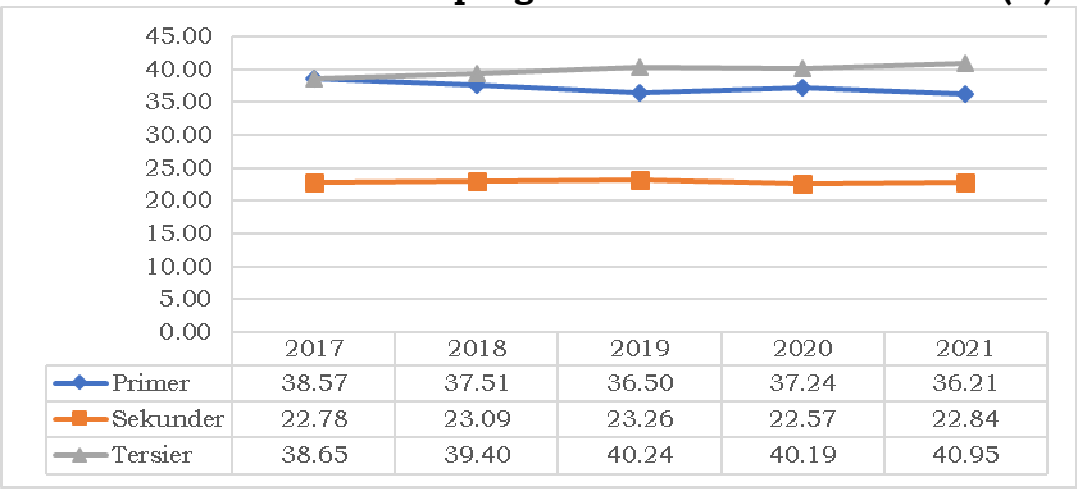

	2017	2018	2019	2020	2021
Primer	38.57	37.51	36.50	37.24	36.21
Sekunder	22.78	23.09	23.26	22.57	22.84
Tersier	38.65	39.40	40.24	40.19	40.95

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Dari sisi PDRB menurut pengeluaran, ada 6 (enam) indikator di dalamnya yang menjadi sumber perhitungan. 6 indikator tersebut terdiri

dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto (nilai ekspor dikurangi impor).

Tabel 3.4
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (%)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67,96	67,98	67,90	68,60	68,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,08	2,09	2,11	2,17	2,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,11	8,27	8,31	8,21	7,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,33	28,36	28,85	28,09	27,84
Perubahan Inventori	0,08	0,08	0,08	0,03	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,56	-6,79	-7,26	-7,10	-6,27
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Struktur PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang menopang 68,27% terhadap agregat PDRB. Dominasi ini menunjukkan betapa pentingnya konsumsi rumah tangga/masyarakat sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, daya beli masyarakat sangat perlu dijaga kesinambungannya, mulai dari pengamatan terhadap dinamika tingkat pendapatan hingga perubahan harga di tingkat konsumen. Jenis pengeluaran terbesar berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang menopang 27,84% pada tahun 2021. Aktivitas investasi merupakan salah satu kebutuhan primer di suatu daerah/negara untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Ada 2 jenis investasi, yaitu investasi fisik dan investasi finansial. PMTB (bersama dengan perubahan inventori) merupakan salah satu cerminan nilai investasi fisik.

Dengan adanya pandemi Covid-19, konsumsi rumah tangga dan PMTB sangat terganggu kinerjanya seiring dengan adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial yang dapat mengurangi laju produksi (pendapatan) dan konsumsi hingga persoalan ini mampu diatasi. Apalagi dengan kondisi perekonomian global yang cenderung mengalami ketidakpastian (*uncertainty*) baik karena Covid-19 maupun gejolak perang dagang dan fluktuasi harga minyak dunia yang juga akan turut berdampak pada stabilitas makro ekonomi nasional dan daerah. Langkah kuratif sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap indikator makro ekonomi maupun indikator-indikator pembangunan lainnya.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Blitar Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,25	4,30	4,28	-1,40	2,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,22	5,90	5,36	0,12	1,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,26	4,34	4,02	-4,93	0,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	5,35	5,87	-5,39	1,56
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	**5,07**	**5,10**	**5,12**	**-2,29**	**3,02**

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran di Kabupaten Blitar tercatat juga mengalami kontraksi pada tahun 2020. Konsumsi rumah tangga dan PMTB sebagai *leading sector* PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi masing-masing sebesar -1,40% dan -5,39%. Konsumsi pemerintah juga mengalami kontraksi -4,93% seiring menurunnya pendapatan daerah yang berdampak pada kuantitas belanja daerah. Perubahan inventori yang terlihat menurun drastis (-58,37%) menunjukkan bahwa produsen di Kabupaten Blitar menghabiskan persediaan stok barangnya (baik bahan baku dan bahan penolong,

maupun barang setengah jadi dan barang jadi). Inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Blitar menghindari adanya spekulasi dengan tidak menyediakan stok inventori dalam jumlah yang tinggi karena kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu (*uncertainty*).

Selain memberikan informasi secara parsial, perkembangan PDRB menurut pengeluaran juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat *incremental capital output ratio* (ICOR) sebagai parameter efisiensi investasi untuk menghasilkan satu *output* tertentu. Semakin kecil angka ICOR, maka investasi di suatu wilayah tersebut dapat dikatakan semakin efisien. Dan sebaliknya, apabila angka ICOR semakin meningkat maka investasi di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin tidak efisien. Angka ICOR dihasilkan dari rasio PMTB sebagai parameter investasi di suatu wilayah terhadap perubahan *output* (agregat PDRB tahun t dikurangi tahun t-1) di wilayah tersebut. Angka ICOR Kabupaten Blitar sebelum adanya pandemi Covid-19 (2016-2019) berada di kisaran 5,75-5,79%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 1% sebagai indikator *output*, dibutuhkan kenaikan input (investasi/PMTB) sebesar 5,75-5,79% per tahun. Dengan kecenderungan angka yang kian meningkat, maka dapat dikatakan bahwa investasi di Kabupaten Blitar semakin tidak efisien. Adanya pandemi Covid-19 semakin menambah beban efisiensi investasi di Kabupaten Blitar karena terbukti pada tahun 2020 angka ICOR-nya semakin memburuk hingga -11,68%.

Gambar 3.4.
Perkembangan ICOR Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

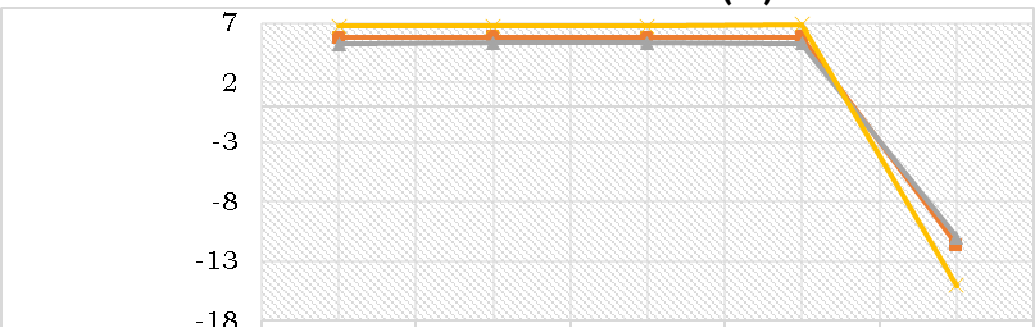

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Blitar	5.75	5.79	5.77	5.79	-11.68
Jawa Timur	5.21	5.31	5.32	5.25	-11.02
Nasional	6.73	6.75	6.72	6.88	-15.09

Sumber: BPS, 2021; BPS Jatim, 2021; dan BPS Kab. Blitar, 2021
Ket: 2019=angka sementara; 2020=angka sangat sementara

Selanjutnya, apabila angka ICOR Kabupaten Blitar disandingkan dengan ICOR Jawa Timur dan Nasional, dapat terlihat bahwa ICOR Kabupaten Blitar masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, namun lebih efisien dibandingkan dengan ICOR Nasional. Pola fluktuasi ICOR Kabupaten Blitar relatif identik dengan ICOR Nasional. Sebelum adanya pandemi Covid-19 (2016-2019), angka ICOR Jawa Timur berada di kisaran 5,21-5,32%, adapun ICOR Nasional berada di kisaran 6,73-6,88%. Dampak Covid-19 juga membuat ICOR Jawa Timur dan Nasional ikut menjadi tidak terkendali sebagaimana halnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. ICOR Jawa Timur pada tahun 2020 merosot hingga -11,02% dan Nasional menurun hingga -15,09%. Oleh karena itu, langkah kuratif sangat dibutuhkan untuk menjaga daya saing investasi daerah dan nasional agar tetap kuat, baik melalui reformasi birokrasi, penguatan sarana-prasarana infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga efisiensi biaya transaksi di tingkat produsen dan konsumen.

Indikator ekonomi makro berikutnya adalah perkembangan harga konsumen yang diukur melalui tingkat inflasi. Inflasi adalah persentase

tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Perubahan tingkat inflasi dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam mekanisme pasar. Tingkat inflasi yang ideal adalah yang terkendali dan stabil dalam kisaran angka yang rendah, sehingga dapat menstimulus proyeksi investasi dan konsumsi masyarakat.

Pengamatan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar mengikuti pengamatan inflasi di Kota Kediri sebagai representasi perkembangan harga konsumen di wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Blitar. Tingkat inflasi di Kabupaten Blitar dengan mengacu pada hasil inflasi Kota Kediri pada tahun 2021 relatif terkendali pada kisaran angka yang rendah, yakni sebesar 1,64%.

Gambar 3.5.
Perkembangan Tingkat Inflasi *Year to Year* Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)

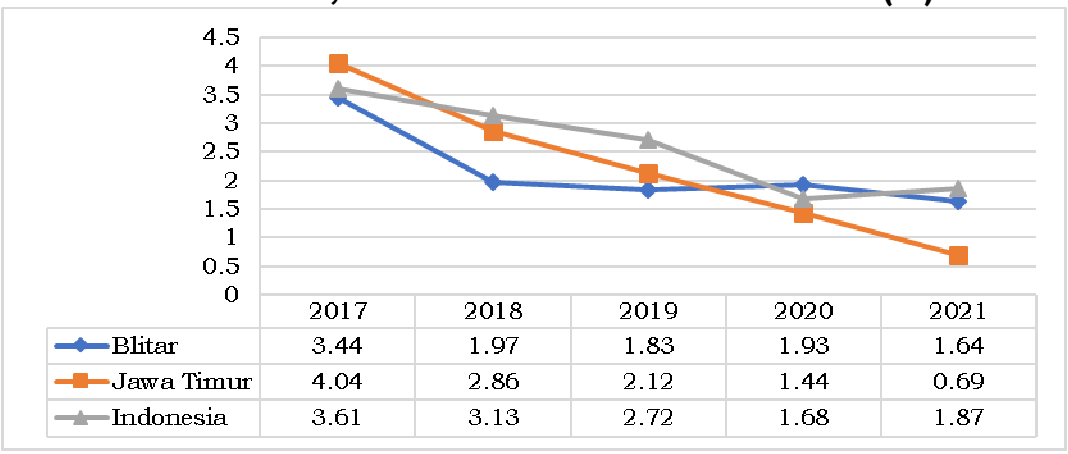

	2017	2018	2019	2020	2021
Blitar	3.44	1.97	1.83	1.93	1.64
Jawa Timur	4.04	2.86	2.12	1.44	0.69
Indonesia	3.61	3.13	2.72	1.68	1.87

Sumber: BPS, 2022; dan BPS Jatim, 2022

Setelah tahun 2017, tren inflasi di Kabupaten Blitar relatif lebih terkendali di bawah 2%. Perkembangan tersebut dapat menjadi stimulus untuk menjaga agar daya beli masyarakat lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir tren inflasi Kabupaten Blitar juga tampak lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi di Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2020 kondisinya sedikit berbeda di mana tingkat inflasi Kabupaten Blitar

sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun masih dalam level yang terkendali. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat inflasi Kabupaten Blitar berada dibawah tingkat inflasi nasional dan berada lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur. Tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2021 berada di angka 0,69%, Nasional memiliki tingkat inflasi sebesar 1,87%, sedangkan Kabupaten Blitar memiliki tingkat inflasi sebesar 1,64%.

Indikator makroekonomi berikutnya adalah pengamatan mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara praktis IPM menjelaskan bagaimana penduduk mampu mendapatkan akses yang memadai terkait dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Secara agregat angka IPM Kabupaten Blitar terus mengalami eskalasi. Pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Blitar sudah mencapai 70,58 poin. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin. Pada tahun 2021, angka IPM Kabupaten Blitar kembali meningkat 0,47 poin menjadi 71,05 poin. Tren positif ini perlu tetap dijaga mengingat pentingnya IPM adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan kualitas dan kuantitas SDM kendati tengah menghadapi pandemi Covid-19, karena muara peningkatan IPM diharapkan juga turut mendukung penguatan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Gambar 3.6.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022

Jika melihat perkembangan komponen/indikator IPM, salah satu penyebab IPM Kabupaten Blitar tahun 2021 kembali dapat meningkat lebih progresif dari tahun sebelumnya adalah kenaikan pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan yang relatif jauh lebih progresif. Kenaikan HLS bahkan jauh melampaui perubahan tahun sebelumnya yang rata-rata hanya 0,01 tahun per periodenya. Sedangkan pada komponen Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan kembali menunjukkan kenaikan setelah tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan. Tren positif pada komponen Pengeluaran per Kapita menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satunya direfleksikan melalui daya beli.

Tabel 3.6
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	Tahun	72,99	73,16	73,39	73,52	73,61
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,44	12,45	12,46	12,63
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,26	7,27	7,29	7,39	7,50
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp Ribu	9.828	10.327	10.861	10.654	10.757
IPM	**Indeks**	**69,33**	**69,93**	**70,57**	**70,58**	**71,05**

Sumber: BPS, 2021; BPS Kab. Blitar, 2021

Dengan angka tersebut, IPM Kabupaten Blitar mampu bertahan pada kategori IPM tinggi. Kendati demikian, jika dikomparasikan dengan IPM kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, posisi IPM Kabupaten Blitar masih tergolong dalam posisi menengah karena berada di urutan ke-22 dari 38 kabupaten/kota. Selain itu IPM Kabupaten Blitar juga masih di bawah IPM Jawa Timur. Jika dideterminasikan lagi, komponen pembentuk IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan. Pada tahun 2021 UHH Kabupaten Blitar adalah 73,61 tahun. Kemudian untuk HLS dan RLS adalah masing-masing sebesar 12,63 tahun dan 7,50 tahun. Sedangkan untuk besaran pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan adalah Rp10,76 juta. Semua komponen tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.7.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

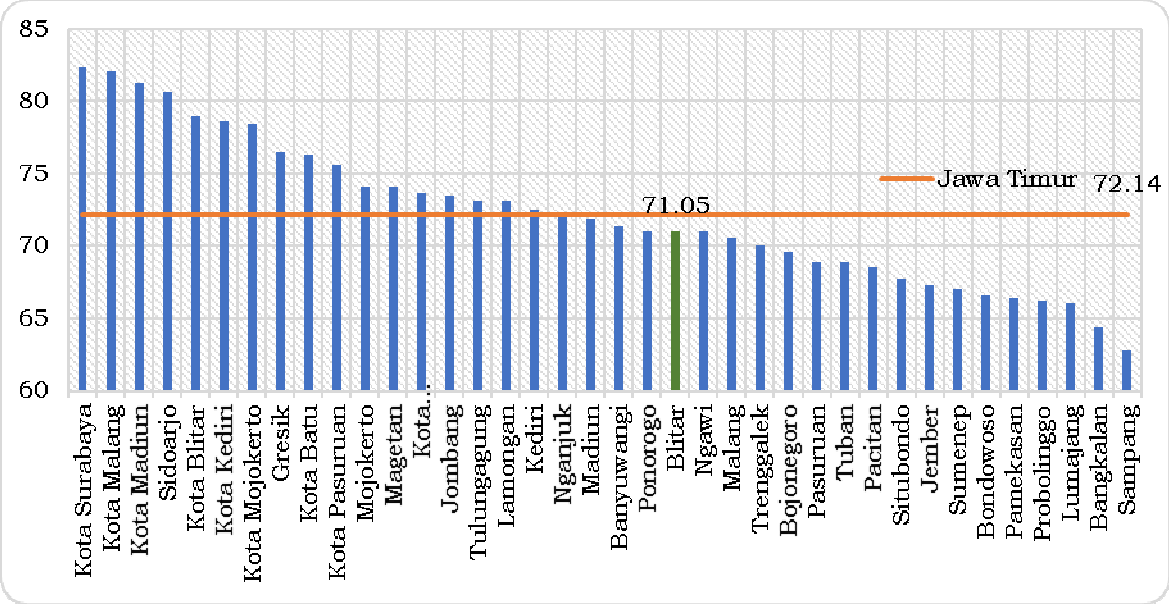

Sumber: BPS, 2021

Perkembangan IPM juga dapat dipilah berdasarkan jenis kelamin yang direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah

indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Gambar 3.8.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur dan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

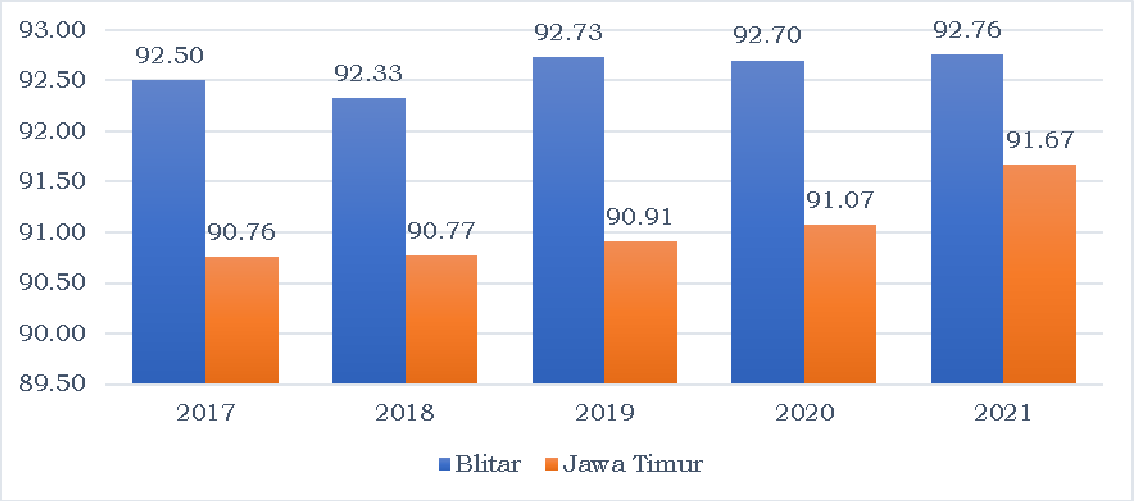

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Dengan nilai IPG diatas 90 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Blitar sudah mendekati seimbang antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2017-2021 berfluktuasi dari 92,50 pada tahun 2017 menjadi 92,33 pada tahun 2018 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 92,73 pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 92,70 dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 92,76. Fluktuasi IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya fluktuasi beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Apabila dibandingkan dengan IPG Jawa Timur, IPG Kabupaten Blitar masih lebih tinggi pada setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan menurut gender di Kabupaten Blitar terus meningkat dan lebih baik dibandingkan Jawa Timur. *Gap* antara IPM laki-laki dengan IPM perempuan di Kabupaten Blitar cenderung masih

mengalami fluktuasi. *Gap* tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,68 poin yang membuat IPG Kabupaten Blitar berada pada titik terendah dalam kurun waktu 2017-2021. Kendati demikian, jika dilihat tren pada waktu yang sama cenderung mengalami penurunan, yakni dari 5,50 poin pada tahun 2017 menjadi 5,44 poin pada tahun 2021.

Gambar 3.9.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

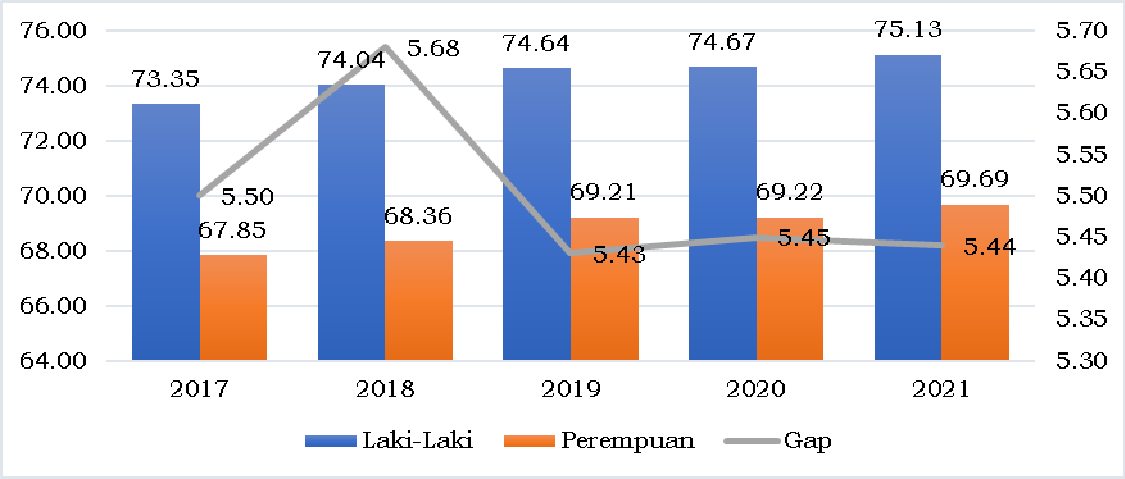

Sumber: BPS, 2022; BPS Kab. Blitar, 2022

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu dampak (*outcome*) positif dari pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang diharapkan pemerintah dapat menjadi media peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam kerangka ekonomi makro daerah, indikator perkembangan ketenagakerjaan diukur melalui penyerapan jumlah tenaga kerja dan pengentasan pengangguran terbuka. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang berada pada usia kerja (≥ 15 tahun) mencapai 933.470 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 657.540 jiwa di antaranya termasuk di dalam angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Blitar pada tahun 2021 adalah 70,44%. Dari seluruh jumlah angkatan kerja, terdapat 633.472 jiwa yang terserap lapangan pekerja (bekerja) dan 24.072 jiwa yang belum bekerja (pengangguran terbuka), sehingga tingkat pengangguran terbuka

(TPT) Kabupaten Blitar pada tahun 2021 mencapai 3,66%. TPT Kabupaten Blitar mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang tampak mengganggu kinerja ekonomi masyarakat hingga secara makro ekonomi daerah terjadi kontraksi. Namun, TPT Kabupaten Blitar kembali berhasil ditekan pada tahun 2021 dengan adanya penurunan sebesar 0,16% menjadi 3,66%.

Tabel 3.7
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bekerja	Jiwa	619.050	625.720	652.531	632.461	633.472
Pengangguran Terbuka	Jiwa	19.085	21.886	20.543	25.134	24.072
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,99	3,38	3,05	3,82	3,66
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	898.121	917.177	922.939	928.291	933,473
Angkatan Kerja	Jiwa	638.135	647.606	673.074	657.595	657,544
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,05	70,61	72,93	70,83	70,44

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2021

Kendati demikian, dampak pandemi Covid-19 terhadap aspek ketenagakerjaan terutama dari sisi perubahan TPT di Kabupaten Blitar relatif lebih terkendali karena masih di bawah 1% (< 1%). Seluruh kabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Timur yang secara agregat berjumlah 38 daerah tercatat mengalami kenaikan TPT dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun 7 daerah di antaranya memiliki perubahan yang relatif rendah di bawah 1%. Perubahan terendah terjadi di Kabupaten Lumajang yang hanya meningkat 0,63%. Sementara itu Kabupaten Blitar berada di urutan ke-6 dengan kenaikan 0,77%. Daerah dengan tingkat perubahan TPT tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kenaikan 6,35%. Adapun Provinsi Jawa Timur secara akumulatif memiliki tingkat perubahan TPT hingga 2,02%.

Gambar 3.10.
Urutan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021 (%)

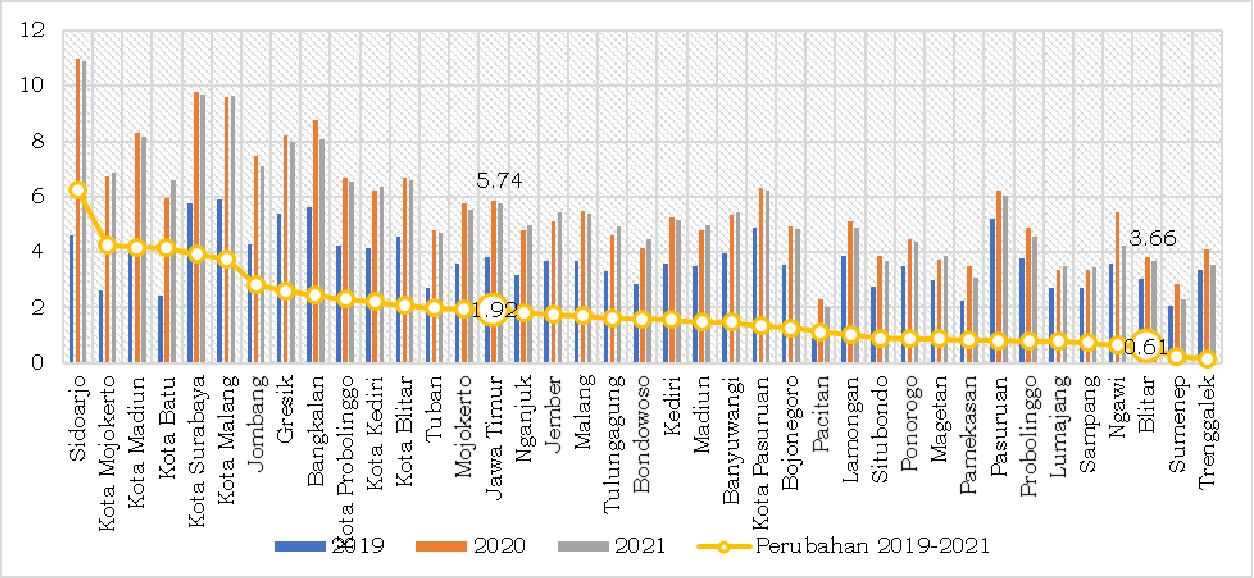

Sumber: BPS Jatim, 2021 (Diolah)

Pada tahun 2021, terjadi perbaikan TPT di Jawa Timur dengan mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan. 25 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mampu menekan angka TPT pada tahun 2021 dengan salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar juga termasuk sebagai daerah dengan dampak pandemi Covid-19 yang paling rendah dari sisi kenaikan TPT sepanjang 2019-2021, yakni hanya meningkat 0,61% dan jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang mengalami kenaikan hingga 1,92% dalam kurun waktu yang sama.

Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. Indikator tingkat kesejahteraan rakyat dapat diukur melalui tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tingkat kemiskinan diukur dari rasio jumlah penduduk miskin terhadap seluruh jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar. Sementara itu, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita sebulannya berada di bawah garis kemiskinan. Adapun tingkat

ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diukur melalui perkembangan gini rasio yang setiap tahun dirilis oleh BPS.

Tabel 3.8
Indikator Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Indikator Kemiskinan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	112,93	112,40	103,75	108,55	112,62
Persentase Penduduk Miskin	%	9,80	9,72	8,94	9,33	9,65
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita / Bulan	285.474	305.440	318.534	325.675	335.573
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,16	1,33	1,13	1,35	0,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,22	0,28	0,23	0,30	0,14

Sumber: BPS, 2021; BPS Kab. Blitar, 2021

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tercatat mengalami kenaikan dari 103,75 ribu jiwa (tahun 2019) menjadi 108,55 ribu jiwa seiring adanya pandemi Covid-19. Setahun berselang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar kembali terjadi kenaikan menjadi 112,62%. Persentase penduduk miskin turut meningkat dari 9,33% menjadi 9,65% pada tahun 2021. Namun, indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*/P_1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami perbaikan dari 1,35 poin menjadi 0,85 poin. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*/P_2) sebagai parameter penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin juga menunjukkan adanya penurunan dari 0,30 poin menjadi 0,14 poin. Hal itu mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Blitar relatif semakin mendekati garis kemiskinan dan terjadi penyempitan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut.

Oleh karena itu, pemulihan ekonomi daerah melalui upaya struktural maupun insentif-insentif fiskal perlu digiatkan khususnya pada tahun 2022 dan 2023, agar dampak negatif pandemi Covid-19 dapat

semakin diminimalisir dan perekonomian Kabupaten Blitar dapat kembali progresif. Langkah interventif yang mengarah pada akselerasi pertumbuhan, pembangunan SDM, serta pengentasan pengangguran terbuka dan kemiskinan, diharapkan mampu menunjang perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pembangunan daerah di Kabupaten Blitar dapat berjalan lebih stabil, adil, dan berdaya saing.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perekonomian daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 dan 2023 tidak bisa lepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, dan regional Jawa Timur. Hingga menjelang berakhirnya tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan global terlebih dengan berkembangnya varian-varian baru. Setelah merebaknya varian Delta yang membuat Indonesia mengalami gelombang kedua (*second wave*) lonjakan kasus Covid-19 besar-besaran pada pertengahan 2021, kini dunia tengah menghadapi tantangan varian Omicron sebagai varian terbaru dari Covid-19. Pemerintah Indonesia merespon kebijakan penanganan pandemi dengan memberlakukan pemberlakukan PPKM Darurat, yang diikuti dengan PPKM level 4 dan 3 di berbagai daerah, penambahan fasilitas kesehatan, peningkatan *testing*, serta akselerasi vaksinasi sehingga kasus Covid-19 mampu ditekan hingga 3 ribuan kasus per hari, lebih rendah dibanding level sebelum gelombang kedua. Meski demikian, Indonesia harus tetap waspada mengingat masih dinamisnya isu Covid-19. Untuk itu akselerasi vaksinasi merupakan salah satu upaya signifikan untuk melawan penyebaran pandemi.

Dari sisi ekonomi global, tren kasus Covid-19 pada lingkup global secara umum kembali menggeliat seiring merebaknya varian Omicron. Jumlah kasus harian Covid-19 hingga 6 Desember 2021 rata-rata 7 hari sudah mencapai lebih dari 490 ribu, sedangkan Indonesia sudah kian membaik hingga hanya 243 kasus harian namun tetap perlu waspada.

Imbas kenaikan Covid-19 global, banyak negara mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat di Triwulan III 2021, sementara laju inflasi di banyak negara cenderung mengalami peningkatan. Perekonomian global masih perlu mewaspadai berbagai tantangan maupun risiko yang terjadi seperti ketidakpastian terkait Covid-19, terbatasnya ruang stimulus bagi perekonomian, risiko akan perubahan iklim seiring peningkatan emisi karbon dan suhu temperatur global, dan tensi geopolitik yang masih tinggi di berbagai wilayah.

Gambar 3.11.
Perkembangan Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Global dan Indonesia (Per 6 Desember 2021)

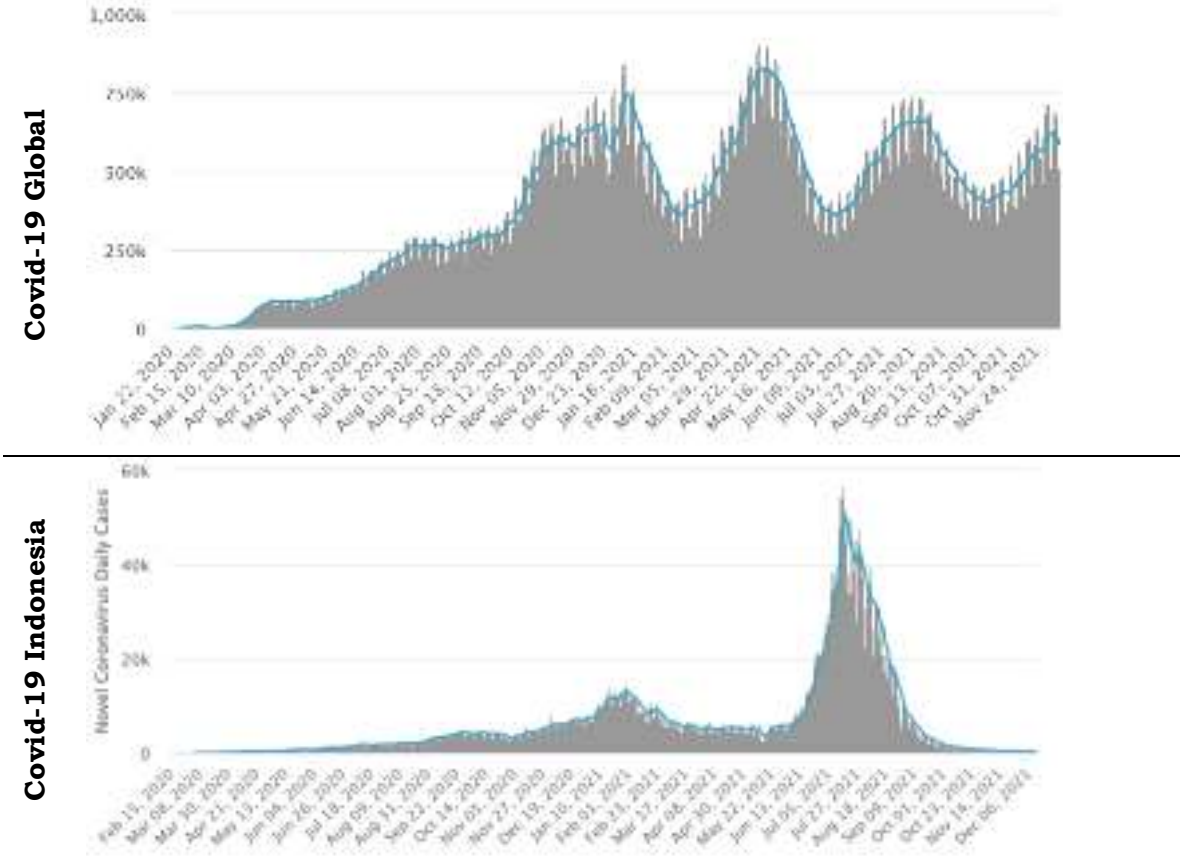

Sumber: worldometer.info

Sebagai akibat dari peningkatan kasus COVID-19 global, berbagai negara mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat di Triwulan III 2021, sementara laju inflasi cenderung meningkat. Laju pertumbuhan

ekonomi yang melambat di berbagai negara pada Triwulan III antara lain didorong *high base* di Triwulan II, *outbreak* varian Delta, serta dampak disrupsi *supply*. Sementara itu, laju inflasi berada dalam tren kenaikan di berbagai negara karena faktor *supply-demand gap* serta disrupsi *supply* yang persisten. Beberapa negara seperti Turki dan Argentina bahkan mencatat laju inflasi yang sangat tinggi, diikuti depresiasi nilai tukar yang sangat tajam. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan III serupa dengan banyak negara lain di dunia, melambat namun tetap tumbuh positif, dengan laju inflasi dan nilai tukar yang relatif stabil. Bahkan Indonesia tercatat menjadi salah satu negara yang perekonomiannya sudah kembali ke level pra-pandemi, yang salah satunya berkat berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah hingga memberikan dorongan positif terhadap pemulihan ekonomi.

Gambar 3.12.
Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Perkembangan Nilai Tukar ytd Bulanan Negara G-20 dan ASEAN

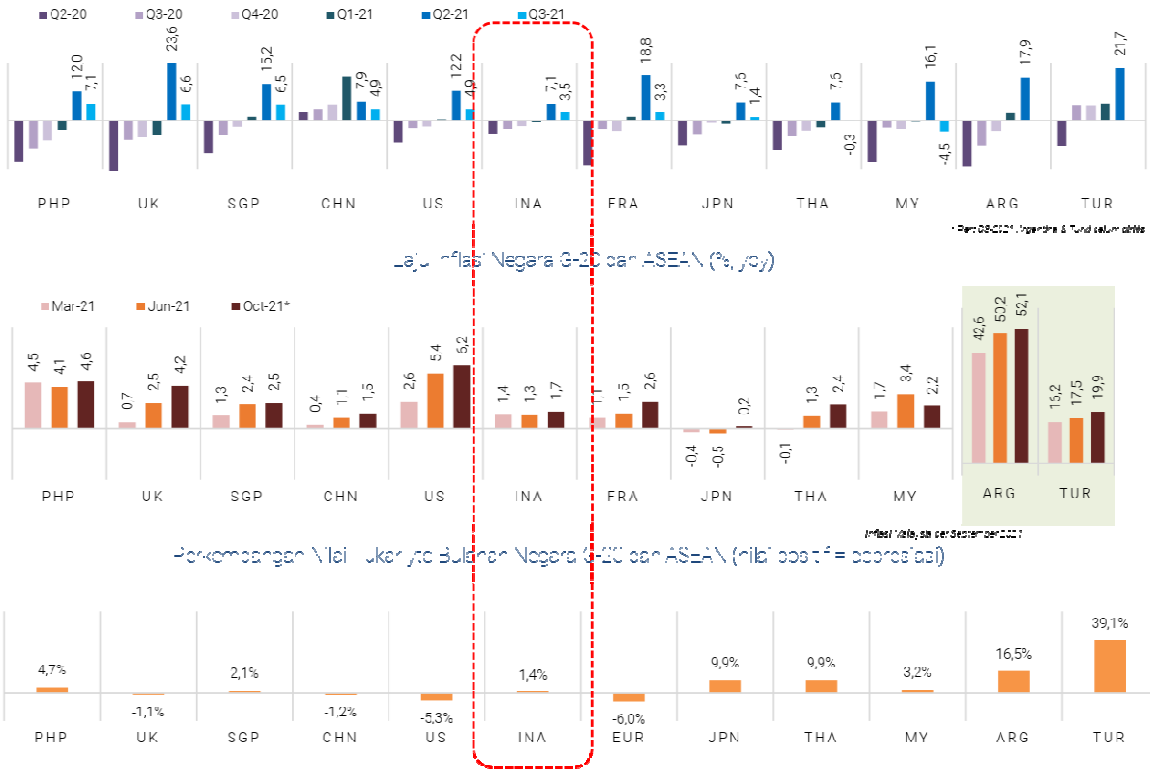

Sumber: Bloomberg, CEIC; dalam BKF Kemenkeu, 2021

Perekonomian Indonesia diprediksi pada tahun 2021 secara agregat akan tumbuh 3,3% oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan semula yang mencapai 3,7%. Hal ini disebabkan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada Triwulan III 2021 hingga pemerintah memutuskan kebijakan PPKM Darurat dan PPKM Level 3-4. Dampak kebijakan PPKM tersebut dianggap menghambat pemulihan ekonomi. OECD juga memproyeksikan perekonomian Indonesia akan lebih baik lagi pada tahun depan apabila konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor mampu diinjeksi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan OECD akan mencapai 5,2% dan 5,1%.

Gambar 3.13.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2023 (%)

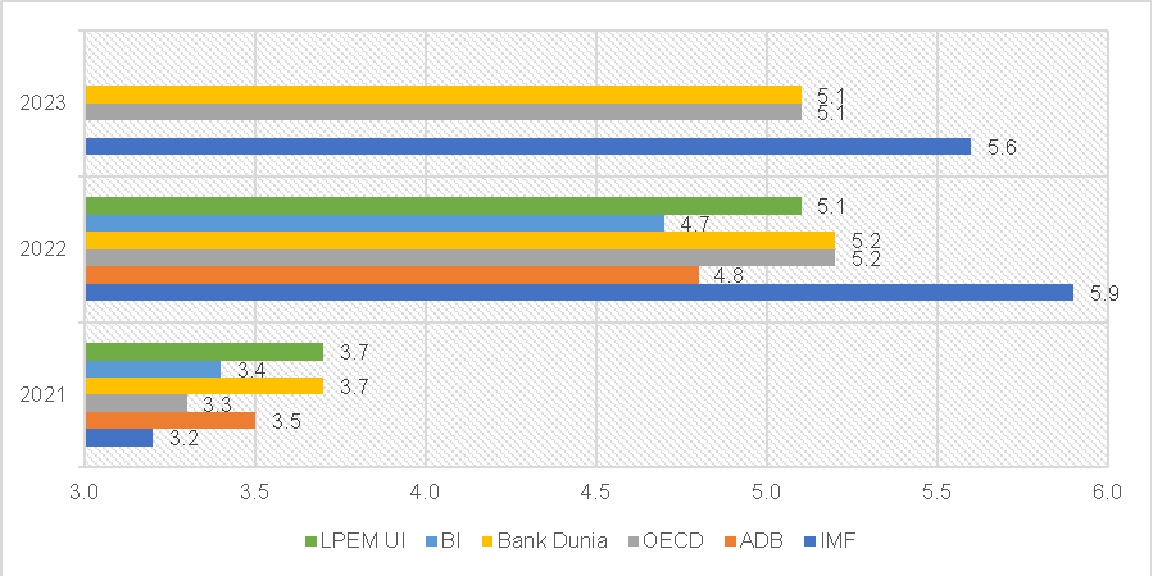

Sumber: IMF, 2021; ADB, 2021; OECD, 2021; Bank Dunia, 2021; BI, 2021; LPEM UI, 2021

Beberapa lembaga nasional dan internasional lainnya juga memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021-2023. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada tahun 2021 hanya akan tumbuh pada 3,2% seiring dengan perlambatan ekonomi ada Triwulan III 2021. Dengan bekal *low base* tersebut, Indonesia justru akan mampu tumbuh lebih cepat pada tahun 2022 selama reformasi struktural mampu dioptimalkan. Apabila tren positif tersebut dapat dijaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mulai akan kembali pada *track* pra-pandemi, yakni di kisaran 5,6%. Asian Development Bank (ADB) memiliki proyeksi yang cenderung berbeda dibandingkan dengan IMF, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan lebih tinggi sebesar 3,5% sedangkan pada 2022 akan lebih rendah dari proyeksi IMF, yakni sebesar 4,8%.

Sementara itu, Bank Dunia menggambarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran angka yang juga moderat. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dengan capaian pada 2021 sebesar 3,69%, kemudian diproyeksikan meningkat menjadi pada 2022 sebesar 5,2%, dan pertumbuhan mulai landai pada tahun 2023 sebesa 5,1%. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercapai pada kisaran 3,4-4,0%. Pada tahun berikutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada kisaran 4,7-5,5%. Adapun proyeksi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 secara moderat akan berada pada kisaran 3,7-3,9%. Perekonomian Indonesia akan kembali meningkat pada tahun 2022 di kisaran 5,1-5,4%.

Beberapa lembaga tersebut menekankan beberapa prasyarat agar Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi, yakni melalui pengendalian tingkat inflasi, memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan efisiensi investasi, dan meningkatkan kinerja ekspor. Jika melihat perkembangan angka *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia, posisi perekonomian Indonesia kembali sehat pada September-November 2021 setelah melalui PPKM Darurat dan Level

3-4. PMI adalah kumpulan dari survei-survei yang dilakukan kepada para manajer *purchasing* manufaktur, yang terdiri atas bidang seperti inventori, perekrutan tenaga kerja, kecepatan *supplier*, tingkat produksi, dan order pelanggan. Sebagai *leading indicator* bagi keadaan perekonomian secara keseluruhan, PMI dapat memberikan gambaran hasil penjualan, upah tenaga, kerja, persediaan barang, dan tingkat harga.

Kenaikan PMI manufaktur menunjukkan optimisme pelaku bisnis manufaktur, yang dapat menarik investor masuk pada sektor ini. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara terkait di pasar mata uang asing dan membuat sentimen positif pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. PMI Indonesia pada September 2021 berada pada 52,2 poin, kemudian meningkat signifikan pada Oktober 2021 menjadi 57,2 poin. Namun, pada November 2021 kembali turun menjadi 53,9 poin. Kendati mengalami penurunan, dengan angka PMI yang masih di atas 50 poin menunjukkan bahwa produksi manufaktur Indonesia masih dalam kondisi ekspansif. Progres yang baik tersebut perlu dipertahankan, mengingat sektor manufaktur memiliki dampak yang relatif besar terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Kondisi eksisting dan proyeksi ke depan perekonomian nasional dapat menjadi referensi kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk turut mengoptimalkan potensi perekonomian daerahnya. Secara umum, perekonomian Jawa Timur dapat dikatakan berada dalam fase pemulihan dengan adanya pertumbuhan kumulatif hingga Triwulan III 2021 sebesar 3,20% (*cumulative to cumulative*/ctc), sedikit lebih rendah dibandingkan di tingkat nasional yang tumbuh sebesar 3,24% (ctc). Kondisi eksisting perekonomian Jawa Timur relatif identik dengan nasional, karena Jawa Timur dapat dikatakan sebagai miniatur perekonomian nasional mengingat kesamaan struktur perekonomiannya. Sektor industri pengolahan sama-sama menjadi tulang punggung perekonomian bagi kedua wilayah, dengan didampingi sektor pertanian, perdagangan, dan

konstruksi. Secara kumulatif hingga Triwulan III 2021, seluruh *leading sectors* Jawa Timur yang telah disebutkan sebelumnya berada dalam ekspansif, setelah dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebagian besar sektor mengalami kontraksi. Sektor industri pengolahan mampu tumbuh 2,91% (ctc) setelah pada periode yang sama pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -1,91%. Sektor perdagangan juga mengalami ekspansi yang signifikan dengan tumbuh 7,50% (ctc) dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mengalami kontraksi cukup dalam hingga -6,36%. Sektor pertanian masih tetap mengalami kenaikan tipis 0,91% (ctc) kendati lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu meningkat 1,20%. Sedangkan sektor konstruksi mulai meningkat perlahan dengan tumbuh 0,10% (ctc) dan tampak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga mengalami kontraksi hingga -1,02%.

Progres dan prospek yang baik terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur diharapkan juga dapat dirasakan di Kabupaten Blitar. Dengan adanya harapan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan penyerapan tenaga kerja mampu kembali menggeliat dan daya beli masyarakat dapat kembali menguat. Setidaknya, *leading sectors* Kabupaten Blitar yang terdiri dari sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi memiliki peluang dan harapan yang sama dengan Jawa Timur dan nasional untuk dapat kembali kepada jalur pertumbuhan. Jika merujuk pada laporan terbaru dari Bank Dunia, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menjaga kinerja positif pada indikator ekonomi makro serta meminimalisir risiko dampak Covid-19 yang berkepanjangan, dengan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mengendalikan pandemi dengan melanjutkan percepatan vaksinasi dan meningkatkan kapasitas pengujian (*testing*), penelusuran (*tracing*), dan perawatan (*treatment*).

2. Melanjutkan berbagai kebijakan moneter dan keuangan yang akomodatif, serta bersiap mengelola dampak kondisi keuangan global yang semakin ketat.
3. Menambah ruang fiskal dengan meningkatkan penghasilan dari pajak serta memperbaiki target dan prioritas dukungan fiskal.
4. Meningkatkan reformasi struktural melalui berbagai tindakan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan hijau. Beberapa prioritas kebijakan termasuk pendalaman sektor keuangan, memperbaiki aktivitas pembelajaran yang sempat terganggu akibat penutupan sekolah melalui kelas remedial dan beragam intervensi lainnya, membantu kalangan muda mendapatkan pekerjaan lewat pelatihan dan program pasar kerja aktif, serta mendorong pengembangan ekonomi digital.

Regulasi dan kebijakan pemerintah masih akan sangat dominan untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 serta memimpin pemulihan ekonomi nasional dan daerah setidaknya pada tahun 2022 dan 2023. Program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan perlu terus digiatkan untuk menjaga daya tahan kesehatan dan ekonomi masyarakat secara simultan.

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan asumsi perekonomian nasional dan regional, kemudian dengan melihat kondisi ekonomi Kabupaten Blitar saat ini, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek potensi wilayah dengan segala ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Blitar, maka beberapa arah kebijakan perekonomian yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar diproyeksikan tumbuh sebesar 7,58% yang bergantung dengan kondisi pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap perekonomian global, nasional, dan regional. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan

pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah akan dijaga pada angka moderat 3% (± 1%) untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap kuat;

2. Pembangunan infrastruktur penopang perekonomian daerah khususnya di kawasan ekonomi produktif seperti sektor pertanian serta pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan padat karya, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta penerapan protokol kesehatan;
3. Orientasi pergerakan ekonomi masih difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak Covid-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada pembangunan kawasan sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian, industri berbasis sumber daya lokal dan pariwisata, sekaligus mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah (PAD);
4. Menjaga ketersediaan komoditas utama dan keterjangkauan harga di pasar, serta menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan non pangan;
5. Menjaga ketersediaan sarana produksi sektor pertanian dan industri, peningkatan daya saing sektor pariwisata, serta meningkatkan peranan BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah;
6. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal, membangun jaringan kelompok usaha desa, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian perdesaan;
7. Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak Covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian, dan agroindustri.
8. Membangun kerja sama pemerintah dengan swasta dan kerjasama antardaerah lain untuk mengembangkan produk olahan hasil

pertanian (industrialisasi pertanian/agroindustri) dengan konsep hulu-hilir, serta membuka dan membesarkan akses pasar di setiap pintu masuk Kabupaten Blitar;

9. Mendorong secara bertahap transformasi ekonomi ke arah digitalisasi dengan memperkuat jaringan internet hingga level desa sebagai upaya konektivitas desa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi kreatif, serta layanan dan informasi publik;
10. Kebijakan relaksasi dalam rangka *recovery* dampak Covid-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan *sunset policy*. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro.
11. Dalam kondisi pandemi covid-19 belum berakhir di tahun 2022, maka kebijakan perekonomian daerah difokuskan untuk penanganan dampak langsung maupun tidak langsung serta pemulihan dalam jangka pendek dan menengah pada tiga fokus utama yakni keselamatan kesehatan, *social safety net,* dan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 di Kabupaten Blitar.

Dalam mendukung kebijakan perekonomian tahun 2023 di Kabupaten Blitar, ditetapkan beberapa indikator makro daerah yaitu:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,75 persen.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPR) sebesar 3,4 persen.
c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,06
d. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,02 persen
e. Gini Rasio sebesar 0,320

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis kebijakan Keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan

pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah.

Sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah memiliki target pembangunan yang salah satunya berkaitan dengan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah dengan menerapkan reformasi fiskal. Strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Selain itu, dalam sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 pemerintah juga menetapkan 5 (lima) prioritas, di mana salah satu prioritasnya menyinggung tentang pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Indikator pembangunan kelembagaan dan keuangan daerah tersebut terdiri dari:

a) Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat;
b) Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas;
c) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien;
d) Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, maka Pemerintah Daerah diarahkan agar mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan akuntabel yang menunjang penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan level solvabilitasnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran serta pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat bermuara pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, percepatan penanganan *stunting*, memberi kepuasan layanan kepada masyarakat, pemenuhan SPM, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat kinerja UMKM, pembangunan kesetaraan gender, serta utamanya untuk penanganan, pencegahan, dan *recovery* pemulihan dampak sosial ekonomi pasca Covid-19 di berbagai bidang.

Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 di bidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan *money follow program priority* diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

3.2.1. Analisis Kinerja Keuangan Periode Tahun 2019-2021

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan daerah, dan struktur belanja daerah. Kinerja keuangan periode tahun 2019-2021, Secara rinci kinerja keuangan tersebut disajikan berikut ini.

A. Pendapatan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal pajak daerah untuk lingkup pemerintah kabupaten/kota terdiri 11 jenis penerimaan, yang meliputi: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, dan masih memungkinkan lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: Retribusi jasa umum; Retribusi jasa usaha; dan Retribusi perizinan tertentu.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019-2021 mengalami pertumbuhan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67 persen, Namun pada bebErapa komponen pendapatan mengalami penurunan diantaranya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki rata–rata pertumbuhan minus sebesar 9,19 Persen dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar 2,05 persen, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan rata-rata perumbuhan minus 4,83 persen

Tabel 3.9
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.401.031.952.736**	**2.255.876.316.829**	**2.467.651.406.772**	**1,67**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**285.742.715.699**	**302.540.062.676**	**407.530.973.690**	**20,29**
4.1.1	Pajak Daerah	96.512.500.209	89.506.182.946	105.284.952.677	5,18
4.1.2	Retribusi Daerah	19.458.062.217	18.899.793.279	28.471.414.093	23,89
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.390.396.739	1.904.856.239	1.941.486.896	-9,19
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	167.381.756.534	192.229.230.212	271.833.120.024	28,13
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.013.237.938.037**	**1.860.746.768.353**	**1.966.462.010.082**	**-0,95**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.831.097.723.790	1.706.670.539.288	1.752.746.586.552	-2,05
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.140.214.247	154.076.229.065	213.715.423.530	11,65
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**102.051.299.000**	**92.589.485.800**	**93.658.423.000**	**-4,06**
4.3.1	Pendapatan Hibah		983.855.800	1.533.431.000	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	102.051.299.000	91.605.630.000	92.124.992.000	-4,83

Sumber: LRA Kab.Blitar Tahun 2019-2021

Kinerja keuangan pendapatan dapat juga dapat dilihat atau disajikan dengan menelaah proporsi setiap komponen objek pendapatan, dari setiap komponen pendapatan tersebut dapat ditelaah komponen pendapatan yang paling besar kontribusinya. Besaran proporsi tersebut diperoleh gambaran kinerja persentase sumber pendapatan pada periode tahun 2019-2021 bahwa persentase pendapatan yang terbesar komponen pendapatan transfer, yaitu pada tahun 2019 sebesar 83,85 persen, tahun 2020 sebesar 82,48 persen, serta pada tahun 2021 sebesar 79,71 persen, serta Sumber pendapatan yang terkecil komponen Lain -Lain Pendapatan daerah yang Sah, yaitu pada tahun 2019 sebesar 4,25 persen, tahun 2020 sebesar 4,10 persen dan pada tahun 2021 sebesar 3,80 persen.

Tabel 3.10
Persentase Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		
		2019	2020	2021
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**11,90%**	**13,41%**	**16,52%**
4.1.1	Pajak Daerah	4,02%	3,97%	4,27%
4.1.2	Retribusi Daerah	0,81%	0,84%	1,15%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,10%	0,08%	0,08%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6,97%	8,52%	11,02%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**83,85%**	**82,48%**	**79,71%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,26%	75,65%	71,04%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,59%	6,83%	8,66%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4,25%**	**4,10%**	**3,80%**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,25%	4,06%	3,73%

Sumber: diolah dari LRA 2019-2021

B. Belanja Daerah

Berdasarkan penelahaan Pos belanja, diperoleh kinerja kuangan dari sisi belanja pada periode tahun 2019-2021, Belanja derah Kabupaten Blitar terjadi penurunan belanja dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar 3,40 persen, penurunan tersebut terjadi karena beberapa komponen belanja diantaranya belanja operasi mengalami penurunan dengan rata-rata minus pertumbuhan sebesar 7,93 persen, belanja modal penurunan dengan rata-rata minus 7,60 persen serta pada komponen transfer yaitu mengalami penurunan sebesar 0,89 persen. Selanjutnya belanja yang terjadi kenaikan pada belanja barang dan jasa 8,40 persen, belanja hibah sebesar 16,08 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 134,67 persen.

Tabel 3.11
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.462.287.179.044**	**2.282.937.756.905**	**2.294.172.722.399**	**-3,40**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.931.862.699.776**	**1.563.273.262.034**	**1.613.526.086.265**	**-7,93**
5.1.1	Belanja Pegawai	974.581.310.017	875.134.545.181	884.783.192.724	-4,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	563.688.615.447	540.705.653.691	653.574.547.791	8,40
5.1.5	Belanja Hibah	71.099.594.711	140.412.905.162	48.687.847.000	16,08
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000	7.020.158.000	26.480.498.750	134,67
5.2	**BELANJA MODAL**	**518.398.600.300**	**271.999.153.804**	**359.930.998.439**	**-7,60**
5.2.1	Belanja Modal	518.398.600.300	271.999.153.804	359.930.998.439	-7,60
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**71.758.500**	**105.185.265.047**	**751.296.370**	**73191,51**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	71.758.500	105.185.265.047	751.296.370	73191,51
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**326.827.100.068**	**342.480.076.020**	**319.964.341.325**	**-0,89**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.954.120.468	13.792.042.094	8.909.878.775	-10,01
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	314.872.979.600	328.688.033.926	311.054.462.550	-0,49

Sumber: diolah dari LRA 2019-2021

C. Pembiayaan Daerah

Pada pos Pembiayaan daerah, Pembiyaan Dearah Kabupaten Blitar terjadi penurunan dengan rata-rata minus 18,87 persen, penurunan persebut diantaranya terjadi karena pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setiap tahun mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 sebesar Rp237.737.324.912 dan pada tahun 2021 sebesar Rp149.470.458.528 atau dengan rata-rata penurunan sebesar 20,54 persen

Tabel 3.12
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
	PEMBIAYAAN	**237.755.424.912**	**237.755.424.912**	**148.035.658.528**	**-18,87**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**237.755.424.912**	**237.755.424.912**	**149.485.658.528**	**-18,56**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.737.324.912	176.500.198.604	149.470.458.528	-20,54
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	18.100.000	31.700.000	15.200.000	11,54
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			**1.450.000.000**	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah			1.450.000.000	

Sumber: diolah dari LRA 2019-2021

D. Neraca Daerah

Kinerja kuangan Kabupaten Blitar dapat digambarkan dengan analisa posisi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Kinerja posisi keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2019 sampai tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata -Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**				
2	**ASET LANCAR**				
3	Kas di Kas Daerah	156.441.619.581	113.963.280.928	221.306.078.047	33,5
4	Kas di Bendahara BOS	8.132.308.963	-	-	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.900.000	-	-	
6	Kas di Bendahara Penerimaan		198.000	308.144	
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	11.922.370.061	35.398.522.060	100.199.273.489	190,0
8	Kas Lainnya	-	378.134.466	8.683.221	
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
10	Piutang Pajak	45.232.494.138	49.372.549.175	50.451.075.949	5,7
11	Piutang Retribusi	173.304.276	176.282.686	322.878.582	42,4
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.903.726.239	-	-	
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.095.197.190	17.998.567.371	73.181.722.592	133,2
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.578.540.205	21.267.621.811	10.082.865.484	-46,4
15	Piutang Pendapatan Lainnya	36.541.556.087	34.816.885.125	-	-52,4
16	Piutang Lainnya	2.517.054.484	2.021.009.563	3.213.045.298	19,6
17	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(51.352.097.286)	(53.437.984.500)	(46.904.595.871)	-4,1
18	Belanja Dibayar Dimuka	37.500.000	37.500.000	37.500.000	0,0
19	Persediaan	39.392.846.413	43.041.891.301	43.972.179.657	5,7
20	**Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)**	**316.620.320.350**	**265.034.457.986**	**455.871.014.591**	**27,9**
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**				
22	**Investasi Non Permanen**				
23	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata -Rata Pertumbuhan (%)
24	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	
25	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
26	Investasi dalam Surat Utang Negara dan SBI	-	-	-	
27	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	
28	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-	-	-	
29	**Jumlah Investasi Non Permanen (23 s/d 28)**	**-**	**-**	**-**	
30	**Investasi Permanen**				
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.590.650.548	25.215.156.895	27.602.359.729	4,0
32	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	
33	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	
34	Invertasi Permanen Lainnya	-	-	-	
35	**Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 34)**	**25.590.650.548**	**25.215.156.895**	**27.602.359.729**	**4,0**
36	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 35)**	**25.590.650.548**	**25.215.156.895**	**27.602.359.729**	**4,0**
37	**ASET TETAP**				
38	Tanah	760.393.962.956	761.493.532.066	905.607.127.171	9,5
39	Peralatan dan Mesin	641.452.534.759	777.446.450.558	881.997.015.735	17,3
40	Gedung dan Bangunan	1.279.973.459.660	1.320.251.551.282	1.344.014.529.315	2,5
41	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.017.481.680.893	3.158.316.689.102	3.328.860.802.297	5,0
42	Aset Tetap Lainnya	50.494.857.455	51.122.339.971	50.846.247.922	0,4
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	24.091.323.009	4.903.171.214	28.968.675.100	205,6
44	Akumulasi Penyusutan	(1.728.311.263.136)	(1.954.790.680.994)	(2.338.018.941.840)	16,4
45	**Jumlah Aset Tetap (38 s/d 44)**	**4.045.576.555.595**	**4.118.743.053.198**	**4.202.275.455.699**	**1,9**
46	**DANA CADANGAN**				
47	Dana Cadangan	-	-	-	
48	**Jumlah Dana Cadangan (47)**	**-**	**-**	**-**	
49	**ASET LAINNYA**				
50	Tagihan Penjualan Angsuran				
51	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.748.036.916	4.703.786.916	39.497.272.041	369,4

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata -Rata Pertumbuhan (%)
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	
53	Aset Tidak Berwujud	8.266.639.646	8.413.879.646	8.413.879.646	0,9
54	Aset Lain-lain	47.479.012.316	49.162.726.223	48.245.905.586	0,8
55	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.768.617.103)	(1.709.115.951)	
56	**Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)**	**60.493.688.878**	**60.511.775.682**	**94.447.941.321**	**28,1**
57	**JUMLAH ASET (20+36+45+48+55)**	**4.448.281.215.370**	**4.469.504.443.761**	**4.780.196.771.341**	**3,7**
58	**KEWAJIBAN**				
59	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
60	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		269.676.926	-	
60	Utang Bunga	-	-	-	
61	Utang Pajak	-	-	-	
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
63	Pendapatan Diterima Dimuka	192.394.616	3.813.455.887	240.781.253	894,2
64	Utang Belanja	25.255.571.370	38.088.280.864	42.332.197.126	31,0
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.202.724.480	4.396.298.690	6.959.961.512	0,7
66	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 65)**	**35.650.690.466**	**46.567.712.368**	**49.532.939.891**	**18,5**
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**				
68	Utang Dalam Negeri	-	-	-	
69	Utang Luar Negeri	-	-	-	
70	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68+69)**	**-**	**-**	**-**	
71	**JUMLAH KEWAJIBAN (66+70)**	**35.650.690.466**	**46.567.712.368**	**49.532.939.891**	**18,5**
72	**EKUITAS**				
73	EKUITAS	4.412.630.524.904	4.422.936.731.393	4.730.663.831.450	3,6
74	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (71+73)**	**4.448.281.215.370**	**4.469.504.443.761**	**4.780.196.771.341**	**3,7**

Sumber: diolah dari Laporan Neraca 2019-2021

Aset Pemerintah Kabupaten Blitar selama periode 2019-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,7 persen serta jumlah kewajiban dan ekuitas dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Adapun penjelasan masing-masing komponen, diuraikan sebagai berikut:

A. Aset

Aset lancar pemerintah Kabupaten Blitar mengalami tren kenaikan pada tahun 2019 hingga 2021 dengan rata-rata 27,9 persen. Kenaikan terbesar pada pos Kas di Badan Layanan Umum Daerag sebesar 190,0 persen antara periode Tahun 2019 sampai dengan 2021. Jumlah aset tetap mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,9 persen. Total aset tetap pada Tahun 2019 adalah Rp4.045.576.555.595 dan meningkat menjadi Rp 4.202.275.455.699 pada Tahun 2021.

B. Kewajiban

Kewajiban pemerintah Kabupaten Blitar mengalami tren kenaikan pada tahun 2019 hingga 2021 dengan rata-rata 18,5 persen. Kenaikan yang signifikan terdapat pada komponen Pendapatan diterima dimuka, diantaranya pada periode tahun 2019 terdapat pendapatan ditermia dimuka sebesar Rp192.394.616 dan periode Tahun 2020 naik menjadi Rp3.813.455.887

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Blitar selama tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 3,6 persen. Pada tahun 2019 sebesar Rp4.412.630.524.904 dan tahun 2021 Rp4.730.663.831.450

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima, sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 dapat diidentifikasi dengan baik. Perhitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan dapat diimplementasikan pada tahun 2023. Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah yang Kredibel

   Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

2. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

   Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari peningkatan intensifikasi

pendapatan daerah, peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah, jumlah penerimaan pajak, penerimaan pajak dibanding target, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pengadaan sarana dan prasarana keuangan daerah, serta penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Proyeksi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, dan pembiayaan, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran serta pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelola anggaran daerah agar mencapai hasil maksimal seperti yang direncanakan, termasuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, terdapat asumsi bahwa

pandemi Covid-19 sudah selesai pada tahun 2022, sehingga aktivitas perekonomian pada tahun 2022 sudah beranjak pada fase pemulihan dan tahun 2023 akan menjadi puncak pemulihan. Sesuai dengan potensi ekonomi Kabupaten Blitar, potensi terbesar Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian sebagai sektor primer yang dapat menunjang perekonomian daerah, sedangkan sektor yang juga kompetitif adalah sektor perdagangan, industri, hotel, dan restoran. Diharapkan selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan asumsi pandemi Covid-19 berakhir pada tahun 2022, maka pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan seiring dengan pulihnya perekonomian nasional yang memberikan pengaruh positif terhadap APBN, sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional kendati ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata mengalami kenaikan per tahun di mana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan dari berbagai sumber pendapatan yang *sustainable* dan dengan jumlah yang memadai. Karena itu kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
2. Memperkuat *database* dan sistem informasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola Pendapatan Daerah;

3. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan
5. Kebijakan pendapatan dalam upaya *recovery* Covid-19 dengan memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama pendapatan, untuk itu dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak hotel dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar, pajak reklame, dan lain-lain, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah.

Kendati demikian, ada beberapa potensi PAD yang di tahun 2023 yang hilang atau mengalami penurunan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sebagai imbas dari adanya perubahan nomenklatur kebijakan dan pada umumnya terkait dengan kebijakan retribusi daerah. Perubahan nomenklatur tersebut seiring dengan upaya Pemerintah Pusat untuk menurunkan hambatan investasi yang ditengarai karena regulasi di daerah. Sehingga beberapa potensi retribusi dihapus atau diambil alih wewenangnya oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pusat. Adapun beberapa potensi pendapatan yang hilang/menurun meliputi:

1. Pajak Sirtu
2. Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO)
3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7. Retribusi Terminal

8. Retribusi Tempat Parkir Khusus
9. Retribusi Pemakaian Pemeriksaan Strow
10. Retribusi Tempat Pariwisata
11. Retribusi Ijin Trayek
12. Retribusi Ijin Usaha Perikanan
13. Laba BPR HAS
14. Laba BPR Jatim
15. Penerimaan Bunga Deposito

Capaian pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah. Namun demikian, dalam situasi *recovery* dampak Covid-19, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi pada mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
   a. Menerapkan penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
   b. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
   c. Melaksanakan *update* database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

2. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. Adapun beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
   a. Revitalisasi gedung atau aset daerah yang dapat dimanfaatkan atau disewakan untuk kegiatan komersil seperti pernikahan, seminar, maupun olahraga.
   b. Lahan-lahan strategis dan belum termanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dapat disewakan untuk kegiatan seperti kafe, minimarket, maupun kegiatan komersil lainnya.
   c. Menawarkan kepada pihak masyarakat dan swasta terkait titik-titik yang strategis untuk pemasangan papan reklame (spanduk, *billboard*, baliho, videotron, megatron). Hal ini juga dapat bekerjasama dengan instansi lain berkaitan dengan kepemilikan lahan dan pemungutan sewa, retribusi, maupun pajak reklame.
3. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-program yang *in line* dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.
5. Pemerintah Kabupaten Blitar akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan

keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk dukungan lainnya.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memberikan informasi mengenai potensi Pendapatan Daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis tren yang didasarkan pada data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di masa lampau, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut dapat lebih realistis.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun proyeksi pendapatan Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.401.031.952.736**	**2.255.876.316.829**	**2.467.651.406.772**	**1,67**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**285.742.715.699**	**302.540.062.676**	**407.530.973.690**	**20,29**
4.1.1	Pajak Daerah	96.512.500.209	89.506.182.946	105.284.952.677	5,18
4.1.2	Retribusi Daerah	19.458.062.217	18.899.793.279	28.471.414.093	23,89
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.390.396.739	1.904.856.239	1.941.486.896	-9,19
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	167.381.756.534	192.229.230.212	271.833.120.024	28,13
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.013.237.938.037**	**1.860.746.768.353**	**1.966.462.010.082**	**-0,95**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.831.097.723.790	1.706.670.539.288	1.752.746.586.552	-2,05
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.140.214.247	154.076.229.065	213.715.423.530	11,65
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**102.051.299.000**	**92.589.485.800**	**93.658.423.000**	**-4,06**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	983.855.800	1.533.431.000	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	102.051.299.000	91.605.630.000	92.124.992.000	-4,83

Lanjutan Tabel 3.13

Kode Rekening	Uraian	Tahun berjalan (APBD) Tahun 2022	APBD 2022 (Pergeseran II)	Proyeksi /Target Pada Tahun 2023	Proyeksi /Target Pda Tahun 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.322.445.580.319**	**2.324.426.542.319**	**2.447.014.961.513**	**3.000.913.379.359**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**336.536.343.119**	**336.536.343.119**	**383.365.510.540**	**440.152.649.233**
4.1.1	Pajak Daerah	113.741.256.724	113.741.256.724	130.802.445.232	174.621.264.385
4.1.2	Retribusi Daerah	21.341.224.216	21.341.224.216	43.424.035.421	46.029.477.553
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.305.737.414	2.305.737.414	2.351.852.162	2.375.370.683
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	199.148.124.765	199.148.124.765	206.787.177.725	217.560.789.685
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.985.909.237.200**	**1.987.890.199.200**	**1.961.277.935.130**	**2.464.132.342.745**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.820.371.345.000	1.822.277.307.000	1.791.665.042.930	2.196.319.693.745
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.537.892.200	165.612.892.200	169.612.892.200	267.812.649.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0

Sumber: LRA Kab.Blitar Tahun 2019, 2020 dan 2021; dan APBD Tahun Anggaran 2022, RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 diolah

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran Belanja Daerah agar tetap terarah, efisien, dan efektif, pada posisi saat ini arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19. Adapun kebijakan Pemerintah Pusat tersebut antara lain *refocusing* penggunaan Dana Transfer Umum (DTU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Dana Desa (DD), dan lain-lain untuk pemulihan pasca Covid-19.

Selain itu, dalam rangka realokasi dan *refocusing* serta penyesuaian belanja APBD, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan arahan kebijakan sebagai berikut: 1) Pemotongan Belanja Pegawai utamanya tunjangan kinerja yang berlebihan dan honorarium; 2) Pemotongan Belanja Barang/Jasa (utamanya yang tidak produktif); 3) Pemotongan Belanja Modal (utamanya yang kurang *urgent* saat ini); serta 4) Pengalihan belanja ke pemulihan pasca Covid-19, seperti bidang kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan insentif UMKM.

Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jendral Bina Bangda menyampaikan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan keuangan daerah antara lain:

1. Sinkronisasi dan Penganggaran. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional
2. Pembiayaan Alternatif. Menjaga keberlanjutan fiskal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah

3. Kerjasama Antar Daerah. Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antardaerah diharapkan menghasilkan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah
4. Evaluasi Hibah dan Bansos. Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan *feedback* yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos.
5. Reorientasi Belanja Modal. Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan); Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, *Creative Center*), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).
6. Dukungan Pemulihan Ekonomi Sektor Riil. Menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan., dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan pemulihan pasca Covid-19.
7. Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah. Percepatan dan perluasan ETPD dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.
8. Penguatan Perlindungan Sosial. Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap memprioritakan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja.

Untuk selanjutnya, berkenaan dengan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, pokok-pokok kebijakan daerah yang perlu dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Sinergi TKDD dan K/L dalam *Human Capital Development*. Pengetatan *mandatory spending* DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan. Dukungan untuk program Merdeka Belajar. Peningkatan kemampuan pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah. Pemanfaatan *creative financing*, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau KPBU. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah. Dukungan TKDD untuk pelaksanaan *creative financing* melalui skema pendanaan terintegrasi (*integrated funding*).
3. Pemulihan Ekonomi. Pembangunan infrastruktur aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.

Berkenaan dengan belanja infrastruktur daerah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jendral Bina Bangda memberi arahan antara lain:

1. Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang;
2. Melakukan *refocusing* pembangunan infrastruktur selama pandemi misalnya dengan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, terutama kesehatan (puskesmas, puskesdes), dan penunjang kesehatan (sanitasi dan air minum layak), infrastruktur penunjang ekonomi (energi dan telekomunikasi), dan infrastruktur perdesaan (penunjang ketahanan pangan);
3. Pembangunan infrastruktur berbasis ICT menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital;

4. Dengan asumsi pandemi telah dapat dikendalikan pada tahun 2022, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki *backward-forward linkage* yang luas, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata (perhotelan, industri dan jasa pendukung pariwisata, ekonomi kreatif), industri (UMKM), perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral (listrik untuk rakyat), dan kehutanan (perhutanan sosial); dan
5. Pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal.

Secara khusus terdapat arahan penting untuk percepatan pembangunan berperspektif gender yang fokus pada penanganan *stunting* di daerah. Isu *stunting* sudah menjadi agenda prioritas nasional, sehingga setiap daerah perlu secara khusus menggarisbawahi persoalan *stunting* ini dengan menyusun rencana aksi yang dikerjakan secara gotong-royong seluruh *stakeholder* pembangunan yang ada. Daerah diminta untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang berprespektif gender.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien, dan efektif, maka beberapa arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Blitar pada tahun 2023;
3. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan

berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

4. Belanja daerah perlu diarahkan untuk prioritas penanganan *stunting* mengingat Kabupaten Blitar menjadi lokus prioritas *stunting* nasional, selain itu juga perlu upaya lebih pada upaya peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengatasi persoalan tingginya angka kematian ibu;
5. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun dana kelurahan;
6. Belanja daerah juga diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dan DPRD dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas Tahun 2023 yang mengarah pada 1) Pembangunan SDM, Penanggulangan Kemiskinan, dan Pengangguran, 2) Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar, 3) Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*, 4) Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pemerintahan, Kawasan Perkotaan, dan Wilayah Perbatasan, 5) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian serta 6) Penguatan Kesiapsiagaan Bencana dan Pelestarian Lingkungan;
8. Belanja daerah juga dapat diarahkan untuk membiayai belanja output kunci kegiatan pada program-program prioritas Tahun 2021 dan 2022 yang tertunda pelaksanaannya sebagai akibat realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dan *recovery* pandemi Covid-19;
9. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas, *recovery* dan penanganan dampak pascapandemi Covid-19 yang mana

penyalurannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu mempersiapkan cadangan belanja pada belanja tidak terduga sebagai antisipasi pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sampai dengan 2023;

10. Belanja daerah juga dapat diarahkan untuk mempersiapkan cadangan belanja untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024;
11. Penggunaan dana-dana spesifik untuk percepatan pencapaian Visi-Misi-Panca Bhakti KDH; dan
12. Belanja daerah lainnya dalam rangka *recovery* dan penanganan pascapandemi Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi Covid 19 belum berakhir di tahun 2022, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat di-*refocusing* dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Blitar diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah perpaduan antara analisa *trend* dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis *trend* data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja, serta justifikasi perangkat daerah pengampu keuangan daerah. Proyeksi belanja juga memperhatikan kebutuhan belanja wajib daerah serta prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2023 semua urusan, baik dari pendekatan perencanaan politis, partisipatif, teknokratis, *top-down* dan *bottom up*.

Belanja Daerah Kabupaten Blitar tahun 2022 sampai tahun 2024 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,18 persen, diantaranya belanja operasi sebesar 7,58 persen, belanja modal sebesar 6,47 persen, belanja tidak terduga dan belanja transfer tidak terjadi kenaikan.

Tabel 3.15
Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2029-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.462.287.179.044**	**2.282.937.756.905**	**2.294.172.722.399**	**-3,40**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.931.862.699.776**	**1.563.273.262.034**	**1.613.526.086.265**	**-7,93**
5.1.1	Belanja Pegawai	974.581.310.017	875.134.545.181	884.783.192.724	-4,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	563.688.615.447	540.705.653.691	653.574.547.791	8,40
5.1.5	Belanja Hibah	71.099.594.711	140.412.905.162	48.687.847.000	16,08
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000	7.020.158.000	26.480.498.750	134,67
5.2	**BELANJA MODAL**	**518.398.600.300**	**271.999.153.804**	**359.930.998.439**	**-7,60**
5.2.1	Belanja Modal	518.398.600.300	271.999.153.804	359.930.998.439	-7,60
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**71.758.500**	**105.185.265.047**	**751.296.370**	**73191,51**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	71.758.500	105.185.265.047	751.296.370	73191,51
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**326.827.100.068**	**342.480.076.020**	**319.964.341.325**	**-0,89**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.954.120.468	13.792.042.094	8.909.878.775	-10,01
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	314.872.979.600	328.688.033.926	311.054.462.550	-0,49

Lanjutan Tabel 3.15

Uraian	Tahun berjalan (APBD) Tahun 2022	APBD 2022 (Pergeseran II)	Proyeksi /Target Pada Tahun 2023	Proyeksi /Target Pada Tahun 2024
BELANJA DAERAH	**2.391.910.263.888**	**2.393.891.225.888**	**2.404.108.129.239**	**2.696.125.426.864**
BELANJA OPERASI	**1.715.529.125.882**	**1.712.479.772.367**	**1.722.696.675.717**	**1.985.058.830.822**
BELANJA MODAL	**263.840.494.845**	**268.870.810.360**	**268.870.810.360**	**298.525.952.880**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**
BELANJA TRANSFER	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**

Sumber: LRA 2019-2021, APBD 2022; RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Data Diolah)

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2023, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Untuk menutup defisit anggaran ini digunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembiayaan daerah lebih terarah, maka arah kebijakan pembiayaan yang diambil untuk tahun 2023, yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi perlu terus dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antartingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Pemerintah Kabupaten Blitar akan menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di Kabupaten Blitar. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Blitar sehingga program-program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar.

Proyeksi Pembiayaan Daerah diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2023. Komposisi Pembiayaan Daerah berdasarkan data realisasi pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan realisasi APBD sejak tahun 2019 sampai dengan Pergeseran kedua APBD 2022, terlihat bahwa terjadi penurunan nilai SiLPA dari tahun ke tahun.

Penerimaan pembiayaan pada RKPD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp74.464.683.569 yang bersumber dari SiLPA. Nilai ini lebih besar dari yang diproyeksikan di RPJMD. Disisi lain, Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 dan 2024 direncanakan masing-masing sebesar Rp15.000.000.000 yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut dialokasikan untuk

penyelengaaraan Pemilihan Presiden dan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Tabel 3.16
Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Tahun berjalan (APBD) Tahun 2022	APBD 2022 (Pergeseran II)	Proyeksi /Target Pada Tahun 2023	Proyeksi /Target Pada Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan 2022-2024 (%)
		2019	2020	2021						
6	**PEMBIAYAAN**	**237.755.424.912**	**237.755.424.912**	**148.035.658.528**	**-18,87**	**69.464.683.569**	**69.464.683.569**	**59.464.683.569**	**57.603.066.480**	**-8,76**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**237.755.424.912**	**237.755.424.912**	**149.485.658.528**	**-18,56**	**79.464.683.569**	**79.464.683.569**	**74.464.683.569**	**72.603.066.480**	**-4,40**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.737.324.912	176.500.198.604	149.470.458.528	-20,54	79.464.683.569	79.464.683.569	74.464.683.569	72.603.066.480	-4,40
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	18.100.000	31.700.000	15.200.000	11,54					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			**1.450.000.000**		**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah			1.450.000.000						

Sumber: LRA 2019-2021, APBD 2022 ; RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, diolah

D. Kebijakan Alokasi Anggaran

Sebelum melakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka perlu dihitung pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan terutama pedoman penyusunan APBD. Perhitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Blitar disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

No	Uraian	Proyeksi RKPD tahun rencana Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
A	**Belanja Mengikat**	**432.093.177.430**	**432.127.744.884**
1	Belanja Pegawai (setelah dikurang Belanja pegawai pendidikan dan kesehatan)	234.265.366.510	234.284.107.740
2	BLUD	197.827.810.919	197.843.637.144
B	**Belanja Wajib**	**1.656.543.029.275**	**1.805.517.558.848**
1	Pendidikan	861.745.794.099	937.941.371.054
2	Kesehatan	451.187.123.871	491.926.584.762
3	Infrastruktur	305.090.100.367	337.126.510.492
4	Peningkatan kapasitas SDM	2.750.939.618	2.751.159.693
5	Penguatan APIP	15.165.338.645	15.166.551.873
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.603.732.676	20.605.380.974
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000
2	Penyertaan modal daerah		
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo		
4	Pemberian Pinjaman Daerah		

No	Uraian	Proyeksi RKPD tahun rencana Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.		
	Total Belanja Wajib Mengikat	**2.103.636.206.705**	**2.252.645.303.732**

Sumber: Hasil analisis, 2022

Tabel 3.18
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun berjalan (APBD) Tahun 2022	APBD 2022 (Pergeseran II)	Proyeksi /Target Pada Tahun 2023	Proyeksi /Target Pda Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan 2022-2024 (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.322.445.580.319**	**2.324.426.542.319**	**2.447.014.961.513**	**2.557.176.842.405**	**4,93**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**336.536.343.119**	**336.536.343.119**	**358.573.343.119**	**359.178.830.851**	**3,36**
4.1.1	Pajak Daerah	113.741.256.724	113.741.256.724	113.949.256.724	114.154.365.386	0,18
4.1.2	Retribusi Daerah	21.341.224.216	21.341.224.216	21.341.224.216	21.695.488.538	0,83
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.305.737.414	2.305.737.414	2.305.737.414	2.351.852.162	1,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	199.148.124.765	199.148.124.765	220.977.124.765	220.977.124.765	5,48
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.985.909.237.200**	**1.987.890.199.200**	**2.088.441.618.394**	**2.197.998.011.554**	**5,20**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.820.371.345.000	1.822.277.307.000	1.918.828.726.194	2.028.385.119.354	5,56
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.537.892.200	165.612.892.200	169.612.892.200	169.612.892.200	1,23
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**79.464.683.569**	**79.464.683.569**	**74.464.683.569**	**72.603.066.480**	**-4,40**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.464.683.569	79.464.683.569	74.464.683.569	72.603.066.480	-4,40
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			0		

Kode Rekening	Uraian	Tahun berjalan (APBD) Tahun 2022	APBD 2022 (Pergeseran II)	Proyeksi /Target Pada Tahun 2023	Proyeksi /Target Pda Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan 2022-2024 (%)
	Daerah					
	TOTAL PENERIMAAN	**2.401.910.263.888**	**2.403.891.225.888**	**2.521.479.645.082**	**2.629.779.908.885**	4,64
5	**BELANJA DAERAH**	**2.391.910.263.888**	**2.393.891.225.888**	**2.506.479.645.082**	**2.711.125.426.864**	**6,48**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.715.529.125.882**	**1.712.479.772.367**	**1.825.068.191.561**	**1.985.058.830.822**	**7,58**
5.1.1	Belanja Pegawai	985.046.257.091				
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	652.638.527.040				
5.1.5	Belanja Hibah	50.718.627.800				
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.125.713.951				
5.2	**BELANJA MODAL**	**263.840.494.845**	**268.870.810.360**	**268.870.810.360**	**298.525.952.880**	**6,47**
5.2.1	Belanja Modal	263.840.494.845				
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**	**53.044.320.000**	**0,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	53.044.320.000				
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**	**359.496.323.161**	**0,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.035.126.161				
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	341.461.197.000				
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	
	TOTAL PENGELUARAN	**2.401.910.263.888**	**2.403.891.225.888**	**2.521.479.645.082**	**2.726.125.426.864**	**6,55**

Sumber: APBD Kabupaten Blitar Tahun 2022; dan hasil analisis, 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun dengan merujuk pada beberapa dokumen penting, diantaranya RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, isu-isu dan/atau kebijakan di tingkat daerah dan nasional, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta evaluasi capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar. Pada subbab ini disajikan telaahan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Timur, sebelum penentuan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar.

4.1.1. Telaahan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020– 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024.

Pembangunan nasional periode 2020-2024 memiliki visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi RPJMN Tahun 2020-2024 dijabarkan kedalam 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

   Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan

wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; serta 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, akan dilakukan melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

   Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Pemikiran tersebut akan diwujudkan melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing." Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2023, yaitu:

a. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Tabel 1.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Pembangunan	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,7	5,2-5,5	5,3–5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	5,3–6,0
3	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,375–0,378
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,5 – 8,5
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,29	73,41-73,46	73,31–73,49
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	23,55	26,87	27,02
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	104,64	103–105	103–105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104,69	104-106	106-107

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31– 73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yakni **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"**, sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Misi RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut:

a. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 1:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan; 2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan; 3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian; 4) Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal; 6) Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM; 7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata; 8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 9) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan 10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.

b. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 2:

2. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai berikut: 1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan 2) Meningkatnya Kemandirian PMKS.

3. Meningkatnya Keseteraan Gender yang memiliki sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai berikut; 1) Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

5. Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran; 1) Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.

c. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3:

6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran sebagai berikut: 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel; 2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah; 3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan 4) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

7. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. 1) Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat; 2) Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan 3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.

d. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4:

8. Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang memiliki sasaran sebagai berikut; 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Adapun realisasi dan target IKU Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 1.2
Realisasi dan Targat Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Jawa Timur

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,57	3,45 – 5,15
2	Indeks Theil	0,312	0,31462 – 0,30162
3	Persentase Penduduk Miskin	10,59	10,55 – 9,35
4	Indeks Gini	0,364	0,3645 – 0,3638
5	Indeks Pembangunan Gender	91,67	90,98 – 91,92
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	73,08 -73,57
7	Tingkat PengangguranTerbuka	5,74	5,41 – 3,82
8	Indeks Reformasi Birokrasi	76,71	77,25 – 79,75
9	Indeks Kesalehan Sosial	66,33	66,44 – 71,96
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,49	68,10 – 69,30
11	Indeks Risiko Bencana	117,26	118,26 – 116,52

Sumber: Paparan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023

Konsep-konsep pembangunan sebagaimana yang telah tertuang di dalam RPJMN Periode 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 juga perlu diselaraskan dengan strategi pembangunan di Kabupaten Blitar. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 mengusung visi **"Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*)."** Target utama visi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat *baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur*. Secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Blitar Mandiri**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.
2. **Blitar Sejahtera**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusivitas dan lingkungan asri yang berkualitas.
3. **Akhlak Mulia**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.
4. ***Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur***, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun". Makna "Negeri yang baik (*Baldatun Thoyyibatun*)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang Maha Pengampun (*Rabbun Ghafuur*)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Definisi ini merujuk pada Al Quran Surah As-Saba ayat 15 yang berbunyi:

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rizki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (QS. Saba': 15).

Visi pembangunan tersebut kemudian dideterminasikan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan, yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas; serta
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

Tabel 1.3
Pemetaan Visi-Misi RPJMN Periode 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

VISI-MISI RPJMN TAHUN 2020-2024			VISI-MISI RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024			VISI-MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026		
VISI	**MISI**	**7 AGENDA PRIORITAS**	**VISI**	**MISI**	**NAWA BHAKTI SATYA**	**VISI**	**MISI**	**PRIORITAS**
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	Bhakti – 1: Jatim Sejahtera Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.	Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya	1. Pengobatan Gratis 2. Pengendalian Covid-19, *Health Circle Area* dan Optimalisasi Laboratorium 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			Bhakti – 3: Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.			
	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Bhakti – 5: Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai		Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai	1. Blitar Cerdas dan Beradab 2. Jaminan Pendidikan 3. Beasiswa Perguruan Tinggi

VISI-MISI RPJMN TAHUN 2020-2024			VISI-MISI RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024			VISI-MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026		
VISI	**MISI**	**7 AGENDA PRIORITAS**	**VISI**	**MISI**	**NAWA BHAKTI SATYA**	**VISI**	**MISI**	**PRIORITAS**
					Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.		Kompetensi Tinggi	4. Pustaka Pesantren 5. *Reward* Guru Ngaji dan Modin 6. *Reward* Guru PTT/GTT 7. Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	Bhakti – 8: Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.		Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas	1. E-Adminduk 2. E-Health 3. E-Transparancy 4. *Public Service Center* 5. Internet Sambung Desa
	Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya				Bhakti – 9: Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.			

VISI-MISI RPJMN TAHUN 2020-2024			VISI-MISI RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024			VISI-MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026		
VISI	**MISI**	**7 AGENDA PRIORITAS**	**VISI**	**MISI**	**NAWA BHAKTI SATYA**	**VISI**	**MISI**	**PRIORITAS**
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan							
	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman bagi Seluruh Warga							
	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	Bhakti – 2: Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi		Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	a. Pengembangan Potensi Peternakan dengan Mendirikan BUMD yang Dapat Menjamin Suplai dan Vitamin Untuk Ternak; b. Optimalisasi Teknologi Pengairan Untuk Pertanian Yang Inovatif dan Menjamin Ketersediaan Pupuk Melalui BUMD; c. Membesarkan
	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan	Bhakti – 4: Jatim Akses.			

VISI-MISI RPJMN TAHUN 2020-2024			VISI-MISI RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024			VISI-MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026		
VISI	**MISI**	**7 AGENDA PRIORITAS**	**VISI**	**MISI**	**NAWA BHAKTI SATYA**	**VISI**	**MISI**	**PRIORITAS**
				Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya				Pasar di setiap Pintu Masuk Kabupaten Blitar; d. Membesarkan Produk Unggulan Berbasis Kawasan; e. Mengembangkan Ekonomi Hulu-Hilir.
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Bhakti – 6: Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan			
					Bhakti – 7: Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.			
								1. Memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju tempat wisata, pengadaan lahan,

VISI-MISI RPJMN TAHUN 2020-2024			VISI-MISI RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024			VISI-MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026		
VISI	**MISI**	**7 AGENDA PRIORITAS**	**VISI**	**MISI**	**NAWA BHAKTI SATYA**	**VISI**	**MISI**	**PRIORITAS**
								pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata khususnya di wilayah selatan. 2. Menstimulus masyarakat untuk bisa menjadi SDM kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing. 3. Mewujudkan Desa Mandiri di seluruh Desa Kabupaten Blitar. 4. Menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang ada.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024; Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran dan target indikator pada RKPD Tahun 2023. Hal ini secara rinci dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 1.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi	Target	
					2021	2022	2023
MISI 1: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BLITAR BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA DENGAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA							
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat		**Prosentase Penduduk Miskin**		**Persen**	**9,65**	**9,25**	**9,02**
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PPKS	Persen	10,92	11,62	10,52
2	Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,74	82 (Baik)	84 (Baik)
MISI 2: MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT BLITAR YANG MEMILIKI MUTU DAN NILAI KOMPETENSI TINGGI, DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI GENERASI MUDA KABUPATEN BLITAR							
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**		**Indeks**	**92,76**	**92,83**	**92,90**
		Indeks Pembangunan Manusia		**Indeks**	**71,05**	**71,48**	**72,06**
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,65	12,77
		2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,51	7,58
		3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,61	73,72	73,89
2	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51,83	55,23	56,02
MISI 3: PENGOPTIMALAN KINERJA PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS							
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Indeks**	**61,81**	**64,46**	**65,96**
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,46	83,44	85,24

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi	Target	
					2021	2022	2023
	Pelayanan Publik Hingga Ke Desa						
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	BB
		2	Indeks SPBE	Indeks	2,76	3,4	3,6
		3	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	200	230
		4	Persentase Desa Mandiri	%	4,55	5,91	7,27
		5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56,58	62,50	65,15
MISI 4: PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN							
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan		**Gini Rasio**		**Ratio**	**0,358**	**0,329**	**0,320**
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		**Indeks**	**65,53**	**72 (Baik)**	**74 (Baik)**
		Pertumbuhan Ekonomi		**%**	**3,02**	**4,56**	**4,75**
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,66	3,52	3,4
		2	Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10.757	11,480	13,794
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,91	67,83	70,80
		2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,14	154	151
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,53	65,45	66,00
3	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,01	1,87	2,97
		2	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,83	4,61	6,5
		3	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	5,45	4,14	6,25
		4	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	1.641.570	1.754.223	1.836.112
		5	ICOR	Indeks	9,17	5,80	5,73

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Telaahan Prioritas Nasional Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023 adalaha "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sementara Prioritas Nasional (PN) sama dengan tahun lalu yakni terdiri atas 7 PN, sebagai berikut:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

   Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) Porsi energi Baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Pangan Harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio

kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) Pertumbuhan PDB perikanan, (d) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB industri pengolahan, (f) Nilai devisa pariwisata, (g) Kontribusi PDB pariwisata, (h) Penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) Pertumbuhan investasi (PMTB), (j) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) Rasio perpajakan terhadap PDB.

2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**

   Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM di KTI, serta (c) Persentase penduduk miskin KTI; dan
   b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) Persentase penduduk miskin KBI.

3. **Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**

   Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

   a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
   b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial dan (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
   c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan Prevalensi stunting

pada balita, (d) menurunkan Insidensi tuberculosis, e) meningkatkan Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (h) menurunkan Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (i) Nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) Harapan lama sekolah;

d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; dan
f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk ke dalam world class university, (c) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan Peringkat *Global Innovation Index*.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan; dan
f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan Kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;

c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota), dan (b) peningkatan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); dan
e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK melalui peningkatan Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB; dan
c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong (a) Persentase penurunan emisi GRK, dan (b) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia, (b) Tingkat

Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah;

b. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
c. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Hukum;
d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mendorong kenaikan Indeks Pelayanan Publik Nasional; dan
e. Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.

Gambar 1.1

Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023



Sumber: Bappenas/Kementerian PPN, 2022

4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, meliputi:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik.
c. Produktivitas pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah.
d. Aksesibilitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
e. Penanganan kesehatan dampak pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi daerah serta penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial.
f. Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **"Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro."**

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, meliputi:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.

   Meliputi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), Standarisasi dan Desain Produk Industri (Sertifikat Halal, SNI), Stabilisasi dan Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo), Sertifikasi Mutu Barang, Perdagangan Antar Pulau, Promosi Investasi (*Business Forum & One on one meeting*), Pendampingan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) bagi PMDN dan UKM, Pekan Pelayanan Perizinan di Sentra Nelayan dan UKM, *Milenial Job Center* (MJC), Revitalisasi Koperasi, *Communal Branding*, Pengembangan Koperasi, *One Pesantren One Product*, Festival Dewi Cemara, Halal *Tourism*, Integrasi Perpusda-Galeri Seni, Inventarisasi Data Kesenian dan Adat Budaya Lokal, dan *Eco Tourism* (Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat).

2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.

   Meliputi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Penanganan Desa Rawan Kekeringan, Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU), Penanganan Jalan dan Jembatan, Penyediaan Akses Sanitasi Layak, Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan, Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Penanganan Banjir, Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan (Teknologi Terbaru), Mudik Balik Gratis, Subsidi Angkutan Perintis Kepulauan, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B, Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, Pembangunan dan Pengembangan Pel. Laut (Pel. Pengumpan Regional), Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan Pembangunan dan Pengembangan Bandara.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan.

   Meliputi BPOPP (SMA, SMK, PK-PLK Negeri & Swasta), MILEA (Millenial Incubation For Enterpreneurship & Innovation), Honorarium GTT & PTT SMA, SMK, PK-PLK Negeri, Revitalisasi Sekolah Pengampu, Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi Kejar Paket, SMA Double Track, Bosda Madin, Buaian, Tantistas Pelayanan Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin, Kopipu, Sajadah, Telemedicine Center Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh, Pengurangan Beban 26 PMKS, Desa Berdaya, Program PKH+, Program Bantuan Permodalan Ke Bumdes, Jatim Puspa Pemberdayaan Usaha Perempuan, Program Bantuan Disabilitas Asistensi Sosial Penyandang Disabiltas (ASPD), MJC (*Millenial Job Center*), *Job Fair*, Revitalisasi Blk, Pelatihan Kerja Reguler, Pelatihan Kerja Intensif 480 Jam, dan MTU (*Mobile Training Unit*).

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal.

Meliputi Tunjangan Kehormatan Bagi Imam Masjid Di Kampung Pesisir & Pulau Terluar, Tunjangan Kehormatan Bagi Huffadz, Beasiswa Guru Diniyah S1 dan S2, Beasiswa S1 Ma'had Aly, Beasiswa S1 Al-Azhar Kairo, Tunjangan Perintis Kemerdekaan, Tunjangan Kehormatan Bagi Penjaga Situs Budaya.

5. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.

   Meliputi Pembangunan Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IR/SR) Bagi Masyarakat Miskin, Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT), Pengembangan Pusat Agropolitan dan Minapolitan, Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (Hulu-Hilir Agroindustri), Pengembangan Perhutanan Sosial, Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Asuransi Petani, Nelayan & Ternak Sapi, Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro, Penyempurnaan Pelabuhan Perikanan, Peningkatan Budaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Penguatan Daya Saing Produk.

6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.

   Meliputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Peralatan Peringatan Dini (EWS) Bencana, Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Satuan Pendidikan Aman Bencana, KSB Kampung Siaga Bencana, dan KANCANA BERDAYA (Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya).

7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

   Meliputi Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Dokumen Perencanaan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan

Perangkat Daerah, Aplikasi *E-Government* pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Big Data), Jaringan Backbone Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Jaringan Backbone Pemprov Jatim, JARAK (Jatim Anti Radikal), Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kakanda Kader Penegakan Peraturan Daerah (KAKANDA), OBH (Organisasi Bantuan Hukum) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Marjinal, Serta Pemajuan Ham, Satu Data Jawa Timur Program Yang Mengelola Big Data OPD, ASN, dan Penanganan Complain Terpadu, dan KOPILABORASI (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi Bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur).

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki beberapa strategi. Strategi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 terbagi menjadi dua, *pertama* strategi umum yang merupakan arahan kepala daerah terpilih yang bersifat sangat umum dan makro, dan *kedua* merupakan strategi berdasarkan analisis SWOT sasaran RPJMD yang bersifat tegas, definitif, dan ilmiah. Adapun strategi umum yang merupakan arahan Kepala Daerah terpilih yang dimaksud diterminologikan dengan istilah **PANCA BHAKTI** sebagaimana dirincikan pada poin-poin berikut ini:

Bhakti 1. Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa

Sektor Pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang relatif besar untuk Pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan memahami bahwa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang cenderung rendah di Kabupaten Blitar, maka Bupati dan Wakil Bupati Terpilih mencanangkan setidaknya 7 (tujuh) arahan pengambangan pendidikan:

a. Blitar Cerdas dan Beradab

   Cakupan: Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mencukupi kebutuhan fasilitas penunjang sekolah.

b. Jaminan Pendidikan

Cakupan: Menjamin akses pendidikan terhadap kaum dhuafa dan anak yatim hingga perguruan tinggi.

c. Beasiswa Perguruan Tinggi

   Cakupan: Menganugerahkan beasiswa perguruan tinggi bagi putra-putri berprestasi dengan mekanisme kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pihak Swasta.

d. Pustaka Pesantren

   Cakupan: Meningkatkan literasi santri dengan memberikan fasilitas penunjang perpustakaan

e. *Reward* Guru Ngaji dan Modin

   Cakupan: Memberikan bantuan tunai atau non tunai kepada guru ngaji dan modin.

f. *Reward* Guru PTT/GTT

   Cakupan: Meningkatkan kesejahteraan guru PTT/GTT

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Cakupan: Peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan kemudahan akses literasi kepada karang taruna, organisasi kepemudaan, PKK, Muslimat, Fatayat dan kelompok masyarakat lainnya.

Bhakti 2. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Perlindungan Ibu dan Anak

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar masih menjadi sorotan. Meskipun Angka Harapan Hidup relatif baik, aspek lain seperti kesehatan ibu dan anak, penanganan penyakit menular dan tidak menular termasuk penanganan covid-19 masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, berikut 6 arahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar:

a. Pengobatan Gratis

   Cakupan: Menjamin pengobatan gratis untuk masyarakat tidak mampu yang meliputi pemberian obat hingga penanganan medis.

b. Pengendalian Covid-19, *Health Circle Area* dan Optimalisasi Laboratorium

Cakupan: Penyelenggaraan kesehatan terpadu dalam penanganan Covid-19 yang sinkron dan terintegrasi hingga level puskemas. Pelayanan SWAB dan Rapid Test gratis di puskesmas dan optimalisasi kelayakan fungsi laboratorium daerah.

c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan: Menjamin kesehatan dan keselamatan ibu hamil meliputi pendampingan ibu hamil hingga melahirkan untuk menjamin asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Serta memenuhi kebutuhan gizi bayi 1000 hari pertama untuk menekan jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Blitar.

Bhakti 3. Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, murah dan nyaman semakin besar. Elektronisasi dan digitalisasi layanan dapat menjawab tuntutan tersebut, maka dari itu, Bupati dan Wakil Bupati memberikan sedikitnya 5 (lima) arahan sebagai berikut:

a. E-Adminduk

Cakupan: Menjamin kemudahan akses layanan kependudukan sampai ke desa. Meningkatkan percepatan layanan yang dapat diakses dan dilaksanakan melalui desa.

b. E-Health

Cakupan: Pendataan dan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu hamil dan balita berbasis elektronik untuk memudahkan proses monitoring dan pengendalian.

c. E-Transparancy

Cakupan: Membuka akses masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui website.

d. Public Service Center

Cakupan: Integrasi *Single Number*. Pusat aduan pelayanan masyarakat yang menerima segala bentuk aduan untuk menjamin respon dantindakan cepat. Serta menjamin.

e. Internet Sambung Desa

Cakupan: Menjamin koneksi internet sampai dengan ke Desa.

Bhakti 4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Kabupaten Blitar masih bergantung pada sektor-sektor agrikultur sebagai penggerak perekonomian daerah. Oleh sebab itu, dengan melakukan intensifikasi terhadap sektor unggulan yang sudah ada serta melakukan ekstensifikasi potensi lain tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, Bupati dan Wakil Bupati Blitar memberikan arahan sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Peternakan dengan Mendirikan BUMD yang Dapat Menjamin Suplai dan Vitamin untuk Ternak
b. Optimalisasi Teknologi Pengairan untuk Pertanian yang Inovatif dan Menjamin Ketersediaan Pupuk Melalui BUMD
c. Membesarkan Pasar di setiap Pintu Masuk Kabupaten Blitar
d. Membesarkan Produk Unggulan Berbasis Kawasan
e. Mengembangkan Ekonomi Hulu-Hilir

Bhakti 5. Pesona Blitar Raya

Kabupaten Blitar memiliki potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa yang sangat potensial untuk dijadikan destinasi wisata. Dengan demikian, Bupati dan Wakil Bupati mengarahkan:

a. Memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju tempat wisata, pengadaan lahan, pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata khususnya di wilayah selatan.
b. Menstimulus masyarakat untuk bisa menjadi SDM kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing.
c. Mewujudkan Desa Mandiri di seluruh Desa Kabupaten Blitar.
d. Menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang ada.

Selanjutnya, berkenaan dengan strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT (*strength, weaknes, opportunity*, dan *threat*) sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, beberapa sasaran bersifat

inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inheren adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Melalui proses analisis SWOT yang telah dilakukan, teridentifikasi 9 (sembilan) strategi pembangunan pada periode pembangunan RPJMD ini, sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan anak, difabel, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengentasan masyarakat miskin secara terpadu;
2. Peningkatan optimalisasi kelembagaan FKUB sarana sebagai lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme;
3. Pemerataan akses, kualitas dan pemenuhan standar serta sarana-prasarana pelayanan pendidikan yang berkarakter dan pelayanan kesehatan yang modern dengan memperhatikan keadilan gender dan afirmasi terhadap perlindungan perempuan;
4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian pemuda;
5. Layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang tangguh dan dinamis;
7. Pengembangan kawasan strategis, dan infrastruktur penunjang aksesibilitas, sarana prasana dasar dan mitigasi bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD; dan
9. Peningkatan keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian-peternakan-perikanan, serta kemitraan dengan daerah dan pelaku ekonomi dalam rangka membantu akses terhadap pasar.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inheren tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sama dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa Dengan Kearifan Lokal Budaya		
Tujuan: Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat		
S.1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	• Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan anak, difable, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengentasan masyarakat miskin secara terpadu.	• Menjamin aktualisasi dan implementasi regulasi terkait melalui monitoring dan evaluasi yang konkrit • Meningkatkan persentase penanganan PPKS • Membangun kemitraan penyelenggaraan pelayanan sosial • Meningkatkan validitas data kesejahteraan sosial serta pemutakhiran secara berkala melalui pengaplikasi teknologi informasi terintegrasi hingga level desa • Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berbasis data yang valid • Meningkatkan relasi kolaboratif dalam penyelenggaraan urusan sosial bersama komunitas peduli sosial • Peningkatan kualitas penanganan kemiskinan • Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran beserta keluarganya • Meningkatkan afirmasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan
S.2. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	• Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB Sarana Sebagai Lini Terdepan dalam Menghambat Penyebaran Radikalisme dan Terorisme	• Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil • Penguatan institusionalisasi FKUB Kabupaten Blitar • Melestarikan modal sosial positif Kabupaten Blitar • Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
MISI 2: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas SDM yang Berperspektif Gender		
S.3. Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	• Pemerataan akses, kualitas dan pemenuhan standar serta sarana-prasarana pelayanan pendidikan yang berkarakter dan pelayanan kesehatan yang modern dengan memperhatikan keadilan gender dan afirmasi terhadap perlindungan perempuan	• Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan • Peningkatan optimalisasi penggunaan 20% alokasi dana APBD daerah untuk pendidikan • Mengakselerasi Peningkatan TK Negeri di Kabupaten Blitar • *Right sizing* Satuan pendidikan • Meningkatkan kualitas kurikulum lokal untuk menyiapkan generasi muda dalam pasar tenaga kerja • Mengelaborasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum sekolah negeri di Kabupaten Blitar • Meningkatkan keinginan bersekolah masyarakat Kabupaten Blitar melalui event-event pendidikan dan kebudayaan • Peningkatan Layanan Pendidikan di jenjang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		PAUD, SD dan SMP bagi anak berkebutuhan khusus • Menurunkan jumlah pengguna narkoba terkhusus di kalangan pelajar • Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana sekolah • Optimalisasii penggunaan dana BOS • Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan • Peningkatan optimalisasi penggunaan 10% alokasi dana APBD daerah untuk kesehatan • Implementasi Regulasi Kesehatan Secara Tegas • Peningkatan afirmasi terhadap mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Blitar • Percepatan pengentasan stunting • Peningkatan UHC menjadi 100% • Mengoptimalisasi momentum kepemimpinan kepala daerah perempuan saat ini untuk meningkatkan dan memotivasi keberdayaan, kemandirian serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kabupaten Blitar • Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Perempuan • Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya • Meningkatkan pemahaman PD dan Pemdes terkait gender • Memfasilitasi event-event pemberdayaan perempuan dan mengakomodir aspirasi pembangunan keberdayaan dan kemandirian perempuan • Pencegahan dan penurunan perkawinan anak (perkawinan dibawah umur)
S.4. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	• Meningkatkan keberdayaan kemandirian pemuda	• Mengkampanyekan nilai-nilai progresif dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan norma kebudayaan lokal daerah • Meningkatkan event-event kepemudaan sebagai media aktualisasi diri pemuda/pemudi • Mengoptimalkan peran pemuda/pemudi dalam pembangunan daerah dan khususnya pembangunan ekonomi dengan membuka jaringan aspirasi yang akonomdatif dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan
MISI 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas		
Tujuan: Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas		
S.5. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa	• Layanan *public* yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegarsi	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi terintegrasi • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik • Mereduksi blank spot dan memelihara jangkauan internet eksisting • Penguatan efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.6. Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	• Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang tanggu dan dinamis	• Optimalisasi penerapan SPBE • Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital • Optimalisasi transparansi pemerintahan • Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data pembangunan • Optimalisasi Transformasi Birokrasi • Peningkatan kinerja penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi • Optimalisasi pengelolaan asset daerah • Pemutakhiran data obyek pajak dan retribusi daerah • Meningkatkan Implementasi, Evaluasi dan Pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Peningkatan pengelolaan /manajemen kepegawaian • Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal • Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kabupaten Blitar • Mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
MISI 4: Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan		
Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan		
S.7. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	• Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD	• Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk investasi • Memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal pada investasi-investasi yang masuk Kabupaten Blitar • Fasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan bersifat one to many (Keterampilan yang universal seperti operasionalisasi teknologi informasi, hospitality, Olahraga, dll) • Memaksimalkan bonus demografi • Mempermudah akses permodalan dan pasar terhadap usaha mikro • Mengoptimalisasi peran forum CSR dalam pembangunan
S.8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	• Pengembangan Kawasan Strategis, dan infrastruktur penunjang aksessbilitas, sarana prasana dasar dan mitigasi bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Meningkatkan infrastruktur penunjang aksessibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya • Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa • Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana-prasarana jalan • Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		• Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan • Pengembangan infrastruktur dasar wilayah selatan • Meningkatkan kualitas irigasi • Penyediaan air baku untuk irigasi • Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak • Meningkatkan akses air minum layak • Diseminasi informasi penataan ruang • Pengendalian alih fungsi lahan • Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan • Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana • Menekan pencemaran sungai dan udara • Meningkatkan pengelolaan persampahan • Melaksanakan konservasi dan rehabiitasi lahan kritis • Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP • Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan
S.9. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	• Peningkatan Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil Pertanian-Peternakan-Perikanan, serta Kemiteraan dengan Daerah dan Pelaku Ekonomi dalam rangka Membantu Akses Terhadap Pasar	• Mengakselerasi produktivitas dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan • Meningkatkan fasilitas penunjang sektor agribisnis dan pariwisata • Menginisiasi kawasan pertanian tematik dengan pengelolaan yang modern dan memiliki nilai tambah • Meningkatkan produksi pertanian menuju organik • Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan bidang pertanian-peternakan-perikanan mulai pra sampai dengan pasca panen, mulai dari hulu hingga ke hilir • Menangkap peluang pertanian, peternakan dan perikanan non-mainstream • Mengeksploitasi potensi teknologi informasi dalam pengembangan produktifitas dan perluasan pasar pertanian-peternakan-perikanan • Meluaskan jaringan kemitraan/kerjasama pertanian dan peternakan daerah • Peningkatan cakupan pembinaan kelompok Nelayan Kecil • Mengembangkan Kawasan Industri • Peningkatan profesionalitas manajemen dan revitalisasi BUMD dan Pasar Daerah • Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sektor pariwisata

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Setelah dirumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis

kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode, namun dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Gambar 1.2
Pemetaan Strategi Pembangunan 2021-2026

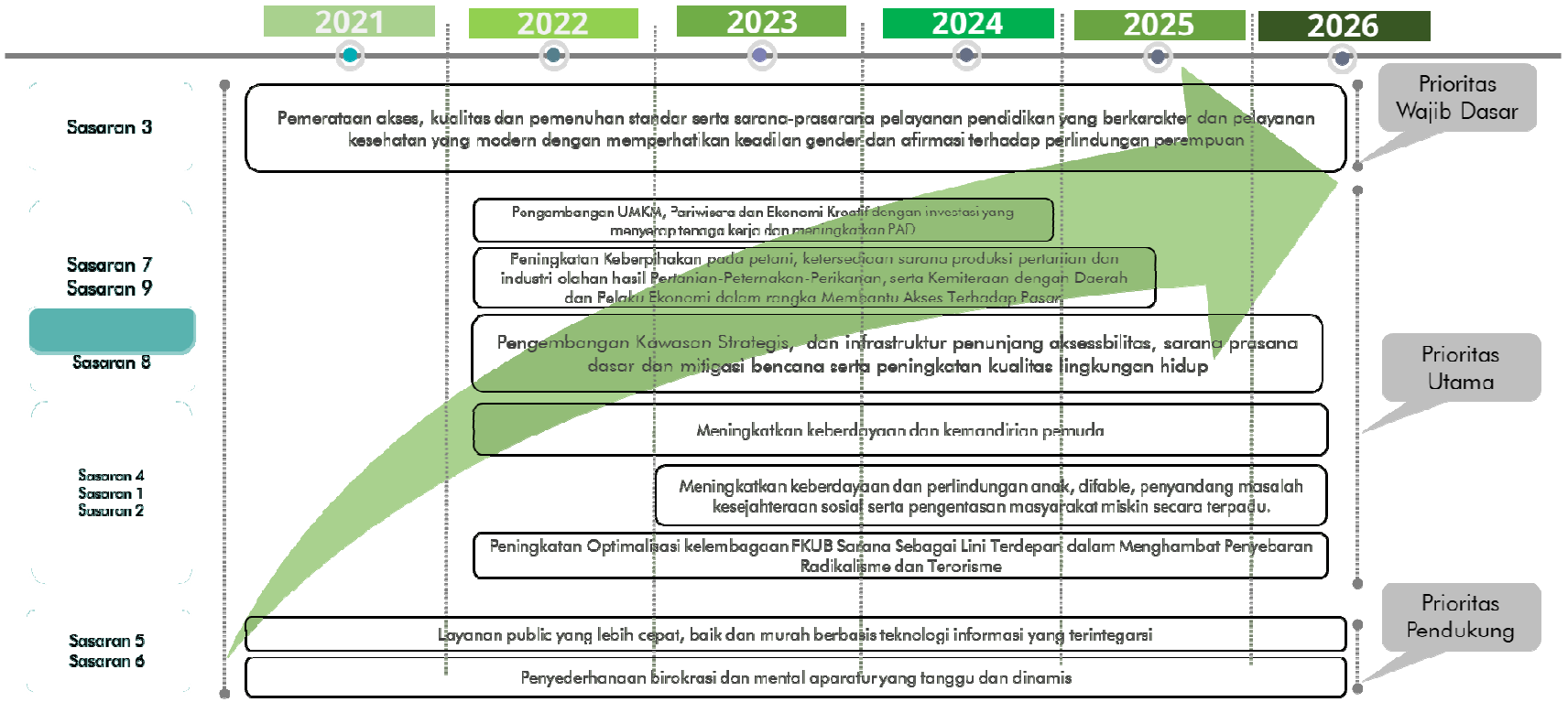

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Blitar disusun dengan tujuan memberikan pedoman dan arah fokus pembangunan tahunan. Dengan mempertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal, maka tema pembangunan tahunan perlu diarahkan dengan dalam prioritas-prioritas tertentu. Menetapkan prioritas pada tahun tertentu bukan berarti urusan yang lain tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. Muatan prioritas ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi anggaran, dan banyak atau sedikitnya kegiatan. Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

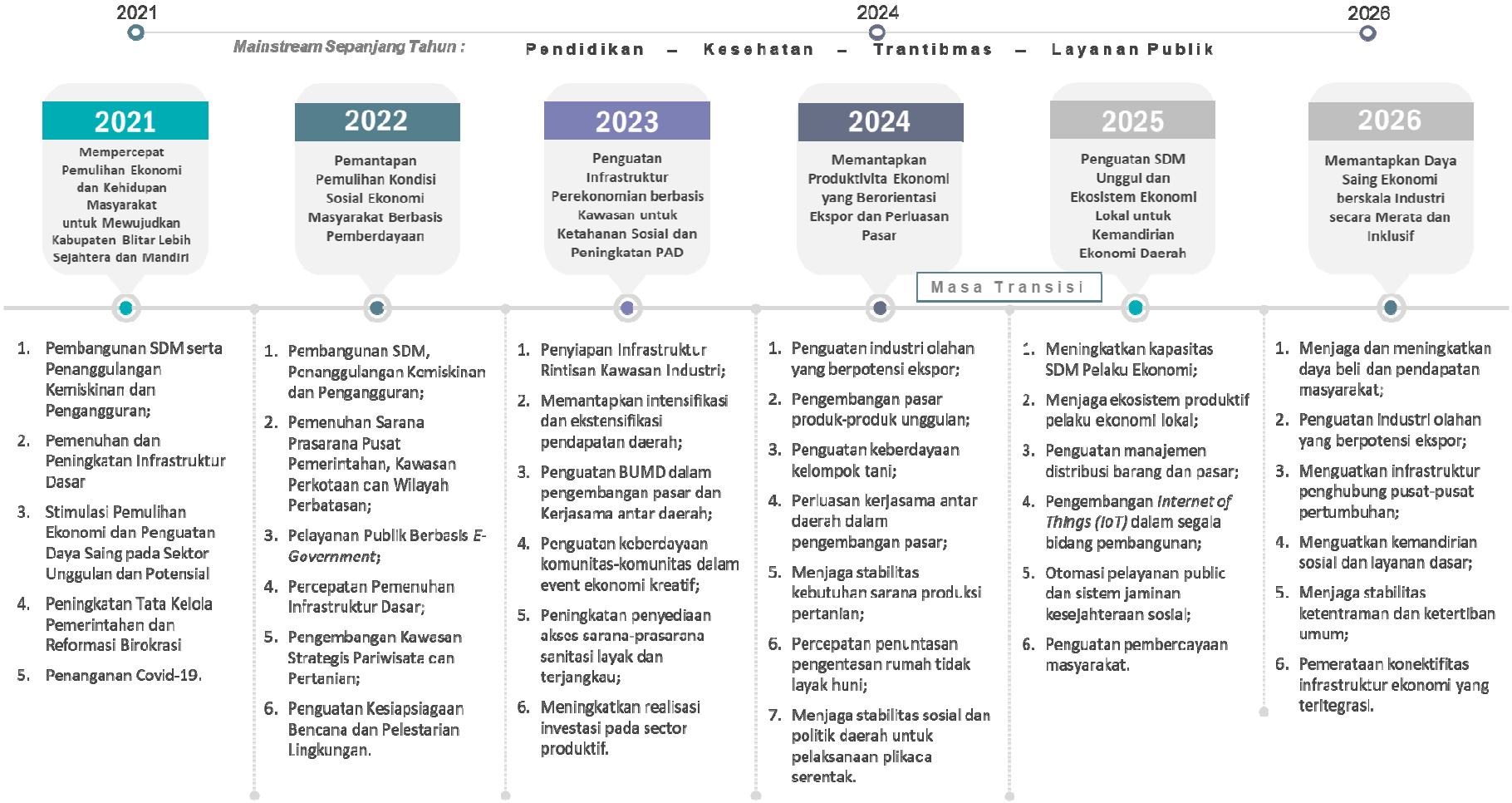

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Kategori prioritas perlu dibedakan didasarkan pertimbangan mandatori urusannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pedidikan, Kesehatan, dan Ketenteraman Umum senantiasa menjadi prioritas sepanjang tahun. Ini dapat disebut sebagai prioritas wajib. Sehingga prioritas yang bersifat tematik diarahkan untuk menjawab skenario pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah. Ini dapat disebut sebagai Prioritas Utama. Prioritas utama berkaitan dengan penguatan perekonomian, kesejahteraan sosial dan pengembangan infratruktur. Kaidah yang perlu diperhatikan adalah tema dan prioritas pembangunan harus bisa dituntaskan pada tahun berkenaan, sehingga tahun-tahun berikutnya berfokus pada tahapan prioritas selanjutnya, tanpa harus berpikir menyelesaikan prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2023

Isu-isu prioritas yang menjadi pertimbangan pembangunan Kabupaten Blitar merujuk pada identifikasi isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026. Isu strategis dapat dimaknai sebagai suatu permasalahan, topik atau hal yang jika tidak diselesaikan/dimanfaatkan akan berdampak buruk/kerugian terhadap pencapaian organisasi/tujuan/misi. Isu strategis memiliki daya ungkit besar terhadap isu dan sektor lain. Dengan memerhatikan urgensi tersebut, maka isu strategis dapat dipertimbangkan menjadi isu prioritas dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Proses perumusan analisis isu strategis dalam RPJMD merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang dirumpunkan ke dalam 5 dimensi untuk kemudian dibobotkan, yaitu Dimensi Administrasi Pemerintahan, Dimensi Sumber Daya Manusia, Dimensi Ekonomi, Dimensi Fisik, dan Dimensi Sosial. Berikut Isu-isu strategis yang terformulasi dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Pentingnya Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Karakter Terintegrasi dengan Pendidikan Formal dan NonFormal;
2. Tantangan untuk Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Standarisasi Tersertifikasi;
3. Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan *Stunting* dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga;
4. Pentingnya Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menghadirkan Investasi yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Secara Luas dan Meningkatkan PAD;
5. Pentingnya Keberpihakan pada Petani, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Industri Olahan Hasil Pertanian untuk Menumbuhkan Produksi dan Produktivitas Pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
6. Mengakselerasi Pembangunan Kawasan Strategis yang Sesuai dengan Penataan Ruang dengan Menyediakan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Dasar;
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dan Ketersediaan Sarana-Prasarana;
8. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Dasar Rumah Layak Huni, Sanitasi Layak, dan Ketersediaan Air Bersih;
9. Pentingnya Mengintegrasikan *Treatment* Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berorientasi pada Keberdayaan Masyarakat Miskin;
10. Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi; dan

12. Tantangan Penyediaan Layanan Publik yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi.

Dengan mengacu pada isu strategis, tema pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah:

"PEMBANGUNAN SDM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN BERBASIS KAWASAN"

Adapun Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan determinan dari Tema Pembangunan tersebut. Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam *Event* Ekonomi Kreatif;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD, dan Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian; dan
5. Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan.

Penyelarasan tema pembangunan antarlevel pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan agar sistem pembangunan secara nasional dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras. Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 diselaraskan dengan tema RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan persandingan tema pembangunan dan prioritas pembangunan antara RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2023.

Tabel 1.6
Prioritas Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

RKP Tahun 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023
Tema: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Tema: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro**	**Tema: Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan**
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal 5. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam *Event* Ekonomi Kreatif 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD, dan Peningkatan Pendapatan Daerah 4. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian 5. Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan

Sumber: Rancangan Awal RKP; Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur; dan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan substansi dari setiap prioritas pembangunan tersebut, maka keselarasan antara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur,



dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

Sumber: hasil analisis, 2022

Berdasarkan gambar di atas, seluruh prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan prioritas RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan dapat mendukung keselarasan pembangunan antarlevel pemerintahan. Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 bersifat dinamis karena antara satu prioritas dapat memiliki keselarasan dengan satu atau lebih dari satu prioritas pada RKP dan/atau RKPD Provinsi Jawa Timur.

4.2.5. Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

Isu-isu strategis pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan peta proses bisnis untuk mengejawantahkan Prioritas Pembangunan menjadi Program-Program Prioritas. Peta proses bisnis RKPD Kabupaten Blitar memiliki beberapa proses, di antaranya adalah proses utama dan proses pendukung. Dari hasil pemetaan proses bisnis, Prioritas Pembangunan 1 hingga 3 dapat dirangkum menjadi 1 (satu)

proses utama, yakni Pembangunan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Ketahanan Sosial. Sementara itu, Prioritas Pembangunan 4 dan 5 dapat dirangkum menjadi 1 (satu) proses utama, yaitu Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan dan Pengembangan Pasar.

Gambar 1.5
Peta Proses Utama Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

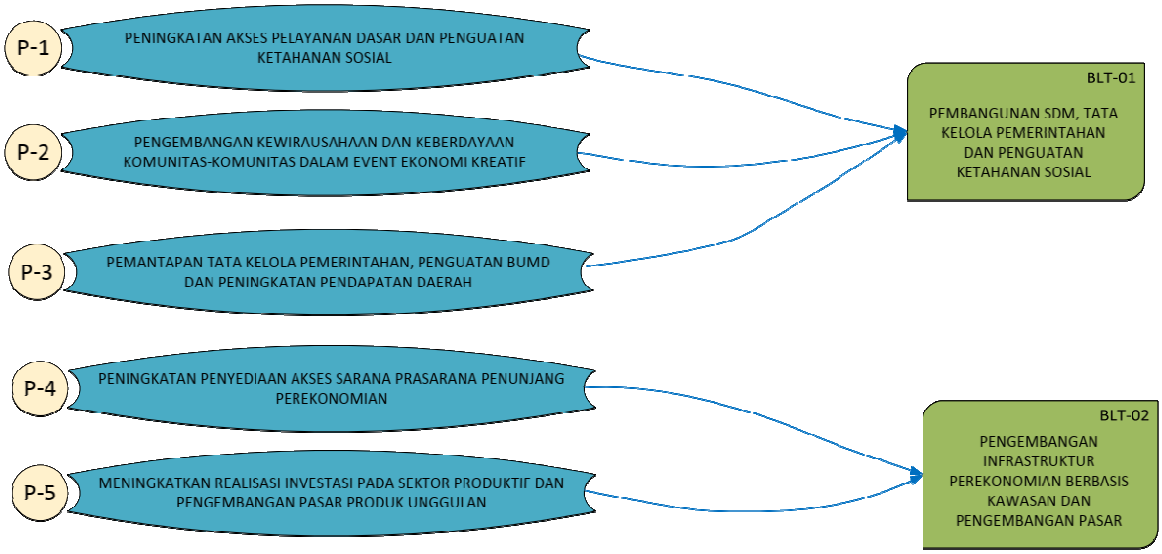

Selain melalui proses utama, proses bisnis untuk mengimplementasikan Prioritas Pembangunan juga akan melalui proses pendukung. Di dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023, terdapat 7 proses pendukung yang terdiri dari: 1) Pengawasan; 2) Peningkatan Kualitas Layanan Publik; 3) Perencanaan dan Penganggaran; 4) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana; 6) Pengelolaan SDM; dan 7) Pengelolaan Administrasi. Di dalam pelaksanaannya nanti akan didukung oleh beberapa *stakeholders* di Kabupaten Blitar yang meliputi DPRD, masyarakat, perguruan tinggi, media, komunitas/*volunteer*, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forpimda.

Gambar 1.6
Peta Proses Utama dan Proses Pendukung Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

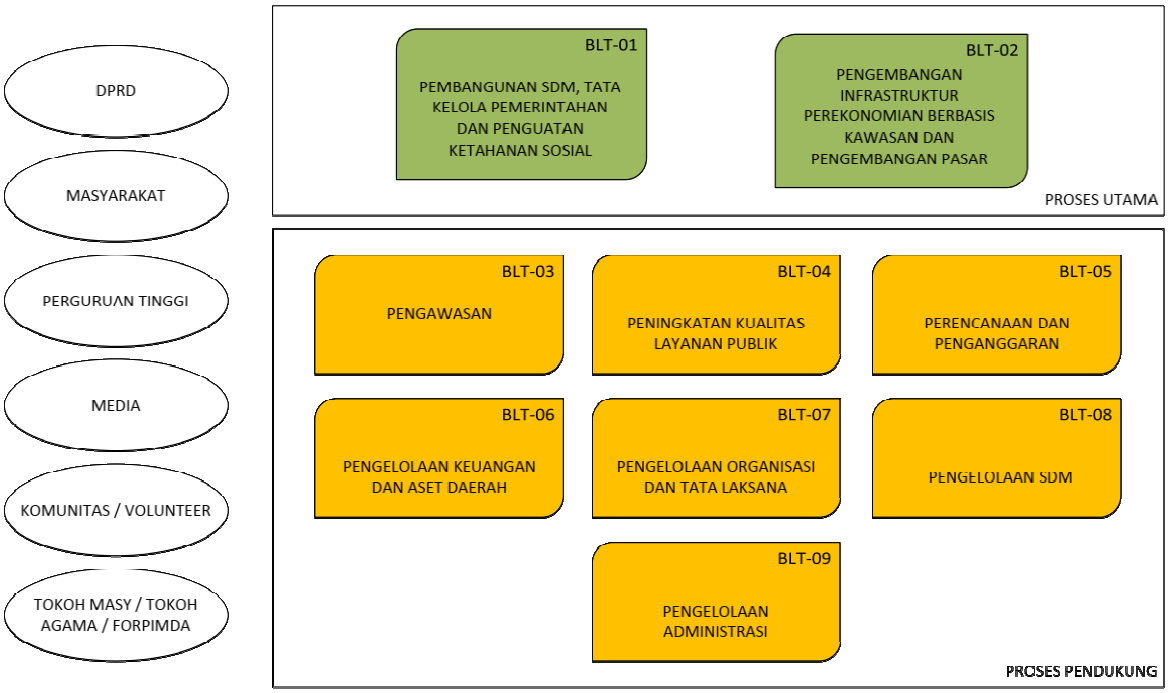

Langkah awal untuk menyusun Program Prioritas yang dapat menunjang proses bisnis Prioritas Pembangunan adalah dengan merujuk pada Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar pada tahun 2023, agar tercipta keselarasan antara Prioritas Pembangunan RKPD 2023 dengan *milestone* RPJMD 2021-2026. Di dalam Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar terdapat Arah Kebijakan dan Program Prioritas yang dapat diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023. Berikut ini merupakan gambar pemetaan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Gambar 1.7
Pemetaan Sasaran dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

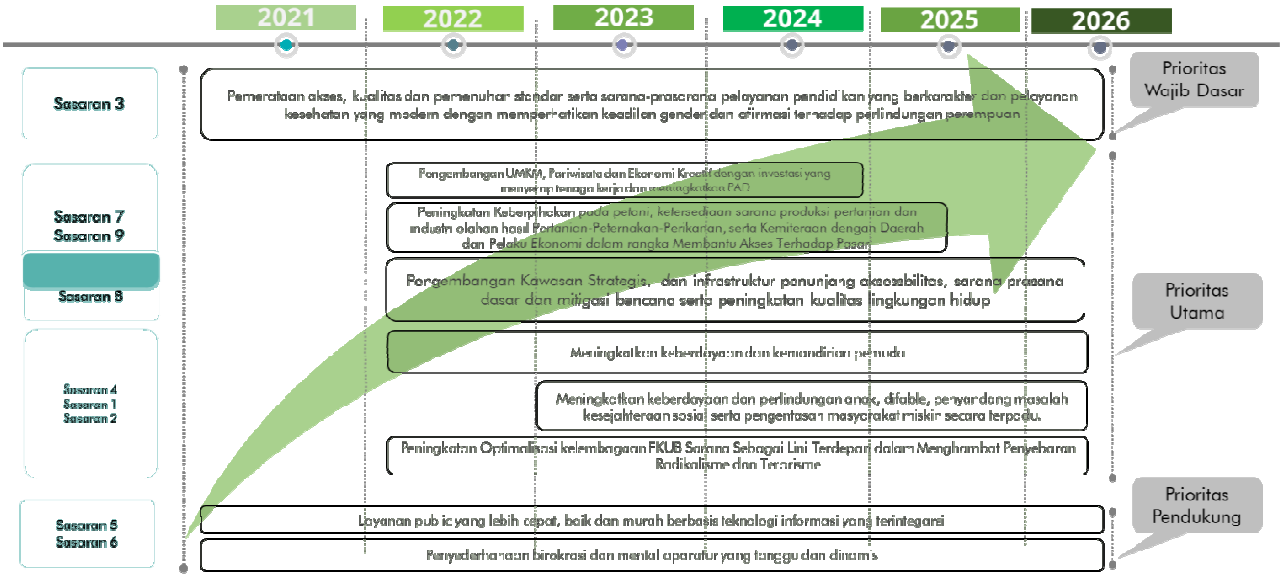

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Pembangunan yang secara garis besar terdiri dari Prioritas Wajib Dasar, Prioritas Utama, dan Prioritas Pendukung. Sasaran-Sasaran Pembangunan tersebut merupakan determinan dari Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Masing-masing Sasaran Pembangunan memiliki horizon waktu yang menunjukkan masa pelaksanaan atas sasaran-sasaran tersebut. Pada tahun 2023, 9 (sembilan) Sasaran Pembangunan akan dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dipetakan keselarasan antara Prioritas Pembangunan dan Proses Utama RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar.

Proses Utama I, yakni Pembangunan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Ketahanan Sosial yang merangkum Prioritas Pembangunan 1 hingga 3 memiliki keselarasan dengan 7 (tujuh) Sasaran Pembangunan. 7 (tujuh) Sasaran tersebut merupakan determinan dari Misi 1 hingga 4 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-

2026. Secara ringkas, gambaran keselarasan Proses Utama, Prioritas Pembangunan, dengan Misi, Sasaran, dan Strategi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.8
Keselarasan Proses Utama I dan Prioritas Pembangunan RKPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2023

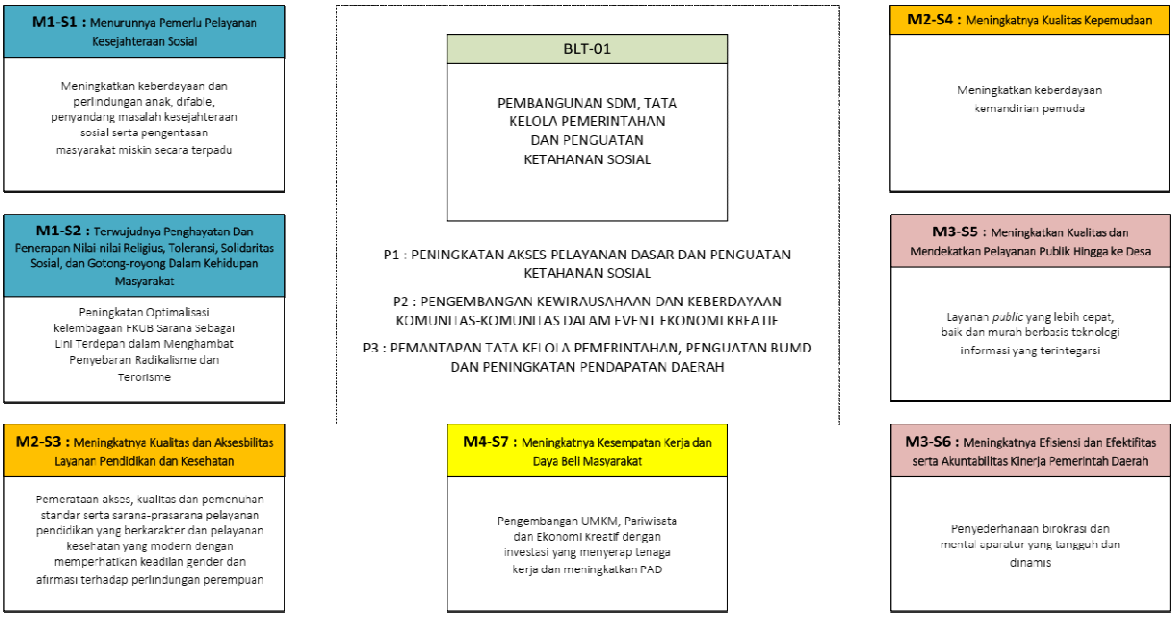

Selanjutnya, pada Proses Utama II, yaitu Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan dan Pengembangan Pasar yang merangkum Prioritas Pembangunan 4 dan 5 RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 selaras dengan 3 (tiga) Sasaran RPJMD. 3 Sasaran tersebut merupakan determinan dari Misi 4 RPJMD. Secara ringkas, gambaran keselarasan Proses Utama, Prioritas Pembangunan, dengan Misi, Sasaran, dan Strategi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.9
Keselarasan Proses Utama II dan Prioritas Pembangunan RKPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2023

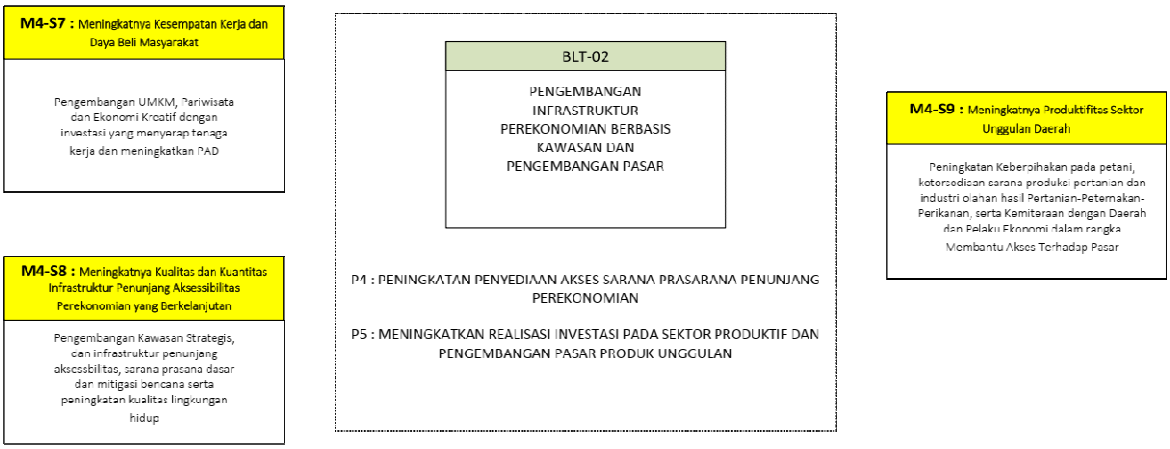

Hasil pemetaan keselarasan antara Proses Utama, Prioritas Pembangunan, dengan Misi dan Sasaran RPJMD tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman untuk menyusun Indikator Kinerja Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Penunjang untuk RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023. Gambaran sistematis mengenai Misi Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Strategi Pembangunan, Indikator Kinerja Sasaran, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, hingga Program Prioritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.7
Peta Proses Bisnis Misi, Sasaran, Strategi, Indikator Kinerja Sasaran, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya	**Sasaran 1:** Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	**Strategi 1:** Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan anak, difabel, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengentasan masyarakat miskin secara terpadu	Persentase PPKS	**Prioritas 1:** Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial	a. Meningkatkan persentase penanganan PPKS b. Membangun kemitraan penyelenggaraan pelayanan sosial c. Meningkatkan validitas data kesejahteraan sosial serta pemutakhiran secara berkala melalui pengaplikasi teknologi informasi terintegrasi hingga level desa d. Meningkatkan relasi kolaboratif dalam penyelenggaraan urusan sosial bersama komunitas peduli sosial e. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berbasis data yang valid f. Peningkatan kualitas penanganan kemiskinan g. Meningkatkan afirmasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan h. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran beserta	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					keluarganya i. Menjamin aktualisasi dan implementasi regulasi terkait melalui monitoring dan evaluasi yang konkrit	12. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 13. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 14. Program Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kab/ Kota 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan 16. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 17. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 18. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 19. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 20. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 21. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 22. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**Sasaran 2:** Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan	**Strategi 2:** Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB	Indeks Kesalehan Sosial	**Prioritas 1:** Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan	a. Penguatan institusionalisasi FKUB Kabupaten Blitar b. Melestarikan modal	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-Royong dalam Kehidupan Masyarakat	Sarana Sebagai Lini Terdepan dalam Menghambat Penyebaran Radikalisme dan Terorisme		Penguatan Ketahanan Sosial	sosial positif Kabupaten Blitar c. Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil d. Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme	Penanganan Konflik Sosial 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 7. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Misi 2: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi	**Sasaran 3:** Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	**Strategi 3:** Pemerataan akses, kualitas dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pelayanan	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 3. Umur	**Prioritas 1:** Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial	a. Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan b. Peningkatan optimalisasi penggunaan 20% alokasi dana APBD daerah untuk pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pembinaan

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar		pendidikan yang berkarakter dan pelayanan kesehatan yang modern dengan memperhatikan keadilan gender dan afirmasi terhadap perlindungan perempuan	Harapan Hidup (UHH)		c. Mengakselerasi Peningkatan TK Negeri di Kabupaten Blitar d. Right sizing Satuan pendidikan e. Meningkatkan kualitas kurikulum lokal untuk menyiapkan generasi muda dalam pasar tenaga kerja f. Mengelaborasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum sekolah negeri di Kabupaten Blitar g. Meningkatkan keinginan bersekolah masyarakat Kabupaten Blitar melalui event-event pendidikan dan kebudayaan h. Peningkatan Layanan Pendidikan di jenjang PAUD, SD dan SMP bagi anak berkebutuhan khusus i. Menurunkan jumlah pengguna narkoba terkhusus di kalangan pelajar j. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana sekolah k. Optimalisasii penggunaan dana BOS l. Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan m. Peningkatan optimalisasi	Perpustakaan 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 6. Program Perlindungan Perempuan 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 10. Program Pembinaan Keluarga Berencana 11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 12. Program Perlindungan Khusus Anak 13. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 15. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 16. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 17. Program Pengendalian Penduduk

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					penggunaan 10% alokasi dana APBD daerah untuk kesehatan n. Implementasi Regulasi Kesehatan Secara Tegas o. Peningkatan afirmasi terhadap mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Blitar p. Percepatan pengentasan stunting q. Percepatan pengentasan stunting r. Peningkatan UHC menjadi 100% s. Mengoptimalisasi momentum kepemimpinan kepala daerah perempuan saat ini untuk meningkatkan dan memotivasi keberdayaan, kemandirian serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kabupaten Blitar t. Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Perempuan u. Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya v. Meningkatkan pemahaman PD dan Pemdes terkait gender w. Memfasilitasi event-event	

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					pemberdayaan perempuan dan mengakomodir aspirasi pembangunan keberdayaan dan kemandirian perempuan x. Pencegahan dan penurunan perkawinan anak (perkawinan dibawah umur)	
Misi 2: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	**Sasaran 4:** Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	**Strategi 4:** Meningkatkan keberdayaan kemandirian pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	**Prioritas 2:** Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif	a. Mengkampanyekan nilai-nilai progresif dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan norma kebudayaan lokal daerah b. Meningkatkan event-event kepemudaan sebagai media aktualisasi diri pemuda/pemudi c. Mengoptimalkan peran pemuda/pemudi dalam pembangunan daerah dan khususnya pembangunan ekonomi dengan membuka jaringan aspirasi yang akomodatif dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Misi 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	**Sasaran 5:** Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa	**Strategi 5:** Layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegarsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Prioritas 3:** Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan	a. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi terintegrasi b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
				Daerah	c. Penguatan efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa d. Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa e. Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi	Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Program Pendaftaran Penduduk 5. Program Pencatatan Sipil 6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Program Pengelolaan Persampahan 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 15. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Misi 3: Pengoptimalan	**Sasaran 6:** Meningkatnya	**Strategi 6:** Penyederhanaan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks SPBE	**Prioritas 3:** Pemantapan Tata	a. Optimalisasi penerapan SPBE	1. Program Administrasi Umum

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	birokrasi dan mental aparatur yang tangguh dan dinamis	3. Indeks Sistem Merit 4. Persentase Desa Mandiri 5. Indeks Inovasi Daerah	Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah	b. Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital c. Optimalisasi transparansi pemerintahan d. Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi e. Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data pembangunan f. Optimalisasi Transformasi Birokrasi g. Menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi h. Optimalisasi pengelolaan aset daerah i. Pemutakhiran data obyek pajak dan retribusi daerah j. Meningkatkan Implementasi, Evaluasi dan Pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah k. Peningkatan kualitas SDM aparatur l. Peningkatan pengelolaan /manajemen kepegawaian m. Mendampingi pemanfaatan dana di	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 10. Program Penyelenggaraan Pengawasan 11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 12. Program Pengelolaan Arsip 13. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 14. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 15. Program Dukungan Yang Menanganian Tugas dan Fungsi DPRD

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					desa agar teralokasi secara optimal n. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kabupaten Blitar o. Mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	16. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 17. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 18. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 19. Program Kepegawaian Daerah 20. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 21. Program Penataan Desa 22. Program Peningkatan Kerjasama Desa 23. Program Administrasi Pemerintahan Desa 24. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 25. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 26. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 28. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Misi 4: Percepatan dan Pemerataan	**Sasaran 7:** Meningkatnya Kesempatan	**Strategi 7:** Pengembangan UMKM, Pariwisata	1. Tingkat Penganggura n Terbuka	**Prioritas 2:** Pengembangan Kewirausahaan	a. Fasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Kerja dan Daya Beli Masyarakat	dan Ekonomi Kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD	(TPT) 2. Pengeluaran Per Kapita	dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif	tenaga kerja dan bersifat one to many b. Memaksimalkan bonus demografi c. Mengoptimalisasi peran forum CSR dalam pembangunan	dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pemasaran Pariwisata 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengembangan UMKM 9. Penelitian dan Pengembangan Daerah
Misi 4: Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	**Sasaran 7:** Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	**Strategi 7:** Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD	1. Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) 2. Pengeluaran Per Kapita	**Prioritas 5:** Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan	a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk investasi b. Memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal pada investasi-investasi yang masuk Kabupaten Blitar c. Mempermudah akses permodalan dan pasar terhadap usaha mikro	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Misi 4: Percepatan dan	**Sasaran 8:** Meningkatnya	**Strategi 8:** Pengembangan	1. Indeks Infrastruktur	**Prioritas 4:** Peningkatan	a. Meningkatkan infrastruktur penunjang	1. Program Penyelenggaraan Jalan

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kawasan Strategis, dan infrastruktur penunjang aksesibilitas, sarana prasana dasar dan mitigasi bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Risiko Bencana 3. IKLH	Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian	aksessibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya b. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa c. Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana-prasarana jalan d. Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan e. Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan f. Pengembangan infrastruktur dasar wilayah selatan g. Meningkatkan kualitas irigasi h. Penyediaan air baku untuk irigasi i. Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak j. Meningkatkan akses air minum layak k. Diseminasi informasi penataan ruang l. Pengendalian alih fungsi lahan m. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan n. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana o. Menekan pencemaran	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program Penanggulangan Bencana 14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					sungai dan udara p. Meningkatkan pengelolaan persampahan q. Melaksanakan konservasi dan rehabiitasi lahan kritis r. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP s. Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan	Penyelamatan Non Kebakaran 15. Program Penanganan Bencana 16. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 17. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH 18. Program Pengelolaan Persampahan 19. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 20. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 21. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 22. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 23. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Misi 4: Percepatan dan Pemerataan Pembangunan	**Sasaran 9:** Meningkatnya Produktivitas Sektor	**Strategi 9:** Peningkatan Keberpihakan pada petani,	1. Pertumbuhan PDRB Pertanian 2. Pertumbuhan	**Prioritas 4:** Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana	a. Mengakselerasi produktifitas dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Unggulan Daerah	ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil Pertanian-Peternakan, Perikanan, serta Kemitraan dengan Daerah dan Pelaku Ekonomi dalam rangka Membantu Akses Terhadap Pasar	PDRB Perdagangan 3. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan 4. Jumlah Kunjungan Wisata 5. ICOR	Penunjang Perekonomian **Prioritas 5:** Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan	b. Meningkatkan fasilitas penunjang sektor agribisnis dan pariwisata c. Menginisiasi kawasan pertanian tematik dengan pengelolaan yang modern dan memiliki nilai tambah d. Meningkatkan produksi pertanian menuju organik e. Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan bidang pertanian peternakan-perikanan mulai pra sampai dengan pasca panen, mulai dari hulu hingga ke hilir f. Menangkap peluang pertanian, peternakan dan perikanan non-mainstream g. Mengeksploitasi potensi teknologi informasi dalam pengembangan produktivitas dan perluasan pasar pertanian-peternakan-perikanan h. Meluaskan jaringan kemitraan/kerjasama pertanian dan peternakan daerah i. Peningkatan cakupan pembinaan kelompok Nelayan Kecil j. Mengembangkan Kawasan Industri	Pertanian 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluh Pertanian 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 12. Program Pengembangan UMKM 13. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 14. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 15. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Misi Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
					k. Peningkatan profesionalitas manajemen dan revitalisasi BUMD dan Pasar Daerah l. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sektor pariwisata	16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 17. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 18. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 19. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 20. Program Pengembangan Ekspor 21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 22. Program Pemasaran Pariwisata 23. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 24. Program Pengembangan Kebudayaan 25. Program Pengembangan Kesenian Tradisional; 26. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 27. Program Pengelolaan Permuseuman

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; SE Bupati Nomor: 050/249/409.201.2/2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Menjadi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2023, diolah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Program tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 2023. Sementara kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Tahun 2023 dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan pagu anggaran.

Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rensta Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dengan memperhatikan arahan kebijakan bidang urusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 serta amanat peraturan perundang-undangan. Rencana program dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 disajikan pada beberapa tabel di bawah, sedangkan informasi lebih rinci dimuat pada Lampiran (sesuai input pada SIPD).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Program Berdasarakan Perangkat Daerah
RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	16	62	Rp. 806.425.056.217	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	20	81	Rp. 217.353.717.73	Dinas Kesehatan
3		2	2	2	Rp. 133.807.044.497	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
4		2	3	5	Rp. 51.800.000.000	RSUD Srengat
5		1	1	1	Rp. 2.176.068.000	Puskesmas Kademangan

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		1	1	1	Rp. 1.863.099.000	Puskesmas Talun
7		1	1	1	Rp. 1.194.002.000	Puskesmas Doko
8		1	1	1	Rp. 1.909.519.211	Puskesmas Kanigoro
9		1	1	1	Rp. 2.038.115.000	Puskesmas Gandusari
10		1	1	1	Rp. 2.393.078.000	Puskesmas Sutojayan
11		1	1	1	Rp. 2.243.925.000	Puskesmas Sanankulon
12		1	1	1	Rp. 1.998.358.000	Puskesmas Wlingi
13		1	1	1	Rp. 964.328.000	Puskesmas Boro
14		1	1	1	Rp. 1.380.720.000	Puskesmas Binangun
15		1	1	1	Rp. 1.593.528.000	Puskesmas Selopuro
16		1	1	1	Rp. 2.329.447.000	Puskesmas Garum
17		1	1	1	Rp. 727.460.000	Puskesmas Slumbung
18		1	1	1	Rp. 2.952.689.000	Puskesmas Srengat
19		1	1	1	Rp. 2.569.887.000	Puskesmas Kesamben
20		1	1	1	Rp. 1.262.143.000	Puskesmas Wonotirto
21		1	1	1	Rp. 2.149.100.000	Puskesmas Nglegok
22		1	1	1	Rp. 2.252.337.000	Puskesmas Ponggok
23		1	1	1	Rp. 1.368.821.000	Puskesmas Udanawu
24		1	1	1	Rp. 1.105.344.000	Puskesmas Bacem
25		1	1	1	Rp. 81.093.481.000	Puskesmas Bakung
26		1	1	1	Rp. 1.257.409.000	Puskesmas Wonodadi
27		1	1	1	Rp. 1.108.669.000	Puskesmas Panggungrejo
28		1	1	1	Rp. 1.118.489.000	Puskesmas Wates
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	17	55	Rp. 192.542.503.634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30					Rp. 17,199,240,478	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	12	27	Rp. 32,001,392,560	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	13	36	Rp. 9.901.859.760	Satuan Polisi Pamong Praja
33		2	11	43	Rp. 5.026.798.930	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	14	43	Rp. 16.695.388.846	Dinas Sosial
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	17	41	Rp. 6,468,067,354	Dinas Tenaga Kerja
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	19	47	Rp. 16.523.253.184	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	6	11	Rp. 858.900.000	Dinas Pertanian dan Pangan
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	3	Rp. 895,224,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	17	37	Rp. 10.397.456.274	Dinas Lingkungan Hidup
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	17	46	Rp. 11.342.106.560	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	10	44	Rp. 12.094.889.812	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	36	Rp. 16.523.253.184	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	17	42	Rp. 13.558.293.047	Dinas Perhubungan
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	10	28	Rp. 12,978,900,996	Dinas Komunikasi dan Informatika
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	15	31	Rp. 7.126.892.096	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	12	32	Rp. 5.774.295.159	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	8	27	Rp. 2,319,508,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	Rp. 880,453,848	Dinas Komunikasi dan Informatika
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	Rp. 98,709,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
50	URUSAN	5	7	14	Rp. 2,070,000,000	Dinas Pariwisata,

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	10	34	Rp. 3,316,074,511	Dinas Perpustakaan dan Arsip
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	9	12	Rp. 260,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	17	43	Rp. 9,977,190,220	Dinas Peternakan dan Perikanan
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	15	55	Rp. 11,875,758,919	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	13	35	Rp. 24.171.180.826	Dinas Pertanian dan Pangan
56		6	14	21	Rp. 2,024,997,500	Dinas Peternakan dan Perikanan
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	17	38	Rp. 11,327,390,107	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	7	Rp. 559,872,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	2	Rp. 164,000,000	Dinas Tenaga Kerja
60	SEKRETARIAT DAERAH	1	2	2	Rp. 43.313.916.505	Sekretariat Daerah
71	SEKRETARIAT DPRD	2	18	83	Rp. 47.004.409.951	Sekretariat DPRD
72	PERENCANAAN	3	13	45	Rp. 8,235,473,898	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
73	KEUANGAN	3	13	64	Rp. 442.167.620.726	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
74		2	8	34	Rp. 36.003.884.975	Badan Pendapatan Daerah
75	KEPEGAWAIAN	2	11	31	Rp. 7,067,858,682	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
76	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	3	Rp. 1,196,071,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
77	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	19	Rp. 1,977,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
78	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	34	Rp. 12.908.061.603	Inspektorat Daerah
79	KECAMATAN	6	14	32	Rp. 5.574.685.300	Kecamatan Sutojayan
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Jingglong
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kalipang
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Sutojayan

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kedungbunder
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Jegu
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kembangarum
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Sukorejo
80		6	16	37	Rp. 4.931.896.900	Kecamatan Wlingi
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Babadan
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Tangkil
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Beru
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Wlingi
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Klemunan
82		6	15	40	Rp. 4.318.539.500	Kecamatan Talun
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kamulan
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kaweron
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Bajang
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Talun
83		6	14	27	Rp. 4.053.311.900	Kecamatan Garum
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Sumberdiren
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Garum
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Bence
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Tawangsari
84		6	16	42	Rp. 4.404.258.900	Kecamatan Srengat
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kauman
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Dandong
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Srengat
					Rp. 1.066.000.000	K elurahan Togogan
85		6	15	30	Rp. 3.085.856.100	Kecamatan Kanigoro
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kanigoro
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Satreyan
86		6	12	26	Rp. 2.790.239.100	Kecamatan Kademangan
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Kademangan
88		6	15	34	Rp. 2.724.173.976	Kecamatan Nglegok
					Rp. 1.066.000.000	Kelurahan Nglegok
90		6	15	40	Rp. 1.807.651.300	Kecamatan Kesamben
91		6	17	56	Rp. 1.986.652.300	Kecamatan Selorejo
92		6	13	28	Rp. 22.171.575.900	Kecamatan Ponggok
93		6	16	54	Rp. 2.258.239.500	Kecamatan Wonodadi
94		6	12	25	Rp. 1.802.243.300	Kecamatan Sanankulon
95		6	16	39	Rp. 1.684.074.700	Kecamatan Bakung
96		6	12	31	Rp. 1.756.859.100	Kecamatan Wonotirto
97		6	15	40	Rp. 1.782.310.700	Kecamatan Panggungrejo
98		6	15	43	Rp. 2.029.621.228	Kecamatan Wates
99		6	15	38	Rp. 2.098.813.300	Kecamatan Binangun
100		6	13	33	Rp. 22.215.471.500	Kecamatan Doko
101		6	13	33	Rp. 1.813.901.729	Kecamatan Selopuro
102		6	16	47	Rp. 1.789.081.716	Kecamatan Gandusari
103		6	14	37	Rp. 2.068.623.300	Kecamatan Udanawu
104	KESATUAN BANGSA DAN	6	11	31	Rp. 7.573.617.267	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	POLITIK					
JUMLAH		**343**	**831**	**2.292**	**Rp. 2.404.108.129.239**	

Sumber: diolah dari SIPD, 2022

Program perangkat daerah yang direncanakan untuk pembangunan tahun 2023 dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target. Selain penyajian rancangan target capaian setiap program per urusan, pada tabel di bawah ini juga ditampilkan pagu indikatif per program RKPD Tahun 2023.

Tabel 1.2
Rancangan Program, Target Kinerja dan Pagu Program RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			
	Dinas Pendidikan			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	641,692,160,50
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	– Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama – Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD – Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar – Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 % 99 % 100 % 92 %	160,009,203,217
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	97%	513.504.700
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan	100%	4,106,600,000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi	100%	105,012,000
		Jumlah		**811.363.274.213**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
	Dinas Kesehatan			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	114.074.326.497

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	11 % 100 % 1:1500 Rasio	92.640.059.985
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar	90%	5.147.246.048
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian berijin	100%	224.508.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM aktif	77%	1.885.378.000
		Jumlah		**213.971.518.530**
	RSUD Ngudi Waluyo Wling			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	121.807.044.497
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	11 % 100 % 1:1500 rasio	4.500.000.000
		Jumlah		**126.307.044.497**
	RSUD Srengat			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	24.298.840.218
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	11 % 100 % 1:1500 rasio	18.516.017.500
		Jumlah		**42.814.857.718**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.790.152.883
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	70,97%	23.931.229.850
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan area pelayanan persampahan	19,15%	783.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	71,85%	16.577.850.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	57,60%	26.661.131.580
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	6,30%	350.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	69,11%	99.692.687.117
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,83%	145.087.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	84%	663.000.000
		Jumlah		**178.594.138.430**
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	85%	10.226.176.148
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	72,50%	6.774.502.227
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	19%	9.746.848.800
		Jumlah		**26.747.527.175**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.743.870.096
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi	97,40%	231.249.500
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	0,18%	51.658.154.549
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	100%	191.448.000
		Jumlah		**58.824.722.145**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi	100%	2.963.383.300
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	100%	294.914.000
		Jumlah		**3.258.297.300**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
	Satuan Polisi Pamong Praja			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	7.543.618.150

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	850.976.299
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	95%	654.705.010
		Jumlah		**9.049.299.459**
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	76%	3.834.566.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	– Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana – Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana – Persentase warga negara yang mem-peroleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100 % 100 %	1.944.539.542
		Jumlah		**5.779.105.542**
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
	Dinas Sosial			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.848.867.175
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	2.576.983.500
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	100%	100.000.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	932.182.941

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan) PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	1.219.764.079
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	1.312.735.663
		Jumlah		**11.990.533.358**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
	Dinas Tenaga Kerja			
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.083.156.692
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	45%	58.353.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	0,02%	883.290.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	86%	2.962.045.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	35%	750.000.000
		Jumlah		**9.736.844.692**
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			
	Dinas Tenaga Kerja			
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	55%	132.710.000
		Jumlah		**132.710.000**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	dan Perlindungan Anak			
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88%	4.066.941.965
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	70 % 3,65 % 30,65 %	372.812.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk)	6,07 Rasio	223.390.800
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	12%	80.501.200
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Profil Gender dan Anak yang digunakan	85%	27.447.512
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya Kategori	105.000.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100%	364.917.512
		Jumlah		**5.241.010.989**
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	19,8 Tahun	250.459.350
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Age Specific Fertility Rate (ASFR) Unmet Need	9,63 % 8,0 %	5.918.806.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	51,58 Indeks	5.458.639.512
		Jumlah		**11.627.904.862**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Dinas Pertanian dan Pangan			
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastuktur kemandirian pangan aktif	35,14%	6.000.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	169,20%	972.432.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Daerah Rawan Pangan	20,16%	44.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	55%	178.500.000
		Jumlah		**7.194.932.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	Dinas Pertanian dan Pangan			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88,14%	25.036.804.610
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian	1,50%	9.201.513.076
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka indeks pertanaman	1,74 Nilai	13.549.042.960
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase penanggulangan becana pertanian yang tertangani	94%	427.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase cakupan pembinaan kelompok tani	60%	5.806.200.000
		Jumlah		**54.020.560.646**
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			
	Dinas Lingkungan Hidup			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.509.804.600
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	200.000.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	2.226.280.454
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	8%	1.900.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1%	200.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab.	70%	325.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	697.719.546
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	70.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	60%	25.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	81%	5.738.726.812
		Jumlah		**16.892.531.412**
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.031.606.560
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non rentan	150 Dokumen	1.386.217.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	– Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16250 Dokumen	64.220.000
		– Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	
		– Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	– Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal – Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain – Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	100 % 100 % 100 %	1.813.573.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	100%	46.490.000
		Jumlah		**11.342.106.560**
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	4.783.986.509
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa Kewenangan Desa	70%	65.970.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pertumbuhan desa yang melakukan kerja sama antar desa	20%	1.371.951.476
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	87,50%	5.897.984.930
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Berkinerja Baik	60%	1.658.800.000
		Jumlah		**13.778.692.915**
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	PERHUBUNGAN			
	Dinas Perhubungan			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	1,4 % 82 %	5.790.758.959
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	– Indeks konektivitas angkutan jalan – Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan	8,75 Nilai 63,12 %	14.699.131.544
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks konektivitas sungai danau dan penyeberangan	70 Indeks	26.867.206
		Jumlah		**20.516.757.709**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	92 persen	4.713.321.380
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	86%	2.564.026.850
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	50 % 100 %	6.342.052.766
		Jumlah		**13.619.400.996**
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70%	880.453.848
		Jumlah		**880.453.848**
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	98.709.400

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	INFORMASI			
		Jumlah		**98.709.400**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.435.605.831
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk	100%	142.103.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP / USP Koperasi yang Sehat	60%	300.180.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP / USP Koperasi yang Sehat	60%	93.060.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang tertib administrasi	47%	518.343.793
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas nilai tambah akses pasar akses pembiayaan penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota	10%	584.213.550
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	4%	692.359.957
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	14,29%	1.042.304.750
		Jumlah		**7.808.170.881**
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada	100%	4.130.191.259

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	program penunjang urusan pemerintahan daerah		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	304.284.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	454.844.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	225.917.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	11700 Milyar	430.636.500
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	228.422.400
		Jumlah		**5.774.295.159**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	75,50%	972.991.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	37%	3.505.354.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Pramuka yang aktif	85,50%	86.005.000
		Jumlah		**4.564.350.000**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan	42%	1.050.110.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	57%	205.000.000
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase aspek sejarah yang terbina	100%	75.000.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	125.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	11%	773.485.000
		Jumlah		**2.228.595.000**
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga			
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urus	10 % 100 %	12.117.772.049
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata Kabupaten yang dikembangkan	48%	1.135.300.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar	12%	757.868.300
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/ Perlindungan HAKI	29,41%	308.307.500
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	65%	581.732.500
		Jumlah		**14.900.980.349**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.118.054.783
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemanfaatan Perpustakan oleh Masyarakat	0,05%	1.064.235.829
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	1%	-

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
		Jumlah		**4.182.290.612**
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			
	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase naskah kuno yang dilestarikan Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	1 % 74.65 %	545.665.650
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	67%	20.280.250
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Tingkat Kesesuaian Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	100%	20.000.000
		Jumlah		**585.945.900**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	Dinas Peternakan dan Perikanan			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10.578.555.588
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	– Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi – Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias – Jumlah Produksi Perikanan Tangkap – Prosentase Pengolahan produk perikanan	18158 Ton 229522500 Ekor 2663 Ton 20 %	598.349.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	18158 Ton 229522500 Ekor	1.262.100.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Peningkatan produksi PUD	5%	15.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolahan produk perikanan	20%	170.000.000
		Jumlah		**12.624.004.588**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			
	Dinas Peternakan dan Perikanan			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,30%	2.565.080.400
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	72%	1.292.000.062
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	28 Sertifikat 83 %	965.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Peternakan	100%	50.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Jumah Pengajuan Perijinan	20%	13.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak terampil	8%	600.000.000
		Jumlah		**5.485.080.462**
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	5 % 100 %	9.528.342.995
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	100 % 100 %	25.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	642.178.064
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	65%	220.709.650
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	20%	560.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	65%	215.600.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	65%	70.000.000
		Jumlah		**11.261.830.709**
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	92,50%	670.684.200
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	100%	90.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02%	100.000.000
		Jumlah		**860.684.200**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4.01	**Sekretariat Daerah**			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan	100%	384.718.393
		– Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan – Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah – Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan – Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik	100% 100% 100% 25%	
				384.718.393
	Sekretariat Daerah-Bagian Tata Pemerintahan			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	– Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan – Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan	100 % 100 %	1.067.828.350

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
		– Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundangundangan yang baru	100 %	
			Jumlah	**1.067.828.350**
	Sekretariat Daerah-Bagian Hukum			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	– Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan – Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan – Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundangundangan yang baru	100 % 100 % 100 %	1.236.911.040
			Jumlah	**1.236.911.040**
	Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	– Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan – Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan – Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundangundangan yang baru	100 % 100 % 100 %	9.686.353.090
			Jumlah	**9.686.353.090**
	Sekretariat Daerah-Bagian Perekonomian			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	– Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa – Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana – Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian – Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	cukup (60-80) Nilai 100 % 100 % 100 %	8.446.564.550
			Jumlah	**8.446.564.550**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Sekretariat Daerah- Bagian Administrasi Pembangunan			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	– Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa – Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana – Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian – Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	cukup (60-80) Nilai 100 % 100 % 100 %	409.625.480
		Jumlah		**409.625.480**
	Sekretariat Daerah-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	– Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa – Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana – Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian – Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	cukup (60-80) Nilai 100 % 100 % 100 %	1.169.525.000
		Jumlah		**1.169.525.000**
	Sekretariat Daerah- Bagian Organisasi			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	– Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan – Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah – Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan – Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik	100 % 100 % 100 % 25 %	1.436.785.560
		Jumlah		**1.436.785.560**
	Sekretariat Daerah- Bagian Umum			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	– Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan – Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah – Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan – Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik	100 % 100 % 100 % 25 %	12.106.370.200
		Jumlah		**12.106.370.200**
	Sekretariat Daerah- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	– Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan – Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah – Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan – Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik	100 % 100 % 100 % 25 %	580.804.660
		Jumlah		**580.804.660**
	Sekretariat Daerah- Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	– Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan – Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah – Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan – Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik	100 % 100 % 100 % 25 %	15.467.398.576
		Jumlah		**15.467.398.576**
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**	**Baik Predikat**	**38.357.624.163**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	Baik Predikat	10.676.450.650
		Jumlah		**49.034.074.813**
5.01	**PERENCANAAN**			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.207.896.236
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	– Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah – Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah – Tingkat pemanfaatan data	6 Dokumen 80 % 55 %	1.072.712.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program PD yang tercapai	75%	1.289.977.130
		Jumlah		**7.570.585.366**
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	25%	1.900.000.000
		Jumlah		**1.900.000.000**
5.02	**KEUANGAN**			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	21.378.074.965
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	– Kesesuaian Program RKPD dengan APBD – Persentase SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara Tepat Waktu dan sesuai SAP – Realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja – Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	100 % 96 % 96 % 100 %	415.411.152.661

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat bernilai baik dan wajar	90%	1.428.393.100
		Jumlah		**438.217.620.726**
5.02	**KEUANGAN**			
	Badan Pendapatan Daerah			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	85%	27.306.492.998
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	15%	8.697.391.977
		Jumlah		**36.003.884.975**
5.03	**KEPEGAWAIAN**			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.158.043.544
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	75 Indeks	2.893.593.619
		Jumlah		**9.051.637.163**
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.04.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	69%	2.632.026.000
		Jumlah		**2.632.026.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11.240.546.757
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah Desa dan unit kerja yang akuntabel	80%	1.867.291.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	70 Indeks	1.432.276.000
		Jumlah		**14.540.113.757**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Sutojayan			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.441.301.089
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	22.250.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	3.842.791.711
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	37.950.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	30.980.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	26.700.000
		Jumlah		**12.401.972.800**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Wlingi			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.438.025.472
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	18.217.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	3.242.018.428
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	61.015.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	33.300.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	51.146.000
		Jumlah		**9.843.721.900**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Wlingi-Kelurahan Wingi			

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	11.700.000
		Jumlah		**11.700.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Talun			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.397.214.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	1.464.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	437.850.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	27.000.000
		Jumlah		**8.326.064.500**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Garum			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.834.600.700
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	23.935.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	2.705.867.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	337.659.200

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	43.305.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	65.470.000
		Jumlah		**8.010.836.900**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Srengat			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.881.937.200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	195.744.600
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	2.216.170.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	508.935.900
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	274.042.400
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	313.191.300
		Jumlah		**8.390.021.400**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Kanigoro			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	4.100.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang	20 Dokumen	-

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	dibuat		
		Jumlah		**4.100.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Kademangan			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.843.710.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	2.128.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	1.400.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	4.505.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	37.630.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	63.547.000
		Jumlah		**2.952.920.100**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kelurahan Kademangan			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	-	846.844.000
		Jumlah		**846.844.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Nglegok			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.054.532.976
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	82%	85.565.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	30%	17.942.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5%	154.329.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	100%	73.020.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	100%	82.310.000
		Jumlah		**3.467.698.976**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Nglegok Kelurahan Nglegok			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	30%	366.000.000
		Jumlah		**366.000.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Kesamben			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.750.001.800
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	5 kegiaan (100%)	24.315.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan 20 dokumen\	10.250.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5.375.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	15.760.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	73.712.000
		Jumlah		**1.879.413.800**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Selorejo			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.956.822.800

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	16.552.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	7.794.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	27.710.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	33.448.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	66.088.000
		Jumlah		**2.108.414.800**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Ponggok			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.075.934.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	18.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	60.071.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	2.916.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	140.247.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	46.170.000
		Jumlah		**2.343.338.400**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Wonodadi			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.067.342.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	15.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	23.385.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	25.440.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	32.550.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	115.485.000
		Jumlah		**2.280.002.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Sanankulon			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.817.167.300
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	17.285.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	25.613.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	27.272.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	14.515.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	43.915.000
		Jumlah		**1.945.768.300**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Bakung			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.577.131.800
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	40.012.400
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kali	15.174.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	12.600.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	20.175.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	90.744.000
		Jumlah		**1.755.837.200**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Wonotirto			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.631.994.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	17.153.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	27.921.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	35.558.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	60.065.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	12 Dokumen	27.692.000
		Jumlah		**1.800.384.100**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Panggungrejo			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.728.873.700
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	22.988.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	13.476.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	21.879.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	30.526.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang	20 Dokumen	58.093.000

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	dibuat		
			Jumlah	**1.875.835.700**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Wates			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.991.997.774
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	19.105.954
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	13.340.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	15.780.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	41.240.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	69.920.000
			Jumlah	**2.151.383.728**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Binangun			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.070.756.300
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	12.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	16.330.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	13.080.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	50.062.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	29.310.000
			Jumlah	**2.192.338.300**

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
7.01	**KECAMATAN**			
	0 Kecamatan Doko			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.127.039.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	12.665.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	8.400.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	23.380.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	5.850.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	59.900.000
		Jumlah		**2.237.234.000**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Selopuro			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah		2.258.708.227
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik		4.400.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.		16.640.575
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan		24.951.190
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan		16.748.600
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat		23.760.000
		Jumlah		**2.345.208.592**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Gandusari			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada	100%	1.709.148.966

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	program penunjang urusan pemerintahan daerah		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	6.265.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	19.730.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	16.802.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	32.542.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	48.118.250
		Jumlah		**1.832.606.716**
7.01	**KECAMATAN**			
	Kecamatan Udanawu			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.009.622.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	23.037.400
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	17.827.200
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	31.622.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	23.170.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	35.107.200
		Jumlah		**2.140.385.800**
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	3.475.735.680

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	80%	329.057.500
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	75%	3.767.232.200
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	12%	1.599.341.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	82%	258.161.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	90%	717.635.000
		Jumlah		**10.147.162.380**

Sumber: diolah dari SIPD, 2022

Dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 direncanakan beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan program dan penganggarannya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penerapan SPM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan peraturan-peraturan menteri terkait standar teknis SPM. Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 yang mendukung penerapan SPM disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 1.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I.	**BIDANG PENDIDIKAN**						
1	Pendidikan Dasar	1			Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Dinas Pendidikan
		1	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.275.690.000	
		1	1	2	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.000.000	
		1	1	3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.110.820.000	
		1	2		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.720.400.000	
		1	2	2	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20,000,000	
		1	2	3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.740.540.000	
		2			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
		2	1		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas		

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		2	1	1	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.059.420.000	
		2	1	2	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	403.024.150	
2	Pendidikan Kesetaraan	1			Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Dinas Pendidikan
		1	1		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.298.610.000	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	1			Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Dinas Pendidikan
		1	1		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	289.317.000	
		1	1	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.582.620.000	
II	**BIDANG KESEHATAN**						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.684.591.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	156.519.000	
4	Pelayanan kesehatan balita	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	211.655.000	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	544.606.500	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	944.332.500	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.488.960.750	
8	Pelayanan kesehatan penderita	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	hipertensi	1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	237.395.000	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	147.012.000	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	735.785.000	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	722.772.750	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		1	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	209.803.000	
III	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas Pekerjaan Umum

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	minum sehari-hari	1	1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Dan Penataan Ruang
		1	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	498.849.400	
		1	1	2	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	540.941.005	
		1	1	3	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	850.000.000	
		1	1	4	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	650.000.000	
		1	1	5	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	85.427.177	
		1	1	6	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	141.952.903	
		1	1	7	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	28.550.000	
		1	1	8	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.430.455.663	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1	1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
		1	1	2	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.405.000.000	
		1	1	3	Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	
		1	1	4	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	3.019.502.227	

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Permukiman		
IV	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**						
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	1			Program Pengembangan Perumahan		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	1	1		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	
		1	1	2	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	35.000.000	
		1	2		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		1	2	1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	43.740.000	
		1	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	60.000.000	
		1	3		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
		1	3	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	62.509.500	
V	**BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban	1			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Umum	1	1		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Praja
		1	1	1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	210.000.000	
		1	1	2	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.000.000	
		1	1	3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	170.536.600	
		1	1	4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	
		1	1	5	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	65.439.699	
		1	1	6	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	50.000.000	
		1	2		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
		1	2	1	Pengembangan Kapasitas	25.000.000	

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					dan Karier PPNS		
2	Pelayanan informasi rawan bencana	1			Program Penanggulangan Bencana		BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	1		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	1	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	99.535.000	
		1	1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	199.943.000	
		1	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		1	2	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.005.000	
		1	2	2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	124.772.500	
		1	2	3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.232.000	
		1	2	4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	329.043.100	
		1	2	5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	49.941.500	
		1	2	6	Penyusunan Rencana Kontijensi	280.222.000	
		1	2	7	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	89.123.000	
		1	3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
		1	3	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	50.632.500	
		1	3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99.982.500	

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	87.862.500	
		1	3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	158.009.442	
		1	3	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.775.000	
		1	4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
		1	4	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	49.072.500	
		1	4	2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	125.388.000	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
		1	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.205.010	
		1	1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	
		1	1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	30.000.000	
		1	1	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	70.000.000	
		1	1	5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	30.000.000	
		1	2		Investigasi Kejadian Kebakaran		

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	2	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	13.500.000	
		1	3		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
		1	3	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000	
VI	**BIDANG SOSIAL**						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1			Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	1	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	1	1	1	Penyediaan Permakanan	221.408.000	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1	1	2	Penyediaan Sandang	10.000.000	
		1	1	3	Penyediaan Alat Bantu	30.000.000	
		1	1	4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	316.273.941	
		1	1	5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	
		1	1	6	Pemberian Layanan Kedaruratan	30.000.000	
		1	1	7	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	1			Program Penanganan Bencana		Dinas Sosial
		1	1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		1	1	1	Penyediaan Makanan	494.389.663	
		1	1	2	Penyediaan Sandang	15.000.000	

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023				Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	1	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	30.000.000	
		1	1	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	

Sumber: hasil analisis, diolah, 2022

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (*output*) kegiatan, hasil (*outcome*) program dan dampak (*impact*) sasaran/tujuan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) perlu ditetapkan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja/keberhasilan pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 terdapat 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya menjadi IKU pada RKPD tahun 2023. Selain IKU, pada bab ini dimuat juga target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Adapun target IKU dan IKK Kabupaten Blitar tahun 2023 dimuat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2020)	Realisasi	Target		Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	
A.	Indikator Tujuan						
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9,33	9,65	9,25	9,02	8.88
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,7	92,76	92,83	92,90	93.1
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,58	71,05	71,48	72,06	73.42
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,66	61,81	64,46	65,96	70
5	Gini Rasio	Ratio	0,33	0,358	0,329	0,320	0.331
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/a	70,38	72	74	80
					(Baik)	(Baik)	5.2
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,29	3,02	4,56	4,75	8.88

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2020)	Realisasi	Target		Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	
B.	Indikator Sasaran						
1	Persentase PPKS	%	11,76	10,92	11,62	10,92	10.76
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	81,74	82	84	90.00
				(Baik)	(Baik)	(Baik)	13.19
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,46	12,63	12,65	12,77	7.78
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,39	7,50	7,51	7,58	74.54
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,52	73,61	73,72	73,89	58.37
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	51,83	55,23	56,02	89.24
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,94	82,46	83,44	85,24	A
8	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	B	BB	4.10
9	Indeks SPBE	Indeks	2,9	2,76	3,4	3,6	305
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	99	200	230	10
11	Persentase Desa Mandiri	%	4,09	4,55	5,91	7,27	75
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	56,58	62,5	65,15	3
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat	3,82	3,66	3,52	3,4	12,155
14	Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10.654	10.757	11.480	13.794	76.66
15	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,07	66,91	67,83	70,8	142.00
16	Indeks Resiko Bencana	Indeks	160,26	146,14	154	151	67.64
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,35	65,53	65,45	66	2.40
18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,06	0,01	1,87	2,97	6.60
19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-7,24	5,83	4,61	6,50	7.47
20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	-5,26	5,45	4,14	6,25	3,029,584
21	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	1.532.742	1.641.570	1.754.223	1.836.112	5.76
22	ICOR	Indeks	n/a	9,17	5,8	5,73	10.76

Sumber: LKPJ Bupati Blitar Tahun 2021; RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Tabel 1.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
A.	**Urusan Pendidikan**						
1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	75	80	85	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pendidikan
2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	75	78	85	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	94	95	97	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	100	100	100	100	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	89	90	90	93	
B.	**Urusan Kesehatan**						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 1.509	1 : 1.500	1 : 1.500	1 : 1.450	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesehatan
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75	87,5	100	100	
3	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	85,95	100	100	100	
	2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	89,97	100	100	100	
	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	93,81	100	100	100	
	4. Pelayanan Kesehatan Balita	%	77,34	100	100	100	
	5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	62,29	100	100	100	
	6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	36,1	100	100	100	
	7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%	52,3	100	100	100	
	8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	30,11	100	100	100	
	9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67	100	100	100	
	10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	
	11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	100	
	12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	66	100	100	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
4	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	148,43	148,39	148,37	148,31	
5	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	%	n/a	0,02	0,02	0,02	
6	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	90	100	100	100	
7	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,46	14,5	14,25	13,5	
8	Insidensi TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	221	221	221	221	
9	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	Per 1.000 penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	
10	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	kasus	11404	11549	11549	11591	
11	Treatment coverage pada pasien TB	kasus	2573	2590	2598	2623	
12	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	90,68	92	93	95,5	
13	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	91,67	100	100	100	
14	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	n/a	8,9	8,8	8,5	
15	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Puskesmas	24	24	24	24	
16	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan. Transportasi, kesehatan, dan lain-lain)	%	n/a	70	75	90	
17	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	n/a	100	100	100	
18	Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan	%	n/a	100	100	100	
C.	**Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						
1	Persentase luas sawah beririgasi	Ha	31.866,88	31.866,88	31.866,88	45.26,9	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	%	58,57	59,34	60,62	62,56	
3	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	%	58,57	59,34	60,62	62,56	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	82,3	84,1	85	87,7	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
5	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	82,3	84,1	85	87,7	
6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	82,3	84,1	85	87,7	
7	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	100	100	100	100	
8	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	72	72,3	72,5	72,9	
9	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	82,26	82,32	82,43	82,77	
10	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	%	80	80	84	92	
11	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	%	80	80	84	92	
12	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	%	80	80	84	92	
13	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	%	80	80	84	92	
14	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	%	100	100	100	100	
D.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	ha	14,3	10	8	0	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	unit	200	200	200	200	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	80	100	100	100	
E.	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	95	95	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	95	95	95	
3	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	40	60	100	
6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan	%	100	100	100	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
	dinyatakan sah/legal						Perlindungan Masyarakat
7	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	56	72	75	100	
8	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	0	9	24	81	
9	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	0	14	32	100	
F.	**Urusan Sosial**						
1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Desa/ Kel	248	248	248	248	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Sosial
2	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	0	0	0	0	
3	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	22	22	22	22	
4	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Layanan	3	3	3	3	
5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang	0	0	0	0	
6	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kelompok	5	5	5	5	
7	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Orang	628.842	628.842	628.842	628.842	
8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	153	153	153	153	
9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	23	23	23	23	
10	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	35	45	45	45	
11	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	27	27	27	27	
12	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang	100	200	200	200	
13	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	20	20	20	20	
14	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	21	21	21	21	
15	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	1	1	1	1	
16	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	12	12	12	12	
G.	**Urusan Tenaga Kerja**						
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	%	20	30	35	50	Perangkat Daerah Yang Menangani

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
	Ketenagakerjaan)						Urusan Tenaga Kerja
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	432	1100	1200	1500	
3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	0	20	25	35	
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	15	80	85	95	
H.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	64,95	65	70	71,05	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0	91,87	92,64	93,74	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	80,32	78,85	78,95	80,25	
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA	Indeks	71,8*	71,85	71,9	72	
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	0	91,87	92,64	93,74	
I.	**Urusan Pangan**						
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	30,86	31,17	31,33	31,8	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pangan
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	21,37	20,56	20,16	18,95	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Point	89	89,2	89,29	89,59	
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	92	94	100	
J.	**Urusan Pertanahan**						
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK	N/A	325	238	290	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pertanahan
2	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	bidang	N/A	325	290	290	
3	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	ha	4	4	4	24	
K.	**Urusan Lingkungan Hidup**						
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	46	65	70	85	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:						
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah	ton	62.474,40	67.000	69.000	75.000	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah	ton	55.732	57.500	59.000	63.500	
L.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	89,02	91	92	94	
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100	
6	Pemanfaatan data kependudukan	%	15,38	25	30	40	
M.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Aparatur	220	110	110	110	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pengurus LKD	220	220	220	220	
2	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	LKD	220	220	220	220	
3	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Unit	10	10	10	10	
4	Jumlah Desa Mandiri	Desa	9	13	16	22	
5	Jumlah Desa Berkembang	Desa	72	47	34	8	
6	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0	0	
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	BUMDesa	102	112	122	150	
N.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	0	56,28	57	57,44	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	78,47	79,41	80,24	81,45	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	8,51	8,51	8,2	7,24	
O.	**Urusan Perhubungan**						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	166.838	37.005	131.073	134.061	Perangkat Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
		Orang	11.376	15.427	15.448	15.844	Yang Menangani Urusan Perhubungan
2	Rasio ijin trayek	%	9,52	19,05	23,81	38,1	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	16.597	15.500	16.000	17.800	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	3	3	3	3	
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	16.597	18.000	18.500	20.000	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	14,25	13,89	13,51	11	
7	Pemasangan Rambu- rambu	unit/km	38,53	43,64	47,28	58,22	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	orang	300	317	326	359	
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	178.214	52.432	146.521	149.905	
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	%	593.494	764.639	867.199	1.073.007	
P.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**						
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	%	30	50	60	90	
3	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Aplikasi	68	57	80	88	
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	%	37,5	42,5	45	50	
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100	100	
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	52	156	208	260	
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	300	400	450	550	
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	100	100	100	100	
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	78	83	86	90	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	%	100	100	100	100	
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	100	100	100	100	
Q.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	10	20	25	40	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	0,12	0,3	0,37	0,74	
R.	**Urusan Penanaman Modal**						
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Milyar	8.700	10.700	11.700	19.200	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Penanaman Modal
S.	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,5	5,9	6,1	6,7	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,44	0,5	0,53	0,61	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	6	8	9	12	
T.	**Urusan Statistik**						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Statistik
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	
U.	**Urusan Persandian**						
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	1	1	1	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Persandian
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Tim	1	1	1	1	
3	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	0	2	2	2	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
	SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)						
V.	**Urusan Kebudayaan**						
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	01.10	01.15	01.20	01.30	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kebudayaan
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	618	618	618	618	
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	00.18	00.20	00.25	00.35	
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	19	20	25	35	
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	01.10	01.15	01.20	01.30	
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	0,43	0,45	0,47	0,55	
7	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	608	611	613	617	
8	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Kegiatan	10	11	11	11	
9	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	0	5	5	5	
10	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Orang	0	5	5	5	
11	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	00.18	00.20	00.25	00.35	
12	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	00.43	00.45	00.47	00.55	
13	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0,79	0,81	0,83	0,87	
14	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	01.10	01.15	01.20	01.30	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
15	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	15	16	17	20	
W.	**Urusan Perpustakaan**						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	11,5	12	13	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Perpustakaan
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	58,3	61,3	67,3	
X.	**Urusan Kearsipan**						
1	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	N/A	332	332	1660	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kearsipan
2	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	N/A	12	12	60	
Y.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**						
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.283,70	2.415	2.536	2.935	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Ekor	17.762,09	17.978	18.158	18.708	
Z.	**Urusan Pariwisata**						
1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	259.842.500	324.803.125	1.315.452.656	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pariwisata
2	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.532.742	1.754.333	1.964.730	3.172.253	
3	Kontribusi PDB Pariwisata	Persen	-4.13	01.20	01.32	02.08	
AA.	**Urusan Pertanian**						
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	2	2	2	2	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pertanian
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	2	2	2	2	
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	1	1	1	1	
4	persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	0,42	0,5	0,5	0,5	
5	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	90	92	94	100	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	80	80	80	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target		Kondisi Akhir Periode	PD Penanggung jawab
			2020	2022	2023	2026	
AB.	**Urusan Perdagangan**						
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-42	20	20	30	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Perdagangan
2	Tertib Usaha	Rekomendasi	4	2	2	5	
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	N/A	50	50	75	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	87	87	88	89	
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	N/A	50	65	75	
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	N/A	50	50	75	
AC.	**Urusan Perindustrian**						
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	01.33	2	2	2	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Perindustrian
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	%	14	14	15	18	
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Juta Rupiah	2.817	3.300	3.960	8.000	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	43.733	46.358	49.000	54.900	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Juta Rupiah	107.021	111.344	113.571	120.523	

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

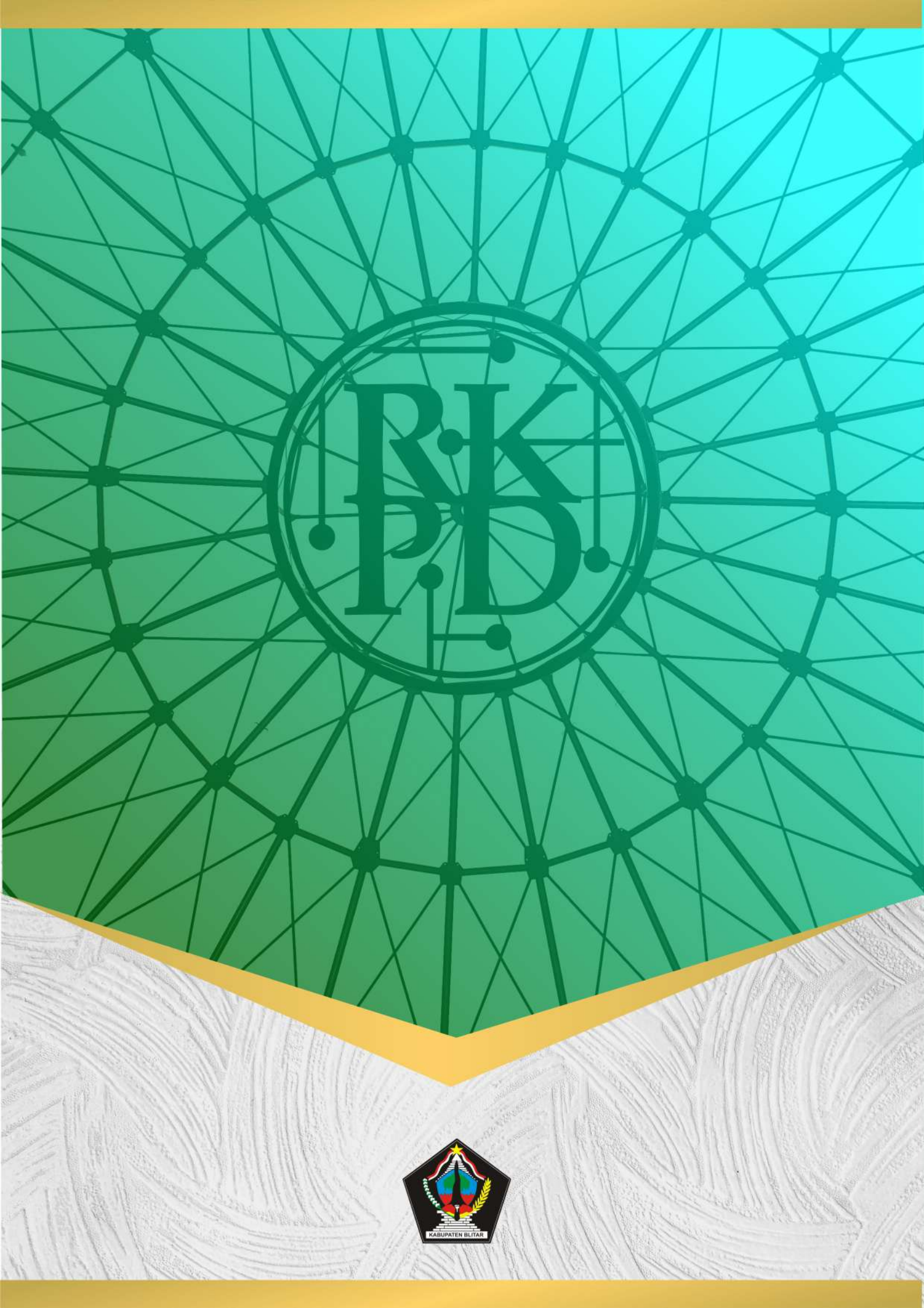
KABUPATEN BLITAR